

# KINERJA

## JURNAL BISNIS DAN EKONOMI

***Mental Accounting* dan Variabel Demografi :  
Sebuah Fenomena pada Penggunaan Kartu Kredit**

*Linda Ariany Mahastanti dan Katarina Kumalasari Wiharjo*

**Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak terhadap  
Manajemen Laba**

*Christina Ranty Sumomba dan YB. Sigit Hutomo*

**Peran Produktivitas Kapital dan Tenaga Kerja Serta Perubahan Teknologi  
dalam Pertumbuhan Industri Manufaktur di Jawa Timur**

*Nurul Istifadah*

**Peranan Kredit dalam Mendorong Kinerja Usaha Kecil**

*Bayu Nuswantara*

**Penerapan Nilai Integritas dan Perspektif Gender dalam Perilaku Beretika**

*lin Mayasari, Iyus Wiadi, Anita Maharani, dan Rini S. Pramono*

**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Hutang dan Nilai Perusahaan:  
Studi Empirik pada Perusahaan Sektor Nonjasa di Bursa Efek Indonesia  
Periode 2007-2010**

*Mafizatun Nurhayati*

**Struktur Pasar dan Kinerja Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia  
Tahun 2007-2010**

*Florentina dan Y.Sri Susilo*

# KINERJA

JURNAL BISNIS DAN EKONOMI

TERAKREDITASI SK NO. 49/DIKTI/KEP/2003

SK NO. 108/DIKTI/KEP/2007

SK NO. 68a/DIKTI/Kep/2010

Volume 16, No. 2 September 2012

ISSN 0853-6627

Diterbitkan Oleh  
Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta

**Ketua Editor**  
Edi Sutarta

**Editor Ahli**

Andreas Lako  
B.M. Purwanto  
Tulus Haryono  
FX. Soewarto  
Hermeindito Kaaro  
J. Sukmawati  
Lena Ellitan  
RA. Supriyono  
Lincoln Arsyad  
Roberto M. Arguelles

Unika Soegijapranata Semarang  
Universitas Gadjah Mada  
Universitas Sebelas Maret  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Unika Widya Mandala Surabaya  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Unika Widya Mandala Surabaya  
Universitas Gadjah Mada  
Universitas Gadjah Mada  
Saint Louis University of Philippines

**Editor Pelaksana**

I Putu Sugiarta Sanjaya  
D. Wahyu Ariani  
Y. Sri Susilo

**Manajemen Usaha**

F. Joki Hartono Tri Nugroho  
Paulina Austino Fillo Regal

**Sekretariat Editor**

Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Jl. Babarsari 43 Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 487711 ext 3132  
Email : kinerja@mail.uajy.ac.id kinerjauajy@gmail.com

**KINERJA** Jurnal Bisnis dan Ekonomi diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY). Jurnal ini terbit dua kali dalam setahun, setiap bulan Agustus dan Februari. Editor menerima naskah yang belum diterbitkan media lain, serta tinjauan buku-buku bisnis dan ekonomi terbitan dalam dan luar negeri yang baru. Pedoman penulisan naskah untuk KINERJA tercantum pada bagian akhir jurnal ini.

Volume	Nomor	Bulan	Tahun	Halaman	ISSN
16	No. 2	September	2012	89-211	0853-6627

# KINERJA

JURNAL BISNIS DAN EKONOMI  
TERAKREDITASI SK NO. 68a/DIKTI/Kep/2010

## DAFTAR ISI

### Daftar isi

<b>Mental Accounting dan Variabel Demografi : Sebuah Fenomena pada Penggunaan Kartu Kredit</b> Linda Ariany Mahastanti dan Katarina Kumalasari Wiharjo .....	89-102
<b>Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba</b> Christina Ranty Sumomba dan YB. Sigit Hutomo .....	103-115
<b>Peran Produktivitas Kapital dan Tenaga Kerja Serta Perubahan Teknologi dalam Pertumbuhan Industri Manufaktur di Jawa Timur</b> Nurul Istifadah .....	116-126
<b>Peranan Kredit dalam Mendorong Kinerja Usaha Kecil</b> Bayu Nuswantara .....	127-152
<b>Penerapan Nilai Integritas dan Perspektif Gender dalam Perilaku Beretika</b> lin Mayasari, Iyus Wiadi, Anita Maharani, dan Rini S. Pramono .....	153-179
<b>Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Hutang dan Nilai Perusahaan: Studi Empirik pada Perusahaan Sektor Nonjasa di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2010</b> Mafizatun Nurhayati .....	180-194
<b>Struktur Pasar dan Kinerja Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia Tahun 2007-2010</b> Florentina dan Y.Sri Susilo.....	195-211

### Pedoman Penulisan

### Indeks Artikel

## MENTAL ACCOUNTING DAN VARIABEL DEMOGRAFI : SEBUAH FENOMENA PADA PENGGUNAAN KARTU KREDIT

Linda Ariany Mahastanti

Katarina Kumalasari Wiharjo  
**Fakultas Ekonimika dan Bisnis**  
**Universitas Kristen Setya Wacana Salatiga**  
Email : linda.ariany@staff.uksw.edu

### Abstract

The aim of this research is to analysis relationships of demographic factor towards mental accounting in using credit card. Demographic factors which use in this research is sex, age, and income. Researcher takes the sample from the employees of Bumi Arta bank, Tbk. Surakarta which have and use credit card. To analysis the primary data, the writer use chi-square test as a tool. The result of this research shows that sex and income have relationships on mental accounting in using credit card.

Keywords : Demographic factors, mental accounting, credit

### 1. PENDAHULUAN

Setiap individu menghadapi berbagai keputusan ekonomi yang berkaitan dengan penghasilan, belanja, uang tabungan, dan kartu kredit. Dalam banyak kasus, keputusan ekonomi tersebut saling terkait atau saling tergantung. Misalnya, dengan memutuskan untuk membeli CD player baru seseorang perlu untuk menunda memperbaiki mesin cuci, atau menggunakan uang untuk makan malam di sebuah rumah makan. Dalam teori behavioral life-cycle menurut Shefrin dan Thaler (1988) diasumsikan bahwa seseorang mengelompokkan aset (kekayaan) dalam tiga akun yaitu pendapatan saat ini, aktiva lancar, dan pendapatan masa depan. Selanjutnya diasumsikan bahwa kecenderungan seseorang untuk lebih banyak menggunakan pendapatan saat ini dibandingkan dengan pendapatan masa depan.

Dalam hal pengambilan keputusan keuangan individu banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang kurang dikenal di dalam model-model keuangan perusahaan, yaitu faktor-faktor psikologis dan sosial yang salah satunya adalah aspek mental accounting, di mana mental accounting merupakan rangkaian operasi kognitif yang dipergunakan oleh individu maupun rumah tangga dalam mengkode, membuat kategori, dan mengevaluasi aktivitas finansialnya. Mental accounting berfokus pada bagaimana seharusnya seseorang menyikapi dan mengevaluasi suatu situasi saat terdapat dua atau lebih kemungkinan hasil, khususnya bagaimana mengkombinasikan kemungkinan-kemungkinan dari hasil tersebut. Mental accounting mengacu pada kecenderungan orang untuk memisahkan uang mereka ke dalam rekening terpisah berdasarkan pada berbagai kriteria subjektif, seperti sumber uang dan tujuan untuk setiap akun. Menurut teori ini, individu menetapkan fungsi yang berbeda untuk setiap kelompok aktiva, yang memiliki efek sering tidak rasional dan merugikan pada keputusan konsumsi dan perilaku lainnya. Aspek lain dari mental accounting adalah bahwa seseorang memperlakukan uang juga berbeda tergantung pada sumbernya. Misalnya, orang cenderung menghabiskan lebih banyak uang yang diperoleh tanpa usaha keras, seperti pengembalian pajak, bonus kerja dan hadiah, dibandingkan dengan uang gaji mereka. Perilaku keuangan individu seperti ini sedikit berbeda dan unik untuk diteliti.

Salah satu contoh mental accounting adalah yang pernah ditayangkan pada Oprah's Show, sebuah talkshow paling populer di Amerika, mengenai seorang pengemis yang menemukan uang sebesar \$100.000. Sebagai orang yang telah bekerja keras dan memiliki uang, Oprah berpikir bahwa lelaki pengemis itu pasti akan menaruh uangnya di bank, mengambil bunganya setiap bulan dan hidup berkecukupan dengan bunga tersebut. Hal tersebut juga yang terpikirkan oleh para penontonnya. Pengemis tersebut kemudian mengakui bahwa ia membeli dua mobil untuk dirinya dan istrinya seharga \$70.000. Sisanya ia gunakan untuk pulang ke kampung halaman dan membagikannya kepada sanak saudara untuk menunjukkan bahwa akhirnya ia memiliki uang dan sanak saudaranya tidak boleh menghinanya lagi. Dalam waktu kurang dari setahun, uang itu habis berikut kedua mobilnya, dan ia kembali mengemis di jalanan. Pada kasus ini, bahwa faktor psikologis sangat menentukan keputusan keuangan seseorang.

Contoh keputusan keuangan lain yang berkaitan dengan mental accounting adalah dalam penggunaan kredit. Kebutuhan masyarakat untuk rumah dan transportasi, keinginan mereka untuk liburan, atau untuk membeli pakaian, smart phone, perhiasan tidak selalu mungkin untuk dilakukan karena keterbatasan uang yang dimiliki. Jika seseorang tidak ingin menunda pembelian sampai tabungan yang diperlukan telah terkumpul, mereka akan cenderung memutuskan untuk menggunakan kredit. Dengan menggunakan kredit, mereka tidak perlu mengeluarkan uang tunai maupun tabungan sehingga dapat lebih mudah dan cepat dalam memenuhi keinginan mereka. Namun mereka kurang menyadari bahwa kredit hanyalah sebuah bentuk yang berbeda dari hutang, yang memiliki risiko ketidakmampuan membayar kembali angsuran karena tingkat bunga yang tinggi. Fenomena mental accounting dalam penggunaan kartu kredit tersebut cukup menarik untuk diteliti, karena banyak terjadi di masyarakat, terutama masyarakat yang hidup di kota metropolitan. Berbeda dengan kota-kota kecil seperti Salatiga yang masih sedikit masyarakat memiliki dan menggunakan kartu kredit sehingga dalam penelitian ini dipilih sebuah bank yang cukup lama berdiri di kota Surakarta, yang tidak terlalu jauh letaknya dari Salatiga yaitu Bank Bumi Arta, Tbk. Cabang Surakarta. Cukup banyak karyawan dari Bank Bumi Arta, Tbk. Cabang Surakarta yang memiliki kartu kredit karena lebih familiar dengan produk-produk keuangan seperti kartu kredit dibanding dengan masyarakat yang tidak terlalu paham dan masih merasa asing dengan produk-produk keuangan. Selain alasan tersebut, peneliti juga tertarik untuk melakukan penelitian di sebuah bank adalah untuk mengetahui apakah dengan lebih paham dan familiarnya karyawan-karyawan bank terhadap kartu kredit sebagai salah satu produk keuangan akan membuat mereka lebih bijaksana dalam penggunaan kartu kredit dan terhindar dari mental accounting.

Mental accounting juga memiliki hubungan dengan faktor demografis yang meliputi jenis kelamin, usia, dan pendapatan. Persepsi dan sikap individu cenderung memiliki perbedaan dengan adanya perbedaan jenis kelamin, usia, dan pendapatan. Persepsi pria dan wanita terhadap uang akan berbeda, begitu pula faktor usia dan pendapatan mempengaruhi keputusan keuangan di mana salah satu contohnya adalah dalam penggunaan kredit.

Fenomena-fenomena mengenai mental accounting dan pengaruh faktor demografis terhadap penggunaan kredit didukung oleh beberapa penelitian. Pada penelitian yang dilakukan Karlsson, Garling, dan Selart (1997), responden yang memiliki jumlah uang dan tabungan yang tidak kompatibel dengan pola konsumtif mereka yang tinggi akan cenderung untuk menggunakan kartu kredit untuk tetap bisa membeli barang-barang yang diinginkan. Penggunaan kartu kredit akan memberikan pola pemikiran bahwa mereka tidak perlu mengeluarkan uang tunai pada saat mereka membeli barang sehingga akan memudahkan mereka dalam memenuhi pola konsumtif mereka yang tinggi.

Selain jenis kelamin dan usia, faktor demografis yang mempengaruhi penggunaan kredit adalah pendapatan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dearden, Goode, Whitfield dan Cox (2010) menunjukkan adanya peningkatan kredit dan ketidakmampuan untuk membayar hutang. Hal tersebut dikarenakan pendapatan rendah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dan terjadi akumulasi dari hutang-hutang sebelumnya.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian mengenai mental accounting dalam penggunaan kartu kredit (Karlsson, Garling, dan Selart, 1997) dengan target penelitian yang berbeda yaitu karyawan Bank Bumi Arta, Tbk. Cabang Surakarta yang memiliki karakteristik demografis yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Target penelitian ini adalah karyawan Bank Bumi Arta, Tbk. Cabang Surakarta yang lebih familiar dengan produk-produk keuangan sehingga cukup banyak yang memiliki dan menggunakan kartu kredit sebagai salah satu

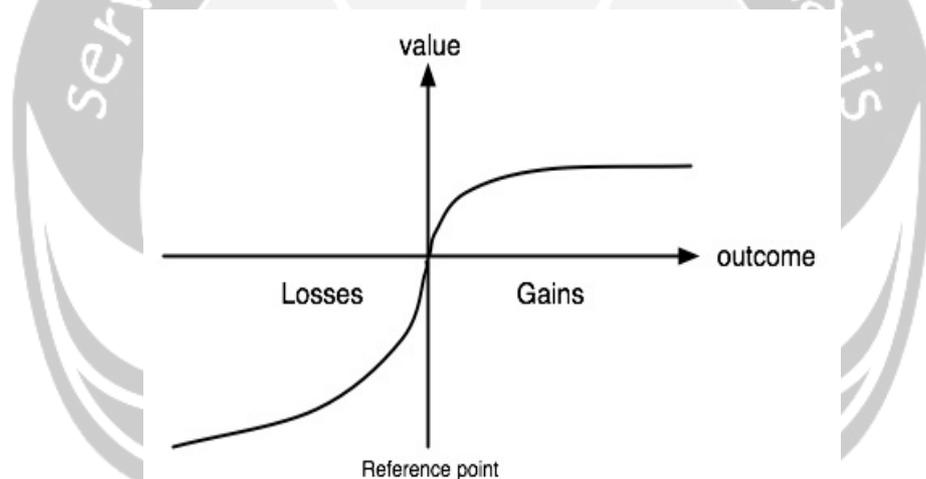
produk keuangan. Karyawan-karyawan pada bank tersebut juga memiliki karakteristik demografis yang berbeda-beda sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan dalam penggunaan kredit, sehingga penelitian ini ingin melihat apakah terdapat hubungan antara faktor jenis kelamin, usia, dan pendapatan dengan mental accounting dalam penggunaan kredit.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Teori Prospek

Prospect Theory (teori prospek) dikembangkan oleh Daniel Kahneman dan Amos Tversky pada awal tahun 1980-an dimana pada dasarnya mencakup dua disiplin ilmu, yaitu psikologi dan ekonomi (psikoekonomi) yang merupakan suatu analisis perilaku seseorang dalam mengambil keputusan ekonomi di antara dua pilihan. Teori Prospek berfokus pada bagaimana keputusan nyata diambil (descriptive approach).

Teori prospek sebenarnya sangat sederhana. Dimulai dengan penelitian Kahneman dan Tversky terhadap perilaku manusia yang dianggap aneh dan kontradiktif dalam mengambil suatu keputusan. Subyek penelitian yang sama diberikan pilihan yang sama namun diformulasikan secara berbeda, dan mereka menunjukkan dua perilaku yang berbeda. Oleh Kahneman dan Tversky, hal ini disebut sebagai risk-aversion dan risk-seeking behavior. (ditunjukkan pada gambar 2.1)



Sumber : [http://en.wikipedia.org/wiki/Prospect\\_theory](http://en.wikipedia.org/wiki/Prospect_theory)

**Gambar 2.1** Teori Prospek

Gambar 2.1 menunjukkan titik referensi membagi daerah di mana seseorang berada dalam kerugian dan daerah yang menunjukkan seseorang berada di keuntungan. Bentuk kurva di atas titik referensi menampilkan penghindaran risiko, sedangkan garis bawah titik referensi untuk mewakili perilaku mencari risiko.

Contoh yang mereka kemukakan adalah seperti ini : orang akan mau menelusuri hampir seluruh toko yang ada pada sebuah kota agar memperoleh \$5 lebih murah untuk sebuah kalkulator seharga \$15, tetapi mereka tidak akan melakukannya agar memperoleh \$5 lebih murah untuk jaket seharga \$125.

Hal yang sangat penting dari studi Kahneman dan Tversky adalah eksperimen mereka yang menunjukkan bahwa sikap tentang risiko menghadapi keuntungan akan sangat berbeda dengan sikap tentang risiko menghadapi kerugian. Contoh yang dikemukakan adalah sekelompok orang pada saat dihadapkan pada pilihan untuk pasti mendapatkan uang \$1.000 atau kurang-lebih 50% dari kemungkinan mendapatkan uang \$2,500, ternyata orang akan lebih memilih yang pasti yaitu sebesar \$1.000. Ini adalah contoh dari perilaku risk-aversion. Akan tetapi, kelompok orang yang sama, jika kepadanya diberikan pilihan untuk pasti rugi sebesar \$1.000 atau kurang-lebih

50% kemungkinan tidak akan rugi, maka mereka akan cenderung memilih pilihan yang lebih berisiko. Ini adalah contoh perilaku risk-seeking.

Teori prospek ini dapat dipakai untuk melihat banyak sekali fenomena perilaku manusia di berbagai bidang kehidupan, khususnya pada proses pengambilan keputusan yang kadangkala 'tidak masuk akal'. Teori ini dipakai untuk mengukur (melakukan measurement perspective) terhadap perilaku orang atau organisasi dalam mengambil keputusan, dan hal-hal yang melatar belakangi keputusannya itu.

Secara singkat dapat dikatakan teori prospek menunjukkan, bahwa orang akan memiliki kecenderungan irasional untuk lebih enggan mempertaruhkan keuntungan (gain) daripada kerugian (loss). Dalam kondisi rugi, seseorang akan cenderung lebih berani menanggung risiko dibandingkan pada saat kondisi berhasil. Seseorang akan merasakan seolah-olah nilai kerugian pada sejumlah uang tertentu dalam suatu taruhan lebih menyakitkan daripada nilai keuntungan dari sejumlah uang yang sama, sehingga dalam situasi rugi orang lebih berani untuk menanggung risiko. Teori prospek tersebut sejalan dengan mental accounting yang berfokus pada bagaimana seseorang harus menyikapi dan mengevaluasi suatu situasi saat terdapat dua atau lebih kemungkinan hasil, khususnya bagaimana mengkombinasikan kemungkinan-kemungkinan hasil tersebut.

## **2.2 Mental Accounting**

Mental accounting merupakan deskripsi mengenai cara seseorang melakukan proses akuntansi yang hanya dapat dipelajari dengan melakukan pengamatan mengenai perilaku seseorang atau menyimpulkan kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat. Menurut Thaler (1985), mental accounting adalah suatu rangkaian operasi kognitif yang dipergunakan oleh individu maupun rumah tangga dalam mengkode, membuat kategori, dan mengevaluasi aktivitas finansialnya. Mental accounting berfokus pada bagaimana seharusnya seseorang menyikapi dan mengevaluasi suatu situasi saat terdapat dua atau lebih kemungkinan hasil, khususnya bagaimana mengkombinasikan kemungkinan-kemungkinan dari hasil tersebut. Dalam mental accounting, individu menentukan tingkat utilitas yang berbeda pada tiap-tiap akun kekayaan sehingga mempengaruhi keputusan konsumsi mereka. Tversky and Kahneman (1981) menyatakan bahwa mental accounting berfokus kepada bentuk dari keputusan individu dalam keuangan, sedangkan Shefrin dan Thaler (1988) membahas bahwa mental accounting juga dipengaruhi pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap keuangan.

Dalam penelitian ini, Teori Mental Accounting yang digunakan sebagai acuan adalah teori menurut Thaler (1985), dimana mental accounting berfokus pada bagaimana seharusnya seseorang menyikapi dan mengevaluasi suatu situasi saat terdapat dua atau lebih kemungkinan hasil, khususnya bagaimana mengkombinasikan kemungkinan-kemungkinan dari hasil tersebut.

## **2.3. Behavioral Life-Cycle Theory**

Behavioral Life-Cycle Theory (Shefrin dan Thaler, 1988) berkaitan dengan penggunaan pendapatan dalam perilaku konsumsi seseorang. Menurut Shefrin dan Thaler (1988), seseorang mengkategorikan kekayaannya ke dalam tiga akun yaitu current income, current assets, dan future income. Menurut teori ini, seseorang tidak memperlakukan kekayaan mereka dengan cara yang sama, tetapi sangat bergantung bagaimana ia memandang uang yang dimilikinya sebagai current income, current assets, atau future income. Dari ketiga akun tersebut seseorang lebih banyak melakukan pengeluaran untuk akun current income. Behavioral Life-Cycle Theory menekankan pada pengendalian diri, mental accounting, dan framing. Terkait dengan pengendalian diri, Thaler dan Shefrin mengatakan bahwa seseorang seharusnya mengadopsi aturan yang dapat membatasi kesempatan untuk membelanjakan uang, baik itu dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar dirinya. Terkait dengan mental accounting, Thaler dan Shefrin (1988) mengatakan pengkategorian dan evaluasi dalam aktivitas finansial diasumsikan dapat membantu menerapkan batasan terhadap uang belanja. Behavioral Life-Cycle Theory juga terkait dengan hipotesis pendapatan permanen (Friedman, 1957) yang menunjukkan bahwa seseorang akan mengambil pinjaman (kredit) ketika pendapatan mereka lebih rendah dari yang diharapkan dan menyimpan ketika

pendapatan mereka lebih tinggi dari yang diharapkan. Keputusan untuk mengambil pinjaman ketika pendapatan mereka lebih rendah dari yang diharapkan adalah untuk tetap dapat memenuhi konsumsi mereka.

## 2.4. Penggunaan Kartu Kredit

Kartu kredit sudah menjadi media pembayaran lazim terutama di kota-kota besar, bahkan pola hidup konsumtif mendorong orang untuk memiliki lebih dari satu kartu kredit. Kartu kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK) yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, dalam hal ini termasuk transaksi pembelanjaan dan atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pemegang kartu kredit dipenuhi terlebih dahulu oleh akuiser atau pihak penerbit dan pemegang kartu kredit berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati. Kartu kredit merupakan salah satu alat pembayaran dengan cara kredit, dimana konsumen dapat berbelanja meskipun pada saat itu tidak mempunyai uang. Prinsipnya, konsumen berbelanja dengan cara utang. Lebih dari itu, konsumen diperkenankan membayar utang itu dengan mencicil sejumlah minimum tertentu dari total transaksi. Jumlah pembayaran minimum itu biasanya sebesar 10 sampai 20 persen dari saldo tagihan.

## 2.5. Faktor Demografis

Variabel demografis menurut Robb dan Sharpe (2009) adalah suatu studi yang mempelajari karakteristik, sikap, dan perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh beberapa faktor misalnya jenis kelamin, status pendidikan dan pendapatan. Faktor lain yang termasuk dalam demografis adalah usia. Faktor-faktor demografis biasanya mempengaruhi perilaku seseorang, termasuk dalam perilaku keuangan. Pria memiliki pengetahuan lebih banyak tentang uang dan lebih percaya diri dalam kecerdasan finansial mereka daripada wanita. Pria memiliki pandangan yang lebih positif dan percaya dengan memiliki uang mereka akan lebih diterima dalam lingkungan sosial mereka. Dibandingkan dengan pria, wanita lebih memandang negatif terhadap uang. Ada enam jenis kepercayaan tentang uang dan menemukan bahwa wanita muda dan pria di Inggris memiliki perbedaan pandangan terhadap uang. Pria lebih terobsesi dengan uang dibandingkan wanita. Sebaliknya, wanita lebih konservatif dalam keuangan mereka. Orang tua lebih cenderung melihat diri mereka sebagai penabung daripada pemboros dan menggambarkan diri mereka bukan sebagai pembeli impulsif. Hal tersebut berbeda dengan orang pada usia muda yang lebih fleksibel dan secara konsisten memiliki pandangan bahwa pinjaman (penggunaan kredit) lebih menguntungkan. Pendapatan juga merupakan salah satu faktor demografis yang mempengaruhi perilaku keuangan. Menurut hipotesis pendapatan permanen (Friedman, 1957) menunjukkan bahwa seseorang akan mengambil pinjaman (kredit) ketika pendapatan mereka lebih rendah dari yang diharapkan dan menyimpan ketika pendapatan mereka lebih tinggi dari yang diharapkan. Hipotesis pendapatan relatif (Duesenberry, 1949) dalam Hollander 2001 mengatakan seseorang cenderung membandingkan diri dengan kebiasaan konsumsi orang lain. Jika mereka memiliki lebih sedikit sumber daya keuangan yang tersedia, mereka mencoba untuk mengatasi kesenjangan keuangan mereka dengan cara meminjam uang (kredit).

## 2.6. Perumusan Hipotesis

### **Hubungan jenis kelamin terhadap mental accounting dalam penggunaan kredit.**

Diketahui pria memiliki pengetahuan lebih banyak tentang uang dan lebih percaya diri dalam kecerdasan finansial mereka daripada wanita. Pria memiliki pandangan yang lebih positif dan percaya dengan memiliki uang mereka akan lebih diterima dalam lingkungan sosial mereka. Dibandingkan dengan pria, wanita lebih memandang negatif terhadap uang. Ada enam jenis kepercayaan tentang uang dan menemukan bahwa wanita muda dan pria di Inggris memiliki perbedaan pandangan terhadap uang. Pria lebih terobsesi dengan uang dibandingkan wanita. Sebaliknya, wanita lebih konservatif dalam keuangan mereka.

Pria dan wanita memiliki pandangan dan perilaku yang berbeda terhadap uang. Pria cenderung lebih percaya diri dalam kecerdasan finansial dan pandangan yang lebih positif terhadap uang dibandingkan wanita. Ditemukan

bahwa wanita memiliki kecemasan yang lebih tinggi dalam keuangan dan lebih menghindari risiko dalam menangani keuangan mereka. Demikian pula pada penelitian yang dilakukan oleh Xiao, Noring, dan Anderson (1995) pria lebih melihat keuntungan pada kredit daripada wanita. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang disusun adalah **H1** : terdapat hubungan antara jenis kelamin wanita dan pria dengan mental accounting pada penggunaan kartu kredit

#### **Hubungan usia terhadap mental accounting dalam penggunaan kredit.**

Orang tua lebih cenderung melihat diri mereka sebagai penabung daripada pemboros dan menggambarkan diri mereka bukan sebagai pembeli impulsif. Selain itu, orang tua cenderung memiliki sikap yang lebih negatif terhadap pinjaman dan tidak merasa nyaman dengan penggunaan kredit. Mayoritas orang tua sangat berhati-hati terhadap pengelolaan uang dan memantau pengeluaran mereka dengan cermat.

Teori tersebut menunjukkan bahwa usia seseorang juga memiliki hubungan terhadap perilaku finansial seseorang. Usia mempengaruhi pandangan terhadap uang dan mengakibatkan pengaruh terhadap keputusan keuangan. Orang tua cenderung menghindari penggunaan kredit untuk menghindari risiko. Dengan demikian usia memiliki hubungan dengan mental accounting dalam penggunaan kredit.

Menurut survei yang dilakukan Rowlingson dan McKay (2002) ditemukan bahwa orang pada usia muda secara konsisten memiliki pandangan bahwa pinjaman (penggunaan kredit) lebih menguntungkan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang disusun adalah:

**H2** : terdapat hubungan antara usia dengan mental accounting pada penggunaan kartu kredit

#### **Hubungan pendapatan terhadap mental accounting dalam penggunaan kredit.**

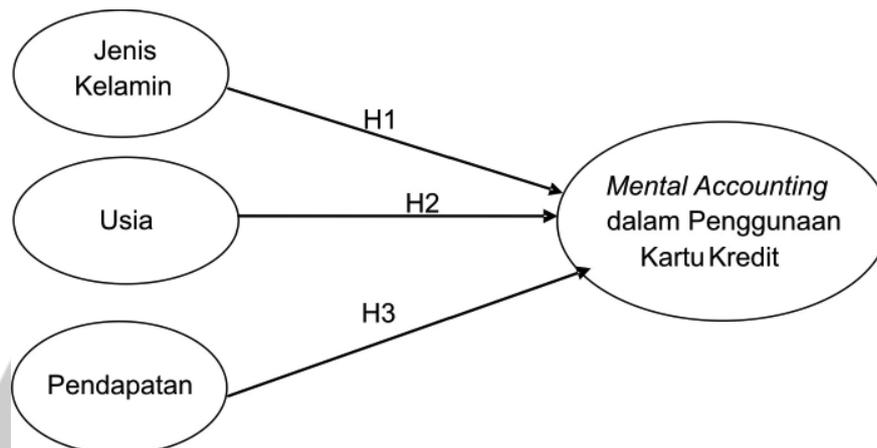
Baridwan (1992 : 30) mendefinisikan pendapatan sebagai aliran masuk atau kenaikan lain aktiva suatu badan usaha atau pelunasan utangnya (atau kombinasi keduanya) selama satu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa, atau dari kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha. Dalam Behavioral Life-Cycle Theory yang terkait dengan hipotesis pendapatan permanen menunjukkan bahwa seseorang akan mengambil pinjaman (kredit) ketika pendapatan mereka lebih rendah dari yang diharapkan dan menyimpan ketika pendapatan mereka lebih tinggi dari yang diharapkan. Keputusan untuk mengambil pinjaman ketika pendapatan mereka lebih rendah dari yang diharapkan adalah untuk tetap dapat memenuhi konsumsi mereka. Menurut Norton (1993) kredit digunakan untuk menjaga atau meningkatkan gaya hidup seseorang. Keluarga berpenghasilan rendah memiliki kecenderungan lebih tinggi dalam penggunaan kredit dibandingkan kelompok berpenghasilan tinggi. Keluarga berpenghasilan rendah menggunakan kredit untuk membeli kebutuhan dan mempertahankan gaya hidup mereka dengan tetap menghemat pendapatan mereka. Dalam negara-negara dengan ketimpangan pendapatan yang tinggi, proses perbandingan sosial tampaknya menginduksi kelompok berpenghasilan rendah untuk menyeimbangkan kesenjangan dengan cara melakukan kredit. Menurut hipotesis pendapatan relatif Duesenberry (1949) dalam (Hollander 2001), seseorang cenderung membandingkan diri dengan kebiasaan konsumsi orang lain. Jika mereka memiliki lebih sedikit sumber daya keuangan yang tersedia, mereka mencoba untuk mengatasi kesenjangan keuangan mereka dengan cara meminjam uang (kredit).

Berdasarkan teori-teori tersebut, menunjukkan bahwa tingkat pendapatan menjadi salah satu variabel yang berhubungan dalam keputusan kredit. Oleh karena itu terdapat perbedaan dalam perilaku keuangan antara individu yang memiliki tingkat pendapatan tinggi dengan yang memiliki pendapatan rendah. Kelompok berpendapatan rendah lebih cenderung untuk menggunakan kredit dalam memenuhi kebutuhannya untuk dapat mengimbangi gaya hidup kelompok berpenghasilan tinggi. Dalam perilaku tersebut terjadi mental accounting dimana untuk mengimbangi gaya hidup orang lain, seseorang mengambil keputusan kredit yang sebenarnya hanyalah bentuk lain dari hutang dan memiliki risiko.

Menurut penelitian yang dilakukan Dearden, Goode, Whitfield dan Cox (2010) tingkat kredit keluarga berpenghasilan rendah di negara Inggris semakin meningkat, dan cukup banyak keluarga yang tidak mampu

melunasi cicilan hutang dikarenakan pendapatan rendah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dan terjadi akumulasi dari hutang-hutang sebelumnya. Keluarga berpenghasilan rendah di negara Inggris menggunakan kredit dalam konsumsi barang-barang yang mereka gunakan untuk mengimbangi gaya hidup keluarga berpenghasilan tinggi. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang disusun adalah:

**H3** : terdapat hubungan antara pendapatan dengan mental accounting pada penggunaan kartu kredit



Gambar2.2 Model Penelitian

### 3. METODE PENELITIAN

Populasi adalah keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup dan waktu yang ingin diteliti, sedangkan sampel adalah sebagian dari observasi yang dipilih dari populasi dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasinya. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah karyawan Bank Bumi Arta, Tbk. Cabang Surakarta sedangkan sampel yang digunakan adalah karyawan Bank Bumi Arta, Tbk. Cabang Surakarta yang memiliki kartu kredit. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan purposive sampling. Purposive sampling merupakan metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti secara obyektif (Supramono dan Utami, 2004). Adapun kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah karyawan Bank Bumi Arta, Tbk. Cabang Surakarta yang memiliki kartu kredit sehingga dapat mengetahui apakah terdapat hubungan antara faktor demografis dengan mental accounting dalam penggunaan kredit.

Berdasarkan sumber datanya, jenis data dibedakan menjadi 2 macam yaitu data primer dan data sekunder (Supramono dan Utami 2004 : 61). Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli baik individu maupun perseorangan. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, yaitu melalui media perantara, data diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer, dimana informasi yang diperlukan diperoleh dengan cara penyebaran kuisioner kepada karyawan Bank Bumi Arta, Tbk. Cabang Surakarta yang memiliki kartu kredit.

**Tabel 3.1** Pengukuran Variabel

Variabel	Skala Pengukuran
Mental accounting	Dengan menggunakan tiga contoh kasus yang dibuat oleh penulis, dari jawaban para responden akan terlihat kecenderungan apakah terdapat mental accounting dalam penggunaan kartu kredit atau tidak. Pengukuran mental accounting menggunakan dummy variable. Terdapat mental accounting = 1 Tidak terdapat mental accounting = 0
Jenis kelamin	Skala nominal Pengukuran jenis kelamin menggunakan dummy variable. Pria = 1 Wanita = 0
Usia	Skala Interval 20-30 tahun 30-40 tahun 40-50 tahun > 50 tahun
Pendapatan	Skala Interval Rp 3.000.000,00 – Rp 4.000.000,00 Rp 4.000.000,00 – Rp 5.000.000,00 >Rp 5.000.000,00

Sumber: hasil olah data

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif naratif dan chi-Square test. Analisis deskriptif naratif digunakan untuk menyajikan deskripsi mengenai suatu fenomena yang diamati dalam konteks nyata. Fenomena dalam penelitian ini adalah menjelaskan mengenai mental accounting dalam penggunaan kredit pada karyawan Bank Bumi Arta, Tbk. Cabang Surakarta. Sedangkan untuk uji hipotesis dalam penelitian ini digunakan Chi-Square test. Chi-Square test digunakan untuk mengetahui hubungan antara variable demografi (Jenis kelamin, usia dan pendapatan) dengan mental accounting yang terjadi dalam penggunaan kartu kredit.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

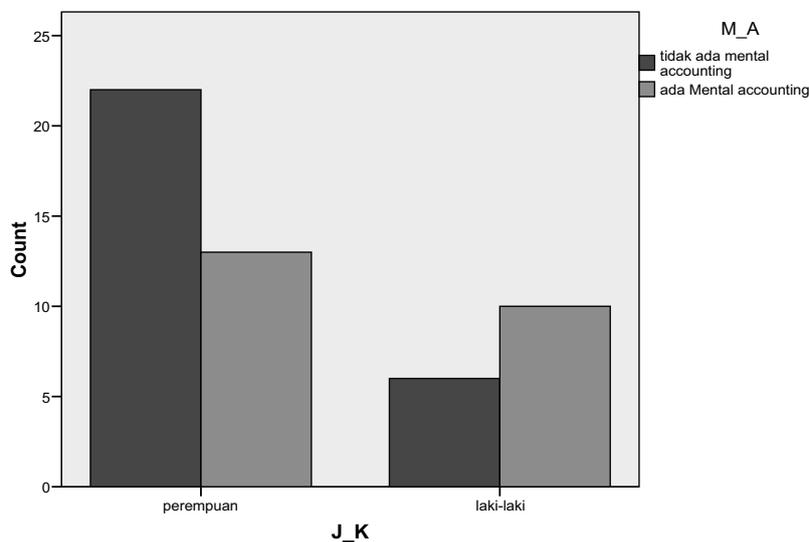
Dari 98 karyawan Bank Bumi Arta, Tbk. Cabang Surakarta sebanyak 51 karyawan (52%) memiliki dan pernah menggunakan kartu kredit. Dari 51 kuisioner yang disebar oleh peneliti dan diisi oleh karyawan Bank Bumi Arta, Tbk. Cabang Surakarta dengan kriteria memiliki kartu kredit, sebesar 28 responden (55 %) menunjukkan kecenderungan tidak terdapat mental accounting dalam penggunaan kartu kredit sedangkan sisanya sebesar 23 responden (45 %) menunjukkan kecenderungan terdapat mental accounting dalam penggunaan kartu kredit.

**Tabel 4.1.** Crosstab antara Jenis Kelamin (J-K) dengan Mental Accounting dalam penggunaan kartu kredit (MA)

		M_A		Total
		Tidak Ada Mental Accounting	Ada Mental Accounting	
J_K	wanita	22	13	35
	pria	6	10	16
Total		28	23	51

Sumber: data primer, 2012

**Bar Chart**



Sumber : data primer, 2012

**Gambar 4.1** Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

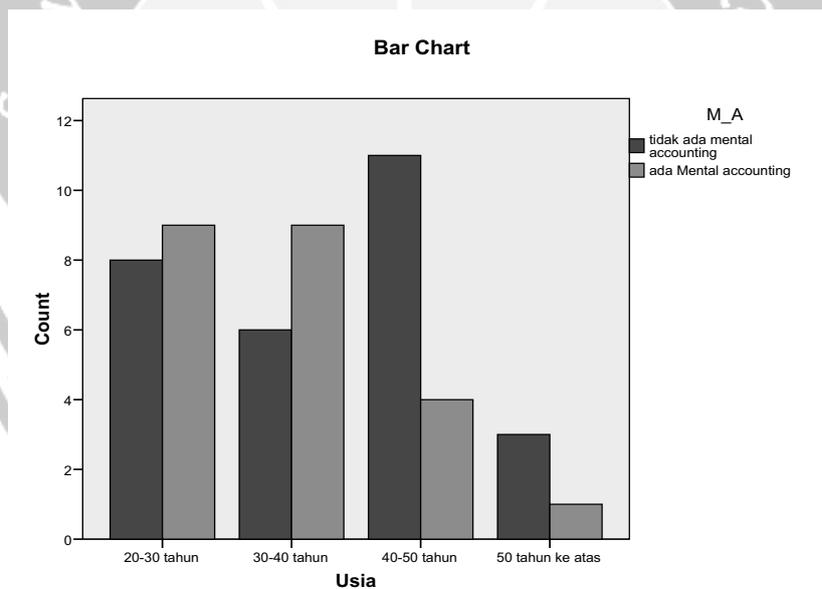
Berdasarkan hasil di atas dapat dilihat bahwa wanita lebih banyak memiliki kartu kredit dibandingkan dengan pria sebanyak 68%. Hal ini dapat terjadi karena biasanya perempuan lebih mudah untuk dipengaruhi oleh pihak penyedia kartu kredit dalam melakukan kepemilikan kartu kredit. Dari 28 responden yang memiliki kecenderungan tidak terdapat mental accounting dalam penggunaan kredit, presentase responden wanita lebih besar yaitu 78 % (22 responden) dibandingkan pria yang memiliki presentase sebesar 22 % (6 responden). Dari 23 responden yang memiliki kecenderungan terdapat mental accounting dalam penggunaan kredit, presentase responden wanita juga lebih besar yaitu 57 % (13 responden) dibandingkan pria yang memiliki presentase sebesar 43% (10 responden). Hasil diduga terjadi karena di budaya Indonesia keputusan untuk melakukan belanja rumah tangga biasanya diserahkan kepada wanita sehingga wanita dimungkinkan untuk menggunakan kartu kredit lebih sering dibandingkan dengan pria dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu mereka rentan didapati mental accounting ketika melakukan keputusan penggunaan kartu kredit, terutama jika terjadi diskon dengan menggunakan kartu kredit.

#### 4.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

**Tabel 4.2** Crosstab antara Usia dengan Mental Accounting dalam penggunaan kartu kredit (MA)

		M_A		Total
		Tidak Ada Mental Accounting	Ada Mental Accounting	
Usia	20-30 tahun	8	9	17
	30-40 tahun	6	9	15
	40-50 tahun	11	4	15
	50 tahun ke atas	3	1	4
Total		28	23	51

Sumber : data primer, 2012



Sumber : data primer, 2012

**Gambar 4. 2** Diagram karakteristik responden berdasarkan usia

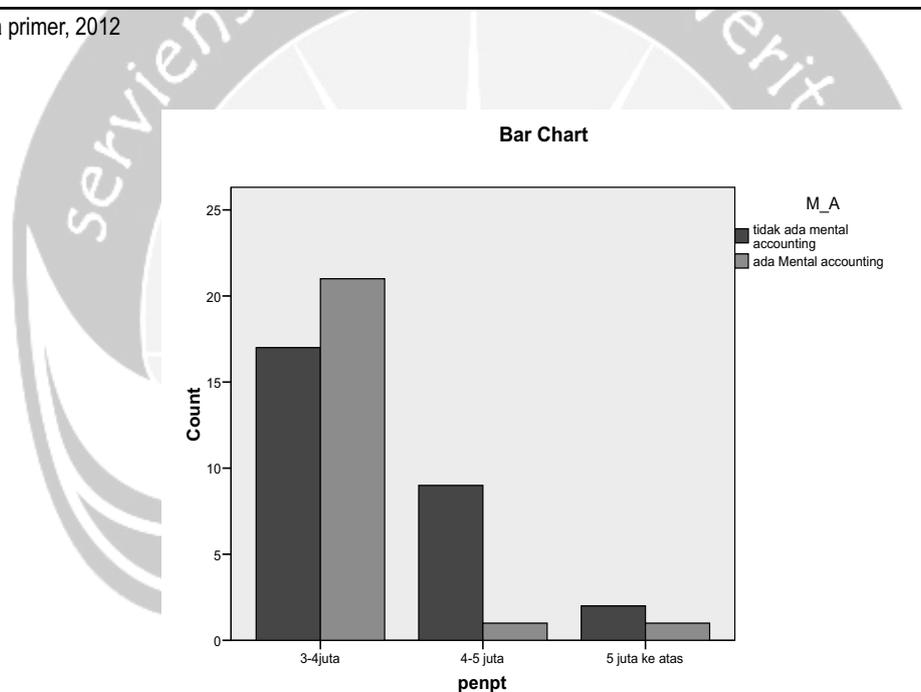
Dari karakteristik responden berdasarkan usia, menunjukkan bahwa kecenderungan terdapat mental accounting lebih banyak terjadi pada kelompok usia muda (20-40 tahun). Sebanyak 18 responden (78%) pada kelompok usia tersebut menunjukkan adanya kecenderungan terjadi mental accounting. Seiring dengan bertambahnya usia mereka maka mental accounting dalam penggunaan kartu kredit semakin menurun. Diketahui pula bahwa orang pada usia muda secara konsisten memiliki pandangan bahwa pinjaman (penggunaan kredit) lebih menguntungkan. Orang tua lebih cenderung melihat diri mereka sebagai penabung daripada pemboros dan menggambarkan diri mereka bukan sebagai pembeli impulsif. Selain itu, orang tua cenderung memiliki sikap yang lebih negatif terhadap pinjaman dan tidak merasa nyaman dengan penggunaan kredit. Mayoritas orang tua sangat berhati-hati terhadap pengelolaan uang dan memantau pengeluaran mereka dengan cermat.

### 4.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan

**Tabel 4.3** Crosstab antara Pendapatan dengan Mental Accounting dalam penggunaan kartu kredit (MA)

		M_A		Total
		Tidak Ada Mental Accounting	Ada Mental Accounting	
penpt	3-4juta	17	21	38
	4-5 juta	9	1	10
	5 juta ke atas	2	1	3
Total		28	23	51

Sumber : data primer, 2012



Sumber : data primer, 2012

**Gambar 4.3** Diagram karakteristik responden berdasarkan pendapatan

Dari karakteristik responden berdasarkan pendapatan menunjukkan bahwa kecenderungan terdapat mental accounting lebih banyak terjadi pada kelompok pendapatan yang lebih rendah. Karyawan pada kelompok pendapatan antara Rp 3.000.000; - Rp 4.000.000; lebih banyak menunjukkan kecenderungan terdapat mental accounting (sebanyak 21 responden atau 91%) dibanding karyawan pada kelompok pendapatan Rp 4.000.000; - Rp 5.000.000 atapun kelompok pendapatan di atas Rp 5.000.000,00 (sebanyak 2 responden atau 9%). Hasil tersebut juga sesuai dengan hipotesis pendapatan relatif Duesenberry (1949) dalam (Holander 2001), yang menyatakan bahwa seseorang cenderung membandingkan diri dengan kebiasaan konsumsi orang lain. Jika mereka memiliki lebih sedikit sumber daya keuangan yang tersedia, mereka mencoba untuk mengatasi kesenjangan keuangan mereka dengan cara meminjam uang (kredit).

#### 4.4. Hasil Penelitian

Hasil Chi-Square test dari data yang diperoleh melalui kuisioner yang dibagikan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.4** Hasil Chi-Square Test

Variabel	Pearson Chi-Square	Asymp. Sig. (2-sided)
Jenis Kelamin	Pearson Chi-Square	0.091*
Usia	Pearson Chi-Square	0.214
Pendapatan	Pearson Chi-Square	0.035**

Sumber : data yang diolah 2012\*sig di level 10% dan \*\* sig level 5%

Berdasarkan hasil uji chi-square di atas didapatkanlah hasil bahwa jenis kelamin dan pendapatan memiliki hubungan dengan mental accounting dalam penggunaan kartu kredit ( H1, dan H3 diterima). Hal ini bisa dilihat dari nilai Asymp.Sig yang berada di bawah 10% dan 5%.

#### 4.5. Pembahasan

Jenis kelamin dan pendapatan ternyata memiliki hubungan dengan mental accounting dalam penggunaan kartu kredit. Hal ini terjadi karena dalam melakukan transaksi belanja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka khususnya yang bersifat kebutuhan sekunder seperti belibur membeli smart phone sering kali didapatkan tawaran yang menggiurkan jika dibayar dengan menggunakan kartu kredit. Wanita akan lebih cenderung untuk tertarik menggunakan kartu kredit jika mereka merasakan seolah-olah mendapatkan penghematan dari penggunaan kartu kredit. Hal ini terjadi karena wanita lebih memiliki sifat belanja impulsif yang lebih tinggi dibandingkan dengan pria. Karena dalam berbelanja wanita lebih mengutamakan perasaan dan kesenangan dibandingkan dengan logika. Hasil temuan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan wanita lebih berhati-hati dalam menggunakan hutang karena menghindari risiko. Perbedaan hasil penelitian ini diduga karena konsep hutang yang digunakan dalam kartu kredit sering kali disalah artikan sebagai tambahan pendapatan bagi pemilik kartu kredit.

Sedangkan untuk pendapatan didapatkan hasil yang menyatakan bahwa pada pendapatan yang paling minimal dalam kepemilikan kartu kredit yaitu sebesar Rp. 3.000.000 – Rp. 4.000.000 mereka cenderung mengikuti gaya hidup lingkungan pergaulan mereka seperti melakukan liburan ataupun membeli smart phone dengan menggunakan fasilitas kartu kredit karena mereka merasa dengan kartu kredit seolah-olah mereka dapat membeli barang dengan harga yang realtif mahal dibandingkan dengan pendapatan mereka. Sehingga disini mereka tidak meyakini bahwa pembelian dengan kartu kredit sebetulnya dapat mengurangi pendapatan mereka di masa depan, sebagai dampak angsuran dari hutang kartu kredit. Hal ini senada dengan penelitian di negara-negara dengan ketimpangan pendapatan yang tinggi, proses perbandingan sosial tampaknya menginduksi kelompok berpenghasilan rendah untuk menyeimbangkan kesenjangan dengan cara melakukan kredit (Morgan dan Christen, 2003). Menurut hipotesis pendapatan relatif (Duesenberry, 1949) dalam Holland (2001), seseorang cenderung membandingkan diri dengan kebiasaan konsumsi orang lain. Jika mereka memiliki lebih sedikit sumber daya keuangan yang tersedia, mereka mencoba untuk mengatasi kesenjangan keuangan mereka dengan cara meminjam uang (kredit).

Berdasarkan hasil uji di atas di dapatkan hasil bahwa usia tidak memiliki hubungan terhadap mental accounting dalam penggunaan kartu kredit. Hal ini diduga disebabkan oleh karakteristik responden penelitian yang terkonsentrasi di usia 20-40 tahun (63%), dimana pada usia tersebut tidak ditemukan perbedaan yang signifikan terhadap mental accounting (gambar 2). Walaupun demikian jika dilihat pada usia yang lebih tua dikisaran 40-

50 tahun ke atas kadar mental accounting di usia ini semakin berkurang. Karena pada usia lanjut sering kali mereka lebih berhati-hati dalam menggunakan karti kredit karena mereka sadar bahwa di hari tua mereka tidak mau menghabiskan uang mereka hanya untun membayar membeli sesuatu yang justru akan menambah beban mereka dengan angsuran cicilan kartu kredit. Hal ini sejalan dengan penelitian McKay, Atkinson, dan Crame (2008) yang mengemukakan orang tua lebih cenderung melihat diri mereka sebagai penabung daripada pemboros dan menggambarkan diri mereka bukan sebagai pembeli impulsif. Selain itu, orang tua cenderung memiliki sikap yang lebih negative terhadap pinjaman dan tidak merasa nyaman dengan penggunaan kredit. Mayoritas orang tua sangat berhati-hati terhadap pengelolaan uang dan memantau pengeluaran mereka dengan cermat.

## **5. PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan di atas didapatkan bahwa variable demografis jenis kelamin, dan pendapatan terbukti memiliki hubungan dengan mental accounting dalam penggunaan kartu kredit sedangkan usia tidak. Jenis kelamin wanita ataupun pria memiliki hubungan yang berbeda dalam mental accounting dalam keputusan penggunaan kartu kredit. Wanita lebih sering terkena mental accounting karena wanita biasanya lebih konsumtif dan sering melakukan pembelian secara impulsif. Begitu pula untuk variabel pendapatan terbukti memiliki hubungan dengan mental accounting dalam penggunaan kartu kredit. Dalam pendapatan yang relatif rendah seseorang berusaha untuk mengikuti gaya hidup lingkungan mereka dengan cara menggunakan fasilitas kartu kredit.

### **5.2. Keterbatasan penelitian**

Tidak ada cross check jawaban responden yang menunjukkan proses berpikir dalam pengambilan keputusan penggunaan kartu kredit. Dengan adanya cros chek jawaban maka dapat diketahui alasan proses berfikir dari masing-masing responden dalam melakukan keputusan pembelian dengan menggunakan kartu kredit. Setelah dilihat terdapat hubungan antara variabel demografi (jenis kelamin dan pendapatan) dengan mental accounting pada penggunaan kartu kredit, maka kedepannya bisa digunakan analisis lebih dalam untuk melihat pengaruh dari varibel-variabel tersebut.

### **5.3. Saran**

Adanya cross check jawaban responden yang menunjukkan proses berpikir dalam pengambilan keputusan penggunaan kartu kredit. menggunakan analisis regresi untuk melihat pengaruh dari hubungan antar variabel di atas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Cummins, Melissa McElprang; Haskell, Janaan H; Jenkins, Susan J, ( 2009 ), "Financial Attitudes And Spending Habits of University Freshmen, *Jornal of Economics and Economic Education Research*, Volume 10, Number 1, 2009.
- Dearden, Chris; Goode, Jackie ; Whitfield, Grahame dan Cox, Lynne, (2010), *Credit and Debt in Low-income Families*, Centre for Research in Social Policy, Loughborough University, Juni.
- Friedman, M. (1957), *A Theory of the Consumption Function*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Garling, Tommy ; Lewis, Alan ; van Raaij, Fred, ( 2010 ), " Psychology, Financial Decision Making, and Financial Crises, *Psychological Science in the Public Interest*. 29 Maret.

- Hollander Heinz, (2001). On the validity of utility statements: standard theory versus Duesenberry's,. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 45, pp. 227–249.
- Kahneman, D., & Tversky, A, (1979), "Prospect theory: An Analysis of Decision Under Risk." *Econometrica*, 47, pp. 263-291.
- Karlsson, N.; Garling, T. dan Selart, M, (1997), *Effects of Mental Accounting on Inter-temporal Choice*, Goteborg Psychological Report No. 27: 5. Goteborg, Sweden: Department of Psychology, University of Gothenburg.
- Keynes, J. M. (1936/1997), *The General Theory of Employment, Interest and Money*, New York.
- Milkman, Katherine L; Beshears, John, (2009), "Mental Accounting and Small Windfalls: Evidence From an Online Grocer", *Journal of Economic Behavior & Organization*, 71, pp. 384–394.
- Norton, C.M. (1993), *The Social Psychology of Credit*, *Credit World*, 82, 18-22, Harcourt, Brace & World.
- Robb, Cliff dan Deanna L Sharpe, (2009), *Effect of Personal Financial Knowledge on College Student's Credit Card Behavior*, *Journal of Financial and Planning*, vol. 20.
- Shefrin, H. M; dan Thaler, R. H, (1988), *The Behavioral Life-cycle Hypothesis*, *Economic Inquiry*, 26, pp. 609-643.
- Supramono dan Intyas Utami, (2004), *Metode Penelitian Akuntansi dan Keuangan*, Salatiga : Andi.
- Thaler, R. H. (1985), *Mental Accounting and Consumer Choice*, *Marketing Science*, 4, pp. 199-214.
- Tversky, A. ; dan Kahneman, D, (1981), *The Framing of Decisions and the Psychology of Choice*, *Science*, 211, pp. 453-458.
- Wilkinson, Nick. (2008), *An Introduction to Behavioral Economics*, New York : Palgrave Macmillan.
- Xiao, J. J ; Noring, F. E ; dan Anderson, J. G, (1995), *College Students' Attitudes Towards Credit Cards*, *Journal of Consumer Studies and Home Economics*, 19, pp. 155-174.
- <http://rowenasuryobroto.multiply.com>\apa yang mempengaruhi keuangan anda. Diunduh 14 Maret 2011.
- <http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2062044-defenisi-pendapatan-menurut-parahli/#ixzz1aLe1f3t6>. Diunduh 10 Oktober 2011.
- <http://tinjauan-sekilas-tentang-mental-accounting.html>. Diunduh 20 Maret 2011.

## PENGARUH BEBAN PAJAK TANGGUHAN DAN PERENCANAAN PAJAK TERHADAP MANAJEMEN LABA

Christina Ranty Sumomba  
**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**  
Email: chr.rantysumomba@gmail.com

YB. Sigit Hutomo  
**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**  
Email: shutomo4@gmail.com

### Abstract

The aim of the study is to provide evidence on how tax rate reform used corporate to affect earning management. The motivation for using deferred tax expense to detect earnings management as there is typically more discretion under generally accepted accounting principles than under tax rules. One might expect firms to include the reporting of income when there is a pre-announced increasing in the corporate tax rate. It is assumed that managers exploit such discretion to manage income backwards primarily in ways that do not affect taxable income. Thus, we expect that decisions to manage earnings backwards will generate book-tax differences that increase deferred tax expense. Previous studies indicate that deferred tax position affects positively on earning management. On the other hand, tax planning and earnings quality jointly affect the information content of book and taxable income.

Sample of 96 manufactured public companies during year 2008-2009 was selected and their financial statement becomes main data source. Multiple regression model was adopted to analysis the effects of the variables and the impact of corporate behavior on earning management.

The results show that deferred tax expense 2008 significantly positive affects on earning management, but it is not proved in deferred tax expense 2009. This result supports the view that firms attempt to shift income in the period of low rate when there are pre-announced increase changes corporate tax rates. On the other hand, tax planning is also used to respond increased tax rate to manage earning. Thus, the results support the hypotheses developed.

**Keywords:** Earning management, deferred tax expense, tax planning, tax rate changes, single tax rate.

## 1. PENDAHULUAN

Manajemen sebagai pihak internal perusahaan memiliki kepentingan melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas laba. Wiryardani dan Yulianti (2009) menyatakan bahwa laba yang berkualitas adalah laba yang dapat mencerminkan kelanjutan laba (sustainable earnings) di masa depan, yang ditentukan oleh komponen akrual dan kas dan dapat mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Semakin berkualitas laba perusahaan, maka investor semakin tertarik untuk menjadi salah satu pemilik saham perusahaan tersebut.

Upaya untuk melakukan manajemen laba dapat dilakukan melalui akuntansi akrual dan posisi pajak tangguhan (deferred tax position), namun diyakini melalui motivasi pajak menunjukkan pertimbangan yang lebih kuat. Scott (2003) menyatakan motivasi pajak (taxation motivation) mendorong manajemen mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan dengan cara menurunkan laba untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Juga, Boatsman et al. (2002) mengungkapkan bahwa isu kebijakan pajak yang kontroversial

dan sering diperdebatkan adalah “keadilan” dalam menentukan total beban pajak. Kelompok kepentingan umum (contohnya, Citizens for Tax Justice (CTJ) 1985; sering mengutip contoh beberapa perusahaan besar dan terkenal yang membayar pajak dengan jumlah sedikit atau tidak sama sekali sebagai bukti bahwa banyak perusahaan yang tidak membayar pajak yang sesuai (Boatsman et al., 2002).

Pemerintah Indonesia melakukan reformasi pajak pada tahun 2008 dan berlaku efektif mulai tahun 2009. Adanya perubahan pajak ini seringkali memotivasi manajemen untuk melakukan manajemen laba. Chen et al. (2007) mengemukakan bahwa manajemen laba pada umumnya terdiri dari pilihan akuntansi yang menaikkan laba akuntansi dan agresifitas pajak dengan pilihan akuntansi untuk menurunkan laba fiskal. Kadang kala manajemen mengurangi penggunaan teknik “bebas” manajemen laba yang memungkinkan menaikkan pendapatan akuntansi, tapi tidak menaikkan pendapatan kena pajak. Atau, mengurangi penggunaan teknik “bebas” perencanaan pajak yang mengakibatkan mengurangi pendapatan kena pajak tapi tidak pendapatan akuntansi, atau keduanya.

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari perilaku (manajemen) perusahaan, terhadap perubahan tarif pajak, dalam mengelola laba. Perilaku manajemen di sini dicerminkan dalam menentukan posisi pajak tangguhan (deferred tax position), khususnya beban pajak tangguhan (deferred tax expense), dan dalam perencanaan pajak. Ada indikasi kuat, bahwa manajemen, bila terjadi perubahan tarif pajak, menggunakan posisi pajak tangguhan dalam mengelola laba yang dilaporkan untuk kepentingan pajak (Poterba et al., 2010). Semakin tinggi kesadaran manajemen dalam memahami ketentuan perpajakan makin kecil perbedaan laba akuntansi dengan laba fiskal sehingga hal ini meningkatkan kualitas (kandungan informasi) laba.

Ada tiga pertimbangan pokok yang mendasari penelitian ini. Pertama, penelitian manajemen laba cenderung dikaitkan dengan abnormal accruals, dengan menggunakan model tipe Jones, ada indikasi kesalahan dalam pengukuran. Kesalahan sistematis terjadi dalam mengklasifikasikan normal accruals sebagai abnormal accruals. Di sisi lain, Phillips et al. (2003) menyatakan bahwa manajemen berupaya untuk mengelola kenaikan laba akuntansi tanpa meningkatkan pendapatan kena pajak, sehingga pelaksanaan kebijakan manajemen untuk mengelola kenaikan laba akuntansi akan menghasilkan perbedaan temporer antara akuntansi dengan pajak. Manajemen terlibat dalam manajemen laba yang bertujuan untuk meningkatkan laba akuntansi namun bukan laba kena pajak, tanpa memperhatikan laba periode sebelumnya, maka manajemen laba tersebut akan menyebabkan perbedaan temporer yang menghasilkan beban pajak tangguhan yang lebih tinggi, sehingga tingkat beban pajak tangguhan, bukan perubahan dalam beban pajak tangguhan, adalah variabel yang tepat.

Beban pajak tangguhan diartikan sebagai beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi dengan laba fiskal (Yulianti, 2004). Beda temporer adalah perbedaan yang disebabkan adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban tertentu berdasarkan standar akuntansi dengan peraturan perpajakan (Suandy, 2008). Dengan kata lain, beban pajak tangguhan ini timbul dari proses koreksi fiskal, di mana terjadi koreksi negatif, yaitu nilai penghasilan berdasarkan akuntansi lebih tinggi dari nilai penghasilan berdasarkan pajak, serta nilai biaya berdasarkan akuntansi lebih kecil dari nilai biaya berdasarkan pajak. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat suatu indikasi manajemen lebih memprioritaskan kenaikan laba akuntansi dibandingkan kenaikan laba fiskal dan penurunan biaya akuntansi dibandingkan biaya fiskal (sama seperti pernyataan dari Phillips et al., 2003, sebelumnya). Hal tersebut lumrah dilakukan oleh manajemen, mengingat investor melihat kinerja perusahaan dari besar nilai laba akuntansi bukan dari besar laba fiskal. Dengan demikian, poin pertama adalah bagaimana pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba.

Kedua, momentum terjadi perubahan peraturan pajak penghasilan di Indonesia yaitu UU No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2009) sebagai pengganti UU No. 17 Tahun 2000, yang menyebabkan tarif pajak penghasilan mengalami perubahan. Perubahan progresif ini terjadi dari tarif pajak berlapis tiga (tarif 15%, 25% dan 30% untuk wajib pajak badan) menjadi tarif pajak tunggal dan besarnya tarif pun secara rata-rata meningkat (menjadi 28%). Ada kemungkinan perubahan tarif ini memberi peluang bagi manajemen untuk melakukan manajemen laba dengan cara melaporkan laba pada periode yang memberlakukan tarif pajak lebih rendah.

Ketiga, pemberlakuan perubahan tarif pajak penghasilan bersifat menurun (dari 28% pada tahun 2009 menjadi 25% pada tahun 2010 dan seterusnya), memberi peluang manajemen untuk melakukan perencanaan pajak yang lebih seksama. Acapkali penurunan tingkat pajak merupakan insentif bagi manajemen untuk melakukan rekayasa laba akuntansi (Frankel dan Trezervant, 1994 dalam Setiawati dan Na'im, 2000). Poterba et al. (2010) menyatakan bahwa para eksekutif perusahaan mendukung tingkat tarif pajak badan yang lebih rendah, karena laba setelah pajak akan lebih tinggi jika tarif pajak rendah. Dengan demikian, adanya penurunan tarif pajak tersebut mempengaruhi bentuk respon manajemen dalam mengelola pajak dan memberi implikasi dalam perencanaan pajak.

Peneliti mempelajari pengaruh potensial posisi beban pajak tangguhan pada perilaku manajemen bila mereka mengetahui akan terjadi perubahan tarif pajak pada tahun 2009 (menjadi 28%). Kemungkinan perubahan tarif pajak ini akan memotivasi manajemen dalam melakukan perencanaan pajak mengingat pada tahun berikutnya (2010) tarif pajak menjadi lebih kecil lagi (tarif 25%). Poterba et al. (2010) menyatakan bahwa ketika tarif pajak dijadwalkan akan turun, perusahaan dengan aset pajak tangguhan (*deferred tax assets*) besar memiliki dorongan untuk menggeser pendapatan ke periode berjalan untuk memanfaatkan keuntungan pajak tangguhan pada saat tingkat pajak tinggi. Lazimnya, ketika tarif pajak menurunkan pendapatan akan ditangguhkan hingga rezim pajak rendah berlaku. Sebaliknya, untuk perusahaan dengan kewajiban pajak tangguhan besar, dorongan untuk menunda pendapatan mendahului rezim pajak rendah adalah lebih kuat daripada perusahaan tanpa kewajiban tersebut, karena dengan menggeser pendapatan ke masa depan perusahaan ini dapat melepaskan kewajiban tangguhan mereka pada saat tarif rendah.

## **2. PENELITIAN TERDAHULU DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **2.1. Perbedaan Laba Akuntansi dengan Laba Fiskal (Book-Tax Differences)**

Pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 paragraf 2, laba akuntansi didefinisikan sebagai laba atau rugi bersih selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak. Penghasilan kena pajak atau laba fiskal (*taxable profit*) atau rugi pajak (*tax loss*) berdasarkan PSAK No. 46 adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan laba ini menjadi dasar penentuan beban pajak tangguhan. Manajemen memiliki dorongan yang berbeda dalam melaporkan laba akuntansi dan laba fiskal ini, karena laba akuntansi secara implisit atau secara eksplisit digunakan dalam kontrak (misalnya, kompensasi rencana dan persyaratan hutang) dan penilaian saham. Manajemen umumnya memilih pendapatan yang lebih tinggi dan memiliki dorongan untuk mengelola kenaikan laba akuntansi. Sebaliknya, laba fiskal digunakan untuk menentukan pajak perusahaan yang harus dibayar, dengan laba fiskal yang lebih tinggi mengakibatkan pembayaran pajak yang lebih tinggi, sehingga manajemen terdorong untuk mendukung penurunan laba fiskal (Chen et al., 2007)

Perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal (*book-tax differences*) menjadi hal yang menarik bagi penelitian sebelumnya, karena perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal dapat memberikan informasi adanya *management discretion* dalam proses akrual (Wijayanti, 2006). Lebih lanjut dikatakan, bahwa laba fiskal dapat digunakan sebagai *benchmark* untuk mengevaluasi laba akuntansi. Perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal (*book-tax differences*) dapat digunakan sebagai *diagnosa* untuk mendeteksi adanya manipulasi pada biaya utama perusahaan. Plesko (2002) dalam Phillips et al. (2003) mengungkapkan bahwa semakin besar perbedaan antara laba fiskal dengan laba akuntansi menunjukkan semakin besarnya *diskresi* manajemen. Besarnya *diskresi* manajemen tersebut terefleksikan dalam beban pajak tangguhan dan digunakan untuk mendeteksi praktik manajemen laba pada perusahaan.

### **2.2. Pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba**

Kenaikan kewajiban pajak tangguhan konsisten dengan perusahaan yang mengakui pendapatan lebih awal atau menunda biaya untuk tujuan pelaporan keuangan komersial pada periode tersebut dibanding tujuan pelaporan pajak. Tindakan perusahaan mengakui pendapatan lebih awal dan menunda biaya mengindikasikan

bahwa manajemen melakukan manajemen laba pada laporan keuangan komersial. Semakin tingginya praktik manajemen laba, maka semakin tinggi kewajiban pajak tangguhan yang diakui oleh perusahaan sebagai beban pajak tangguhan (Phillips et al., 2003).

Holland dan Jackson (2002) mengungkapkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara beban pajak tangguhan terhadap indikasi perusahaan melakukan manajemen laba. Phillips et al. (2003) membuktikan beban pajak tangguhan secara signifikan dapat mendeteksi manajemen laba untuk menghindari penurunan laba, sementara untuk tujuan menghindari kerugian, beban pajak tangguhan dianggap lebih superior dibandingkan model akrual dalam mendeteksi manajemen laba.

Hasil penelitian Yulianti (2004) membuktikan bahwa beban pajak tangguhan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba untuk menghindari kerugian, artinya semakin besar nilai variabel beban pajak tangguhan, semakin besar probabilitas perusahaan tersebut melakukan manajemen laba untuk menghindari kerugian. Selain itu, Yulianti (2004) menemukan bahwa variabel beban pajak tangguhan dapat menjelaskan probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba dengan tingkat keyakinan yang lebih tinggi 5% dibandingkan model discretionary accrual, sedangkan untuk tingkat keyakinan antara beban pajak tangguhan dengan total accrual memiliki tingkat keyakinan yang sama yaitu pada level 95%.

Lestari (2008) membuktikan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh positif dalam mendeteksi manajemen laba untuk menghindari penurunan laba pada perusahaan manufaktur. Selain itu, Lestari (2008) menemukan bahwa rasio profitabilitas tidak berpengaruh positif secara signifikan terhadap perusahaan yang melakukan manajemen laba. Hal ini dikarenakan profitabilitas merupakan hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan manajemen laba yang mencerminkan prestasi dan kinerja yang telah dicapai oleh perusahaan (Brigham, 2006:89 dalam Lestari, 2008).

Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Ha1a:** Beban pajak tangguhan tahun 2008 berpengaruh secara positif signifikan terhadap praktik manajemen laba tahun 2008.

**Ha1b:** Beban pajak tangguhan tahun 2009 berpengaruh secara positif signifikan terhadap praktik manajemen laba tahun 2009.

### **2.3. Peran Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya bahwa ketika terjadi perubahan peraturan perpajakan yang diikuti pula dengan perubahan tarif pajak, terdapat suatu indikasi manajemen melakukan manajemen laba dalam proses perencanaan pajak. Studi empiris di Amerika Serikat yang memanfaatkan perubahan peraturan perpajakan, dikenal dengan Tax Reform Act (TRA), untuk mengevaluasi perilaku manajemen laba kaitannya dengan meminimalisasi pajak.

Maydew (1997) yang berhasil membuktikan bahwa penghematan pajak menjadi insentif bagi manajemen, khususnya manajemen pada perusahaan yang mengalami net operating loss pada 1986-1991, dengan tujuan untuk mempercepat pengakuan biaya penjualan dan biaya administrasi serta menunda pengakuan laba kotor untuk memaksimalkan tax refund. Hasil penelitian Wulandari dkk. (2004) membuktikan bahwa dengan adanya perubahan UU Perpajakan yaitu UU PPh Tahun 2000, manajemen cenderung untuk mentransfer labanya pada periode setelah perubahan UU Perpajakan karena pada periode ini tarif pajak penghasilannya telah menurun sehingga perusahaan dapat memperoleh penghematan pajak.

Implikasi lain dari perencanaan pajak yaitu menaikkan tingkat pengembalian atas ekuitas saham biasa. Wild et al. (2004) mengungkapkan bahwa semakin tinggi ukuran atas efektifitas manajemen pajak yang diukur dengan tingkat retensi pajak, maka semakin tinggi pula tingkat pengembalian atas ekuitas saham biasa (return on common shareholders equity ROCE). ROCE digunakan oleh investor sebagai salah satu indikator untuk menghitung besarnya tingkat pengembalian yang diperoleh pada masa mendatang. Apabila ROCE tinggi, maka investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya di perusahaan, dengan harapan bisa memperoleh pengembalian (dividen)

sesuai dengan ekspektasi para investor. Suandy (2008) menjelaskan bahwa jika tujuan perencanaan pajak adalah meredakan beban pajak (tax burden) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuatan Undang-Undang, maka perencanaan pajak di sini sama dengan tax avoidance karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (after tax return) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

Penelitian yang dilakukan oleh Utami (2005) membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat akrual, maka semakin tinggi pula biaya modal ekuitas. Artinya, manajemen laba dilakukan untuk memperoleh modal dari investor, sehingga manajemen meningkatkan tingkat akrual untuk menarik investor. Biaya modal merupakan konsep yang dinamis yang dipengaruhi oleh beberapa faktor ekonomi dan diperoleh dari dana jangka panjang, salah satunya saham biasa yang diperoleh dari investor. Biaya modal ekuitas adalah tingkat imbal hasil saham yang dipersyaratkan atau tingkat pengembalian yang diinginkan oleh investor untuk mau menanamkan dananya di perusahaan (Utami, 2005). Bagnoli dan Watts (2000) dalam Utami (2005) menambahkan bahwa praktik manajemen laba banyak dilakukan oleh manajemen karena mereka menganggap bahwa perusahaan lain juga melakukan hal yang sama. Dengan demikian, kinerja kompetitor juga dapat menjadi pemicu untuk melakukan praktik manajemen laba karena investor dan kreditur akan melakukan komparasi untuk menentukan perusahaan mana yang mempunyai rating yang baik (favorable).

Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Ha2a:** Perencanaan pajak tahun 2008 berpengaruh secara positif signifikan terhadap praktik manajemen laba tahun 2008.

**Ha2b:** Perencanaan pajak tahun 2009 berpengaruh secara positif signifikan terhadap praktik manajemen laba tahun 2009.

### 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1. Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen laba. Manajemen laba adalah suatu intervensi manajemen dengan sengaja dalam proses penentuan laba untuk memperoleh beberapa keuntungan pribadi (Schipper, 2000 dalam Kusuma, 2006). Berdasarkan penelitian Phillips et al. (2003), rumus untuk variabel manajemen laba yang diukur dengan pendekatan distribusi laba:

$$\Delta E = \frac{E_{it} - E_{it-1}}{MVE_{t-1}}$$

Keterangan :

$\Delta E$  : Distribusi laba. Bila nilai  $E$  adalah nol atau positif, maka perusahaan menghindari penurunan laba. Bila nilai  $E$  adalah negatif, maka perusahaan menghindari pelaporan kerugian. Pada penelitian ini, nilai dari  $E$  tersebut hanya digunakan sebagai informasi tambahan pada hasil statistik deskriptif.

$E_{it}$  : laba perusahaan  $i$  pada tahun  $t$

$E_{it-1}$  : Laba perusahaan  $i$  pada tahun  $t-1$

$MVE_{it-1}$  : Market Value of Equity perusahaan  $i$  pada tahun  $t-1$  (menggunakan nilai kapitalisasi pasar). Nilai kapitalisasi diukur dengan mengalikan jumlah saham beredar perusahaan  $i$  pada akhir tahun  $t-1$  dengan harga saham perusahaan  $i$  pada akhir tahun  $t-1$ .

Variabel independen dalam penelitian ini adalah beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak. Beban pajak tangguhan (deferred tax expense) merupakan beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi dengan laba fiskal (Yulianti, 2004). Phillips et al. (2003) menyatakan bahwa rumus besaran deferred tax expense (dalam penelitian ini dinyatakan dengan Besaran Beban Pajak Tangguhan) adalah sebagai berikut:

$$BBPT_{it} = \frac{\text{Beban pajak tangguhan perusahaan } i \text{ pada tahun } t}{\text{Total aktiva pada akhir tahun } t-1}$$

Keterangan :

$BBPT_{it}$  = Besaran Beban Pajak Tangguhan perusahaan  $i$  pada tahun  $t$ .

Perencanaan pajak (tax planning) sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku (Mangoting, 1999). Variabel perencanaan pajak diukur menggunakan rumus tax retention rate (tingkat retensi pajak) yang menganalisis suatu ukuran dari efektifitas manajemen pajak pada laporan keuangan perusahaan tahun berjalan (Wild et al., 2004). Ukuran efektifitas manajemen pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ukuran efektifitas perencanaan pajak. Rumus tax retention rate adalah (Wild et al., 2005):

$$TRR = \frac{\text{Net Income}_{it}}{\text{Pretax Income (EBIT)}_{it}}$$

Keterangan:

$TRR_{it}$  : Tax Retention Rate (tingkat retensi pajak) perusahaan  $i$  pada tahun  $t$ .

$\text{Net Income}_{it}$  : laba bersih perusahaan  $i$  pada tahun  $t$ .

$\text{Pretax Income (EBT)}_{it}$  : Laba sebelum pajak perusahaan  $i$  pada tahun  $t$

### 3.2. Model Penelitian

Model yang digunakan untuk menguji pengaruh beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba adalah sebagai berikut:

$$EM_{it} = \alpha + \beta_1 BBPT_{it} + \beta_2 TRR_{it} + e$$

Keterangan:

$EM_{it}$  : Earnings Management (manajemen laba) perusahaan  $i$  pada tahun  $t$ .

: Konstanta.

$\beta_1$  : Koefisien regresi.

$BBPT_{it}$  : Besaran Beban Pajak Tangguhan perusahaan  $i$  pada tahun  $t$ .

$TRR_{it}$  : Tax Retention Rate (tingkat retensi pajak) perusahaan  $i$  pada tahun  $t$ .

$e$  : Standar error.

### 3.3. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang dipilih dengan menggunakan purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu (Hartono, 2007:79). Pertimbangan memilih perusahaan manufaktur adalah perusahaan manufaktur mempunyai persediaan dan banyak menggunakan aktiva tetap yang merupakan sumber dari akrual, sehingga kemungkinan terjadinya manajemen laba di perusahaan manufaktur sangat besar dibandingkan dengan perusahaan jasa yang tidak memiliki persediaan (Hartono, 2007:75).

Empat kriteria sampel penelitian sebagai berikut: (1) perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2008 dan tahun 2009, dan mempublikasikan laporan keuangan perusahaan per 31 Desember 2007 sampai dengan laporan keuangan per 31 Desember 2009 yang dinyatakan dalam mata uang rupiah, (2) perusahaan manufaktur memiliki akun beban pajak tangguhan tahun 2008 dan tahun 2009, (3) perusahaan manufaktur yang tidak melakukan merger dan akuisis selama periode pengamatan, (4) perusahaan manufaktur yang memiliki kelengkapan data publikasi yang berhubungan dengan pengukuran variabel beban pajak tangguhan, perencanaan pajak dan manajemen laba tahun 2008 dan tahun 2009. Total perusahaan manufaktur tahun 2008 dan 2009 sebanyak 149 perusahaan. Berdasarkan kriteria sampel penelitian dan melalui proses pemilihan sampel penelitian, maka diperoleh 96 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008 dan tahun 2009.

### 3.4. Data dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan pada penelitian adalah data mengenai total aktiva, laba sebelum pajak, beban pajak tangguhan dan laba bersih perusahaan manufaktur yang diperoleh dalam laporan keuangan dari tahun 2007 sampai tahun 2009 serta data mengenai jumlah saham beredar dan harga saham perusahaan manufaktur. Data tersebut diperoleh dari Gallery Efek Vast Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan Indonesian Capital Market Directory 2007 dan Indonesian Capital Market Directory 2008.

Tiga alasan penelitian ini menggunakan data tahun 2007 sampai tahun 2009 adalah: (1) data tahun 2007 digunakan untuk menghitung distribusi laba dan besaran beban pajak tangguhan untuk tahun 2008, (2) data tahun 2009 merupakan laporan keuangan terbaru, (3) pada awal bulan September 2008, pemerintah menyetujui perubahan peraturan perpajakan yang terbaru yaitu UU No. 36 Tahun 2008, di mana peraturan ini berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2009. Dengan demikian, dalam penelitian ini data tahun 2008 dan data tahun 2009 diuji secara parsial atau menggunakan single periode (periode tunggal).

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif variabel manajemen laba tahun 2008 dengan jumlah N sebanyak 93 (Tabel 1) menunjukkan nilai minimum sebesar -0,585, nilai maksimum 0,567, nilai mean sebesar -0,059, nilai median sebesar 0,0054 dan nilai standar deviasi sebesar 0,1915. Nilai mean variabel manajemen laba yang negatif menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan manufaktur pada tahun 2008 melakukan praktik manajemen laba dengan tujuan untuk menghindari pelaporan kerugian.

Hasil statistik deskriptif variabel beban pajak tangguhan tahun 2008 dengan jumlah N sebanyak 93 (Tabel 1) menunjukkan nilai minimum sebesar -0,208, nilai maksimum 0,046, nilai mean sebesar -0,0061, nilai median sebesar -0,0016 dan nilai standar deviasi sebesar 0,0275. Phillips et al. (2003) mengungkapkan bahwa mean beban pajak tangguhan bernilai negatif mengindikasikan keuntungan pajak tangguhan yang mengimplikasikan bahwa rata-rata perusahaan melaporkan laba fiskal lebih tinggi daripada laba akuntansi.

Demikian pula untuk variabel perencanaan pajak tahun 2008 dengan jumlah N sebanyak 93 (Tabel 1) menunjukkan nilai minimum sebesar -6,933, nilai maksimum 2,822, nilai mean sebesar 0,6418, nilai median sebesar 0,6908 dan nilai standar deviasi sebesar 0,9143. Nilai mean perencanaan pajak tahun 2008 sebesar

0,6418 menunjukkan bahwa rata-rata laba bersih perusahaan manufaktur tahun 2008 lebih tinggi sebesar 64,18% dibandingkan dengan laba sebelum pajak tahun 2008.

Hasil statistik deskriptif variabel manajemen laba tahun 2009 dengan jumlah N sebanyak 80 (Tabel 1) menunjukkan bahwa nilai minimum sebesar -0,451, nilai maksimum 2,874, nilai mean sebesar 0,1301, nilai median sebesar 0,0631 dan nilai standar deviasi sebesar 0,3798. Nilai mean variabel manajemen laba yang positif menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan manufaktur pada tahun 2009 melakukan praktik manajemen laba dengan tujuan untuk menghindari menghindari penurunan laba.

Hasil statistik deskriptif variabel beban pajak tangguhan tahun 2009 dengan jumlah N sebanyak 80 (Tabel 1) menunjukkan nilai minimum sebesar -0,055, nilai maksimum 0,051, nilai mean sebesar 0,0003, nilai median sebesar 0,0002 dan nilai standar deviasi sebesar 0,0105. Phillips et al. (2003) mengungkapkan bahwa mean beban pajak tangguhan bernilai positif mengindikasikan kewajiban pajak tangguhan yang mengimplikasikan bahwa rata-rata perusahaan melaporkan laba akuntansi lebih tinggi dari laba fiskal.

Hasil statistik deskriptif variabel perencanaan pajak tahun 2009 dengan jumlah N sebanyak 80 (Tabel 1) menunjukkan nilai minimum sebesar -0,112, nilai maksimum 4,469, nilai mean sebesar 0,7703, nilai median sebesar 0,7158 dan nilai standar deviasi sebesar 0,4662. Nilai mean perencanaan pajak tahun 2009 sebesar 0,7703 dapat menunjukkan bahwa rata-rata laba bersih tahun 2009 lebih tinggi sebesar 77,03% dibandingkan dengan laba sebelum pajak tahun 2009.

**Tabel 1.** Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N		Minimum		Maksimum		Mean		Median		Standar Deviasi	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Manajemen Laba	93	80	-0,585	-0,451	0,567	2,874	-0,006	0,13	0,005	0,063	0,192	0,380
Beban Pajak Tangguhan	93	80	-0,208	-0,055	0,046	0,051	-0,006	0	-0,002	0	0,028	0,011
Perencanaan Pajak	93	80	-6,933	-0,112	2,822	4,469	0,642	0,77	0,691	0,716	0,914	0,466

Sumber: hasil olah data

## 4.2. Pengujian Hipotesis

Beberapa hasil analisis regresi linier berganda tahun 2008 (Tabel 2). Pertama, hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai adjusted R-Square tahun 2008 sebesar 0,201. Hal ini berarti 20,1% variabel manajemen laba tahun 2008 dijelaskan oleh variabel beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak tahun 2008, sedangkan sisanya 79,9% dijelaskan oleh variabel lainnya.

Kedua, berdasarkan nilai uji F tahun 2008 diketahui bahwa beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak tahun 2008 secara simultan mempengaruhi manajemen laba pada tahun 2008. Hal ini ditunjukkan dengan nilai F hitung sebesar 12,589 dengan tingkat signifikansi 0,000. Selain itu, karena probabilitas signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak tahun 2008 terhadap praktik manajemen laba tahun 2008.

Ketiga, berdasarkan hasil uji t diperoleh beban pajak tangguhan tahun 2008 berpengaruh positif signifikan terhadap praktik manajemen laba tahun 2008. Hal ini ditunjukkan dari koefisien regresi beban pajak tangguhan tahun 2008 bernilai positif sebesar 2,505 serta tingkat signifikansi beban pajak tangguhan tahun 2008 sebesar 0,000 yang lebih kecil dari ( $\alpha$ ) 0,05. Dengan demikian,  $H_0$  diterima.

Keempat, berdasarkan hasil uji t diperoleh perencanaan pajak tahun 2008 berpengaruh positif signifikan terhadap praktik manajemen laba tahun 2008. Hal ini ditunjukkan dari koefisien regresi perencanaan pajak tahun 2008 bernilai positif sebesar 0,062 serta tingkat signifikansi perencanaan pajak tahun 2008 sebesar 0,002 yang lebih kecil dari ( $\alpha$ ) 0,05. Dengan demikian, Ha2a diterima.

**Tabel 2.** Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Tahun 2008

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-0,030	0,022		-1,372	0,174
Beban Pajak Tangguhan	2,505	0,648	0,360	3,865	0,000
Perencanaan Pajak	0,062	0,020	0,295	3,169	0,002
Dependent Variabel : Manajemen Laba					
R	: 0,468				
R Square	: 0,219				
Adjusted R-Square	: 0,201				
F-Hitung	: 12,589				
Sig F	: 0,000				

Sumber: hasil olah data

Beberapa hasil analisis regresi linier berganda tahun 2009 (Tabel 3). Pertama, hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai adjusted R-Square tahun 2009 adalah 0,638. Hal ini berarti 63,8% variabel manajemen laba tahun 2009 dijelaskan oleh variabel beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak tahun 2009, sedangkan sisanya 36,2% dijelaskan oleh variabel lainnya.

Kedua, berdasarkan hasil uji F tahun 2009 diketahui bahwa beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak tahun 2009 secara simultan mempengaruhi manajemen laba pada tahun 2009. Hal ini ditunjukkan dengan nilai F hitung sebesar 70,603 dengan tingkat signifikansi 0,000. Selain itu, karena probabilitas signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak tahun 2009 terhadap praktik manajemen laba tahun 2009.

Ketiga, berdasarkan hasil uji t diperoleh beban pajak tangguhan tahun 2009 tidak berpengaruh positif signifikan terhadap praktik manajemen laba tahun 2008. Hal ini ditunjukkan dari koefisien regresi beban pajak tangguhan tahun 2009 bernilai negatif sebesar -0,896 serta tingkat signifikansi beban pajak tangguhan tahun 2009 sebesar 0,715 yang lebih besar dari ( $\alpha$ ) 0,05. Dengan demikian, Ha1b tidak diterima.

Keempat, berdasarkan hasil uji t diperoleh perencanaan pajak tahun 2009 berpengaruh positif signifikan terhadap praktik manajemen laba tahun 2009. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien regresi yang bertanda positif, yaitu sebesar 0,654 serta tingkat signifikansi perencanaan pajak tahun 2009 sebesar 0,000 yang lebih kecil dari ( $\alpha$ ) 0,05. Dengan demikian, Ha2b diterima.

**Tabel 3.** Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Tahun 2009

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-0,373	0,050		-7,520	0,000
Beban Pajak Tangguhan	-0,896	2,449	-0,025	-0,366	0,715
Perencanaan Pajak	0,654	0,055	0,803	11,844	0,000

Dependent Variabel : Manajemen Laba

R : 0,804  
R Square : 0,647  
Adjusted R-Square : 0,638  
F-Hitung : 70,603  
Sig F : 0,000

Sumber: hasil olah data

#### 4.3. Pembahasan

Penelitian ini membuktikan bahwa beban pajak tangguhan tahun 2008 mampu mendeteksi praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen, karena berdasarkan hasil pengujian tahun 2008 menunjukkan beban pajak tangguhan berpengaruh secara positif signifikan terhadap praktik manajemen laba tahun 2008. Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Holland and Jackson (2002), Phillips et al. (2003), Yulianti (2004) dan Lestari (2008). Informasi tambahan dari hasil statistik deskriptif tahun 2008 menunjukkan bahwa praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur pada tahun 2008 bertujuan untuk menghindari pelaporan kerugian.

Sedikit berbeda dengan analisis tahun 2009, untuk variabel beban pajak tangguhan tahun 2009 tidak dapat digunakan untuk mendeteksi adanya praktik manajemen laba. Ada tiga penyebab beban pajak tangguhan tidak dapat digunakan untuk mendeteksi manajemen laba pada tahun 2009.

Pertama, pada tahun 2009 manajemen lebih bereaksi terhadap penurunan tarif pajak yang akan berlaku mulai awal periode 2010. Oleh karena itu, ketika tarif pajak masih 28% di tahun 2009, manajemen mengambil langkah untuk menunda pendapatan dan mengakui lebih awal kewajiban perusahaan, sehingga timbul aktiva pajak tangguhan yang dapat mengurangi beban pajak periode berikutnya. Poterba et al. (2010) menyatakan bahwa ketika tarif pajak dijadwalkan akan turun, perusahaan dengan aktiva pajak tangguhan besar memiliki dorongan untuk menggeser pendapatan ke periode berjalan untuk memanfaatkan keuntungan pajak tangguhan pada saat sekarang ini tingkat pajak tinggi, hanya kebalikan dari prediksi standar bahwa ketika tarif pajak menurunkan pendapatan akan ditangguhkan hingga rezim pajak rendah berlaku. Sebaliknya, perusahaan dengan kewajiban pajak tangguhan besar, dorongan untuk menunda pendapatan mendahului rezim pajak rendah adalah lebih kuat daripada perusahaan tanpa kewajiban tersebut, karena dengan menggeser pendapatan ke masa depan perusahaan dapat melepaskan kewajiban tangguhan pada saat tarif rendah.

Kedua, mekanisme akuntansi pajak tangguhan, dimana pajak tangguhan timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi dengan laba fiskal yang diakui sebagai kewajiban atau aktiva pajak tangguhan dan disajikan dalam neraca pada suatu periode tertentu. Hanna (2009) dalam Poterba et al. (2010) menjelaskan bahwa pemotongan tarif pajak perusahaan akan menyebabkan sekelompok kecil perusahaan manufaktur, atas nama para

wakil yang mencoba mempengaruhi, untuk mengambil biaya dengan segera atau “menendang” laba, sehingga melaporkan pendapatan bersih kuartal yang lebih rendah dan laba per saham yang lebih rendah.

Ketiga, keterbatasan manajemen dalam mempengaruhi beban pajak tangguhan karena beban pajak tangguhan diatur tidak hanya dalam akuntansi komersial tetapi juga akuntansi fiskal yang diatur dalam peraturan perpajakan, sehingga membatasi manajemen untuk memilih kebijakan dalam menyusun laporan keuangan fiskal.

Penelitian ini juga membuktikan bahwa manajemen melakukan manajemen laba tahun 2008 dan tahun 2009 melalui perencanaan pajak. Hal ini dilakukan oleh manajemen atas reaksi mereka terhadap perubahan tarif pajak. Pada tahun 2008, manajemen laba dilakukan untuk menghindari beban pajak tinggi di tahun 2009, karena tarif pajaknya 10% lebih tinggi dibandingkan tarif pajak tahun 2008. Pada tahun 2009 manajemen laba juga dilakukan dengan tujuan yang sama yaitu untuk menghindari pembayaran beban pajak yang tinggi tahun 2009, mengingat tahun berikutnya akan berlaku tarif pajak yang lebih rendah dari tahun 2009. Tujuan lain manajemen melakukan manajemen laba melalui perencanaan pajak adalah untuk meminimalkan beban PPh supaya perusahaan membayar pajak serendah mungkin serta meningkatkan ROCE supaya para investor tertarik membeli saham perusahaan dan perusahaan memperoleh tambahan modal dari investor.

Penelitian tahun 2008 dan tahun 2009 sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Maydew (1997) dan Wulandari dkk. (2004). Dilihat dari aspek biaya modal ekuitas, penelitian ini sesuai juga dengan konsep penelitian Utami (2005) yang membuktikan bahwa manajemen laba dilakukan untuk memperoleh modal investor.

## **5. PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian makalah ini, penulis menarik tiga kesimpulan. Pertama, beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak dapat digunakan untuk mendeteksi praktik manajemen laba. Kedua, manajemen selalu merespon perubahan tarif pajak, baik itu kenaikan tarif pajak atau penurunan tarif pajak yang dianggap oleh manajemen sebagai peluang “emas” untuk memberikan profit bagi perusahaan baik pada periode tersebut maupun periode yang akan datang. Ketiga, respon manajemen atas perubahan tarif pajak tersebut akan mempengaruhi posisi beban pajak tangguhan.

### **5.2. Keterbatasan Penelitian**

Adapun keterbatasan yang menjadi kelemahan dan kekurangan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini hanya menggunakan dua periode penelitian yang diuji secara terpisah antara tahun 2008 dengan tahun 2009, akibat adanya perbedaan tarif pajak masing-masing periode.
- 2) Pada penelitian ini terdapat 45 penelitian manufaktur yang memiliki data tidak lengkap, karena beberapa perusahaan belum mempublikasikan laporan keuangan tahun 2009.
- 3) Penelitian ini tidak memisahkan perusahaan yang memiliki laba sebelum pajak dan laba bersih bernilai positif dengan yang bernilai negatif. Tarif pajak tahun 2008 dalam menghitung beban pajak tangguhan perusahaan dikenakan sebesar 30%, sehingga diasumsikan semua sampel perusahaan manufaktur penghasilan kena pajaknya dikenakan tarif pajak progresif lapisan ketiga yaitu 30%. Hal inilah yang menjadi dasar penulis mengasumsikan semua sampel perusahaan memiliki laba sebelum pajak dan laba bersih bernilai positif.

### **5.3. Saran**

Berdasarkan keterbatasan penelitian ini, maka saran untuk penelitian berikutnya antara lain:

- 1) Disarankan tidak menguji beban pajak tangguhan secara periode tunggal karena beban pajak tangguhan yang diakui dalam laporan laba rugi perusahaan pada suatu periode berjalan merupakan bagian dari kewajiban pajak tangguhan dari periode-periode sebelumnya. Perlu diperhatikan juga tarif PPh yang berlaku harus sama semua selama periode pengamatan. Terdapat dua justifikasi penulis menguji dengan periode tunggal.

Pertama, penelitian terdahulu telah meneliti periode sebelum tahun 2009 dengan variabel yang sama (beban pajak tangguhan). Kedua, Indonesia sedang dalam masa transisi dari tarif pajak progresif menjadi tarif pajak tunggal, yang menyebabkan tarif pajak tahun 2008 berbeda dengan tarif pajak tahun 2009.

- 2) Penelitian selanjutnya dapat membuktikan logika hipotetik penulis bahwa laba tahun 2008 dan laba tahun 2009 yang tidak diakui sebelumnya oleh manajemen (ditunda) akan diakui pada laporan keuangan tahun 2010 dan periode-periode berikutnya dengan menggunakan perusahaan yang memiliki nilai laba positif serta mengambil periode penelitian lebih dari tiga tahun ke depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Boatsman, James R., Gupta, Sanjay and Weaver, Connie D., (2002), "Tax Management, Sustainable Competitive Advantage, and The Effects of Tax Reform", Working Paper Series, Arizona State University and University of Texas at Austin, August.
- Chen, Linda H., Dhaliwal, Dan S., Trombley, Mark A., (2007), "The Impact of Earnings Management and Tax Planning on the Information Content of Earnings", Working Paper Series, University of Massachusetts at Boston and University of Arizona, November.
- ECFIN Institute for Economic and Financial Research, (2007), Indonesian Capital Market Directory 2007, Eighteenth Edition.
- ECFIN Institute for Economic and Financial Research, (2008), Indonesian Capital Market Directory 2008, Fourteenth Edition.
- Hartono, Jogiyanto, (2007), Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman, Cetakan Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Holland, Kevin and Jackson, Richard H. G., (2002), "Earnings Management and Deferred Tax", Social Science Research Network Electronic Paper Collection.
- Ikatan Akuntan Indonesia, (2009), Standar Akuntansi Keuangan, Per 1 Juli 2009, Salemba Empat, Jakarta.
- Kusuma, Hadri, (2006), "Dampak Manajemen Laba terhadap Relevansi Informasi Akuntansi : Bukti Empiris dari Indonesia", Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 8, No. 1, Mei, hlm. 1-12.
- Lestari, Ubertin Wuri, (2008), "Analisis Pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta", Skripsi, Program Sarjana Fakultas Ekonomi UAJY, Yogyakarta. (tidak dipublikasikan).
- Mangoting, Yenni, (1999), "Tax Planning: Sebuah Pengantar sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak", Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 1, No. 1, Mei 1999, hlm. 43-53.
- Maydew, Edward L., (1997), "Tax-Induced Earnings Management by Firms with Net Operating Losses", Journal of Accounting Research (Spring), pp. 83-96.
- Phillips, John, Pincus, Morton and Rego, Sonja Olhof, (2003), "Earnings Management: New Evidence Based on Deffered Tax Expense", The Accounting Review, Vol. 27, pp. 491-521.
- Poterba, James, Rao, Nirupama and Seidman, Jeri, (2010), "Deferred Tax Positions and Incentives For Corporate Behavior around Corporate Tax Changes", Working Paper Series, Massachusetts Institute of Technology (MIT) and University of Texas at Austin, Revised February 2010.
- Scott, William R., (2003), Financial Accounting Theory, Third Edition, Prentice-Hall, Toronto, Canada.

- Setiawati, Lilis dan Na'im, Ainun, (2000), "Manajemen Laba". Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol. 15, No. 4, Oktober 2000, hlm. 424-441.
- Suandy, Ery, (2008), Perencanaan Pajak, Edisi Keempat, Salemba Empat, Jakarta.
- Utami, Wiwik, (2005), "Pengaruh Manajemen Laba terhadap Biaya Modal Ekuitas (Studi Perusahaan Publik Sektor Manufaktur)", Simposium Nasional Akuntansi VIII, Solo.
- Wijayanti, Handayani Tri, (2006), "Analisis Pengaruh Perbedaan antara Laba Akuntansi dan Laba Fiskal Terhadap Persistensi Laba, Akrua dan Arus Kas", Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang.
- Wild, John J., Subramanyam, K. R. and Halsey, Robert F., (2004), Financial Statement Analysis, Eighteenth Edition, Mc.Graw-Hill, Boston.
- Wiryandari, Santi Aryn dan Yulianti, (2009), "Hubungan Perbedaan Laba Akuntansi & Laba Pajak Dengan Perilaku Manajemen Laba Dan Persistensi Laba", Simposium Nasional Akuntansi XII, Palembang.
- Wulandari, Deni, Kumalahadi dan Prasetyo, Januar Eko, (2004), "Indikasi Manajemen Laba Menjelang Undang-undang Perpajakan 2000 Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta", Simposium Akuntansi Nasional VII, Denpasar.
- Yulianti, (2004), "Kemampuan Beban Pajak Tangguhan Dalam Memprediksi Manajemen Laba", Simposium Nasional Akuntansi VII, Denpasar.

## PERAN PRODUKTIVITAS KAPITAL DAN TENAGA KERJA SERTA PERUBAHAN TEKNOLOGI DALAM PERTUMBUHAN INDUSTRI MANUFAKTUR DI JAWA TIMUR

Nurul Istifadah  
Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Airlangga Surabaya  
Email: nistifadah@yahoo.com.au

### Abstract

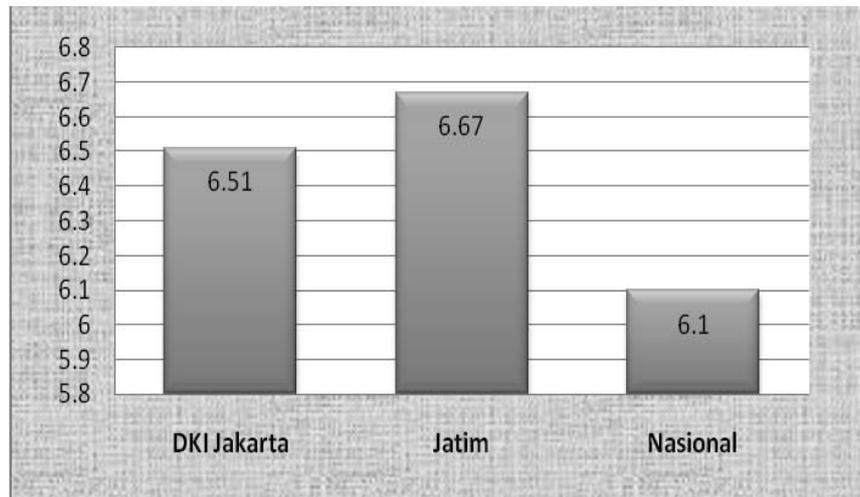
This paper aims to calculate and analyze the contribution of productivity of production factors capital and labor and technology in manufacturing output growth in East Java. The role of technology in the production process referred to as Total Productivity Factor (TPF). Analysis techniques used in this paper is the Residu method, namely the difference between the growths in total output minus total productivity of factors of production.

The results showed that the majority of East Java's manufacturing industry is labor-intensive industries with the technology that is not capital intensive. Thus, the strategy and policy development is the mobilization of manpower and develop appropriate technology which does not absorb much capital. However, this labor mobilization policy needs to consider enactment of the law of diminishing returns that can lower the marginal productivity of manufacturing output in East Java.

Keywords: Manufacturing industry, the residual method, the productivity of factors of production, total factor productivity.

### 1. PENDAHULUAN

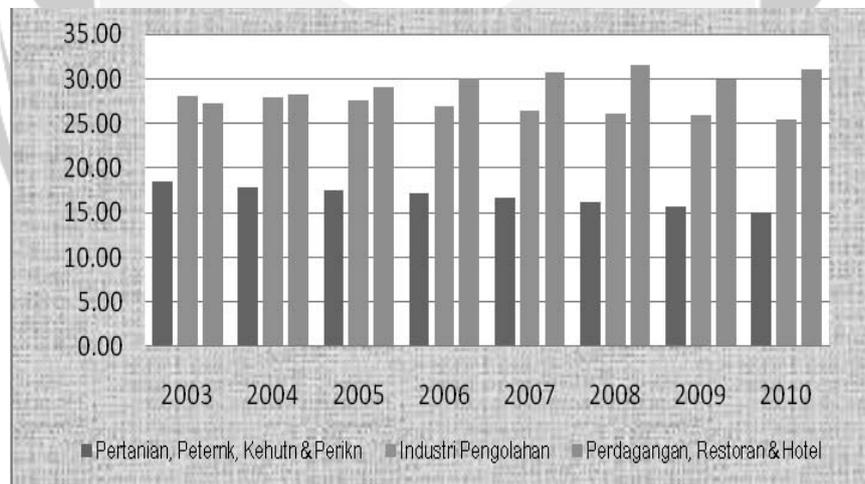
Propinsi Jawa Timur mempunyai posisi yang strategis dalam konteks geografis dan ekonomi, karena posisi Jawa Timur merupakan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan merupakan salah satu penopang utama perekonomian nasional. Pada tahun 2010, kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur terhadap PDB nasional sebesar 15,41%. Nilai tersebut masih lebih besar dibandingkan total kontribusi PDRB tiga pulau besar di Indonesia, yaitu Kalimantan (8,57%), Sulawesi (4,81%), serta Maluku & Papua (1,74%). Bahkan, tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi ibukota DKI Jakarta. Kondisi tersebut dapat dilihat digambar 1.



Sumber: BPS, diolah.

**Gambar 1.** Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2010 (%)

Perekonomian Jawa Timur selama ini didominasi oleh tiga sektor utama, yaitu industri manufaktur; perdagangan, hotel & restoran; serta sektor pertanian. Kontribusi industri manufaktur adalah yang terbesar, namun dengan kecenderungan yang semakin menurun. Bahkan, sejak tahun 2004 perannya digantikan oleh sektor perdagangan hotel & restoran. Kenyataan ini menggambarkan adanya pergeseran struktur ekonomi di Jawa Timur dari industri ke perdagangan atau dari sektor primer ke sektor tersier.



Sumber: BPS, diolah.

**Gambar 2.** Sektor dengan Kontribusi Tersebar dalam PDRB Jawa Timur (%)

Seperti terlihat dalam Tabel 1 dan Gambar 3 di bawah ini yang menunjukkan bahwa pertumbuhan industri manufaktur dan kontribusinya terhadap PDRB Jawa Timur terus mengalami penurunan. Sedangkan sektor perdagangan, hotel & restoran terus mengalami peningkatan, terkecuali pada tahun 2009 dengan nilai pertumbuhan di bawah sektor pengangkutan dan telekomunikasi. Sektor telekomunikasi selama tiga tahun terakhir tumbuh dengan sangat cepat.

Walaupun pertumbuhan dan peran industri manufaktur terhadap PDRB Jawa Timur cenderung turun, namun apabila ditingkatkan dengan lebih efisien, diharapkan akan dapat meningkatkan output dan daya saing perekonomian di tingkat lokal, nasional dan bahkan global. Peningkatan daya saing industri manufaktur ini salah satunya dapat dilakukan dengan meningkatkan produktivitas, baik produktivitas faktor produksi (kapital dan tenaga kerja) maupun produktivitas teknologi (produktivitas tehnik) melalui efisiensi proses produksi. Efisiensi proses produksi industri manufaktur di Jawa Timur dapat diimplementasikan melalui pengalokasian sumber daya yang tersedia secara efisien, efektif dan lebih inovatif.

Paper ini bertujuan untuk menghitung dan menganalisis peran produktivitas faktor produksi kapital dan tenaga kerja serta perubahan teknologi dalam pertumbuhan output industri manufaktur di Jawa Timur. Peran teknologi dalam proses produksi ini biasa disebut sebagai produktivitas teknologi atau Total Produktivitas Faktor (TPF) (Setiono, 2011). Dengan mengetahui share peran faktor produksi dan kemajuan teknologi dalam pertumbuhan output industri manufaktur Jawa Timur, maka dapat diformulasikan secara tepat strategi dan kebijakan pengembangan industri manufaktur di Jawa Timur sehingga meningkatkan daya saing perekonomian.

## 2. STUDI/RISET TERKAIT

Penelitian yang berkaitan dengan peran produktivitas faktor produksi dan teknologi (TPF) telah banyak dilakukan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Di Amerika Serikat, penelitian tentang peran produktivitas faktor produksi dan teknologi (TPF) dilakukan oleh Solow pada tahun 1956-1957 pada perkembangan ekonomi Amerika Serikat selama periode tahun 1909-1949. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa lebih dari 80% pertumbuhan output per satuan jam kerja di Amerika Serikat dikontribusi oleh faktor kemajuan teknologi, sedangkan sisanya (20%) dikontribusi oleh peran akumulasi faktor produksi.

Penelitian di NICs (New Industrial Countries) tentang kontribusi peran akumulasi faktor produksi dan teknologi (TPF) dilakukan oleh Alwyn Young untuk periode 1970-1985. Hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata TFP di keempat negara tidak terlalu tinggi, yaitu berkisar antara 3,7% - 17,5% dari total nilai tingkat pertumbuhan. Nilai TFP tertinggi dicapai oleh Hongkong dengan nilai 2,5%, disusul kemudian oleh Taiwan (1,5%), Korea Selatan (1,4%), dan Singapura (0,1%). Hal ini menunjukkan bahwa hasil kemajuan output yang dicapai oleh NICs bukanlah karena faktor kemajuan tehnik (tehnologi) melainkan karena faktor akumulasi faktor produksi, yaitu kapital dan tenaga kerja.

## 3. METODE RISET

### 3.1. Definisi Operasional

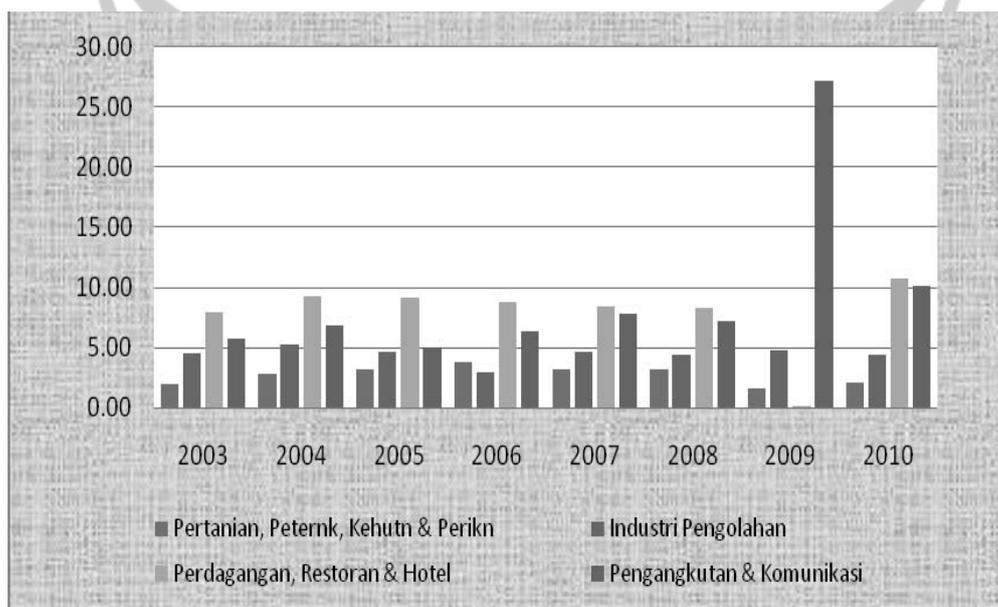
Definisi operasional dari variabel yang akan digunakan dalam riset ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Industri manufaktur dalam paper ini adalah suatu unit produksi di Jawa Timur yang melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk mengubah suatu barang secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi produk baru yang nilainya lebih tinggi. Industri manufaktur yang dimaksud adalah 9 subsektor industri manufaktur dalam PDRB Jawa Timur.
- b. Produktivitas faktor produksi adalah nilai output dibagi dengan nilai faktor produksi. Faktor produksi yang dimaksud meliputi faktor produksi kapital dan tenaga kerja.
- c. Produktivitas tehnik atau disebut juga Total Produktivitas Faktor (TPF) adalah nilai output dibagi dengan perubahan (kemajuan) teknologi. Nilai TPF merupakan residu dari pertumbuhan total output industri manufaktur Jawa Timur dikurangi dengan produktivitas faktor produksi kapital dan tenaga kerja.
- d. Pertumbuhan industri manufaktur adalah pertumbuhan output proses produksi industri manufaktur Jawa Timur yang diukur dengan perubahan sektor industri manufaktur dalam PDRB Jawa Timur.
- e. Provinsi Jawa Timur adalah Pemerintah Daerah provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 29 kabupaten dan 8 kota, yaitu :

Tabel 1. Distribusi PDRB Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2003– 2010 (%)

No	Sektor	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	<b>Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan</b>	<b>18.41</b>	<b>17.89</b>	<b>17.44</b>	<b>17.14</b>	<b>16.66</b>	<b>16.22</b>	<b>15.65</b>	<b>14.98</b>
2	Pertambangan dan Galian	1.97	1.90	1.96	2.01	2.09	2.16	2.21	2.27
3	<b>Industri Pengolahan</b>	<b>28.02</b>	<b>27.87</b>	<b>27.55</b>	<b>26.83</b>	<b>26.46</b>	<b>26.09</b>	<b>25.96</b>	<b>25.40</b>
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	1.75	1.72	1.73	1.70	1.79	1.74	1.36	1.36
5	Bangunan	3.69	3.55	3.47	3.33	3.18	3.08	3.21	3.21
6	<b>Perdagangan, Hotel dan Restoran</b>	<b>27.31</b>	<b>28.19</b>	<b>29.08</b>	<b>30.13</b>	<b>30.77</b>	<b>31.46</b>	<b>29.91</b>	<b>31.04</b>
7	Pengangkutan dan Komunikasi	5.66	5.71	5.66	5.72	5.81	5.88	7.10	7.33
8	Keuangan, Real Estate dan Jasa Perush	4.69	4.86	4.94	5.02	5.13	5.23	5.42	5.45
9	Jasa-Jasa	8.49	8.30	8.17	8.13	8.11	8.14	9.17	8.97
Produk Domestik Regional Bruto		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: BPS, diolah



Sumber : BPS, diolah.

**Gambar 3.** Sektro PDRB Jawa Timur dengan Pertumbuhan Tertinggi (%)

- Kabupaten : Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep.
- Kota : Kediri, Blitar, Malang, Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, Madiun, Surabaya.

### 3.2 Tehnik Analisis

Komponen tingkat pertumbuhan output industri manufaktur Jawa Timur terdiri dari komponen yang merupakan kontribusi dari kemajuan teknologi dan kontribusi akumulasi faktor produksi (kapital dan tenaga kerja). Untuk menghitung komponen kontribusi faktor teknologi (A) terhadap pertumbuhan output produksi industri manufaktur Jawa Timur secara keseluruhan, dihitung melalui selisih dari pertumbuhan produksi industri manufaktur total dikurangi dengan porsi komponen kontribusi akumulasi faktor produksi (K dan L). Metode ini oleh Solow disebut sebagai metode Residu atau analisis Total Produktivitas Faktor (TPF).

Persamaan dimulai dari fungsi produksi Cobb-Douglas:

$$Y = f(A, K, L) \quad (1.1)$$

dimana :

- Y = Output industri manufaktur Jawa Timur
- A = Tingkat teknologi dalam proses produksi industri manufaktur Jawa Timur
- K = Stok modal (kapital) dalam proses produksi industri manufaktur Jawa Timur
- L = Jumlah tenaga kerja dalam proses produksi industri manufaktur Jawa Timur

Dari persamaan (1.1) di atas, apabila didiferensialkan terhadap waktu menjadi:

$$\frac{dY}{dt} = \dot{Y} = \frac{\partial Y}{\partial A} \cdot \frac{dA}{dt} + \frac{\partial Y}{\partial K} \cdot \frac{dK}{dt} + \frac{\partial Y}{\partial L} \cdot \frac{dL}{dt}$$

$$\dot{Y} = \frac{\partial Y}{\partial A} \cdot \dot{A} + \frac{\partial Y}{\partial K} \cdot \dot{K} + \frac{\partial Y}{\partial L} \cdot \dot{L} \quad (1.2)$$

dimana  $F_A = \frac{\partial Y}{\partial A}$ ;  $F_K = \frac{\partial Y}{\partial K} = \frac{\partial F}{\partial K}$ ; dan ;  $F_K$  dan  $F_L$  adalah produk marginal faktor produksi kapital dan tenaga kerja. Persamaan (1.2) kemudian dibagi dengan Y dan sedikit modifikasi menjadi:

$$\frac{\dot{Y}}{Y} = F_A \cdot \frac{\dot{A}}{A} + F_K \cdot \frac{\dot{K}}{K} + F_L \cdot \frac{\dot{L}}{L} \quad (1.3)$$

$$\frac{\dot{Y}}{Y} = \left( F_A \cdot \frac{A}{Y} \right) \cdot \frac{\dot{A}}{A} + \left( F_K \cdot \frac{K}{Y} \right) \cdot \frac{\dot{K}}{K} + \left( F_L \cdot \frac{L}{Y} \right) \cdot \frac{\dot{L}}{L} \quad (1.4)$$

$$g = \left( F_A \cdot \frac{A}{Y} \right) \cdot \frac{\dot{A}}{A} = \frac{\dot{Y}}{Y} - \left( F_K \cdot \frac{K}{Y} \right) \cdot \frac{\dot{K}}{K} - \left( F_L \cdot \frac{L}{Y} \right) \cdot \frac{\dot{L}}{L}$$

$$g = \left( F_A \cdot \frac{A}{Y} \right) \cdot \frac{\Delta A}{A} = \frac{\Delta Y}{Y} - \left( F_K \cdot \frac{K}{Y} \right) \cdot \frac{\Delta K}{K} - \left( F_L \cdot \frac{L}{Y} \right) \cdot \frac{\Delta L}{L} \quad (1.5)$$

dimana  $g$  merupakan share komponen perubahan (kemajuan) teknologi terhadap pertumbuhan output industri manufaktur Jawa Timur. Pada kondisi optimal, tingkat marginal faktor produksi setara dengan harga faktor produksi, sehingga  $F_K$  sama dengan harga sewa modal ( $r$ ) dan  $F_L$  sama dengan upah tenaga kerja ( $w$ ), sehingga persamaan (1.5) menjadi:

$$g = \frac{\Delta Y}{Y} - \left(\frac{rK}{Y}\right) \cdot \frac{\Delta K}{K} - \left(\frac{wL}{Y}\right) \cdot \frac{\Delta L}{L} \quad (1.6)$$

dimana  $(rK/Y)$  dan  $(wL/Y)$  merupakan porsi faktor produksi kapital dan tenaga kerja dalam total output industri manufaktur Jawa Timur dengan asumsi constant return to scale.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Gambaran Umum Industri Manufaktur Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu pusat konsentrasi industri manufaktur terbesar kedua di pulau Jawa bahkan di Indonesia, setelah provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat menyumbang lebih dari 25% dari total output industri manufaktur nasional sedangkan Jawa Timur menyumbang lebih dari 16%, namun dengan persentase yang semakin menurun (BPS, 2007). Sedangkan output industri manufaktur pulau Jawa menyumbang lebih dari 70% total output industri manufaktur nasional. Dengan demikian, peran industri manufaktur Jawa Timur sebagai pembentuk daya saing industri manufaktur nasional sangatlah penting.

Turunnya kontribusi industri manufaktur Jawa Timur terhadap nilai PDRB Jawa Timur dan total output industri manufaktur nasional merupakan gejala bahwa industri manufaktur Jawa Timur sedang mengalami penyusutan (sunset industry). Wibisono, Deputi Pemimpin Bank Indonesia Regional Jawa Timur Bidang Ekonomi Moneter, menilai bahwa tren penurunan ini karena pengaruh resesi global (Jawa Pos, 14 Juni 2010). Namun demikian, mengingat industri manufaktur merupakan salah satu kontributor terbesar dalam PDRB Jawa Timur dan merupakan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah cukup besar (setelah sektor pertanian dan perdagangan), maka diperlukan upaya-upaya untuk menjadikan sektor ini sebagai salah satu potensi ekonomi di wilayah Jawa Timur.

Secara umum, kebijakan pengembangan industri manufaktur di Jawa Timur tidak lepas dari kebijakan makro ekonomi nasional yang menempatkan industrialisasi sebagai grand design pembangunan ekonomi di Indonesia. Proses industrialisasi mensyaratkan penggunaan sebagian besar sumber daya untuk diprioritaskan di sektor industri. Pengembangan industri manufaktur Jawa Timur juga sejalan dengan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) tahun 2011-2025 yang telah menetapkan 6 koridor ekonomi di seluruh Indonesia, dimana koridor ekonomi pulau Jawa ditetapkan sebagai pendorong industri dan jasa nasional dengan sebaran kegiatan utama pada industri makanan-minuman, tekstil, permesinan transportasi, perkapalan, alutsista, dan telematika.

**Tabel 2.** Distribusi Subsektor Industri Manufaktur Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000, Tahun 2004-2010 (%)

Subsektor	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Industri Makanan, Minuman, Tembakau	53.57	53.90	53.43	52.74	52.56	54.23	54.27
Industri Tekstil, Pakaian Jadi, dan Kulit	3.95	3.87	3.84	3.77	3.43	3.08	3.09
Industri Kayu dan Hasil Hutan Lainnya	3.31	3.21	3.13	3.00	2.84	2.22	2.07
Industri Kertas, Percetakan dan Penerbitan	14.40	14.27	14.28	14.82	15.26	17.61	17.74
Industri Kimia, Minyak Bumi Karet dan Plastik	7.91	8.12	8.37	8.44	8.49	9.74	9.60
Industri Barang Galian non Logam, kecuali Minyak Bumi dan Batubara	3.49	3.45	3.56	3.45	3.47	3.27	3.15
Industri Logam Dasar	7.73	7.40	7.53	7.61	7.65	3.88	3.99
Industri Barang dari Logam, Mesin dan Peralatan	1.77	1.91	1.94	2.26	2.42	3.50	3.48
Industri Pengolahan lainnya	3.86	3.88	3.93	3.91	3.88	2.50	2.61

Sumber: BPS, diolah.

Industri manufaktur dalam PDRB Jawa Timur terbagi menjadi 9 jenis industri. Jenis industri makanan, minuman dan tembakau menyumbang share yang paling besar atau lebih dari separuh (50%) dari total output industri manufaktur Jawa Timur. Hal ini menunjukkan terjadinya ketimpangan distribusi output antar 9 jenis industri manufaktur di Jawa Timur sekaligus menunjukkan adanya potensi besar di sektor industri makanan, minuman dan tembakau. Lihat Tabel 2 di atas.

Dari aspek spasial, Di wilayah Jawa Timur hanya beberapa daerah kabupaten/kota saja yang menjadi kantong-kantong (kluster) industri manufaktur. Sehingga untuk mengembangkan industri manufaktur di Jawa Timur, perlu terlebih dulu mengetahui lokasi pemusatan (kluster) industri manufaktur untuk berbagai jenis industri.

Dalam proses produksinya, industri manufaktur Jawa Timur memiliki keterkaitan yang erat dengan sektor-sektor ekonomi lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan vertikal dan horizontal. Keterkaitan horizontal adalah keterkaitan antar sektor, sedangkan keterkaitan vertikal adalah keterkaitan antara sektor industri dengan seluruh jaringan produksi dan distribusi terkait. Input sektor industri manufaktur tidak hanya berasal dari output sektor industri manufaktur itu sendiri tetapi juga berasal dari output sektor-sektor ekonomi lainnya. Sebaliknya, output sektor industri manufaktur sebagian digunakan sebagai input di sektor industri manufaktur itu sendiri dan juga sektor-sektor ekonomi lainnya disamping yang langsung dikonsumsi oleh konsumen akhir.

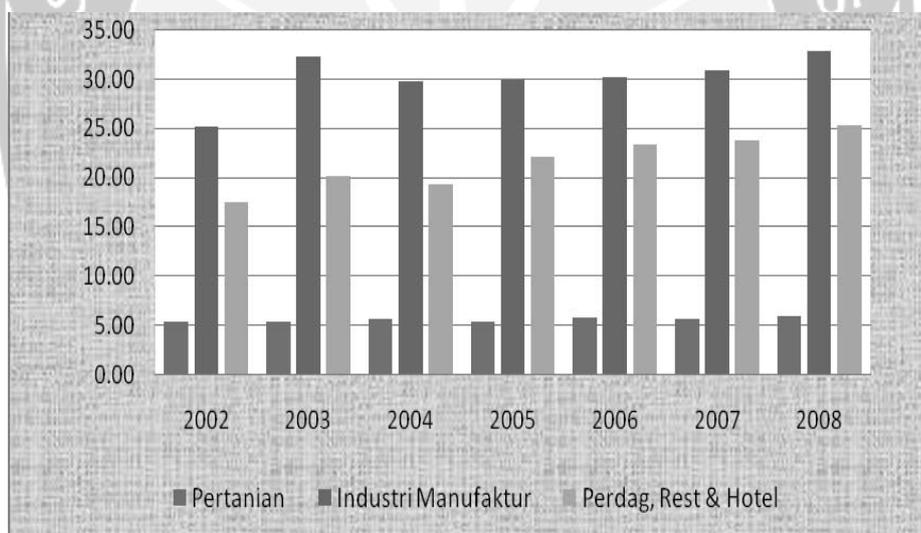
#### 4.2. Produktivitas Industri Manufaktur Jawa Timur

Industri manufaktur Jawa Timur terdiri dari industri padat modal dan padat karya. Dalam Tabel 3 di bawah ini menunjukkan bahwa Industri manufaktur Jawa Timur menyerap tenaga kerja sebesar 12,78% pada tahun 2008 (BPS) dan merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar ketiga setelah sektor pertanian (43,65%) dan sektor perdagangan, hotel & restoran (20%). Dalam konteks nasional, 25% tenaga kerja yang bekerja di sektor industri manufaktur berada di Jawa Timur.

**Tabel 3.** Distribusi Jumlah penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Propinsi Jawa Timur Tahun 2002-2008 (%)

No	Sektor	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan&Perikanan	44.96	47.09	44.11	46.35	44.81	44.75	43.65
2	Pertambangan dan Galian	0.97	0.75	0.88	0.58	0.68	0.67	0.78
3	Industri Pengolahan	14.32	12.00	13.04	13.34	13.61	13.11	12.78
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	0.00	0.00	0.26	0.22	0.19	0.12	0.11
5	Bangunan	4.69	4.41	5.36	4.66	5.06	5.09	5.11
6	Perdagangan, Restoran dan Hotel	19.42	18.73	20.33	18.98	19.80	19.83	20.00
7	Pengangkutan dan Komunikasi	4.25	5.30	5.02	4.51	4.36	4.62	4.89
8	Keuangan, Real Estate dan Jasa Persh	0.82	1.22	0.61	0.92	1.03	1.02	1.19
9	Jasa-Jasa	10.57	10.49	10.40	10.45	10.46	10.79	11.49

Sumber: BPS, diolah



Sumber : BPS, diolah.

**Gambar 4.** Output/Tenaga Kerja Tiga Sektor Ekonomi Terbesar dalam PDRB Jawa Timur, Tahun 2003-2010 (juta Rp/Orang)

Dalam Gambar 4 di atas terlihat bahwa output per tenaga kerja di sektor industri manufaktur Jawa Timur adalah yang paling tinggi di antara sektor ekonomi lainnya. Dengan kemampuannya menghasilkan output serta menyerap tenaga kerja yang relatif besar, maka produktivitas tenaga kerja industri manufaktur juga relatif lebih tinggi dibanding sektor pertanian dan perdagangan, hotel & restoran.

Industri manufaktur Jawa Timur dalam proses produksinya menyerap faktor produksi kapital dan faktor produksi tenaga kerja dengan nilai tertentu pada tingkat teknologi tertentu pula. Dengan kata lain, pertumbuhan output industri manufaktur Jawa Timur sangat dipengaruhi oleh produktivitas faktor produksi (kapital & tenaga kerja)

serta produktivitas tehnik (perubahan teknologi). Produktivitas teknologi diukur dengan nilai Total Produktivitas Faktor (TPF). Hal ini sesuai dengan pandangan ekonom Neo-Klasik yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi pada dasarnya merupakan proses peningkatan pendapatan atau output yang digerakkan oleh akumulasi faktor-faktor produksi (Setiono, 2011: 160). Sedangkan menurut teori pertumbuhan baru (new growth theory) menyatakan bahwa selain akumulasi faktor produksi kapital dan tenaga kerja, perubahan teknologi merupakan faktor endogen yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, berdasarkan teori pertumbuhan tersebut, maka pertumbuhan output industri manufaktur Jawa Timur sangat dipengaruhi oleh produktivitas faktor produksi kapital, produktivitas tenaga kerja, serta produktivitas (perubahan) teknologi yang digunakan dalam proses produksi di sektor industri manufaktur Jawa Timur. Produktivitas faktor produksi merupakan pertambahan nilai kapital dan tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan suatu nilai output industri manufaktur tertentu. Sedangkan TPF menggambarkan peran perubahan teknologi terhadap pertumbuhan output industri manufaktur di Jawa Timur.

Dari beberapa penelitian terdahulu terhadap industri manufaktur di Indonesia menunjukkan nilai rata-rata TPF masih sangat rendah, yaitu sebesar 2,1% untuk periode 1986-1991. Tabel 4 di bawah ini menunjukkan nilai TPF industri manufaktur Jawa Timur berdasarkan hasil perhitungan pada tahun 2005, yaitu sebesar 2,25%. Nilai tersebut memberi peran perubahan teknologi sebesar 48,81% terhadap total pertumbuhan output industri manufaktur Jawa Timur pada tahun 2005. Sementara itu, peran produktivitas faktor produksi kapital hanya sebesar 0,22% sedangkan peran terbesar berasal dari produktivitas tenaga kerja, yaitu sebesar 50,98%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai pertumbuhan industri manufaktur Jawa Timur pada tahun 2005 lebih banyak ditentukan oleh mobilisasi tenaga kerja dan bukan oleh produktivitas kapital. Hal ini menunjukkan pula bahwa industri manufaktur di Jawa Timur lebih banyak berupa industri padat karya dan bukan padat modal. Sedangkan peran perubahan teknologi relatif cukup besar terhadap tingkat pertumbuhan output industri manufaktur di Jawa Timur.

**Tabel 4.** Komposisi Kontribusi Produktivitas Kapital, Tenaga Kerja, dan Tehnologi (TPF) terhadap Pertumbuhan Industri Manufaktur Jawa Timur Tahun 2005(%)

	Nilai	Kontribusi
Pertumbuhan Output	4.61	100.00
Produktivitas Kapital	0.01	0.22
Produktivitas Tenaga Kerja	2.35	50.98
Total Produktivitas Faktor (TPF)	2.25	48.81

Sumber: BPS, diolah

Dari hasil perhitungan peran produktivitas faktor produksi dan peran teknologi dalam membentuk tingkat pertumbuhan output industri manufaktur di Jawa Timur, maka strategi dan kebijakan untuk mengembangkan industri manufaktur di Jawa Timur adalah melalui mobilisasi tenaga kerja dan pengembangan teknologi tepat guna yang tidak membutuhkan kapital besar. Namun demikian, yang perlu diperhatikan adalah berlakunya hukum hasil yang semakin berkurang (the law of diminishing return) yang dapat menurunkan produktivitas marginal output industri manufaktur di Jawa Timur. Hasil perhitungan tersebut juga menunjukkan bahwa peran faktor produksi kapital dalam membentuk tingkat pertumbuhan output industri manufaktur Jawa Timur sangat rendah.

Apabila dilihat dari kontribusi sektoralnya seperti juga dijelaskan di atas, maka kontributor terbesar nilai output industri manufaktur Jawa Timur adalah jenis industri makanan, minuman dan pengolahan tembakau. Sehingga mobilisasi tenaga kerja dan teknologi sebaiknya juga diprioritaskan pada industri makanan, minuman, dan pengolahan tembakau. Tehnologi yang diprioritaskan adalah teknologi tepat guna yang tidak memerlukan kapital besar dan disesuaikan dengan kebutuhan industri makanan, minuman, dan pengolahan tembakau.

## 5. PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa industri manufaktur merupakan sektor unggulan yang potensial untuk dikembangkan di wilayah provinsi Jawa Timur. Sektor industri manufaktur memberi share relatif besar dalam perekonomian (PDRB) Jawa Timur, menghasilkan output per tenaga kerja yang tinggi, serta mampu menyerap tenaga kerja yang relatif besar dibanding sektor-sektor ekonomi lainnya di Jawa Timur. Namun demikian, dari berbagai potensi di atas, industri manufaktur juga memiliki beberapa kelemahan, seperti semakin turunnya share terhadap PDRB Jawa Timur, tren pertumbuhan yang semakin turun, serta masih rendahnya daya saing di pasar global.

Secara umum, kebijakan pengembangan industri manufaktur di Jawa Timur tidak lepas dari kebijakan makro ekonomi nasional yang menempatkan industrialisasi sebagai grand design pembangunan ekonomi di Indonesia. Industrialisasi mensyaratkan penggunaan sebagian besar sumber daya untuk mengembangkan sektor industri. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan industri unggulan yang berbasis potensi sumber daya lokal, diantaranya sumber daya alam yang menjadi potensi khas di masing-masing daerah.

Industri manufaktur Jawa Timur terdiri dari industri manufaktur yang padat modal dan padat karya. Industri manufaktur Jawa Timur dalam proses produksinya menyerap faktor produksi kapital dan tenaga kerja dengan nilai serta tingkat teknologi tertentu. Sehingga, pertumbuhan outputnya sangat dipengaruhi oleh produktivitas faktor produksi (kapital & tenaga kerja) serta produktivitas tehnik (perubahan tehnologi). Produktivitas tehnik diukur dengan nilai Total produktivitas Faktor (TPF).

Nilai TPF industri manufaktur Jawa Timur pada tahun 2005 sebesar 2,25%. Nilai tersebut memberi kontribusi sebesar 48,81% terhadap komponen pertumbuhan ekonomi di sektor industri manufaktur Jawa Timur. Sementara itu, kontribusi produktivitas faktor produksi kapital hanya 0,22% sedangkan kontribusi terbesar berasal dari produktivitas faktor produksi tenaga kerja, yaitu sebesar 50,98%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai pertumbuhan industri manufaktur Jawa Timur pada tahun 2005 lebih banyak ditentukan oleh produktivitas faktor produksi tenaga kerja dan bukan oleh produktivitas kapital. Hal ini menunjukkan bahwa industri manufaktur Jawa Timur lebih banyak berupa industri padat karya, dan peran tehnologi relatif cukup besar dalam pertumbuhan industri manufaktur di Jawa Timur.

Dari hasil perhitungan kontribusi komponen pertumbuhan industri manufaktur di Jawa Timur tersebut di atas, maka strategi dan kebijakan untuk mengembangkan industri manufaktur adalah melalui mobilisasi tenaga kerja dan pengembangan tehnologi. Namun demikian, mengingat bahwa berlakunya hukum hasil yang semakin berkurang (the law of diminishing return) dalam proses produksi, maka perlu diwaspadai terjadinya penurunan produktivitas marginal output industri manufaktur di Jawa Timur.

Hasil perhitungan juga menunjukkan bahwa kondisi di atas menggambarkan rendahnya peran faktor produksi kapital dalam menyumbang nilai pertumbuhan industri manufaktur Jawa Timur. Dapat dianalisis pula bahwa industri manufaktur Jawa Timur yang didominasi oleh jenis industri makanan, minuman dan pengolahan tembakau masih berupa industri yang padat karya namun dengan peran tehnologi yang cukup besar. Namun demikian, tehnologi yang diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan industri manufaktur Jawa Timur adalah tehnologi yang tidak membutuhkan kapital besar, yaitu tehnologi tepat guna, terutama yang disesuaikan dengan kebutuhan industri makanan, minuman, dan pengolahan tembakau di Jawa Timur.

### 5.2. Saran dan Implikasi Kebijakan

Percepatan pertumbuhan output industri manufaktur Jawa Timur dilakukan dengan :

1. memobilisasi faktor produksi tenaga kerja. Namun untuk meningkatkan produktivitas marginal tenaga kerja dan memperlambat berlakunya hukum the law of diminishing return adalah dengan meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui peningkatan keterampilan yang berkaitan dengan proses produksi. Implikasi kebijakan

yang terkait adalah dengan mengembangkan balai latihan kerja yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun membangun kerjasama kemitraan antara industri besar dan industri kecil.

2. Mengembangkan teknologi tepat guna yang relatif murah (tidak banyak menyerap kebutuhan kapital) yang sesuai dengan kebutuhan proses produksi, terutama untuk industri makanan, minuman, dan pengolahan tembakau. Implikasi kebijakannya adalah dengan mengembangkan teknologi tepat guna melalui kerjasama dengan perguruan tinggi sebagai motor penggerak kemajuan teknologi melalui hasil riset dan inovasi yang aplikatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Dewi, (2010), Peringkat Daya Saing RI Naik dari 42 jadi 35, Artikel, diakses dari <http://web.bisnis.com>, tgl 2 Juni 2010.
- Fujita, M, and Thisse, J.F., (2001), *Economics of Agglomeration, Cities, Industrial Location, And Regional Growth*, Cambridge University Press.
- Gatfield, Terry and Yang, Cathy, (2006), *New Industrial Space Theory – A Case Study And Empirical Analysis of Factors Effecting Newly Emerging Key Industries in Queensland*, *Australasian Journal of Regional Studies*, Vol. 12, No. 1.
- Kuncoro, Mudrajad, (2002), *Analisis Spasial dan Regional, Studi Aglomerasi dan Kluster Indonesia*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Landiyanto, E Agustino, (2005), *Spesialisasi dan Konsentrasi pada Sektor Industri Manufaktur Jawa Timur*, Paper, dipresentasikan di Hotel Borobudur Jakarta pada seminar *Industry and Trade* pada tanggal 17 November 2005.
- Setiono, Dedi NS, (2011), *Ekonomi Pengembangan Wilayah, Teori dan Analisis*, LPFE-UI, Jakarta.
- Sukirno, Sadono, (1985), *Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah*, LPFE-UI, Jakarta.
- Sukirno, Sadono, (2006), *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- [http://id.wikipedia.org/laporan\\_daya\\_saing\\_global/](http://id.wikipedia.org/laporan_daya_saing_global/), diakses tgl 9 Juni 2010
- [http://www.wikipedia.org/wiki/Sunset\\_industry](http://www.wikipedia.org/wiki/Sunset_industry), diakses tgl 13 feb 2012.
- <http://idsaham.com/news-saham-Hentikan-Stigma-Industri-Sunset>, diakses tgl 13 Feb 2012
- <http://www.antaranews.com>, Antara News, (2007), *Daya Saing Indonesia 2007 Terperosok*, diakses tgl 3 Juni 2010.

## PERANAN KREDIT DALAM MENDORONG KINERJA USAHA KECIL

Bayu Nuswantara  
Universitas Kristen Setya Wacana Salatiga  
Email: bnuswan@gmail.com

### Abstract

The objectives of the research were, (1) to analyze the influence of credits on small enterprises performance, and (2) to formulate the policies for development of credits that can promote the performance of small enterprises. This research used an econometric analysis in the form of simultaneous equation towards models of small enterprises economic consists of eight behavioral equations and three identity relationships. Estimation for structural equation parameters used the method of Two Stage Least Squares (2SLS).

The research conclusions are as follows: (1) the credits have an influence on the enterprise revenue, which is the main performance indicator of small enterprises, (2) the credits taken by these small enterprises will increase with the reduced interest rates, which in turn will increase the enterprise capital, the use of raw materials, fuel and labor, and finally increase the enterprise revenue, and (3) the policy-making on increasing of credits will provide the greatest impact of the increase in a row on: capital, raw material usage, enterprise income, and enterprise revenue. While the combination of policy-making on increasing of credits, increasing of price, and expansion of marketing areas to reach East Java, West Java, Jakarta and surrounding areas together, will provide the greatest increase in a row on: capital, enterprise income, enterprise revenue, and use of raw materials.

Keywords: Credits, small enterprise, enterprise performance, econometric model.

### 1. PENDAHULUAN

Pada tahun 2005 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mencanangkan tahun keuangan mikro (international microfinance year 2005), dimana lembaga keuangan mikro juga telah berkembang sebagai alat pembangunan ekonomi, antara lain bertujuan menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan dengan cara menciptakan dan mengembangkan usaha mikro dan kecil, meningkatkan produktivitas dan pendapatan kelompok yang rentan, mengurangi ketergantungan masyarakat perdesaan terhadap risiko gagal panen, dan diversifikasi kegiatan usaha yang dapat menghasilkan pendapatan (Arsyad, 2008). Dalam kaitan ini maka peranan kredit terhadap perekonomian menjadi penting, khususnya pada aspek mikro usaha kecil.

Perkembangan ini sejalan dengan perekonomian Indonesia yang tidak dapat dilepaskan dari adanya peran sektor usaha mikro dan kecil. Adapun peranan strategis dapat dilihat dari berbagai aspek (Bank Indonesia, 2005), yaitu:

1. Jumlah unit usahanya banyak dan terdapat hampir di setiap sektor ekonomi.
2. Potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja.
3. Kontribusi usaha mikro dan kecil dalam Produk Domestik Bruto (PDB) nasional yang cukup besar, serta potensinya dalam nilai ekspor non migas.

Data Kemenkop dan UKM tahun 2009, mencatat 52 723 470 unit Usaha Mikro dan Kecil (UMK) atau 99 persen lebih dari total pelaku usaha yaitu UMK dan Usaha Besar (UB), tersebar di sembilan sektor ekonomi, dengan urutan sektor: (1) pertanian 50.49 persen, (2) perdagangan 28.98 persen, dan (3) industri pengolahan 6.15 persen.

**Tabel 1.** Perkembangan Data UMKM dan Usaha Besar di Indonesia Tahun 2007-2009

No	Indikator	Satuan	Tahun		
			2007	2008	2009
I	Total Unit Usaha	Unit	50 150 263	51 414 262	52 769 280
1	Usaha Mikro	Unit	49 608 953	50 847 771	52 176 795
2	Usaha Kecil	Unit	498 565	522 124	546 675
3	Usaha Menengah	Unit	38 282	39 717	41 133
4	Usaha Besar	Unit	4 463	4 650	4 677
II	Total Tenaga Kerja	Orang	93 027 341	96 780 483	98 886 003
1	Usaha Mikro	Orang	84 452 002	87 810 366	90 012 694
2	Usaha Kecil	Orang	3 278 793	3 519 843	3 521 073
3	Usaha Menengah	Orang	2 761 135	2 694 069	2 677 565
4	Usaha Besar	Orang	2 535 411	2 756 205	2 674 671
III	Total PDB <sup>1)</sup>	Rp.Miliar	1 883 549.0	1 997 937.9	2 088 292.3
1	Usaha Mikro	Rp.Miliar	620 864.0	655 703.8	682 462.4
2	Usaha Kecil	Rp.Miliar	204 395.4	217 130.2	225 478.3
3	Usaha Menengah	Rp.Miliar	275 411.4	292 919.1	306 784.6
4	Usaha Besar	Rp.Miliar	782 878.2	832 184.8	873 567.0
IV	Total Ekspor Non Migas	Rp.Miliar	794 872.1	983 540.4	953 089.9
1	Usaha Mikro	Rp.Miliar	12 917.5	16 464.8	14 375.3
2	Usaha Kecil	Rp.Miliar	31 619.5	40 062.5	36 839.7
3	Usaha Menengah	Rp.Miliar	95 826.8	121 481.0	111 039.6
4	Usaha Besar	Rp.Miliar	654 508.3	805 532.1	790 835.3

**Sumber** : Kemenkop dan UKM, 2009 (diolah)

**Keterangan** : <sup>1)</sup> Total PDB Harga Konstan 2000

Besarnya potensi usaha mikro dan kecil, ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah unit usaha mikro selama kurun waktu tahun 2007–2009 rata-rata sebesar 2.59 persen per tahun, sedangkan jumlah unit usaha kecil meningkat rata-rata 4.82 persen per tahun. Pada tahun 2009 tercatat jumlah usaha mikro sebanyak 52 176 795 unit atau mencapai 98.88 persen dari total jumlah usaha mikro, kecil, menengah dan besar, sedangkan jumlah usaha kecil tercatat sebanyak 546 675 unit atau sekitar 1.04 persen.

Secara spesifik pula sektor usaha mikro dan kecil di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan usaha besar, antara lain banyak yang belum berbadan hukum dan merupakan usaha perorangan yang tidak memiliki laporan keuangan yang terpisah antara usaha dan pemiliknya. Manajemen usahanya merupakan usaha keluarga yang dikelola secara turun temurun (Bank Indonesia, 2005). Kondisi lainnya adalah pasar usaha mikro dan kecil yang digarap oleh perbankan baru sekitar 30 persen saja secara nasional, dan 70 persen sisanya, belum tergarap oleh perbankan nasional (Abdullah, 2006).

Provinsi Jawa Tengah merupakan wilayah yang sangat potensial bagi upaya pengembangan usaha mikro dan kecil, serta diharapkan bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap ekonomi wilayah. Bank Indonesia (BI) Semarang (2008) menyatakan besarnya jumlah dan keberadaan usaha mikro, kecil dan menengah, serta tingginya penyaluran kredit yang diberikan oleh perbankan, membuat Jawa Tengah mendapat sebutan *heart of small medium enterprises*.

Sementara itu hasil survei database terhadap pelaku UMKM (Bank Indonesia Semarang, 2008), menunjukkan: (1) aspek keuangan, sekitar 61 persen sumber dana UMKM berasal dari modal sendiri, dan hanya sekitar 39 persen yang berasal dari modal pinjaman. Suku bunga pinjaman paling murah 0.12 persen per bulan dan paling mahal 3 persen per bulan. Sebagian besar sekitar 44 persen agunan berupa tanah dan bangunan, (2) aspek hukum dan manajemen, sekitar 45.71 persen pelaku usaha hanya memiliki satu macam perijinan, dalam arti belum semuanya perijinan dimiliki. Berkaitan dengan pengalaman berwirausaha, sekitar 61.90 persen pelaku usaha telah memiliki pengalaman bekerja sebelumnya sebagai wirausaha dalam jenis usaha yang lain maupun sebagai karyawan. Sebagian besar atau sekitar 48.6 persen pemilik usaha berpendidikan SMA/SMK atau yang setara, dan (3) aspek produksi dan pasar, terdapat 56.52 persen usaha beroperasi sebanding atau lebih besar dari kapasitas produksi. Sistem pembayaran bahan baku yang dilakukan 76.81 persen adalah tunai. Wilayah pemasaran produk sekitar 70.84 persen di wilayah Jawa Tengah, sekitar 27 persen di luar wilayah Jawa Tengah, dan untuk pemasaran ke luar negeri hanya 2.52 persen yang mampu mengaksesnya. Sistem pembayaran penjualan 63.81 persen adalah tunai.

Beberapa fakta yang patut dicatat: (1) kontribusi perbankan dalam menggarap pasar usaha mikro dan kecil secara nasional, baru mencapai angka sekitar 30 persen ini mengindikasikan adanya kesulitan usaha mikro dan kecil untuk memperoleh kredit atau adanya kesenjangan antara pengetahuan UMKM dengan produk dan prosedur perkreditan perbankan, (2) kontribusi usaha mikro dan kecil dalam penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah sangatlah besar, dan (3) kemampuan daya tahan usaha mikro dan kecil selama pasca krisis ekonomi menunjukkan bahwa usaha mikro khususnya, sangatlah *feasible* secara bisnis tetapi belum *bankable* dalam mengakses kredit. Secara spesifik dapat dirumuskan permasalahan dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peranan kredit mikro dan kecil terhadap kinerja usaha kecil?
2. Sejauh mana kebijakan pengembangan kredit mikro dan kecil dalam mendorong kinerja usaha kecil?

## **2. TINJAUAN TEORI DAN PEMBENTUKAN HIOTESIS**

### **2.1. Kredit dan Usaha Kecil**

Di beberapa literatur disebutkan istilah kredit berasal dari bahasa Latin *credo* atau *credere*, yang berarti kepercayaan atau trust. Kredit mengandung pengertian adanya suatu kepercayaan dari pihak pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman, bahwa di masa datang akan mampu memenuhi segala kewajiban yang telah diperjanjikan (Rivai dan Veithzal, 2007).

Fungsi kredit pada dasarnya ialah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan produksi, perdagangan dan konsumsi, sehingga pada akhirnya akan menaikkan pendapatan masyarakat (Firdaus, 2004). Fungsi-fungsi kredit secara spesifik meliputi: (1) mendorong tukar menukar barang dan jasa, (2) mengaktifkan alat pembayaran yang idle, (3) menciptakan alat pembayaran baru, (4) sebagai alat pengendalian harga, dan (5) meningkatkan kegunaan (*utility*) potensi-potensi ekonomi yang ada.

Istilah kredit mikro (*microcredit*) erat kaitannya dengan kredit bagi usaha skala mikro dan kecil. Kredit mikro ini merupakan kredit dengan plafon pinjaman kurang dari Rp.50 juta dan terdiri dari kredit modal kerja, kredit

investasi dan kredit konsumsi (Bank Indonesia, 2006). Kredit mikro menjadi populer karena “metode kontroversial” dikembangkan di negara miskin, karena bank komersial sulit untuk memenuhi permintaan kredit dari rakyat yang tidak memiliki agunan fisik (physical collateral) tetapi layak mendapat kredit (creditworthy) (Hollis dan Sweetman, 1998).

Usaha kecil didefinisikan sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha, dan tidak terkait dengan secara kepemilikan dengan usaha menengah atau usaha besar (UU No.20 Th 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Dalam analisis teori mikroekonomi, usaha kecil sebagai suatu badan yang melakukan kegiatan usaha melalui proses produksi dengan mengubah masukan (input) yang disebut juga faktor produksi termasuk segala sesuatu yang harus digunakannya, menjadi keluaran yang sering disebut produk (output) (Pindyck dan Rubinfeld, 2001).

Berkaitan dengan pemberlakuan UU No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka batasan usaha di definisikan sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Dengan kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Dengan kekayaan bersih antara Rp 50 juta sampai Rp 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan tahunan Rp 300 juta sampai Rp 2.5 miliar.

Sedangkan batasan dan kriteria usaha kecil dari aspek penggunaan tenaga kerja, dapat dibedakan berdasarkan kriteria dari:

1. Bank Dunia: usaha mikro adalah usaha yang mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 10 orang, usaha kecil adalah usaha yang mempekerjakan tenaga kerja antara 10 sampai dengan 49 orang.
2. Badan Pusat Statistik: usaha mikro adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja kurang dari 5 orang, sedangkan usaha kecil adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja antara 5 sampai dengan 19 orang. Usaha menengah adalah bila memiliki jumlah tenaga kerja antara 20 sampai dengan 99 orang.

## 2.2. Usaha Kecil dan Kebutuhan Kredit

Dalam kegiatan produksi, kredit sangat berperan sebagai penambah modal dari luar (eksternal) untuk membiayai masukan produksi sehingga produsen dapat meningkatkan produksi menjadi lebih tinggi. Masukan produksi yang dibiayai kredit mempunyai biaya tambahan yang nilainya sebesar tingkat bunga kredit. Adanya kredit akan menambah biaya untuk kegiatan produksi, sehingga dapat mempengaruhi komposisi penggunaan input optimum pada jalur perluasan usaha (expansion path).

Dengan pendekatan konsep biaya produksi, produsen akan menghadapi fungsi produksi sebagai berikut (Baker, 1968).

$$y = f(x_1, x_2 | x_f) \dots\dots\dots (01)$$

dimana:

y = keluaran; dan f menyatakan fungsi daripada

$x_1$  = masukan variabel

$x_f$  = masukan lainnya yang dianggap tetap

Berdasarkan fungsi produksi tersebut, persamaan biaya dapat dinyatakan:

$$c = p_1x_1 + p_2x_2 + b \dots\dots\dots (02)$$

dimana:

c = biaya total yang dikeluarkan

p<sub>1</sub> = harga per satuan masukan variabel x<sub>1</sub>

b = total biaya tetap

Apabila saat ini biaya total c diketahui sejumlah modal tertentu, misalnya sebesar c<sub>0</sub>, maka persamaan biaya menjadi:

$$c_0 = p_1x_1 + p_2x_2 + b \dots\dots\dots (03)$$

Berdasarkan persamaan biaya diatas, maka dapat diperoleh persamaan garis iso-biaya, yang menggambarkan permintaan masukan variabel x<sub>1</sub> dan x<sub>2</sub> pada jumlah modal c<sub>0</sub> tersebut. Persamaan iso-biaya tersebut adalah:

$$x_1 = \frac{c_0 - b}{p_1} - \frac{p_2}{p_1} x_2 \dots\dots\dots (04)$$

$$x_2 = \frac{c_0 - b}{p_2} - \frac{p_1}{p_2} x_1 \dots\dots\dots (05)$$

Berdasarkan hubungan x<sub>1</sub> dan x<sub>2</sub> pada sejumlah biaya c<sub>0</sub>, produsen dapat memaksimalkan keluaran y pada kondisi:

$$-\frac{dx_2}{dx_1} = \frac{p_1}{p_2} \dots\dots\dots (06)$$

dimana  $-\frac{dx_2}{dx_1}$  menunjukkan daya substitusi masukan x<sub>1</sub> terhadap masukan x<sub>2</sub> dan juga merupakan sudut kemiringan garis iso-biaya, yaitu merupakan tempat kedudukan titik-titik kombinasi penggunaan masukan x<sub>1</sub> dan x<sub>2</sub> yang dapat dilakukan dalam batas anggaran yang dimiliki, untuk produksi tertentu (Kuntjoro, 1983). Apabila c<sub>0</sub> meningkat jumlahnya, maka akan diperoleh garis perluasan usaha (expansion path).

Dalam melakukan kegiatan produksi pelaku usaha masih terkendala oleh modal yang dimilikinya, sehingga penggunaan masukan x<sub>1</sub> dan x<sub>2</sub> juga terbatas jumlahnya. Dengan asumsi bahwa pelaku usaha kecil masih dalam tahap daerah produksi II yang rasional, yaitu produk marjinal masih positif sehingga masih dapat memperbanyak penggunaan masukan untuk menaikkan produksi, maka tambahan modal dari luar (eksternal) dapat diperoleh melalui kredit.

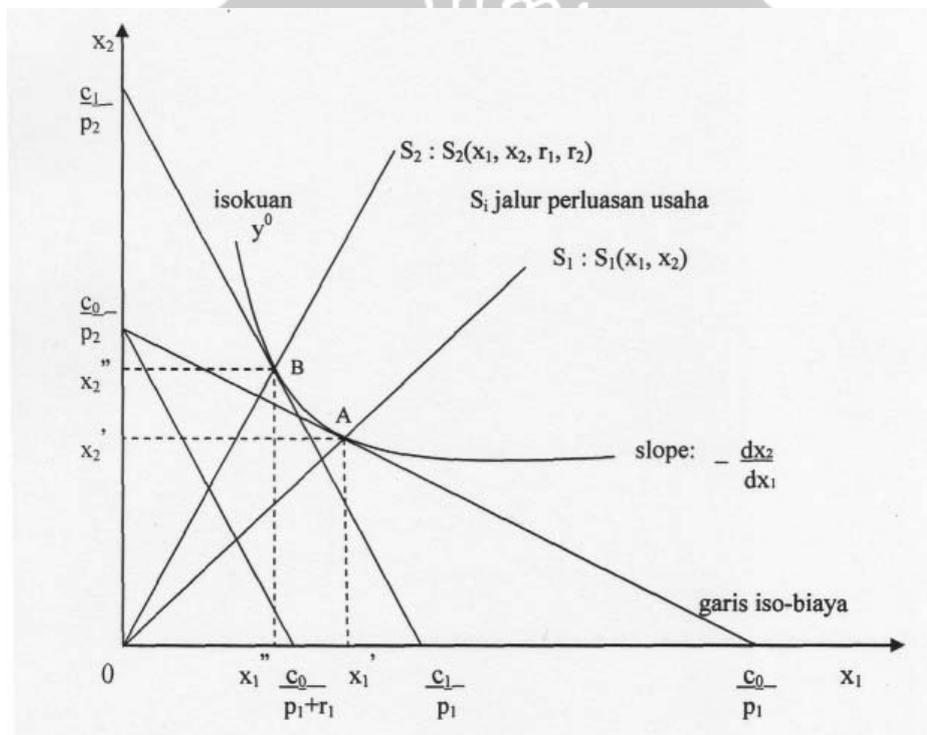
Persamaan produksi diatas masih menggunakan masukan produksi yang tidak dibiayai dengan kredit, sehingga harga masukan yang digunakan adalah harga pasar. Jika masukan x<sub>1</sub> dan x<sub>2</sub> diperoleh dari kredit, maka harga masukan menjadi lebih mahal, karena terbebani biaya kredit. Apabila r<sub>1</sub> dan r<sub>2</sub> masing-masing adalah biaya marjinal dari modal yang mempengaruhi penggunaan satu satuan masukan x<sub>1</sub> dan x<sub>2</sub>, yaitu tambahan biaya yang dikeluarkan untuk manambah penggunaan satu satuan masukan x<sub>1</sub> dan x<sub>2</sub>, misalnya tingkat bunga kredit, maka keseimbangan penggunaan masukan menjadi (Baker, 1968):

$$-\frac{dx_2}{dx_1} = \frac{p_1 + r_1}{p_2 + r_2} \dots\dots\dots (07)$$

Jika diasumsikan hanya masukan  $x_1$  yang dibiayai dari kredit, maka harga satu satuan masukan  $x_1$  menjadi  $p_1+r$  dimana  $r$  adalah biaya kredit yang dibebankan tiap satu satuan masukan  $x_1$  yang dibiayai. Sehingga persamaan keseimbangan penggunaan input yang optimal akan mengalami perubahan menjadi (Kusnadi, 1990):

$$-\frac{dx_2}{dx_1} < \frac{p_1+r}{p_2} \dots\dots\dots (08)$$

Untuk mengimbangi hal ini, maka produsen harus mengurangi jumlah penggunaan masukan  $x_1$ . Apabila jumlah keluaran atau isokuan  $y^0$  tertentu, tetap dipertahankan seperti keadaan semula, maka kebutuhan modal harus ditambah menjadi  $c_1$ . Dengan menambah modal menjadi  $c_1$ , maka akan didapat jalur perluasan usaha (expansion path) yang baru. Tampak jalur perluasan usaha yang baru setelah mendapat kredit cenderung lebih banyak menggunakan masukan  $x_2$ .



Sumber : Baker, 1968

**Gambar 1.** Pengaruh Adanya Kredit terhadap Komposisi Masukan dan Biaya Minimum, serta Jalur Perluasan Usaha

Gambar 1 memperlihatkan penggunaan masukan pada kondisi biaya minimum tanpa adanya biaya kredit diperoleh pada titik A. Sedangkan jalur perluasan usaha tanpa adanya biaya kredit diperlihatkan oleh garis  $S_1$ . Apabila penggunaan masukan  $x_1$  dibiayai dari kredit, maka harga masukan  $x_1$  meningkat menjadi lebih mahal sebesar  $r$ , sehingga komposisi penggunaan masukan optimum diperoleh pada titik B, sehingga jalur perluasan usaha akan berubah menjadi garis  $S_2$  dengan masukan  $x_2$  lebih besar dari sebelumnya (Baker, 1968).

### 2.3. Kinerja Usaha Kecil

Dalam kegiatan manajemen produksi istilah kinerja seringkali dipergunakan secara bergantian dengan efisiensi dan produktivitas. Namun demikian terdapat perbedaan yang cukup mendasar secara teknis. Efisiensi dan produktivitas lebih menunjukkan kepada ratio keluaran (output) terhadap masukan (input), sedangkan kinerja menunjukkan pengertian lebih luas dari efisiensi dan produktivitas (Adam dan Ronald, 1986). Produktivitas berasal dari kata produk yang berarti barang atau jasa, sehingga merupakan ukuran dari seluruh keluaran produksi dibagi masukan produksi.

Konsep kinerja merupakan singkatan dari kinetika energi kerja yang padanannya dalam bahasa Inggris adalah performance. Kinerja dapat diartikan sebagai keluaran yang dihasilkan oleh fungsi atau indikator suatu pekerjaan dalam waktu tertentu. Dalam kegiatan usaha kecil, pekerjaan adalah aktivitas memproduksi suatu barang dengan menggunakan bahan baku, tenaga kerja dan ketrampilan tertentu. Suatu pekerjaan mempunyai sejumlah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur hasil pekerjaan tersebut. Karena itu kinerja dari kegiatan usaha kecil dapat diukur secara luas, baik dengan ukuran finansial maupun ukuran non finansial.

Menurut (Radnor dan Barnes, 2007), dalam suatu usaha kecil pengukuran kinerja usaha antara lain mengacu pada langkah di tingkat perluasan (broadening) dari unit analisis dan kedalaman (deepening) ukuran kinerja usaha. Hal ini akan memberikan gambaran tidak hanya secara kuantitatif, tetapi juga secara kualitatif dari usaha kecil, sehingga dapat mendukung perkembangan secara kualitatif dan meningkatkan daya saing (competitiveness) dari usaha kecil.

Ukuran kinerja usaha ini seringkali merupakan sekumpulan pengharapan yang diekspresikan sebagai sekumpulan sasaran yang dapat dirumuskan dalam bentuk hasil penjualan, keuntungan usaha, pangsa pasar, pengembangan hasil produksi, dan penurunan biaya (Dharma, 2005). Pada perspektif keluaran produksi dari kegiatan usaha, variabel kinerja finansial biasanya diukur dengan indikator : penerimaan usaha, keuntungan usaha, pertumbuhan usaha dan ratio keuangan. Sedangkan variabel kinerja non finansial bisa dilihat dari tiga sisi, (1) konsumen, terdiri: harga produk, tipe pasar, kualitas produk, dan distribusi, (2) masyarakat dan pemerintah, terdiri: kepedulian sosial, tingkat limbah, dan regulasi pemerintah, dan (3) pemasok bahan baku, terdiri: lokasi pemasok dan ukuran pemasok.

### 2.4. Hipotesis

Pengambilan kredit oleh usaha kecil diduga akan mempengaruhi, penggunaan bahan baku, penggunaan bahan bakar, penggunaan tenaga kerja, penerimaan usaha, pendapatan usaha, serta konsumsi, tabungan, dan pengeluaran pendidikan dan sosial.

## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di tiga Kabupaten yaitu: Semarang, Magelang, dan Klaten. Penentuan tiga kabupaten ini dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan: (1) daerah potensial untuk kegiatan usaha kecil, (2) daerah sentra produksi usaha kecil makanan olahan (berbasis bahan baku pertanian) (BPS Semarang, 2003). Penelitian dilaksanakan bulan Februari 2007 s/d Agustus 2007.

### 3.2. Metoda Pengambilan Contoh

Pengambilan data primer menggunakan data cross-section dengan contoh yang diambil secara acak (random sampling method), sehingga setiap pelaku usaha kecil mempunyai peluang yang sama untuk dipilih sebagai contoh (sampel). Contoh ditarik dari wilayah yang telah dipilih lebih dahulu, dalam hal ini adalah daerah sentra usaha kecil (wilayah kecamatan). Contoh ditarik dari kelompok populasi sebagai kerangka contoh, tetapi tidak semua anggota

kelompok populasi menjadi anggota contoh. Sehingga didapat contoh usaha kecil antara 9 sampai 15 contoh (sampel) untuk setiap wilayah kecamatan. Jumlah keseluruhan adalah 90 contoh usaha kecil.

### 3.3. Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer cross-section dari survei yang bersumber dari usaha kecil sebagai contoh. Pengumpulan data ini dilakukan melalui wawancara terhadap pelaku usaha kecil menggunakan daftar pertanyaan dengan kuisisioner yang dirancang untuk penelitian ini.

## 4. GAMBARAN UMUM PENELITIAN

### 4.1. Karakteristik Sosial Ekonomi

Kegiatan usaha kecil yang dilakukan contoh (sampling) mempunyai keragaman cukup tinggi, baik dari umur, jenis kelamin, maupun tingkat pendidikan.

**Tabel 2.** Karakteristik Rumah Tangga Usaha Kecil

Diskripsi	Kabupaten			Jumlah
	Semarang	Magelang	Klaten	
1. Jumlah Contoh (KK)	15	50	25	90
2. Umur:				
15 - 30 tahun	1	4	2	7
31 - 45 tahun	10	21	9	40
46 - 60 tahun	4	25	14	43
3. Jenis kelamin:				
Laki-laki	9	33	24	66
Perempuan	6	17	1	24
4. Pendidikan:				
SD	4	16	6	26
SMP	5	17	5	27
SMA	5	13	13	31
D3 / Perguruan Tinggi	1	4	1	6

Sumber : Data Primer (diolah)

Dilihat umur pelaku usaha kecil sebagian besar berumur antara 31 – 45 tahun dan 46 – 60 tahun, dimana jumlahnya mencapai 83 contoh dari total 90 contoh (sekitar 92 persen). Hal ini cukup merisaukan jika dilihat dari aspek upaya pengembangan dan keberlanjutan usaha kecil yang sedang digelutinya.

#### 4.2. Jenis Usaha Kecil

Jenis usaha kecil yang dilakukan cukup beragam terdiri dari makanan siap konsumsi dan makanan siap olah.

**Tabel 3.** Jenis Usaha Kecil yang Dilakukan

Diskripsi	Kabupaten			Jumlah
	Semarang	Magelang	Klaten	
1. Jumlah Contoh (KK)	15	50	25	90
2. Jenis-jenis Usaha:				
Krupuk kedelai	15			15
Kripik tempe		14		14
Ceriping(pisang,ketela,getuk)		13		13
Rengginang ketan		3		3
Slondok ketela		7		7
Krupuk rambak		13	10	23
Soun mie			15	15
3. Jenis Produk:				
Produk jadi (siap konsumsi)		50	10	60
Produk setengah jadi (siap olah)	15		15	30

Sumber : Data Primer (diolah)

#### 4.3. Karakteristik Kredit Mikro dan Kecil

Karakteristik kredit mikro dan kecil dari contoh (sampel), memiliki keragaan yang cukup tinggi, baik pagu kredit, tingkat bunga, dan jenis agunan.

**Tabel 4.** Karakteristik Kredit dan Pinjaman yang Diambil Usaha Kecil

Diskripsi	Kabupaten			Jumlah
	Semarang	Magelang	Klaten	
1. Jumlah contoh (KK)	15	50	25	90
2. Sumber Pinjaman:				
Bank (BRI, BNI, Mandiri, BPD)	-	10	13	23
BPR	-	10	2	12
Koperasi	-	2	9	11
Sumber lainnya	15	28	1	44

Diskripsi	Kabupaten			Jumlah
	Semarang	Magelang	Klaten	
3. Pengambilan Kredit:				
5 juta rupiah	15	25	9	49
5 s/d 50 juta rupiah	-	24	9	33
> 50 juta rupiah	-	1	7	8
4. Tingkat Bunga Pinjaman:				
12 persen per tahun	-	22	7	29
• 12 s/d 18 persen per tahun	-	5	5	10
• 18 s/d 24 persen per tahun	-	20	13	33
• 24 persen per tahun	15	3	-	18
5. Jenis Agunan:				
Sertifikat Tanah	-	22	15	37
BPKB	-	9	-	9
Tanpa Agunan	15	19	10	44

Sumber : Data Primer (diolah)

Berdasarkan tabel 4, ada beberapa catatan dalam kaitannya dengan hubungan antara usaha kecil dan bank atau sumber pinjaman lainnya, (1) ada usaha kecil yang telah feasible dan bankable, (2) ada usaha kecil yang telah feasible tapi belum bankable, dan (3) sebenarnya masih terdapat pula usaha kecil dan mikro lainnya yang belum terlalu feasible, tapi produktif dalam arti mampu memberikan nilai tambah.

#### 4.4. Karakteristik Perijinan dan Pemasaran Produk

Dalam melakukan kegiatan produksi, usaha kecil juga dihadapkan pada persoalan aspek formal usaha yaitu berupa perijinan dari dinas kesehatan, dinas perindustri dan perdagangan. Jenis perijinan yang dimiliki usaha kecil terdiri dari: ijin Depkes, SIUP, TDI dan TDP. Perijinan ini dalam jangka panjang akan memberikan keuntungan bagi usaha kecil dalam hal akses pasar, apabila ingin melakukan deversifikasi produk dan menembus pasar nasional dan luar negeri.

**Tabel 5.** Karakteristik Perijinan dan Pemasaran Produk

Diskripsi	Kabupaten			Jumlah
	Semarang	Magelang	Klaten	
1. Jumlah contoh (KK)	15	50	25	90
2. Jenis-jenis Ijin Usaha:				
Depkes	-	7	-	37
Deperindag	3	7	13	22
Depkes dan Deperindag	8	20	-	28
Belum ada ijin usaha	4	16	12	24
3. Lokasi Pemasaran:				
Lokal (Jateng dan DIY)	7	25	10	42
Jawa Barat	1	7	1	9
Jakarta	7	18	5	30
Jawa Timur	-	-	9	9
4. Cara Pembayaran:				
Secara tunai	12	41	9	62
Secara kredit (konsinyasi)	3	9	16	28

Sumber : Data Primer (diolah)

## 5. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 5.1. Pengambilan Kredit

Pengambilan Kredit (PKM) yang dimaksud adalah besarnya jumlah kredit atau pinjaman yang diambil pelaku usaha kecil dalam satu tahun terakhir ini dan dihitung dalam satuan rupiah. Sedangkan jenis kredit dalam penelitian ini meliputi kredit dari bank dan non bank, terutama kredit modal kerja untuk usaha. Kredit dari bank adalah kredit yang diperoleh usaha kecil dari lembaga kredit formal, seperti bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sedangkan kredit dari non bank adalah kredit yang berasal dari koperasi simpan pinjam dan pemberi pinjaman informal.

Dari hasil perhitungan, rata-rata besarnya pengambilan kredit oleh setiap usaha kecil per tahun adalah sekitar Rp 16 280 000,-. Pengambilan kredit oleh usaha kecil ini akan menjadi tambahan modal terutama sebagai modal kerja (modal lancar), dengan asumsi bahwa tambahan modal sendiri dari setiap siklus produksi harian untuk membeli bahan baku masih terbatas jumlahnya.

**Tabel 6.** Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Pengambilan Kredit (PKM)

No	Variabel	Parameter Dugaan	Prob >  t	Elastisitas
1	Intersep	15 104 932	0.0601	
2	Tingkat Bunga Kredit (SBK)	-1 071 138	0.0001 *	-1.2531
3	Tabungan (TABS)	2.6830	0.0145 *	0.8028
4	Pengel. Non Tenaga Kerja (PNTK)	2.5544	0.2239	0.1658
5	Pengalaman Usaha (LTU)	-49 707	0.8314	-0.0405
6	Dummy Sumber Kredit (DSK)	16 640 364	0.0003 *	
R <sup>2</sup> = 0.4090      F Hitung = 11.63      Prob > F = 0.0001				

Sumber: hasil olah data

Keterangan: \* = Parameter dugaan berbeda nyata pada taraf nyata ( $\alpha$ ) 0.10

Beberapa hal penting dapat disimpulkan dari persamaan pengambilan kredit oleh usaha kecil adalah; Pertama, pengambilan kredit memiliki respon yang tinggi terhadap perubahan tingkat bunga kredit. Ini mengindikasikan bahwa pengambilan kredit oleh usaha kecil untuk mengembangkan kegiatan usahanya masih cukup besar. Kedua, pengeluaran tabungan oleh usaha kecil masih cukup rendah, sehingga perlu didorong lagi agar mampu meningkatkan pengambilan kredit lebih tinggi lagi. Ketiga, permintaan kredit oleh usaha kecil makanan olahan yang berasal dari sumber kredit bank menunjukkan pengambilan kredit yang lebih besar dibandingkan pengambilan kredit dari sumber kredit yang berasal dari non bank.

## 5.2. Penggunaan Bahan Baku

Penggunaan Bahan Baku (PBM) merupakan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh usaha kecil untuk membeli bahan baku guna menghasilkan produk makanan olahan dalam periode satu tahun dan dihitung dalam satuan rupiah. Berdasarkan perhitungan nilai rata-rata pengeluaran untuk penggunaan bahan baku setiap usaha kecil per tahun adalah sekitar Rp 235 990 000 atau sekitar 84 persen dari pengeluaran untuk total biaya produksi.

**Tabel 7.** Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Penggunaan Bahan Baku (PBM)

No	Variabel	Parameter Dugaan	Prob >  t	Elastisitas
1	Intersep	20 367 366	0.6653	
2	Modal Usaha (MOUS)	2.3972	0.0143 *	0.3239
3	Harga Input Produksi (PI)	630.02	0.8509	0.0120
4	Jumlah Tenaga Kerja (JTK)	65 441.69	0.0061 *	0.5778
R <sup>2</sup> = 0.3244      F Hitung = 13.77      Prob > F = 0.0001				

Sumber: hasil olah data

Keterangan: \* = Parameter dugaan berbeda nyata pada taraf nyata ( $\alpha$ ) 0.10

Modal Usaha (MOUS) berpengaruh nyata terhadap Pengeluaran Bahan Baku (PBM). Ini berarti bahwa peningkatan modal akan mampu menaikkan pengeluaran untuk penggunaan bahan baku. Oleh karena itu upaya mendorong peningkatan modal usaha melalui tambahan kredit bagi usaha kecil akan sangat membantu usaha tersebut dalam meningkatkan kapasitas produksi melalui tambahan penggunaan bahan baku. Jumlah Tenaga Kerja (JTK) yang digunakan, juga berpengaruh nyata terhadap Penggunaan Bahan Baku (PBM) dengan nilai elastisitas sebesar 0.5778. Jumlah tenaga kerja dalam kegiatan usaha kecil ini masih cukup dominan mengingat usaha kecil makanan olahan ini merupakan kegiatan usaha yang cenderung padat karya dengan masih tergantung pada penggunaan tenaga kerja dalam kegiatan produksinya mulai dari kegiatan persiapan, produksi dan pengemasan.

### 5.3. Penggunaan Bahan Bakar

Penggunaan Bahan Bakar (PBB) merupakan pengeluaran untuk penggunaan bahan bakar yang meliputi minyak tanah dan kayu bakar dalam kegiatan usaha kecil dalam periode satu tahun dan dihitung dalam satuan rupiah. Selama ini bahan bakar yang digunakan oleh usaha kecil adalah minyak tanah dan kayu bakar, dengan jumlah yang dominan adalah kayu bakar. Berdasarkan perhitungan nilai rata-rata pengeluaran untuk penggunaan bahan bakar per tahun setiap usaha kecil adalah sekitar Rp 17 275 000 , nilai ini mencapai sekitar 6 persen dari total pengeluaran untuk biaya produksi dan merupakan beban bagi usaha kecil yang bergerak untuk menghasilkan produk makanan olahan.

**Tabel 8.** Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Penggunaan Bahan Bakar (PBB)

No	Variabel	Parameter Dugaan	Prob >  t	Elastisitas
1	Intersep	5 530 032	0.0001	
2	Modal Usaha (MOUS)	0.15312	0.0001 *	0.2827
3	Pgl. Bahan Bakar M.Tanah (PBBM)	0.86324	0.0001 *	0.3972
R <sup>2</sup> = 0.8876    F Hitung = 343.42    Prob > F = 0.0001				

Sumber: hasil olah data

Keterangan: \* = Parameter dugaan berbeda nyata pada taraf nyata ( $\alpha$ ) 0.10

Modal Usaha (MOUS) berpengaruh nyata terhadap pengeluaran untuk Penggunaan Bahan Bakar (PBB). Ini berarti bahwa peningkatan modal usaha akan menaikkan penggunaan bahan bakar. Hasil ini mengindikasikan bahwa modal usaha cukup mampu mendorong pengeluaran untuk penggunaan bahan bakar oleh usaha kecil. Namun demikian peningkatan jumlah penggunaan kayu bakar akibat beralihnya penggunaan minyak tanah perlu dicermati, karena akan mendorong kelangkaan kayu bakar di tingkat lokal dan dapat memicu kenaikan harga kayu bakar. Hal ini bisa menjadi problema kedepan, mengingat adanya kecenderungan sebagian usaha kecil untuk mengurangi biaya produksi dengan cara menekan pengeluaran pada komponen bahan bakar, seperti beralihnya ke penggunaan kayu bakar setelah adanya kebijakan konversi minyak tanah ke gas elpiji.

Penggunaan Bahan Bakar Minyak Tanah (PBBM) juga berpengaruh nyata terhadap pengeluaran untuk Penggunaan Bahan Bakar (PBB) dengan nilai elastisitas sebesar 0.3972. Penggunaan bahan bakar minyak tanah dalam kegiatan usaha kecil ini sebelumnya masih cukup dominan mengingat harga minyak tanah cukup rendah sekitar Rp 2 300 per liter, karena masih disubsidi oleh pemerintah. Hal ini akan menjadi persoalan karena setelah adanya konversi bahan bakar minyak tanah ke gas elpiji, akan membuat usaha kecil beralih ke bahan bakar kayu bakar yang saat ini ketersediaannya di pasar lokal mulai agak sulit didapat.

#### 5.4. Penggunaan Tenaga Kerja

Penggunaan Tenaga Kerja (PTK) merupakan pengeluaran untuk penggunaan tenaga kerja yang meliputi tenaga kerja laki-laki dan perempuan dalam kegiatan usaha kecil dalam periode satu tahun dan dihitung dalam satuan rupiah. Penggunaan tenaga kerja dalam proses produksi merupakan hal yang sangat penting, mengingat usaha kecil makana olahan merupakan kegiatan usaha yang padat tenaga kerja dan mengandalkan ketrampilan tenaga kerja untuk menghasilkan produk yang spesifik dan unik sehingga disukai oleh konsumen.

Berdasarkan perhitungan nilai rata-rata pengeluaran untuk penggunaan tenaga kerja per tahun setiap usaha kecil adalah sekitar Rp 27 500 000.

**Tabel 9.** Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Pengeluaran Tenaga Kerja (PTK)

No	Variabel	Parameter Dugaan	Prob >  t	Elastisitas
1	Intersep	2 986 745	0.1635	
2	Modal Usaha (MOUS)	0.37557	0.0001 *	0.4352
3	Pengg. Tenaga Kerja Peremp.(PTKP)	0.94921	0.0001 *	0.4562
R <sup>2</sup> = 0.7182      F Hitung = 110.88      Prob > F = 0.0001				

Sumber: hasil olah data

Keterangan: \* = Parameter dugaan berbeda nyata pada taraf nyata ( $\alpha$ ) 0.10

Modal Usaha (MOUS) berpengaruh nyata terhadap pengeluaran untuk Penggunaan Tenaga Kerja (PTK). Ini berarti bahwa peningkatan modal usaha akan menaikkan pengeluaran untuk penggunaan tenaga kerja. Hasil ini mengindikasikan bahwa modal usaha cukup mampu mendorong penggunaan tenaga kerja. Selama ini kebutuhan tenaga kerja untuk usaha kecil ini didapat dari wilayah setempat di desa tersebut dimana usaha kecil tersebut berada, namun demikian di beberapa tempat seperti: usaha kecil yang memproduksi soun di Ngawen Klaten, terdapat usaha kecil yang menggunakan tenaga kerja terutama laki-laki, berasal dari luar wilayah setempat yaitu: dari Boyolali, yang merantau musiman atau sementara. Ini juga menunjukkan kebutuhan tenaga kerja terus mengalami perubahan dan adanya kebutuhan terhadap kesesuaian tenaga kerja yang spesifik dengan karakteristik usaha kecil yang mengandalkan ketrampilan tenaga kerja.

Pengeluaran untuk Penggunaan Tenaga Kerja Perempuan (PTKP) juga berpengaruh nyata terhadap pengeluaran untuk Penggunaan Tenaga Kerja (PTK) dengan nilai elastisitas sebesar 0.4550. Pengeluaran untuk penggunaan tenaga kerja perempuan dalam kegiatan usaha kecil ini masih cukup dominan mengingat jumlahnya sekitar 46 persen dari pengeluaran tenaga kerja. Ini menunjukkan tenaga kerja perempuan memiliki kontribusi cukup besar terhadap keberlangsungan usaha kecil makanan olahan, terutama yang berada di wilayah pedesaan.

#### 5.5. Penerimaan Usaha

Penerimaan Usaha (PENU) adalah penerimaan usaha kecil yang merupakan nilai penjualan hasil produksi (kuantitas hasil dikalikan harga jual produk) yang dihasilkan oleh usaha kecil dalam periode satu tahun dan dihitung dalam satuan rupiah. Besarnya nilai penjualan hasil produksi rata-rata untuk setiap usaha kecil adalah sekitar Rp 384 890 000 , dengan nilai rata-rata ini menunjukkan nilai penjualan tahunan dari usaha ini tersebut termasuk dalam kategori usaha kecil (UU. No.20 Tahun 2008), yaitu menghasilkan nilai penjualan tahunan diatas Rp 300 000 000.

**Tabel 10.** Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Penerimaan Usaha (PENU)

No	Variabel	Parameter Dugaan	Prob >  t	Elastisitas
1	Intersep	-13 490 000	0.4144	
2	Peng. Bahan Baku (PBM)	1.03637	0.0001 *	0.6354
3	Peng. Bahan Bakar (PBB)	1.49155	0.0080 *	0.0669
4	Peng. Tenaga Kerja (PTK)	2.99643	0.0001 *	0.2142
5	Harga Produk (PO)	2 714.44	0.0082 *	0.0693
6	Dummy Pemasaran Produk (DPP)	35 448 025	0.0501 *	
R <sup>2</sup> = 0.9558    F Hitung = 363.28    Prob > F = 0.0001				

Sumber: hasil olah data

Keterangan: \* = Parameter dugaan berbeda nyata pada taraf nyata ( $\alpha$ ) 0.10

Penggunaan Bahan Baku (PBM) berpengaruh nyata dan responsif terhadap Penerimaan Usaha (PENU) dengan nilai elastisitas 0.6354. Respon penerimaan usaha oleh perubahan pengeluaran untuk penggunaan bahan baku ini menunjukkan bahwa penggunaan bahan baku menentukan besarnya penerimaan usaha, dimana kenaikan penggunaan bahan baku akan menaikkan penerimaan usaha. Respon ini terjadi karena kenaikan pengeluaran untuk penggunaan bahan baku akan menyebabkan bertambahnya penggunaan bahan baku untuk memproduksi produk usaha kecil.

Penggunaan Bahan Bakar (PBB) juga berpengaruh nyata dan responsif terhadap Penerimaan Usaha (PENU) dengan nilai elastisitas sebesar 0.0669. Respon penerimaan usaha oleh perubahan pengeluaran untuk penggunaan bahan bakar ini menunjukkan, bahwa kenaikan penggunaan bahan bakar akan menaikkan penerimaan usaha. Respon ini walaupun kecil, menunjukkan bahwa kenaikan pengeluaran untuk penggunaan bahan bakar akan menyebabkan bertambahnya kuantitas produk meningkat sehingga menaikkan penerimaan usaha. Penggunaan bahan bakar yang sesuai dengan jenis kegiatan produksi yang dilakukan usaha kecil, akan menyebabkan efisiensi dalam proses produksi sehingga kuantitas produksi meningkat.

Sedangkan Penggunaan Tenaga Kerja (PTK) juga berpengaruh nyata dan responsif terhadap Penerimaan Usaha (PENU) dengan nilai elastisitas sebesar 0.2142. Respon ini menunjukkan bahwa kenaikan pengeluaran untuk penggunaan tenaga kerja akan menyebabkan bertambahnya kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan meningkat sehingga menaikkan penerimaan usaha. Penggunaan tenaga kerja yang sesuai dengan jenis kegiatan produksi yang dilakukan oleh usaha kecil dan kualitas produk yang diinginkan oleh pasar, akan menyebabkan efisiensi sehingga kuantitas dan kualitas produk akan meningkat sehingga penerimaan usaha juga meningkat. Keuntungan yang spesifik dari penggunaan tenaga kerja ini adalah meningkatnya kualitas produk sesuai yang diinginkan dan berkurangnya bahan baku yang terbuang.

Harga Jual Produk (PO) berpengaruh nyata terhadap Penerimaan Usaha (PENU) dengan nilai elastisitas sebesar 0.0693. Respon yang relatif kecil dari penerimaan usaha oleh perubahan tingkat harga jual produk ini diduga karena tingkat harga jual produk di pasar sangat bersaing dan masing-masing produk telah memiliki segmen pasar dan wilayah pasar yang tersendiri. Namun setiap produk masih bisa kompetitif, sehingga cukup signifikan dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan usaha kecil. Karena itu upaya-upaya untuk memperkuat kegiatan produksi dan pemasaran produk, terutama: ketrampilan tenaga kerja, sarana pemasaran dan cara pembayaran, sangatlah diperlukan agar diperoleh tingkat harga yang lebih tinggi.

Dummy Pemasaran Produk (DPP) yaitu: 0 adalah meliputi wilayah Jateng dan Yogyakarta, dan 1 adalah meliputi hingga wilayah Jatim, Jabar, serta Jakarta dan sekitarnya, berpengaruh nyata terhadap Penerimaan

Usaha (PENU). Luasnya wilayah pemasaran produk menembus luar wilayah Jateng dan Yogyakarta, secara nyata mampu meningkatkan penerimaan usaha dimana usaha kecil dengan wilayah pemasaran yang lebih luas memiliki tingkat penerimaan usaha yang lebih tinggi.

Dari nilai koefisien elastisitas dari persamaan penerimaan usaha ini, ada beberapa catatan yang menarik untuk diperhatikan. Pertama, pengeluaran untuk total biaya produksi mampu mendorong kenaikan penerimaan usaha secara responsif, Kedua, penerimaan usaha kecil juga dipengaruhi secara nyata oleh harga jual produk. Karena itu apabila terjadi kenaikan biaya produksi, sementara harga jual produk relatif tetap, maka akan sangat memberatkan usaha kecil. Ketiga, pelaku usaha yang memiliki wilayah pemasaran produk di Yogyakarta dan luar Jateng mempunyai penerimaan usaha yang lebih tinggi.

## 5.6. Tabungan

Tabungan (TABS) adalah jumlah uang yang disisihkan untuk disimpan oleh usaha kecil baik di bank dan lembaga lainnya (koperasi atau kelompok simpan pinjam) atau disimpan di rumah dalam satu tahun dan dihitung dalam satuan rupiah. Besarnya nilai tabungan rata-rata per tahun setiap usaha kecil sekitar Rp 4 870 000.

Pendapatan Usaha (PEND) berpengaruh nyata terhadap Tabungan (TABS) dengan nilai elastisitas sebesar 0.1315. Rendahnya respon tabungan oleh perubahan pendapatan usaha ini menunjukkan bahwa perilaku menabung pada pelaku usaha kecil ini masih rendah sehingga perlu ditingkatkan lagi. Disamping itu akses pelaku usaha kecil untuk menabung juga masih belum baik, akibat ketersediaan fasilitas lembaga keuangan (bank) di wilayah sentra-sentra usaha kecil juga masih sedikit.

**Tabel 11.** Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Tabungan (TABS)

No	Variabel	Parameter Dugaan	Prob >  t	Elastisitas
1	Intersep	2 205 311	0.0140	
2	Pendapatan Usaha (PEND)	0.00615	0.0182 *	0.1315
3	Jumlah Anggota Keluarga(JAK)	-282 239	0.1053 **	-0.2401
4	Tingkat Pendidikan (TP)	664 601.6	0.0014 *	0.4517
5	Dummy Kelemb.Tabungan (DJST)	3 583 772	0.0001 *	
R <sup>2</sup> = 0.5678      F Hitung = 27.92      Prob > F = 0.0001				

Sumber: hasil olah data

Keterangan: \* = Parameter dugaan berbeda nyata pada taraf nyata ( $\alpha$ ) 0.10

\*\* = Parameter dugaan berbeda nyata pada taraf nyata ( $\alpha$ ) 0.20

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil ini adalah. Pertama, pendapatan usaha yang diperoleh usaha kecil berpengaruh positif terhadap tabungan. Kedua, kemampuan pelaku usaha kecil untuk menabung masih dipengaruhi oleh beban pengeluaran yang ditimbulkan oleh bertambahnya jumlah anggota keluarga, semakin banyak jumlah anggota keluarga akan semakin berkurang jumlah tabungan, karena itu perlu upaya untuk tetap menjaga dan mendorong kebiasaan dan perilaku menabung bagi pelaku usaha kecil. Ketiga, tingkat pendidikan yang dimiliki oleh usaha kecil berpengaruh positif terhadap tabungan. Keempat, berkenaan dengan kebiasaan menabung yang masih rendah diantara pelaku usaha kecil, maka sudah mendesak saatnya untuk mendorong lembaga keuangan formal yang juga mempunyai komitmen besar dalam memobilisasi tabungan secara efektif.

## 5.7. Konsumsi

Konsumsi (PKON) merupakan pengeluaran untuk kebutuhan makanan dan listrik dalam periode satu tahun dan dihitung dalam satuan rupiah. Nilai konsumsi rata-rata per tahun pada usaha kecil ini sekitar Rp 22 350 000.

**Tabel 12.** Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Konsumsi (PKON)

No	Variabel	Parameter Dugaan	Prob >  t	Elastisitas
1	Intersep	4 479 184	0.0643	
2	Pendapatan Usaha (PEND)	0.01883	0.0654 *	0.0877
3	Jumlah Anggota Keluarga (JAK)	1 483 237	0.0021 *	0.2749
4	Tingkat Pendidikan (TP)	-553 154	0.3219	-0.0819
5	Konsumsi Tenaga Kerja (KTK)	1.31575	0.0001 *	0.5190
R <sup>2</sup> = 0.8387		F Hitung = 110.51	Prob > F = 0.0001	

Sumber: hasil olah data

Keterangan: \* = Parameter dugaan berbeda nyata pada taraf nyata ( $\alpha$ ) 0.10

Pendapatan Usaha (PEND) berpengaruh nyata terhadap Konsumsi (PKON) dengan nilai elastisitas sebesar 0.0877. Rendahnya respon ini diduga karena jenis pengeluaran untuk konsumsi yang dikeluarkan merupakan konsumsi untuk kebutuhan rutin yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan usaha.

Hal menarik dari hasil ini adalah. Pertama, pendapatan bersih usaha mempunyai pengaruh nyata terhadap konsumsi namun dengan respon yang relatif rendah. Kedua, jumlah anggota keluarga berpengaruh nyata terhadap konsumsi dengan respon yang cukup tinggi, sehingga kenaikan jumlah anggota keluarga akan menyebabkan tambahan pengeluaran yang terkait dengan pengeluaran konsumsi. Ketiga, konsumsi tenaga kerja berpengaruh nyata terhadap pengeluaran konsumsi oleh usaha kecil dengan respon yang cukup tinggi.

## 5.8. Pengeluaran Pendidikan dan Sosial

Pengeluaran pendidikan dan sosial adalah pengeluaran oleh pelaku usaha kecil yang digunakan untuk pendidikan anggota keluarga dan kegiatan sosial masyarakat dalam periode satu tahun dan dihitung dalam satuan rupiah. Besarnya nilai pengeluaran untuk pendidikan dan sosial per tahun adalah sekitar Rp 6 200 000, berarti setiap bulan sekitar lima ratus ribu rupiah.

**Tabel 13.** Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Pengeluaran Pendidikan dan Sosial (PPKS)

No	Variabel	Parameter Dugaan	Prob >  t	Elastisitas
1	Intersep	-3 467 540	0.0016	
2	Pendapatan Usaha (PEND)	0.017714	0.0001 *	0.2972
3	Jumlah Anak Sekolah (JAS)	4 092 241	0.0001 *	1.0843
4	Pengeluaran Sosial (PSO)	0.42049	0.2073	0.1401
5	Dummy Jenis Kelamin (DJG)	305 509	0.6938	
R <sup>2</sup> = 0.6421		F Hitung = 38.12	Prob > F = 0.0001	

Sumber: hasil olah data

Keterangan: \* = Parameter dugaan berbeda nyata pada taraf nyata ( $\alpha$ ) 0.10

Pendapatan Usaha (PEND) berpengaruh nyata terhadap Pengeluaran Pendidikan dan Sosial (PPKS) dengan nilai elastisitas sebesar 0.2972. Respon cukup rendah ini diduga karena pengeluaran untuk pendidikan dan sosial yang dikeluarkan ini merupakan investasi yang cukup mendasar dan jangka panjang sehingga tidak terlalu terpengaruh dengan besarnya pendapatan bersih usaha.

Beberapa hal yang menonjol dari hasil ini adalah. Pertama, pendapatan usaha dari kegiatan usaha kecil mampu mendorong pengeluaran untuk pendidikan, dan sosial dalam bentuk pengeluaran yang bersifat jangka panjang dan intangible. Hal ini akan memperkuat ikatan sosial diantara usaha kecil yang umumnya berada dalam kawasan usaha yang sama (sentra produksi). Kedua, besarnya respon dari pengeluaran pendidikan dan sosial oleh jumlah anak sekolah yang dimiliki usaha kecil, menunjukkan bahwa kesadaran terhadap pendidikan anak (investasi jangka panjang) di kalangan usaha kecil sangat tinggi. Ketiga, masih terlihat adanya kesadaran pelaku usaha kecil untuk melakukan kewajiban dan kepedulian sosial sebagai bagian memperkuat modal sosial di masyarakat. Keempat, dummy jenis kelamin tidak berpengaruh nyata terhadap pengeluaran pendidikan dan sosial. Ini mengindikasikan bahwa kesadaran pelaku usaha kecil baik itu perempuan ataupun laki-laki, terhadap pendidikan dan sosial adalah relatif sama baiknya.

## **6. ANALISIS KEBIJAKAN**

Secara teoritis tujuan dari suatu simulasi kebijakan adalah untuk menganalisis dampak dari berbagai alternatif kebijakan dengan jalan mengubah dari salah satu atau beberapa nilai variabel atau instrumen kebijakan (policy instrument).

### **6.1. Dampak Perubahan Suku Bunga Kredit**

Pada bagian ini akan dilakukan analisis terhadap dampak perubahan Suku Bunga Kredit (SBK), yaitu kredit yang diambil oleh pelaku usaha kecil. Penurunan suku bunga kredit ini dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain melalui mekanisme subsidi bunga atau penjaminan kredit, sehingga risiko pinjaman akan menurun dan suku bunga kredit menjadi lebih rendah, seperti misalnya pada program Kredit Untuk Rakyat (KUR). Mekanisme ini sangat bermanfaat bagi usaha kecil yang pada umumnya sangat feasible tapi masih belum bankable.

Simulasi 1 adalah simulasi dampak penurunan suku bunga kredit sebesar 20 persen. Dengan tingkat bunga kredit rata-rata saat ini yang dinikmati oleh usaha kecil sebesar 19.05 persen per tahun, maka penurunan suku bunga kredit sebesar 20 persen diharapkan akan membuat suku bunga kredit turun menjadi 15.24 persen per tahun atau 1.27 persen per bulan. Penurunan SBK sebesar 20 persen akan berdampak positif terhadap seluruh variabel endogen. Kenaikan paling besar di dapat variabel PKM dan MOUS, masing-masing sebesar 25.45 persen dan 12.99 persen. Perubahan pada variabel Pengambilan Kredit (PKM) ini cukup elastis, karena itu penurunan suku bunga kredit memberikan dampak positif yang besar terhadap PKM dan MOUS.

### **6.2. Dampak Kenaikan Pengambilan Kredit**

Simulasi.2 digunakan untuk melihat dampak kenaikan Pengambilan Kredit (PKM) sebesar 100 persen. Kenaikan pengambilan kredit ini dapat dilakukan oleh pemerintah melalui dua cara; pertama, secara langsung dengan kebijakan pemberian dan perluasan skim-skim kredit baru dengan plafon kredit yang lebih besar, terutama di bank-bank pemerintah; kedua, secara tidak langsung melalui himbuan (suasion) dan insentif terhadap bank-bank non pemerintah dan lembaga non bank, yang memberikan kredit kepada usaha kecil dengan plafon kredit yang lebih besar.

Kenaikan pengambilan kredit ini akan meningkatkan jumlah kredit yang diambil usaha kecil dari sekitar Rp 16 280 000 menjadi Rp 32 560 000. Perubahan ini akan mendorong peningkatan pada variabel endogen lainnya meliputi: Modal Usaha (MOUS) 51.07 persen, Total Biaya Produksi (TBP) 17.10 persen, Penerimaan Usaha (PENU) 16.33 persen, dan Pendapatan Usaha (PEND) 14.28 persen, serta Penggunaan Bahan Baku (PBM) 16.68 persen, Penggunaan Tenaga Kerja (PTK) 22.23 persen, dan Penggunaan Bahan Baku (PBB) sebesar 14.43 persen.

### 6.3. Dampak Perubahan Sumber Kredit

Dummy Sumber Kredit (DSK) juga mempunyai arti yang penting dalam meningkatkan jumlah pengambilan kredit, karena usaha kecil yang memperoleh sumber kredit dari bank memiliki tingkat pengambilan kredit (pinjaman) yang lebih tinggi dibandingkan dengan usaha kecil yang memperoleh sumber pinjaman dari lembaga non bank. Dummy Sumber Kredit (DSK) yaitu: 0 adalah sumber pinjaman (kredit) dari non bank, dan 1 adalah sumber kredit dari bank. Perubahan sumber kredit terutama dari non bank ke sumber kredit dari bank, dapat didorong dan difasilitasi oleh pemerintah melalui kegiatan pendampingan secara individu atau kelompok terutama kepada usaha kecil yang telah feasible tetapi belum bankable, sehingga mampu memiliki akses yang baik terhadap perbankan.

Hasil simulasi 3 yaitu perubahan sumber kredit dari non bank ke sumber kredit dari bank, memberikan dampak positif terhadap seluruh variabel endogen. Dampak terbesar pada variabel endogen: PKM meningkat 63.41 persen, MOUS meningkat 32.38 persen, PENU meningkat 10.36 persen dan PEND meningkat 9.06 persen.

Sedangkan simulasi 4 adalah perubahan sumber kredit dari sumber kredit bank menjadi sumber kredit dari non bank juga akan mempengaruhi jumlah permintaan kredit, karena usaha kecil yang memperoleh sumber kredit dari non bank memiliki tingkat permintaan kredit (pinjaman) yang lebih kecil dibandingkan dengan usaha kecil yang memperoleh sumber pinjaman dari lembaga bank. Hasil simulasi ini yaitu perubahan sumber kredit dari lembaga bank ke non bank memberikan dampak yang negatif terhadap seluruh variabel endogen yaitu: PKM, MOUS, PBM, PTK, PBB, TBP, PENU, PEND, TABS, PKON, dan PPKS. Dampak terbesar terjadi pada dua variabel endogen: Pengambilan Kredit (PKM) berkurang 40.35 persen dan Modal Usaha (MOUS) berkurang 20.60 persen.

### 6.4. Dampak Kenaikan Harga Jual Produk

Harga Jual Produk (PO) juga turut menentukan besarnya penerimaan usaha kecil, simulasi 5 adalah simulasi yang digunakan untuk melihat dampak kenaikan Harga Jual Produk (PO) sebesar 10 persen terhadap variabel-variabel endogen lainnya. Kenaikan harga jual produk ini dapat terjadi apabila pemerintah melakukan perbaikan infrastruktur jalan, jembatan dan prasarana transportasi lainnya, terutama di daerah-daerah perdesaan dimana terdapat banyak sentra-sentra usaha kecil. Peningkatan infrastruktur ini akan memberikan peluang lebih baik bagi produk-produk usaha kecil makanan olahan untuk dipasarkan ke wilayah lain, sehingga diperoleh harga jual yang lebih tinggi. Perbaikan prasarana dan sarana ini secara tidak langsung akan menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan usaha kecil.

Perubahan akibat adanya kenaikan Harga Jual Produk (PO) sebesar 10 persen ini akan mendorong peningkatan paling besar pada variabel Pendapatan Usaha (PEND) dan Penerimaan Usaha (PENU), masing-masing sebesar 2.65 persen, dan 0.74 persen, sedangkan variabel endogen lainnya lebih rendah dari nilai tersebut. Dampak yang terjadi oleh kenaikan harga jual produk ini tidaklah besar, yang diduga karena elastisitas jangka pendek dari variabel eksogen Harga Jual Produk (PO) sangat kecil sekitar 0.069, dengan demikian kebijakan tunggal pada variabel ini tidaklah mempunyai dampak yang cukup berarti, sehingga perlu dilakukan simulasi kebijakan secara simultan dengan kombinasi perubahan variabel endogen maupun variabel eksogen lainnya. Salah satu variabel endogen yang layak digunakan untuk kombinasi simulasi adalah variabel Pengambilan Kredit (PKM).

### 6.5. Dampak Perubahan Daerah Pemasaran Produk

Perubahan daerah pemasaran produk dapat dilakukan oleh pemerintah dengan memperbaiki kelembagaan pemasaran produk dan sarana transportasi, antara lain dengan memberikan kesempatan kepada usaha kecil untuk mengikuti kegiatan pameran dagang, pelatihan maupun lokakarya (workshop) baik di tingkat regional ataupun nasional, serta memberikan subsidi terhadap transportasi umum bagi produk-produk usaha kecil. Kesempatan untuk mengikuti pameran dagang ini bagi usaha kecil akan mendorong kemampuan daya saing produk, sehingga mampu menembus pasar regional, nasional, atau bahkan pasar ekspor. Kegiatan semacam ini secara tidak langsung juga dapat mensinergikan usaha kecil dengan pelaku usaha menengah maupun besar.

Simulasi perubahan daerah pemasaran produk ini dilakukan dengan menggunakan variabel Dummy Pemasaran Produk (DPP). Dummy pemasaran produk juga mempunyai arti yang penting dalam meningkatkan jumlah pengambilan kredit, karena usaha kecil yang mempunyai wilayah atau daerah pemasaran produk yang lebih luas diharapkan akan mampu meningkatkan jumlah (kuantitas) penjualan yang lebih besar karena mempunyai pasar yang lebih luas.

Hasil simulasi 6 yaitu perubahan daerah pemasaran produk dari hanya wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah menjadi wilayah pemasaran produk hingga mencakup juga wilayah Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta dan sekitarnya, diharapkan mempunyai dampak positif terhadap seluruh variabel endogen. Dampak terbesar terjadi pada tiga variabel endogen yaitu: Pendapatan Usaha (PEND) oleh usaha kecil meningkat 16.14 persen, Pengeluaran Pendidikan dan Sosial (PPKS) meningkat 4.80 persen, dan Penerimaan Usaha (PENU) meningkat 4.60 persen. Dari simulasi ini terlihat bahwa perluasan daerah pemasaran akan mampu mendorong peningkatan omset penjualan, sehingga penerimaan usaha dan pendapatan usaha meningkat.

Sedangkan simulasi 7 perubahan daerah pemasaran produk dari wilayah pemasaran yang mencakup hingga Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta dan sekitarnya menjadi hanya wilayah pemasaran produk di Yogyakarta dan Jawa Tengah, juga akan mempengaruhi variabel-variabel endogen lainnya. Hasil simulasi ini memberikan dampak yang negatif terhadap seluruh variabel endogen. Dampak terbesar terjadi pada tiga variabel endogen yaitu: pendapatan usaha (PEND) oleh usaha kecil berkurang 18.45 persen, pengeluaran pendidikan (PPKS) berkurang 5.48 persen, dan penerimaan usaha (PENU) berkurang 5.26 persen. Keadaan ini menunjukkan bahwa pada saat sekarang ini, daerah pemasaran produk masih cukup besar terkonsentrasi di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah.

## 6.6. Dampak Kombinasi Simulasi Kebijakan

Simulasi 8 adalah kombinasi simulasi 2 dan simulasi 5, yaitu untuk melihat dampak kenaikan Pengambilan Kredit (PKM) sebesar 100 persen dan kenaikan Harga Jual Produk (PO) sebesar 10 persen secara simultan. Dampak dari simulasi ini adalah adanya kenaikan variabel-variabel endogen lainnya, dengan dampak paling besar pada kenaikan Modal Usaha (MOUS) sebesar 51.07 persen, sedangkan Total Biaya Produksi (TBP) meningkat 17.10 persen, Penerimaan Usaha (PENU) meningkat 17.03 persen, dan Pendapatan Usaha (PEND) meningkat 16.84 persen.

Adanya kombinasi simulasi dengan melakukan perubahan secara simultan pada dua variabel, yaitu kenaikan pengambilan kredit dan kenaikan harga jual produk, akan terlihat dampaknya pada kenaikan lebih tinggi di beberapa variabel endogen, terutama variabel penerimaan usaha, pendapatan usaha, dan total biaya produksi.

Sedangkan skenario 9 meliputi simulasi terhadap dampak kebijakan kenaikan pengambilan kredit sebesar 100 persen dan perluasan wilayah pemasaran dari hanya di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah menjadi wilayah pemasaran mencakup Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta dan sekitarnya. Dampak dari simulasi ini adalah kenaikan variabel-variabel endogen lainnya secara lebih signifikan, terjadi peningkatan modal usaha sebesar 51.07 persen, total biaya produksi meningkat 17.10 persen, sedangkan penerimaan usaha meningkat 20.65 persen, dan pendapatan usaha meningkat sebesar 30.18 persen. Simulasi ini menggabungkan perubahan pada variabel pengambilan kredit dan dummy pemasaran produk.

Dari hasil simulasi terdapat kenaikan variabel-variabel endogen lainnya, yang lebih tinggi dibandingkan dengan simulasi sebelumnya. Hal ini karena pada simulasi 6 sebelumnya, yaitu perluasan daerah pemasaran produk hingga mencakup wilayah Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta dan sekitarnya, juga terjadi kenaikan yang besar pada variabel pendapatan usaha dan penerimaan usaha.

Skenario 10 adalah simulasi yang digunakan untuk melihat dampak kebijakan kenaikan pengambilan kredit sebesar 100 persen, kenaikan harga jual produk sebesar 10 persen dan perluasan wilayah pemasaran dari hanya di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah menjadi wilayah pemasaran mencakup Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta dan sekitarnya. Dampak dari kebijakan ini akan menaikkan variabel-variabel endogen lainnya secara lebih signifikan, terjadi kenaikan modal usaha sebesar 51.07 persen, total biaya produksi meningkat 17.10 persen, sedangkan penerimaan usaha meningkat 21.35 persen, dan pendapatan usaha meningkat tajam 32.75

persen. Sedangkan pengeluaran untuk penggunaan bahan baku meningkat 16.69 persen, pengeluaran untuk penggunaan tenaga kerja meningkat 22.23 persen, dan pengeluaran untuk penggunaan bahan bakar meningkat 14.43 persen. Pada skenario ini simulasi yang dilakukan pada tiga variabel sekaligus, memberikan dampak yang besar terhadap semua variabel endogen lainnya.

## 6.7. Rekapitulasi Simulasi Kebijakan

Untuk memberikan gambaran simulasi kebijakan yang telah dibuat, akan disajikan rangkuman atau rekapitulasi yang merupakan ikhtisar dari seluruh simulasi kebijakan. Dari tabel dibawah terlihat bahwa delapan simulasi kebijakan yaitu: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, dan 10 merupakan simulasi pilihan untuk melakukan kebijakan. Hal ini berarti delapan alternatif kebijakan tersebut akan memberikan dampak kenaikan terhadap seluruh variabel endogen, yaitu: pengambilan kredit, modal usaha, penggunaan bahan baku, penggunaan tenaga kerja, penggunaan bahan bakar, total biaya produksi, penerimaan usaha, pendapatan usaha, pengeluaran pendidikan dan sosial, tabungan, dan konsumsi.

**Tabel 14.** Presentasi Perubahan Nilai Rata-rata Variabel Endogen Akibat Beberapa Simulasi Kebijakan

Variabel	Nilai Dasar	Simulasi Kebijakan (%)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pengambilan Kredit (PKM)	16 282 049	25.45	100.00	63.41	-40.35	0.28	1.70	-1.95	100.00	100.00	100.00
Modal Usaha (MOUS)	31 887 605	12.99	51.07	32.38	-20.60	0.14	0.87	-0.99	51.07	51.07	51.07
Penggunaan Bahan Baku (PBM)	233 910 000	4.25	16.69	10.58	-6.73	0.04	0.28	-0.33	16.69	16.69	16.69
Penggunaan Tenaga Kerja (PTK)	27 517 423	5.66	22.23	14.09	-8.97	0.06	0.38	-0.43	22.23	22.23	22.23
Penggunaan Bahan Bakar (PBB)	17 275 175	3.67	14.43	9.15	-5.82	0.04	0.25	-0.28	14.43	14.43	14.43
Total Biaya Produksi (TBP)	278 700 000	4.35	17.10	10.84	-6.90	0.05	0.29	-0.33	17.10	17.10	17.10
Penerimaan Usaha (PENU)	382 730 000	4.15	16.33	10.36	-6.59	0.74	4.60	-5.26	17.03	20.65	21.35
Pendapatan Usaha (PEND)	104 030 000	3.63	14.28	9.06	-5.76	2.61	16.14	-18.45	16.84	30.18	32.75
Tabungan (TABS)	4 871 744	0.48	1.88	1.19	-0.76	0.34	2.12	-2.42	2.21	3.97	4.30
Konsumsi (PKON)	22 357 864	0.32	1.25	0.79	-0.51	0.23	1.42	-1.62	1.48	2.65	2.87
Pengeluaran Pendidikan dan Sosial (PPKS)	6 204 833	1.08	4.24	2.69	-1.71	0.77	4.80	-5.48	5.00	8.97	9.73

Sumber: hasil olah data

### Keterangan Simulasi Kebijakan :

1. Penurunan suku bunga kredit sebesar 20 persen.
2. Kenaikan pengambilan kredit sebesar 100 persen.
3. Perubahan sumber kredit dari non bank menjadi sumber kredit yang berasal dari bank (dummy = 1)
4. Perubahan sumber kredit dari bank menjadi sumber kredit dari non bank (dummy = 0)
5. Kenaikan harga jual produk sebesar 10 persen
6. Perluasan daerah pemasaran produk dari hanya di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah menjadi wilayah pemasaran mencakup Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta dan sekitarnya (dummy = 1)
7. Perubahan daerah pemasaran produk dari mencakup wilayah Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta dan sekitarnya, menjadi hanya di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah (dummy = 0)
8. Kombinasi simulasi 2 dan simulasi 5.
9. Kombinasi simulasi 2 dan simulasi 6.
10. Kombinasi simulasi 2, simulasi 5 dan simulasi 6.

Apabila tujuan utama kebijakan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan nilai rata-rata variabel endogen pengambilan kredit oleh usaha kecil, maka alternatif kebijakan simulasi 1 dan simulasi 3 yaitu penurunan suku bunga kredit sebesar 20 persen, dan perubahan sumber kredit dari non bank menjadi sumber kredit dari bank, adalah merupakan pilihan yang terbaik, yaitu akan meningkatkan pengambilan kredit oleh usaha kecil masing-masing sebesar 25.45 persen dan 63.41 persen. Alternatif ini sangat erat berkaitan dengan kebijakan di bidang moneter khususnya perbankan.

Sedangkan apabila tujuan utama kebijakan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan nilai rata-rata variabel endogen penerimaan usaha dan pendapatan usaha, serta maka seluruh variabel endogen lainnya, maka alternatif kebijakan pilihannya adalah simulasi 9 dan 10. Simulasi 9 kenaikan pengambilan kredit sebesar 100 persen, perubahan dummy wilayah pemasaran hingga Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jakarta sekitarnya, akan meningkatkan penerimaan usaha sebesar 20.65 persen dan meningkatkan pendapatan usaha sebesar 30.18 persen.

Simulasi 10 kenaikan pengambilan kredit sebesar 100 persen, kenaikan harga jual produk sebesar 10 persen, dan perubahan dummy wilayah pemasaran hingga Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jakarta sekitarnya, akan meningkatkan penerimaan usaha sebesar 21.35 persen dan meningkatkan pendapatan usaha sebesar 32.75 persen. Alternatif kebijakan pada simulasi 9 dan simulasi 10 ini erat berkaitan dengan kebijakan di perbankan, penciptaan iklim usaha yang kondusif, dan kelembagaan pemasaran. Karena itu kebijakan simultan ini memerlukan koordinasi yang baik antar kementerian terkait dan pihak perbankan, sehingga implementasi kebijakan di lapangan dapat dirasakan langsung oleh usaha kecil.

## **7. PENUTUP**

### **7.1. Kesimpulan**

1. Kredit mikro dan kecil berpengaruh terhadap penerimaan usaha yang merupakan indikator kinerja usaha kecil. Penerimaan usaha merupakan komponen utama pendapatan bersih usaha yang akan mendorong peningkatan terhadap pengeluaran untuk pendidikan dan sosial, konsumsi, dan tabungan yang dilakukan usaha kecil.
2. Kredit mikro dan kecil yang diambil oleh usaha kecil ini akan meningkat dengan adanya penurunan suku bunga kredit, sehingga akan menambah modal usaha. Peningkatan modal usaha akan meningkatkan penggunaan bahan baku, bahan bakar dan tenaga kerja, sehingga meningkatkan penerimaan usaha.
3. Kebijakan kenaikan pengambilan kredit oleh usaha kecil akan memberikan dampak kenaikan paling besar berturut-turut pada: modal usaha, penggunaan bahan baku, penerimaan usaha, dan pendapatan usaha. Sedangkan kombinasi kebijakan kenaikan pengambilan kredit oleh usaha kecil, kenaikan harga jual produk, dan perluasan wilayah pemasaran hingga mencapai Jatim, Jabar, Jakarta dan sekitarnya secara bersamaan, akan memberikan kenaikan paling besar berturut-turut pada: modal usaha, pendapatan usaha, penerimaan usaha, dan penggunaan bahan baku.

### **7.2. Implikasi Kebijakan**

Beberapa implikasi kebijakan yang dapat dimunculkan.

1. Besarnya respon yang ditunjukkan oleh suku bunga kredit terhadap kredit yang diambil oleh usaha kecil, perlu diikuti dengan kebijakan perbankan antara lain dengan memperbanyak skim kredit dengan suku bunga yang rendah, sehingga dapat menjadi sumber tambahan modal usaha yang kompetitif bagi usaha kecil. Selain itu pemerintah dan perbankan perlu terus mengembangkan berbagai jenis skim kredit yang mampu mengakomodasi kondisi usaha kecil, dengan memberikan kelonggaran atau insentif dari sisi agunan (collateral) dan memperluas jangkauan kredit tersebut hingga mencapai wilayah sentra-sentra usaha kecil yang berada di perdesaan.

2. Untuk meningkatkan kinerja usaha kecil terutama usaha kecil yang telah layak usaha (feasible) dan lokasinya berdekatan dengan bank dan sudah memiliki akses yang baik terhadap bank (bankable), perlu didorong dan difasilitasi agar dapat memperoleh skim kredit baru dari bank sehingga mendapatkan pinjaman yang lebih besar, agar dapat memenuhi kebutuhan modal usaha yang semakin meningkat, antara lain dengan mempermudah prosedur pinjaman dan memperbesar plafon kredit.
3. Untuk usaha kecil yang masih mengandalkan sumber kredit atau pinjaman dari lembaga non bank (koperasi simpan pinjam dan sumber pinjaman lainnya), pemerintah perlu terus mendorong keberadaan dan keberlanjutan lembaga non bank tersebut melalui penguatan sumber dan struktur pendanaan lembaga tersebut, penguatan kelembagaan, dan pengaturan (regulasi) yang jelas, sehingga mampu menjangkau usaha kecil yang telah feasible tapi belum bankable, atau usaha lainnya yang produktif belum tapi belum feasible.
4. Saran untuk penelitian lanjutan adalah agar dilakukan penelitian tentang, (a) peranan kredit terhadap peningkatan kinerja usaha kecil, dengan membuat disagregasi berdasarkan: karakteristik wilayah perdesaan dan perkotaan, dan (b) peranan kredit terhadap peningkatan kinerja usaha kecil di beberapa jenis usaha diluar usaha makanan olahan, seperti: minuman, tekstil dan pakaian (garmen), kerajinan kulit dan kayu, atau pertanian.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, B., (2006), Perbankan Sepatutnya Lebih Serius Garap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Kompas, 10 Maret 2006.
- Adam, E.E. and J.E. Ronald, (1986), Production and Operations Management: Concepts, Models and Behavior. Third Edition. Prentice-Hall International, London.
- Arsyad, L. 2008. Lembaga Keuangan Mikro: Institusi, Kinerja, dan Sustainabilitas. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Anderson, C.L., A. Locker and R. Nugent, (2002), "Microcredit, Social Capital, and Common Pool Resources", World Development Journal, 30(1), pp. 29-42.
- Ashari, (2009a), "Optimalisasi Kebijakan Kredit Program Sektor Pertanian di Indonesia", Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian, 7(1), pp. 21-42.
- \_\_\_\_\_, (2009b), "Pendirian Bank Pertanian di Indonesia: Apakah Agenda Mendesak", Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian, 8(1), pp. 13-27.
- Asian Development Bank, (2010), Microfinance: Definition, Sources and Problems. <http://microfinancehub.com/2010/01/31/what-is-microfinance-definition-sources-problems>.
- Badan Pusat Statistik, (2006), Sensus Ekonomi Tahun 2006, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Semarang, (2003), Direktori Industri Kecil Jawa Tengah 2003. Badan Pusat Statistik, Semarang.
- \_\_\_\_\_, (2006), Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2006, Badan Pusat Statistik, Semarang.
- \_\_\_\_\_, (2007), Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2007. Badan Pusat Statistik, Semarang.
- \_\_\_\_\_, (2009), Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2009. Badan Pusat Statistik, Semarang.
- Baker, C.B., (1968), "Credit in the Production Organization of the Firm", American Journal of Agricultural Economics, 50(3), pp. 507-520.

- Bank Indonesia, (2005), Hasil Penelitian Profil Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Bank Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, (2006), Laporan Perekonomian Indonesia 2006, Bank Indonesia, Jakarta.
- Bank Indonesia Semarang, (2008), Kajian Ekonomi Regional Provinsi Jawa Tengah: Profil UMKM Peserta Jateng Fair 2008, Bank Indonesia, Semarang.
- Becker, G.S., (1976), *The Economic Approach to Human Behavior*, The University of Chicago Press, Chicago.
- Chaves, R.A. and C. Gonzales-Vega, (1996), "The Design of Successful Rural Financial Intermediaries", *World Development Journal*, 24(1), pp. 77-94.
- Dharma, S., (2005), *Manajemen Kinerja: Falsafah Teori dan Penerapannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Evenson, R.E., (1976), "On The New Household Economics", *Journal of Agricultural Economics and Development*, 6 (1), pp. 87-107.
- Fariyanti, A., (2008), "Perilaku Ekonomi Rumah tangga Petani Sayuran dalam Menghadapi Risiko Produksi dan Harga Produk di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung", Disertasi Doktor, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Firdaus, H.R., (2004), *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasi*, Alfabeta, Bandung.
- Hasibuan, M., (2008), *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Henderson, J.M. and R.E. Quandt, (1980), *Microeconomics Theory, A Mathematical Approach*, Third Edition. McGraw-Hill International Company, Tokyo.
- Hollis, A. and A. Sweetman, (1998), "Microcredit: What Can We Learn from the Past?", *World Development Journal*, 26(10), pp. 34-56.
- Hyman, D.N., (1997), *Microeconomics*, Fourth Edition. Irwin / McGraw-Hill International Company, New York.
- Intriligator, M., (1996), *Econometric Models, Techniques and Applications*, Second Edition. Prentice-Hall, New Jersey.
- Kamerschen, D., (1984), *Money and Banking*, Eighth Edition. South-Western Publishing, Cincinnati, Ohio.
- Kemenkop dan UKM., (2006), *Statistik Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Tahun 2004-2005*, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, (2009), *Statistik Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Tahun 2007-2008*, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Jakarta.
- Koutsoyiannis, A., (1977), *Theory of Econometrics: An Introductory Exposition of Econometric Methods*, Second Edition. The Macmillan Press Ltd, London.
- Krause, K.R., (1969), "Application of the Financial Management Function in the Family Size Farm Firm", *American Journal of Agricultural Economics*, 51(5), pp. 1536-1542.
- Kuncoro, M., (2003), "Usaha Kecil di Indonesia: Profil, Masalah dan Strategi Pemberdayaan", <http://website.mudrajad.com/journals>.
- Kuntjoro, (1983), "Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembayaran Kembali Kredit Bimas Padi: Studi Kasus di Kabupaten Subang Jawa Barat", Disertasi Doktor, Fakultas Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

- Kusnadi, N., (1990), "Penyediaan dan Penggunaan Kredit pada Usahatani Dampak "Model Farm" di Wilayah Hulu DAS Citanduy", Tesis Magister, Fakultas Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Kusnadi, N., (2005), "Perilaku Ekonomi Rumah tangga Petani dalam Pasar Persaingan Tidak Sempurna di Beberapa Provinsi di Indonesia", Disertasi Doktor, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Lains, A., (2006), *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi*, Jilid II, Penerbit LP3ES, Jakarta.
- Ledgerwood, J., (1999), *Microfinance Handbook: An Institutional and Financial Perspective*, The World Bank, Washington D.C.
- Llanto, G.M., (2007), "Overcoming Obstacles to Agricultural Microfinance: Looking at Broader Issues", *Asian Journal of Agriculture and Development*, 4(2), pp. 23-40.
- Manurung, (2005), *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Morduch, J., (2000), "The Microfinance Schism", *World Development*, 28(4), pp. 617-629.
- Nuridin, A., (2007), *Membangun Bank UMKM : Concepts and Better Practices*, IRPA, Jakarta.
- Nurmanaf, A.R., (2007), "Lembaga Informal Pembiayaan Mikro Lebih Dekat dengan Petani", *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, 5(2), hlm. 99-109.
- Nuswantara, B., (2009), "Pengaruh Kredit Mikro dan Kecil Terhadap Kinerja Usaha Kecil", *Jurnal Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Indonesia*, 19(2), hlm. 78-97.
- Nuswantara, B., (2012), "Peranan Kredit Mikro dan Kecil Terhadap Kinerja Usaha Kecil dan Perekonomian Wilayah di Provinsi Jawa Tengah", Disertasi Doktor, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Olivares-Polanco, F.J., (2005), "Commercializing Microfinance and Deeping Outreach? Empirical Evidence from Latin America", *Journal of Microfinance*, 7(2), pp. 63-110.
- Otero, M., (1999), "Bringing Development Back, into Microfinance", *Journal of Microfinance*, 1(1), pp. 98-107.
- Pindyck, R.S. and D.L. Rubinfeld, (1991), *Econometric Models and Economic Forecast*, Third Edition. Mc Graw-Hill, Inc. New York.
- Pindyck, R.S. and D.L. Rubinfeld, (2001), *Microeconomics*, Fifth Edition. Prentice-Hall Inc. Upper Saddle River, New Jersey.
- Priyarsono, D.S., (2011), *Dari Pertanian ke Industri: Analisis Pembangunan dalam Perspektif Ekonomi Regional*, IPB Press, Bogor.
- Rachmina, D., (1994), "Analisis Permintaan Kredit pada Industri Kecil: Kasus Jawa Barat dan Jawa Timur", Tesis Magister, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Radnor, Z.J. and D. Barnes, (2007), "Historical Analysis of Performance Measurement and Management in Operations Management", *International Journal of Productivity and Performance Management*, 56(5/6), pp. 384-396.
- Rahman, A., (1999), "Micro-credit Initiatives for Equitable and Sustainable Development: Who Pays?", *World Development Journal*, 27(1), pp. 42-61.
- Ray, D., (1998), *Development Economics*, Princeton University Press, New Jersey.
- Raynor, J., (2003), "The Impact of Large Capital Infusion to Community Development Credit Unions", *Journal of Microfinance*, 5(1), pp. 71-97.

- Rhyne, E., (2009), *Microfinance for Bankers and Investors: Understanding the Opportunities and Challenges of the Market at the Bottom of the Pyramid*, McGraw-Hill, New York.
- Rivai, V. dan A.P.Veithzal, (2007), *Credit Management Handbook: Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Rose, P.S., (1999), *Commercial Bank Management, Fourth Edition*. Irwin McGraw-Hill, Boston.
- Schreiner, M., (2002), "Aspects of Outreach: A Framework for Discussion of the Social Benefits of Microfinance", *Journal of International Development*, 14(5), pp. 591-603.
- Seibel, H.D., (2003), "History Matters in Microfinance", *International Journal of Microfinance and Business Development*, 14(2), pp. 10-12.
- Sinaga, B.M., (1989), "Econometric Model on the Indonesian Hardwood Products Industry: A Policy Simulation Analysis", Ph.D Dissertation, University of the Phillipines at Los Banos, Los Banos.
- Syukur, M., (2002), "Analisis Keberlanjutan dan Perilaku Ekonomi Peserta Skim Kredit Rumahtangga Miskin", Disertasi Doktor, Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Syukur, M., Sugiarto, Hendiarto, dan Wiryono, B., (2003), "Analisa Rekayasa Kelembagaan Pembiayaan Usaha Pertanian", Laporan Penelitian, Puslitbang Sosek Pertanian, Badan Litbang Pertanian.
- Tambunan, M., (2004), "Usaha Kecil Menengah (UKM) dibawah Pemerintahan SBY-JK (2004-2009): Momentum Baru Menjadikan UKM Berdaya Saing dan Naik Kelas?", *Jurnal Infokop*, 25(10), hlm. 21-43.
- Tambunan, T., (2009), *UMKM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Triandaru, S dan T. Budisantoso, (2007), *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- White, B., (1990), *Agroindustri, Industrialisasi Pedesaan dan Transformasi Pedesaan*, Sekindo Eka Jaya, Jakarta.
- Wibisono, D., (2006), *Manajemen Kinerja: Konsep, Desain, dan Teknik Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Wijono, W., (2005), "Perberdayaan Lembaga Keuangan Mikro sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan", *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan. Edisi Khusus*, 9(4), pp. 86-100.
- Wirawan, (2009), *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia: Teori, Aplikasi dan Penelitian*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Yaron, J., McD.P. Benjamin Jr and G.L. Pipek, (1997), "Rural Finance: Issues, Design, and Best Practises", *Environmentally and Socially Sustainable Development Studies and Monographs Series 14*. The World Bank, Washington, D.C., pp.87
- Yunus, M. dan K. Weber, (2008), *Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan: Bagaimana Bisnis Sosial Mengubah Kehidupan Kita*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

## **PENERAPAN NILAI INTEGRITAS DAN PERSPEKTIF GENDER DALAM PERILAKU BERETIKA**

Iin Mayasari  
Iyus Wiadi, Anita Maharani, Rini S. Pramono

**Management Study Program  
Faculty of Economics and Business  
Universitas Paramadina Jakarta  
Email: iin.mayasari@yahoo.com**

### **Abstract**

This study aimed to determine the effect of the value of integrity and gender in ethical behavior. This study uses a framework of ethical theory to explain the personal aspect in influencing ethical behavior. Respective values of integrity, gender, and ethical conduct have measurements. Research method used survey by sending questionnaires to the active workers in college and banking. This survey was preceded by the implementation of focus group discussion to learn about the value of integrity and understanding of the application of applying a gender perspective. The main data obtained by distributing questionnaires to the respondents who worked as a lecturer at universities and employees working in banking. The main data obtained by distributing questionnaires to the respondents who worked as a lecturer at universities and employees working in banking. Total of 300 questionnaires were distributed. Number of questionnaires were used for further analysis was 278. The results showed that the value of integrity affect ethical behavior for both lecturers and banking employees, but only gender influence on the ethical behavior of employees in banking.

Keywords: value of integrity, gender perspective, ethical behavior

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perilaku beretika merupakan aspek penting dalam menunjang sebuah keberlangsungan hidup individu dan organisasi. Organisasi bisa bertahan dalam waktu yang lama karena dukungan pelaksanaan etika yang baik dalam organisasi. Pelaksanaan etika bisa dilakukan baik di level individu maupun level organisasi. Pelaksanaan etika di level individu menunjukkan tidak adanya pelanggaran kode etik atau tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dari para karyawan di segala level manajerial yang bekerja. Pelaksanaan etika di level organisasi misalnya penerapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap para stakeholdernya. Meskipun pelaksanaan etika individu merupakan bagian kecil dari organisasi, karyawan merupakan aspek agregat yang menunjang keberlangsungan organisasi.

Pelaksanaan etika yang baik dalam organisasi sebagai sebuah entitas bisnis memiliki sejumlah keuntungan yang bisa diperoleh organisasi itu sendiri. Pertama, perusahaan akan memperoleh dukungan dari berbagai komponen stakeholdernya yang meliputi karyawan, investor, konsumen, pemerintah, pemasok, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat (Yang & River, 2009). Para komponen stakeholder ini akan memberikan dukungan moral dan material bagi terlaksananya perilaku beretika. Konsumen juga memiliki persepsi positif terhadap perilaku beretika perusahaan dengan demikian akan menciptakan sikap positif dan perilaku positif yaitu memiliki loyalitas yang tinggi terhadap produk atau jasa yang ditawarkan oleh organisasi (Roman & Ruiz, 2005; Kim & Rader, 2010).

Kedua, perilaku yang beretika bisa menciptakan praktik-praktik bisnis yang beretika pula. Dengan demikian, kondisi ini akan menciptakan iklim organisasi yang baik. Iklim organisasi yang ditunjukkan dengan meningkatnya rasa peduli karyawan terhadap organisasi dan kepuasan kerja karyawan meningkat (Koh & Boo, 2001; Leung, 2008). Ketiga, perilaku beretika juga memengaruhi terciptanya suatu sikap kerja yang positif yaitu karyawan memiliki komitmen organisasi yang baik. Komitmen di sini diartikan sebagai suatu rasa untuk memiliki pengorbanan yang tinggi bagi pelaksanaan kerja yang baik dan keinginan untuk bisa tinggal lebih lama dalam suatu organisasi.

Begitu sebaliknya, apabila perilaku tidak beretika banyak terjadi dalam organisasi, maka organisasi akan menerima risiko buruk. Penelitian Pelletier dan Bligh (2008) menunjukkan bahwa organisasi yang memiliki catatan buruk akan perilaku tidak beretika misalnya nepotisme, pemimpin yang melakukan pelanggaran kode etik, diskriminasi kerja akan menciptakan reaksi emosional dari karyawannya. Reaksi emosional bisa berupa sinisme yaitu sikap yang ditunjukkan rasa kecewa, marah; pesimisme yaitu sikap tidak percaya bahwa organisasi mampu menangani perilaku tidak beretika, dan paranoid yaitu sikap tidak percaya dan takut akan keberlangsungan kerja dalam organisasi. Dengan demikian, karyawan yang bekerja berniat akan meninggalkan organisasi.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh ethisphere (ethisphere.com, 2010), perusahaan yang paling beretika adalah perusahaan yang mampu menerapkan kategori-kategori berikut: corporate citizenship and responsibility, corporate governance, inovasi yang memberikan kontribusi terhadap kemaslahatan masyarakat publik, kepemimpinan di dalam industri yang diturunkan dari pimpinan puncak, rekam jejak reputasi dan penetapan regulasi yang tegas, dan memiliki program sistem internal yang memastikan terlaksananya kehidupan beretika. Hasil studi ini mengungkapkan perusahaan-perusahaan yang berhasil memenuhi kategori di atas dengan sangat baik, di antaranya untuk perusahaan otomotif yakni Ford Motor Company, perbankan yakni Rabobank, perusahaan pakaian yakni Nike, perusahaan kosmetik yakni Kao dan sebagainya. Peningkatan ini dimaksudkan untuk menampilkan perusahaan-perusahaan yang tidak sekedar menetapkan janji untuk berperilaku etika saja, namun juga menerapkan dalam kehidupan berbisnis.

Menariknya dalam studi yang dilakukan oleh ethisphere (2010) di atas yakni, peningkatan ini dilakukan oleh beberapa pihak, yakni jaksa agung, profesor dari beberapa perguruan tinggi, Pejabat Pemerintahan dan para pimpinan perusahaan. Hal ini menunjukkan adanya perhatian penuh mengenai perilaku beretika di dunia bisnis dari sudut pandang praktisi maupun akademisi.

Konsep perilaku beretika penting untuk dipahami baik dari sisi akademis dan praktisi. Dari sisi akademis, bisa dipahami mengenai kajian penelitian terdahulu berkaitan dengan konsep perilaku beretika beserta variabel yang memengaruhinya sudah diuji secara empiris. Dengan demikian, pemahaman mengenai aspek yang memengaruhi perilaku beretika bisa dijadikan aspek referensi dalam menguji lebih lanjut suatu aspek pada perilaku beretika. Dari sisi praktisi, pemahaman pentingnya variabel-variabel yang memengaruhi perilaku beretika bisa dimanfaatkan untuk membuat perumusan kebijakan dalam organisasi untuk mencegah terjadinya perilaku yang tidak beretika.

Aspek-aspek yang diteliti pada penelitian terdahulu untuk menjelaskan perilaku beretika meliputi aspek nilai (Pater & Van Gils, 2003; Vadi & Jaakson, 2006), pemimpin (Brown et al., 2005; Davis & Rothstein, 2006), kode etik (O'Dwyer & Madden, 2006; Stevens, 2008; Weeks & Nantel, 2004), iklim organisasi (Jaramillo, et al., 2005; Martin & Cullen, 2006), iklim etika (Ahmed & Machold, 2004; Schwepker, 2005; Mayasari, 2008); program etika (McKendall et al., 2002); strategi kepemimpinan (Grojean et al., 2004); kepribadian locus of control dan persepsi keadilan (Mayasari & Wulandari, 2009).

Kajian menunjukkan bahwa penelitian mengenai nilai integritas masih dilakukan dalam lingkup terbatas. Aspek integritas dianggap sebagai bagian dari nilai secara umum. Integritas juga dianggap sebagai nilai kejujuran sehingga pemaknaan konsep cenderung lebih terbatas (Mayasari et al., 2010). Pemaknaan integritas harus lebih mencakup aspek dimensional. Gosling dan Huang (2010) berpendapat bahwa integritas harus selalu menjadi aspek utama dalam penelitian dan diskusi etika bisnis. Hal ini didukung oleh White dan Lean (2008) bahwa integritas menjadi sumber utama dalam penciptaan iklim organisasi yang beretika. Apabila unsur integritas tidak dimiliki dalam organisasi, organisasi akan menghadapi sejumlah risiko antara lain munculnya perilaku tidak beretika misalnya korupsi, pemimpin yang tidak bisa dijadikan panutan, praktik kerja yang tidak sesuai dengan kode etik.

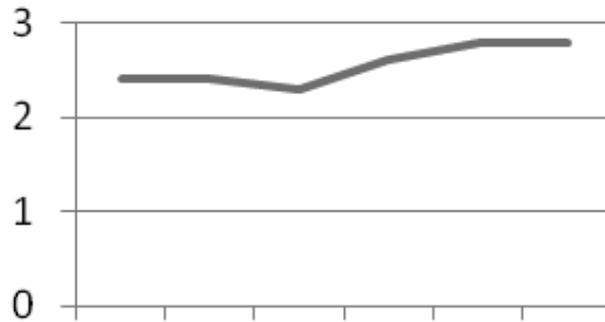
Indikator praktis yang menunjukkan mengenai kurangnya atau hilangnya unsur integritas ditandai dengan munculnya kasus di level organisasi yaitu kasus Enron dan AIG atau kasus di level individu Bernard Madoff dengan skema Ponzi atau bahkan kasus Melinda Dee di Citibank Indonesia. Bersamaan dengan hal tersebut, pentingnya nilai integritas kurang disadari oleh sejumlah pelaku bisnis di Indonesia. Nilai integritas yang kurang tertanam dengan baik dalam organisasi di Indonesia mendapatkan perhatian. Salah satu indikator mengenai hal tersebut yaitu indikator tingkat korupsi. Tingkat korupsi yang cukup tinggi menunjukkan kurangnya nilai integritas dalam setiap melakukan tindakan atau pekerjaan sehari-hari. Berdasarkan hasil studi dari Transparency International-The Global Coalition Against Corruption, menunjukkan bahwa indeks persepsi korupsi di Indonesia selama lima tahun berturut-turut ada pada pada kategori merah yaitu di bawah koefisien 3 yang artinya tidak bersih. Aspek yang diteliti adalah partai politik, pemerintah, parlemen atau perwakilan rakyat, polisi, sektor bisnis, pengadilan, media, sistem pendidikan, lembaga sosial dan militer. Tabel 1.1. menjelaskan ringkasan indeks persepsi korupsi tersebut. Berdasarkan survey tahun 2010, Indonesia menduduki peringkat 110 dari 178 negara dengan koefisien 2,8; survey tahun 2009, Indonesia pada peringkat 111 dari 180 negara dengan koefisien 2,8; survey tahun 2008, Indonesia pada peringkat 126 dari 180 negara dengan koefisien 2,6; survey tahun 2007, Indonesia pada peringkat 143 dari 180 negara dengan koefisien 2,3; survey tahun 2006, Indonesia pada peringkat 130 dari 163 negara dengan koefisien 2,4 serta survey tahun 2005, Indonesia pada peringkat 130 dari 163 negara dengan koefisien 2,4.

**Tabel 1.1.** Indeks Persepsi Korupsi untuk Indonesia

<b>N0</b>	<b>Tahun</b>	<b>Peringkat</b>	<b>Jumlah Negara</b>
1	2010	110	178
2	2009	111	180
3	2008	126	180
4	2007	143	180
5	2006	130	163
5	2005	130	163

Sumber: Transparency International

Gambar 1.1. juga menunjukkan bahwa tingkat persepsi bersihnya korupsi di Indonesia meningkat. Indikator penilaian adalah 0 (semakin tidak bersih) dan 10 (semakin bersih). Namun demikian, hal ini belum menjadi indikator yang baik karena masih ada pekerjaan rumah yang harus dibenahi. Pekerjaan rumah ini merupakan suatu tantangan bagi para semua individu yang terlibat dalam entitas keseluruhan untuk bisa menegakkan nilai integritas. Penelitian ini memfokuskan perilaku individu sebagai penentu perilaku etis dari entitas bisnis dengan memahami dan menerapkan nilai integritas dalam setiap aspek kerja. Meskipun lingkungannya kecil, apabila semua para karyawan yang bekerja menunjukkan perilaku beretika, maka hasilnya akan lebih terasa dan memiliki implikasi positif yang besar. Nilai integritas dianggap sebagai aspek penting dalam menentukan perilaku beretika termasuk di dalamnya perilaku anti korupsi.



Sumber: Transparency International

**Gambar 1.1.** Koefisien Tingkat Kebersihan Korupsi di Indonesia dengan 0 (sangat tidak bersih) dan 10 (sangat bersih)

Selain menekankan pentingnya nilai integritas dalam menciptakan perilaku beretika, penelitian ini juga memfokuskan pada perspektif gender. Perspektif gender dianggap sebagai perspektif yang dapat membantu individu untuk menjalankan perilaku beretika. Kajian literatur terdahulu menunjukkan bahwa perspektif gender dimaknai bahwa ada perbedaan antara pria dan perempuan. Perempuan dianggap lebih bisa memperhatikan aspek etika secara keseluruhan karena perempuan dianggap lebih mementingkan orientasi secara menyeluruh dan memberikan perhatian pada yang lain serta memperhatikan lingkungan di luar perusahaan (Lund, 2008). Tabel 1.2. memberikan gambaran bahwa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perempuan dianggap lebih memiliki orientasi pada perilaku beretika daripada pria.

**Tabel 1.2.** Penelitian Terdahulu tentang Perspektif Gender

No	Peneliti	Topik
1	Gill (2010)	Perempuan lebih memiliki aspek sensitivitas dalam membuat keputusan strategi bisnis, kode etik dan sistem evaluasi.
2	Bear et al. (2010)	Komposisi direktur dengan lebih banyak perempuan memberikan perhatian lebih besar pada pelaksanaan Corporate Social Responsibility.
3	Ahmad dan Seet (2010)	Perempuan lebih memperhatikan aspek praktik bisnis beretika karena menginginkan untuk mempertahankan kejujuran, berusaha menepati janji dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan.
4	Bateman dan Valentine (2009)	Perempuan lebih menggunakan filosofi moral yaitu menjaga harmoni. Filosofi ini menjadi basis pemikiran untuk membuat keputusan.
5	Ibrahim et al. (2009)	Perempuan lebih mematuhi aturan kode etik moral karena ada aspek perhatian dan berkeinginan untuk menjalankan apa yang sudah ditetapkan dalam organisasi untuk kebaikan semua.
6	Atakan et al. (2008)	Perempuan memiliki kecenderungan untuk memiliki niat berperilaku etis karena perempuan memiliki perasaan yang peka terhadap akibat perilaku yang tidak beretika.
7	Daily dan Dalton (2003)	Komposisi perempuan dalam jabatan struktural lebih tinggi memungkinkan perempuan lebih memiliki perspektif luas untuk menyelesaikan masalah sehingga keputusan yang diambil harus memperhatikan konsekuensi secara menyeluruh.

Sumber: hasil olah data

Sebenarnya, perspektif gender tidak bisa dimaknai sebagai orientasi seks yaitu perempuan dan pria. Anggapan bahwa perempuan lebih beretika atau lebih memiliki perhatian tindakan-tindakan yang menghindari terjadi pelanggaran peraturan daripada pria tidak selalu menjadi hal yang utama untuk membedakan perempuan dan pria. Perempuan dan pria dianggap sama-sama beretika hanya orientasi etika lebih berbeda penekanannya. Menurut Hansen (2002), ada hal yang harus ditekankan dalam memahami perspektif gender yaitu gender tidak berkaitan dengan perbedaan seks. Seks berkaitan dengan aspek biologis (Borna & White, 2003). Permasalahan gender muncul karena suara perempuan selama ini tidak mendapat perhatian dari kaum pria. Aspek gender juga berkaitan dengan masalah pria. Perspektif gender lebih untuk menjelaskan aspek orientasi pada maskulinitas dan feminisme. Masing-masing orientasi memiliki keunggulan untuk sama-sama bisa memengaruhi perilaku beretika dengan cara yang berbeda. Penelitian ini lebih mengedepankan perspektif gender dengan memfokuskan pada feminisme. Dalam penelitian ini, subjek penelitian bisa perempuan maupun pria.

## 1.2. Perumusan Masalah dan Definisi Konsep

Masalah nilai integritas menjadi penting dalam memengaruhi perilaku beretika. Perilaku beretika harus selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam kehidupan berorganisasi. Banyak faktor bisa digunakan untuk dijadikan pedoman dalam berperilaku beretika misalnya kepemimpinan, iklim kerja, peraturan organisasi, sanksi hukum yang ketat. Namun, nilai integritas dianggap memiliki multi dimensi untuk bisa menjelaskan perilaku beretika. Nilai integritas tidak hanya mencakup aspek masalah konsistensi perilaku, namun berkaitan dengan moral dan acuan berperilaku.

Integritas didefinisi sebagai kualitas moral pengelolaan diri pada level individu. Menurut Palanski dan Yammarino (2007), integritas memiliki lima makna. Pertama, wholeness (kebulatan atau kesatuan). Integritas merupakan kesatuan antara pikiran, sikap, kata-kata dan perilaku sepanjang waktu. Integritas dengan wholeness ini berorientasi global dan lokal. Baik global dan lokal, seharusnya individu tetap memiliki kesatuan. Kedua, konsistensi dalam keragaman. Ketika individu dihadapkan pada keputusan yang situasinya kompleks karena akan melibatkan banyak pihak, individu tetap konsisten pada pendiriannya. Individu tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain karena harus memutuskan sesuatu berdasarkan desakan dari satu pihak yang belum tentu benar konsekuensi keputusannya. Ketiga, otentik. Individu berusaha untuk menunjukkan bahwa sejatinya orang yang memiliki kesamaan antara ucapan dan perkataan. Kesesuaian antara ucapan dan perkataan tidak hanya muncul karena ada paksaan sosial, namun memang kesesuaian ini sudah tertanam dalam diri seseorang dengan sendirinya. Keempat, konsistensi kata dan tindakan. Konsistensi kata dan tindakan harus sejalan. Individu tidak boleh hanya beretorika, namun harus diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari secara terus-menerus. Dengan demikian, individu akan selalu ingat untuk berbuat baik dengan tidak melanggar peraturan. Kelima, etika dan moralitas. Integritas berkaitan dengan etika dan moralitas.

Moralitas berkaitan dengan pertimbangan segala sesuatu dengan memperhatikan konsekuensinya pada orang lain atau komunitas. Menurut Gosling dan Huang (2010), integritas harus dikaitkan dengan masalah komunitas. Integritas harus memberi dampak pada lingkungan. Konsistensi kata, sikap dan tindakan tidak hanya diterapkan dalam lingkup terbatas, tetapi juga sistem lingkungan di mana individu berada. Ketika melakukan konsistensi ucapan dan tindakan untuk satu hal dalam kehidupan, di sisi lain, konsistensi tersebut juga diterapkan dalam kehidupan misalnya dalam berperilaku etika, menaati peraturan, menghindari dari penyuapan, menghindari dari penipuan.

Moralitas sebagai dimensi dari nilai integritas meliputi 1) kekuatan dan pemahaman moral sebagai refleksi dari apa yang dianggap salah dan benar, 2) resolusi moral dan bisa dipertanggungjawabkan secara publik-kesadaran bahwa masalah individu bisa membawa implikasi publik, 3) komitmen moral dan karakter individu sehingga menjadi pegangan membuat keputusan ketika dihadapi dilema dalam bertindak benar atau salah, 4) koherensi moral berkaitan dengan pertimbangan diri, sikap, ekspresi, harmoni antara prinsip dan praktik. Harmonisasi antara prinsip dan praktik selalu memengaruhi tindakan beretika artinya menghindari perbuatan yang merugikan diri sendiri,

organisasi dan sistem yang lebih besar (Petrick & Quinn, 2000). Oleh karena itu, perumusan masalah pertama adalah ini adalah apakah nilai integritas dapat memengaruhi perilaku beretika?

Selain masalah nilai integritas sebagai aspek penting dalam memahami perilaku beretika adalah mengenai perspektif gender. Perspektif gender diartikan sebagai cara pandang terhadap diri sendiri. Perspektif gender mengutamakan adanya kesamaan kondisi dan situasi bagi perempuan dan pria agar bisa mendapatkan kesamaan peran dalam setiap bidang tanpa pengecualian. Definisi tradisional mengenai gender adalah konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan manusia (Oakley, 2002). Gender merupakan atribut yang diciptakan oleh manusia dan dapat ditukar atau berubah sesuai dengan budaya yang mengikuti. Sifat gender bisa meliputi maskulin dan feminisme. Atribut maskulin tidak hanya dimiliki pria, namun perempuan juga memiliki atribut maskulin, begitu juga sebaliknya, atribut feminisme tidak hanya dimiliki oleh perempuan, tetapi pria juga memiliki atribut feminisme.

Penelitian ini lebih memfokuskan perspektif gender yang lebih memfokuskan aspek feminisme. Perspektif gender memiliki empat aspek yaitu 1) empati, 2) berusaha memelihara, 3) memfokuskan pada perhatian, 4) menekankan pada membangun relasi dengan baik.

Dengan demikian, perumusan masalah kedua adalah ini adalah apakah perspektif gender dapat memengaruhi perilaku beretika?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh aspek nilai integritas dalam menjelaskan perilaku beretika. Ada lima alasan yang mendukung pentingnya nilai integritas.

Pertama, nilai integritas dianggap sebagai kompetensi inti yang dimiliki oleh organisasi (Petrick & Quinn, 2000). Integritas dianggap sebagai sumber daya utama selain modal yang dimiliki oleh organisasi. Kompetensi inti dianggap sebagai suatu daya saing bagi organisasi untuk bisa menunjukkan kinerja baik. Integritas sebagai kompetensi inti bisa menjadi sesuatu yang unik dan dijadikan sebagai identitas organisasi yang memiliki reputasi baik di mata para stakeholder. Integritas menjadi sesuatu yang tidak mudah ditiru karena sudah menjadi bagian melekat dalam organisasi. Nilai integritas yang konsisten diterapkan bisa meningkatkan nilai perusahaan di mata investor (Maak, 2008).

Kedua, nilai integritas mengandung aspek moralitas dan karakter individu (Koehn, 2005). Moralitas berkaitan dengan keyakinan diri bahwa apa yang akan dilakukan merupakan bagian dari suatu sistem komunitas. Individu yang bermoral akan selalu mempertimbangkan konsekuensi tindakannya pada sistem di mana individu tersebut berada. Dengan demikian, moralitas berperan sebagai penuntun dalam menjalankan tindakan seseorang dan menyadarkan segala bentuk konsekuensi yang akan dihadapi. Efek negatif dari tindakan sudah menjadi bagian pertimbangan dalam pelaksanaan tindakan. Rutinitas memahami segala konsekuensi tindakan akhirnya bisa membentuk karakter seseorang. Sosialisasi nilai integritas terus-menerus dalam kehidupan seseorang menjadikan seseorang akan selalu sadar setiap konsekuensi tindakan. Nilai moralitas sebagai bagian dari nilai integritas menjadi ciri khas bagi individu dengan demikian akan selalu mempertimbangkan untuk melakukan perilaku beretika di setiap kesempatan.

Ketiga, nilai integritas memiliki dimensi nilai kejujuran, ketulusan, keadilan, dan kepercayaan (Audi & Murphy, 2006). Dengan memiliki nilai integritas beserta dimensi menyertainya akan memengaruhi seseorang untuk selalu berperilaku etika.

Keempat, nilai integritas yang dimiliki oleh karyawan akan meminimalkan perilaku menyimpang (Dineen, et al., 2006). Perilaku menyimpang ini bisa dideskripsi sebagai perilaku yang tidak pantas atau cenderung mengarah ke suatu agresivitas (Vardi & Wiener, 1996). Perilaku menyimpang ini secara sosial merugikan bagi organisasi. Perilaku ini bisa terjadi karena tidak ada nilai integritas yang melandasinya.

Kelima, bisnis dalam sistem ekonomi merupakan suatu sistem yang tidak berdiri sendiri dan nilai integritas menjadi inti dari pelaksanaan bisnis yang sehat (Brown, 2006). Bisnis berada dalam suatu sistem yang saling tergantung dan memengaruhi. Bisnis berada dalam lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat ini

merupakan pendukung eksistensi organisasi yang terdiri atas konsumen, karyawan yang bekerja di dalam organisasi, masyarakat sekitar, pemerintah, pemasok dan lembaga non-pemerintah. Apabila organisasi melakukan tindakan tidak etis misalnya melakukan pencemaran lingkungan, pembuatan produk yang mengandung bahan kimia, pemimpin organisasi melakukan korupsi, dan sebagainya, lingkungan masyarakat sebagai bagian sistem organisasi juga akan terkena imbasnya. Lingkungan masyarakat ini menjadi tidak percaya. Konsumen tidak akan membeli produk. Pemerintah akan memberikan sanksi. Masyarakat akan melakukan demonstrasi. Semua ini bisa dihindari dengan dimilikinya integritas. Integritas bisa menjadi pedoman dalam menjalankan bisnis dengan cara atau melalui penerapan kode etika dalam organisasi.

Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami adanya pengaruh perspektif gender dalam perilaku beretika. Ada tiga alasan pentingnya feminisme dari perspektif gender untuk menjadi dasar dalam berperilaku beretika.

Pertama, aspek feminisme memfokuskan pada aspek relasi atau pentingnya membangun suatu hubungan yang baik. Setiap keputusan yang dibuat harus mempertimbangkan dampaknya pada hubungan dengan orang lain dan bukan pada kepentingan diri yang sifatnya lebih individualistik. Aspek feminisme lebih berorientasi pada keinginan untuk memelihara (Mayasari & Pramono, 2009). Oleh karenanya, dalam membuat keputusan akan selalu berusaha untuk menjaga harmonisasi dengan semua aspek. Keputusan untuk berperilaku tidak beretika akan mengakibatkan dampak buruk bagi orang-orang di sekitarnya.

Kedua, kesuksesan aktivitas bisnis memang tidak terlepas dari filosofi moral individu yang melatarbelakanginya. Feminisme dianggap memiliki filosofi berpikir yang berbeda. Filosofi ini menunjukkan bahwa cenderung menghindari kekerasan untuk tidak melukai pihak lain. Oleh karena itu, perilaku dengan feminisme dalam keseluruhan tindakan pada umumnya berdasarkan pada aspek kehati-hatian. Pertimbangan lebih memperhatikan pada aspek menyeluruh. Dalam mempertimbangkan setiap keputusan cenderung untuk menghindari tidak melanggar peraturan. Pelanggaran peraturan membawa implikasi negatif pada individu dan lingkungan tempat bekerja.

Ketiga, aspek feminisme menganggap bahwa hal privasi bisa menjadi milik bersama. Masalah yang kecil bisa dijadikan pertimbangan untuk diselesaikan bersama. Feminisme cenderung untuk berorientasi tidak mengabaikan permasalahan kecil menjadi sesuatu yang remeh.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Konsep Perilaku Beretika**

Perilaku beretika seseorang dipengaruhi oleh dua aspek eksternal dan internal. Lingkungan eksternal yaitu lingkungan budaya, lingkungan profesional dan lingkungan industri. Lingkungan budaya bisa meliputi agama, sistem hukum, dan sistem politik; sedangkan lingkungan profesional dan lingkungan industri terdiri atas norma informal, kode formal dan code enforcement.

Selain lingkungan eksternal, lingkungan internal memengaruhi perilaku beretika. Lingkungan internal terdiri atas agama, sistem nilai, karakter moral, perkembangan moral kognitif dan sensitivitas etis.

### **2.2. Konsep Nilai Integritas**

Kapasitas integritas didefinisi sebagai kemampuan individual maupun kolektif untuk proses pengembangan moral awareness, moral deliberation, karakter, dan moral conduct yang menunjukkan sebagai suatu pertimbangan yang seimbang, perkembangan moral dan sistem yang mendukung pembuatan keputusan moral (Petrick & Quinn, 2000). Individu maupun kelompok yang memiliki kapasitas integritas tinggi akan bisa menyelesaikan permasalahan kompleks di antara sistem-sistem yang menekan untuk mengarahkan perbuatan negatif.

Menurut Petrick dan Quinn (2000), ada empat dimensi kapasitas integritas yang mendukung terbentuknya moral progress yaitu:

- 1) Process integrity capacity
- 2) Judgment integrity

- 3) Development integrity capacity
- 4) System integrity capacity

#### Process Integrity Capacity

Keempat dimensi dalam process integrity capacity diharapkan bisa terinternalisasi dalam diri individu dan organisasi. Keempat dimensi dijadikan komitmen untuk bertindak sesuai dengan rerangka etis. Aktivitas bisnis yang berlandaskan pada process integrity capacity akan diwarnai dengan kinerja karyawan yang baik, persepsi publik yang positif, konsumen yang loyal, investor yang loyal dan kinerja keuangan yang positif.

- 1) Moral awareness. Konsep ini adalah kapasitas untuk merasakan dan memiliki sensitivitas berkaitan dengan isu etika yang relevan dalam pembuatan keputusan yang memiliki implikasi pada orang lain. Dalam membuat keputusan harus memperhatikan suara orang atau aspek lain dalam organisasi.
- 2) Moral deliberation. Komponen kedua dari process integrity berkaitan dengan kapasitas untuk mengolah dengan analisis sebuah keputusan. Analisis sebuah keputusan harus mempertimbangkan jangka panjang berkaitan dengan segala risiko dan konsekuensinya.
- 3) Moral character. Pertimbangan moral menjadi bagian karakter individu yang bisa meliputi sejumlah aspek semangat, kejujuran, keadilan, kebaikan bersama, kepercayaan, welas asih, kasih sayang, dan aspek perhatian pada sesama.
- 4) Moral conduct. Tindakan yang bermoral menjadi sesuatu hal yang bisa dilihat dan dijadikan referensi oleh individu yang lain. Tindakan yang bermoral menjadi praktik bisnis yang senantiasa selaku dijadikan rujukan oleh setiap orang dalam organisasi.

#### Judgment Integrity

Judgment integrity merupakan gabungan antara teori dalam manajemen, etika dan hukum yang akhirnya membentuk kebijakan dan praktik bisnis. Teori manajemen yang terlibat adalah rational goal theory, internal process theory, human relations theory, dan open system theory (Petrick & Quinn, 2000). Intinya, penekanan pada aspek rasionalitas akan berdampak pada perbedaan individu. Individu menjadi diabaikan karena demi pencapaian produktivitas kerja yang maksimal. Penekanan pada hubungan antar manusia akan menghambat kemajuan karena terlalu memfokuskan perhatian pada perasaan masing-masing individu.

#### Development Integrity Capacity

Development integrity capacity merupakan perkembangan kognitif terhadap kemampuan memberikan argumen moral secara individual dan kolektif. Argumen ini juga berkaitan dengan memberikan alasan terhadap norma-norma standar dan komitmen untuk menjalankan prinsip etika secara universal. Berdasarkan teori cognitive moral development dari Kohlberg (Donleavy, 2008), ada enam tahapan dalam perkembangan moral individu. Pada tahap pertama, individu akan berperilaku etis apabila takut terhadap hukuman karena berbuat kesalahan. Tahap kedua, berperilaku etis selama ada reward terhadap perilaku tersebut. Tahap ketiga, keinginan berperilaku etis karena dorongan agar diterima dalam masyarakat. Tahap keempat, perilaku beretika didorong karena merasa bagian dari masyarakat luas. Tahap kelima, perkembangan moral individu didorong karena mengadopsi pandangan utilitarianisme atau memiliki kontrak sosial. Oleh karena itu, tahapan ini menunjukkan bahwa individu sudah memiliki kesadaran moral yang cukup tinggi. Tahap kelima, individu memiliki orientasi moral deontologi sehingga setiap tindakan selalu dipertimbangkan dengan memahami segala risiko dan konsekuensinya.

#### System Integrity Capacity

System integrity capacity berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan organisasional yang menguatkan perkembangan moral dalam organisasi dan memudahkan organisasi memberikan rerangka pengembangan lingkungan kerja dengan menguatkan aspek integritas. Penguatan rerangka integritas dalam organisasi dapat

dilakukan melalui sejumlah aktivitas dalam organisasi melalui kepemimpinan bermoral, budaya kerja, strategi, kebijakan etika, dan audit etika.

### 2.3. Perspektif Gender

Gender memainkan peran dalam pemikiran etika. Pemikiran gender oleh Gilligan (Donleavy, 2008) menunjukkan bahwa aspek care atau perhatian pada orang lain telah menjadi panduan bagaimana perempuan menekankan care dalam menyelesaikan dilema etika sedangkan pria memfokuskan nilai konsep keadilan. Gender memfokuskan pada connectedness. Individu tidak bisa membuat keputusan tanpa mempertimbangkan keterikatan dengan pihak lain. Keputusan yang dibuat harus disadari akan memberikan implikasi pada lingkungan lain termasuk masyarakat, rekan kerja dan masyarakat. Selain itu aspek connectedness juga berkaitan dengan rasa tanggung jawab untuk memberikan terbaik kepada tempat individu bekerja atau di manapun berada. Tabel 1.3 menjelaskan dimensi care.

**Tabel 1.3.** Dimensi Care

Dimensi Care	Fokus	Nilai
Caring about	Pengakuan bahwa ada kebutuhan untuk memberikan perhatian.	Atensi, fokus, dan memiliki kepekaan kepada orang lain.
Taking care of	Keinginan dan kapasitas untuk mengerjakan sesuatu di mana perhatian dibutuhkan.	Tanggung jawab
Care-giving	Memberikan perhatian mengenai aktivitas di mana kebutuhan perhatian diharapkan.	Kompetensi, empati
Care receiving	Interaksi antara penerima dan pemberi perhatian	Responsif dan penerimaan

Sumber: Sevenhuijsen (2003)

Tabel 1.3. menunjukkan bahwa dalam perspektif gender yang memfokuskan pada aspek care menunjukkan bahwa aspek ini memiliki keterkaitan kuat dengan masalah perilaku beretika. Ketika individu memutuskan untuk melakukan tindakan tertentu, segala konsekuensi dan risiko sudah memperhatikan implikasinya pada orang lain. Semakin individu memiliki perhatian, empati, tanggung jawab pada orang lain, semakin individu berusaha untuk menghindari dari perilaku yang melanggar etika.

### 2.4. Sintesis Penjelasan Pengaruh Nilai Integritas dan Perilaku Beretika

Nilai integritas merupakan nilai yang dianggap sebagai aspek dasar yang melandasi perilaku seseorang pada jalur etika. Nilai integritas memiliki empat komponen utama yaitu process integrity capacity; judgment integrity, development integrity capacity, dan system integrity capacity. Individu sebagai karyawan dalam organisasi diharapkan memiliki empat dimensi agar selalu berperilaku etis. Dalam process integrity capacity terdapat kemampuan diri untuk memiliki sensitivitas berkaitan dengan isu etika yang relevan dalam pembuatan keputusan yang memiliki implikasi pada orang lain. Setiap keputusan harus mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang berkaitan dengan segala risiko dan konsekuensinya. Nilai integritas diharapkan menjadi bagian karakter individu dan dijadikan referensi oleh individu yang lain. Berkaitan dengan judgment integrity capacity, individu juga harus memperhatikan norma hukum berlaku karena norma hukum yang berlaku ini menjadi dorongan eksternal untuk memiliki kehati-hatian untuk tidak bertindak melanggar peraturan. Dalam mengembangkan nilai integritas, individu

sudah menganggap bahwa moralitas menjadi pegangan setiap saat dalam memutuskan sesuatu dengan demikian individu bisa terhindar dari perilaku tidak beretika. Dengan berlandaskan moralitas, moralitas bisa menjadi pedoman yang dimiliki individu atau kelompok mengenai apa yang benar dan salah serta mempertimbangkan konsekuensi serius, didasarkan pada penalaran yang baik, bukan pada suatu kekuasaan serta tidak memihak. Nilai integritas yang dimiliki juga bisa diperkuat melalui sytem integrity capacity yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan organisasional yang menguatkan perkembangan moral dalam organisasi dan memudahkan organisasi memberikan rerangka pengembangan lingkungan kerja dengan menguatkan aspek integritas. Dengan demikian, nilai integritas bisa mendukung kesesuaian antara sikap, kata dan perbuatan secara konsisten.

## **2.5. Sintesis Penjelasan Pengaruh Perspektif Gender dan Perilaku Beretika**

Perspektif gender memainkan peran dalam pemikiran etika. Perspektif gender memiliki aspek care atau perhatian pada orang lain dan menjadi panduan bagaimana menyelesaikan dilema etika. Perspektif gender didasarkan pada connectedness atau keterkaitan dengan pihak lain. Harmonisasi dengan pihak lain menjadi prioritas utama dengan demikian konflik berusaha untuk dihindari. Oleh karena itu, dalam membuat keputusan, perilaku beretika lebih memperhatikan aspek keterikatan dengan lingkungan. Dengan demikian setiap keputusan akan memperhatikan bagaimana dampaknya bagi orang lain.

## **3. METODE PENELITIAN**

Studi ini menerapkan pendekatan deduktif karena memfokuskan pada pengembangan hipotesis yang didasarkan pada suatu teori. Unit analisis penelitian ini adalah individu sebagai karyawan dalam organisasi. Subjek penelitian adalah karyawan yang bekerja pada organisasi perbankan dan pendidikan. Karyawan pada organisasi perbankan dianggap sebagai individu yang harus memiliki tingkat integritas yang tinggi. Dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari, karyawan ini harus menjaga kepercayaan dari para konsumennya karena konsumen telah menggunakan jasa perbankan. Karyawan ini berasal dari semua level manajerial. Karyawan pada organisasi (universitas) pendidikan dipilih dalam penelitian karena karyawan inilah berinteraksi dengan mahasiswa dan bekerja dalam dunia pendidikan sekaligus mengajarkan pengetahuan tentang tindakan yang beretika. Karyawan merupakan dosen.

Sampling dalam penelitian ini adalah menggunakan non-probability sampling. Pemilihan responden menggunakan convenience sampling. Pemilihan dilakukan dengan memanfaatkan responden berdasarkan prinsip kemudahan untuk memperoleh karyawan sebagai responden. Karyawan yang akan digunakan sebagai responden adalah 300. Jumlah responden untuk organisasi perbankan sebanyak 150 orang sedangkan jumlah responden untuk organisasi pendidikan (universitas) sebanyak 150.

## **4. HASIL ANALISIS STUDI UTAMA**

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan selama hampir dua bulan, yaitu dari pertengahan bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Oktober 2011. Jumlah kuesioner yang disebarakan kepada dosen sejumlah perguruan tinggi di Jakarta adalah 150 eksemplar; sedangkan jumlah kuesioner yang disebarakan kepada karyawan perbankan di Jakarta adalah 150 eksemplar. Tabel 1.1. menunjukkan tingkat pengembalian kuesioner. Dari jumlah tersebut, kuesioner dosen yang kembali dan bisa digunakan selanjutnya adalah 140 eksemplar. Hal ini menunjukkan bahwa, tingkat pengembalian kuesioner penelitian ini sebesar 93 persen. Di sisi lain, kuesioner karyawan perbankan yang kembali dan bisa digunakan selanjutnya adalah 138 eksemplar dengan tingkat pengembalian kuesioner sebesar 92,6 persen.

**Tabel 1.4.** Deskripsi Responden

Variabel	Kategori	Jumlah	Persen (%)
Jenis Kelamin	Pria	129	46,40
	Perempuan	149	53,59
Usia (tahun)	26-30	53	19,06
	31-35	111	39,92
	36-40	47	16,90
	≥ 41	67	24,10
Pendidikan Terakhir	D3	9	3,23
	S1	67	24,10
	S2	193	69,42
	S3	9	3,23
Pekerjaan	Pegawai Perbankan	138	49,64
	Dosen	140	50,35
Lama Bekerja	≤ 1 tahun	32	11,51
	1-3 tahun	67	24,10
	≥ 3 tahun	179	63,66

Sumber: hasil olah data

#### 4.1. Hasil Pengujian Validitas

Pengujian validitas ini dilakukan dengan menggunakan data terpisah. Data dosen dan data karyawan atau pegawai perbankan dianalisis terpisah. Tujuannya untuk mendapatkan penjelasan dari kekuatan masing-masing data. Data dianalisis dengan confirmatory factor analysis melalui SPSS. Confirmatory factor analysis digunakan menguji hubungan indikator yang ada dalam konstruk. Apabila indikator-indikator yang ada dalam kuesioner mengukur konstruk dengan baik, maka indikator-indikator tersebut akan memiliki kekuatan satu sama lain. Oleh karena itu, indikator-indikator dinyatakan valid. Kriteria menentukan indikator yang valid adalah dengan minimal koefisien 0,3 (Hair, Black, Babin & Anderson).

#### 4.2. Hasil Pengujian Validitas Dosen

Pengujian validitas pada menunjukkan keragaman hasil. 24 indikator pengukuran konstruk perilaku beretika menunjukkan bahwa satu indikator tidak valid yaitu PBD5. Indikator ini mengukur "keputusan yang dibuat dalam organisasi selalu berdasarkan untung dan rugi". Indikator ini tidak valid karena disebabkan makna untung dan rugi merupakan konsep yang dirasa tidak jelas. Untung dan rugi di kalangan dosen mungkin tidak bisa diterapkan karena dosen bekerja cenderung berdasarkan motivasi tinggi dan tidak mempertimbangkan untung rugi.

Tabel 1.5. Pengujian Validitas Data Dosen

Konstruk	Butir		Factor Loading	Konstruk	Butir		Factor Loading	
	Jumlah	Kode			Jumlah	Kode		
Perilaku Beretika	24	PBDI1	0,708	Integritas	15	Inte1	0,603	
		PBDI2	0,693			Inte2	<b>0,224</b>	
		PBDI3	0,792			Inte3	0,425	
		PBDI4	0,700			Inte4	0,547	
		PBDI5	0,050			Inte5	0,678	
		PBDL1	0,691			Inte6	0,648	
		PBDL2	0,725			Inte7	0,626	
		PBDL3	0,482			Inte8	<b>0,261</b>	
		PBDP1	0,742			Inte9	0,441	
		PBDP2	0,645			Inte10	0,680	
		PBDP3	0,592			Inte11	0,322	
		PBDR1	0,682			Inte12	0,397	
		PBDR2	0,715			Inte13	-0,310	
		PBDR3	0,705			Inte14	0,638	
		PBDR4	0,653			Inte15	0,504	
		PBDR5	0,785					
		PBTJ1	0,736					
		PBTJ2	0,708					
		PBTJ3	0,609					
		PBDM1	0,451					
		PBDM2	0,535					
		PBPRI1	0,398					
		PBPRI2	0,462					
		PBPRI3	0,569					
	Gender	15	Gen1	0,051				
			Gen2	0,143				
			Gen3	0,121				
Gen4			0,077					
Gen5			0,447					
Gen6			0,614					
Gen7			0,696					
Gen8			0,657					
Gen9			0,715					
Gen10			0,568					
Gen11			0,477					
Gen12			0,525					
Gen13			0,238					
Gen14			0,669					
Gen15			0,462					

Sumber: hasil olah data

Untuk konstruk gender, sejumlah indikator tidak valid yaitu Gen1, Gen2, Gen3, Gen4, Gen5, Gen12. Salah satu indikator tersebut menunjukkan “dalam membuat keputusan, saya mempertimbangkan masukan dari orang lain”, “saya berpendapat bahwa perbedaan pendapat dari banyak orang lain perlu dihargai”. Indikator-indikator gender cenderung belum memiliki pengukuran yang valid. Indikator gender sebenarnya tidak menunjukkan adanya perbedaan pemikiran antara perempuan dan pria. Namun lebih menekankan pada kemauan untuk berbagi pendapat dengan orang lain. Apabila individu mau menerima masukan atau ide dari orang lain, maka paling tidak individu memiliki pandangan berbeda dan ada masukan untuk kebaikan. Namun, indikator-indikator gender ini dimaknai berbeda.

Konstruk integritas juga memiliki tiga indikator yang tidak valid yaitu indikator Inte2, Inte8 dan Inte13. Salah satu indikator yang tidak valid adalah indikator Inte13, yang meminta responden untuk menjawab sebaliknya karena berbentuk reverse. Mungkin saja, responden tidak menyadari atau tidak memahami konsep ini, sehingga indikator ini tidak valid.

#### **4.3. Hasil Pengujian Validitas Karyawan Perbankan**

Tabel 1.6. menunjukkan hasil pengujian validitas karyawan perbankan. Hasil pengujian validitas untuk data perbankan khususnya konstruk perilaku beretika terdapat kesamaan pada pengujian validitas data dosen. Indikator yang digunakan masih sama. 24 indikator pengukuran konstruk perilaku beretika menunjukkan bahwa satu indikator tidak valid yaitu PBD5. Indikator ini mengukur “keputusan yang dibuat dalam organisasi selalu berdasarkan untung dan rugi”. Indikator ini tidak valid karena makna untung dan rugi merupakan konsep yang dirasa tidak jelas. Untung dan rugi di kalangan perbankan juga dimaknai sama seperti dosen yaitu bekerja cenderung berdasarkan motivasi tinggi dan tidak mempertimbangkan untung rugi.

Tabel 1.6. Hasil Pengujian Validitas Karyawan Perbankan

Konstruk	Butir		Factor Loading	Konstruk	Butir		Factor Loading
	Jumlah	Kode			Jumlah	Kode	
Perilaku Beretika	24	PBDI1	0,646	Integritas	15	Inte1	0,650
		PBDI2	0,735			Inte2	0,117
		PBDI3	0,777			Inte3	0,696
		PBDI4	0,729			Inte4	0,637
		PBDI5	0,253			Inte5	0,718
		PBDL1	0,702			Inte6	0,736
		PBDL2	0,709			Inte7	0,618
		PBDL3	0,327			Inte8	0,041
		PBDP1	0,481			Inte9	0,516
		PBDP2	0,533			Inte10	0,683
		PBDP3	0,717			Inte11	0,375
		PBDR1	0,662			Inte12	0,331
		PBDR2	0,700			Inte13	-0,359
		PBDR3	0,590			Inte14	0,692
		PBDR4	0,502			Inte15	0,616
		PBDR5	0,630				
		PBTJ1	0,390				
		PBTJ2	0,534				
		PBTJ3	0,381				
		PBDM1	0,506				
		PBDM2	0,591				
		PBPRI1	0,360				
		PBPRI2	0,433				
		PBPRI3	0,359				
Gender	15	Gen1	0,360				
		Gen2	-0,056				
		Gen3	0,047				
		Gen4	0,002				
		Gen5	0,177				
		Gen6	0,147				
		Gen7	0,306				
		Gen8	0,178				
		Gen9	0,408				
		Gen10	0,727				
		Gen11	0,284				
		Gen12	0,281				
		Gen13	0,347				
		Gen14	0,670				
		Gen15	0,212				

Sumber: hasil olah data

Untuk konstruk gender, sejumlah indikator tidak valid yaitu Gen2, Gen3, Gen4, Gen5, Gen6, Gen8, Gen11, Gen12 dan Gen 15. Indikator tidak valid ini memiliki jumlah yang lebih besar pada data perbankan daripada data dosen. Hal ini mungkin disebabkan oleh ketidakmampuan dalam memahami indikator, sehingga pada pengujian berikutnya, indikator-indikator ini tidak digunakan untuk menganalisis konsep gender. Begitu juga dengan indikator Inte2, Inte8 dan Inte13. Ada kesamaan data perbankan dan dosen untuk indikator 13. Yaitu dengan meminta responden untuk menjawab sebaliknya karena berbentuk reverse. Baik dosen maupun karyawan perbankan yang menjadi responden tidak menyadari atau tidak memahami konsep ini, sehingga indikator ini tidak valid. Konsep ini mungkin dipersepsi membingungkan.

#### 4.4. Hasil Pengujian Reliabilitas

Pengujian reliabilitas pada penelitian ini menunjukkan sejumlah hasil. Tabel 1.7. menunjukkan hasil pengujian reliabilitas menggunakan koefisien Cronbach Alpha. Pada data dosen, semua variabel memiliki koefisien Cronbach Alpha yang baik. Variabel menunjukkan konsistensi. Nilai cut-off untuk menunjukkan reliabilitas sebuah pengukuran variabel adalah 0,6 (Hair, et al., 2010). Pengujian reliabilitas lebih cenderung untuk menunjukkan kesalahan tidak sistematis artinya pengujian cenderung lebih memperhatikan aspek situasional ketika responden melakukan pengisian kuesioner. Hal ini menunjukkan bahwa semua dosen yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah menunjukkan konsistensi dalam memberikan pendapat dalam kuesioner. Selain itu, terdungkungnya konsistensi jawaban dalam kuesioner adalah suasana ketika mengisi kuesioner.

**Tabel 1.7.** Hasil Pengujian Reliabilitas Data

Reliabilitas Data Dosen		
No	Variabel	Koefisien Cronbach Alpha
1	Perilaku Beretika	0,940
2	Integritas	0,79
3	Gender	0,786
Reliabilitas Data Perbankan		
No	Variabel	Koefisien Cronbach Alpha
1	Perilaku Beretika	0,919
2	Integritas	0,89
3	Gender	0,6

Sumber: hasil olah data

#### 4.5. Hasil Analisis Data Deskriptif Dosen

Pengujian nilai rata-rata dosen menunjukkan nilai yang kurang lebih sama. Tabel 1.8. menunjukkan bahwa dari 140 individu menunjukkan bahwa sebagai dosen mengatakan setuju untuk berperilaku beretika dengan nilai 3,76. Secara umum, individu berusaha untuk mengutamakan kepentingan organisasi dan memperhatikan kepentingan orang lain. Dosen sebagai karyawan memiliki perhatian pada kepentingan organisasi. Begitu juga, variabel nilai integritas, individu menunjukkan konsistensi antara nilai perkataan dan tingkah laku, dengan nilai rata-rata 4,20. Selain itu, variabel gender, individu menunjukkan perhatian untuk membuat keputusan dengan memperhatikan orang lain dan menghindari adanya konflik dengan orang lain, dengan nilai rata-rata 4,02.

**Tabel 1.8** Hasil Pengujian Nilai Rata-rata Dosen

	Mean	Standar Deviation	N
Perilaku Beretika	3,76	0,542	140
Nilai Integritas	4,20	0,409	140
Gender	4,02	0,341	140

Sumber: hasil olah data

#### 4.6. Hasil Analisis Deskriptif Perbankan

Pengujian nilai rata-rata karyawan perbankan menunjukkan nilai yang kurang lebih sama. Tabel 1.9. menunjukkan bahwa dari 138 individu menunjukkan bahwa sebagai karyawan perbankan mengatakan setuju untuk berperilaku beretika dengan nilai 3,87. Secara umum, individu berusaha untuk mengutamakan kepentingan organisasi dan memperhatikan kepentingan orang lain. Responden sebagai karyawan perbankan memiliki perhatian pada kepentingan organisasi. Begitu juga, variabel nilai integritas, individu menunjukkan konsistensi antara nilai perkataan dan tingkah laku, dengan nilai rata-rata 4,27. Selain itu, berkaitan dengan variabel gender, individu menunjukkan perhatian untuk membuat keputusan dengan memperhatikan orang lain dan menghindari adanya konflik dengan orang lain, dengan nilai rata-rata 3,70.

**Tabel 1.9.** Hasil Pengujian Nilai Rata-rata Karyawan Perbankan

	Mean	Standar Deviation	N
Perilaku Beretika	3,87	0,494	138
Nilai Integritas	4,27	0,430	138
Gender	3,70	0,541	138

Sumber: hasil olah data

#### 4.7. Hasil Analisis Regresi Data Dosen dan Karyawan Perbankan

Dalam analisis ini, data dosen dan karyawan perbankan dianalisis menjadi satu. Pertimbangan yang dilakukan adalah baik variabel integritas dan gender memengaruhi perilaku beretika di kalangan dosen dan perbankan kecuali variabel gender di kalangan dosen tidak memengaruhi.

Secara lebih terperinci, untuk data dosen, pada Tabel 1.10., variabel nilai integritas memiliki pengaruh pada perilaku beretika dengan nilai t sebesar 2,914 dan nilai signifikansi sebesar 0,04. Variabel gender tidak memengaruhi perilaku beretika pada dosen dengan nilai t sebesar 1,226 dan nilai signifikansi sebesar 0,222.

**Tabel 1.10.** Hasil Pengujian Koefisien Regresi Data Dosen

	Unstandardized Coefficient	Standardized Coefficient	Nilai t	Nilai Signifikansi
Nilai Integritas	0,361	0,272	2,914	0,04
Gender	0,183	0,115	1,226	0,222

Sumber: hasil olah data

Secara lebih terperinci, untuk data karyawan perbankan, pada Tabel 1.11., variabel nilai integritas memiliki pengaruh pada perilaku beretika dengan nilai t sebesar 4,773 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Variabel gender memengaruhi perilaku beretika pada karyawan perbankan dengan nilai t sebesar 2,971 dan nilai signifikansi sebesar 0,004.

**Tabel 1.11.** Hasil Pengujian Koefisien Regresi Data Perbankan

	Unstandardized Coefficient	Standardized Coefficient	Nilai t	Nilai Signifikansi
Nilai Integritas	0,427	0,371	4,773	0,000
Gender	0,211	0,231	2,971	0,004

Sumber: hasil olah data

#### 4.8. Penjelasan Aspek Integritas

Nilai integritas memiliki pengaruh kuat untuk individu baik di lingkungan perbankan maupun lembaga pendidikan untuk menunjukkan perilaku beretika. Penjelasan kemampuan nilai integritas berpedoman pada konsep yang sudah dijelaskan pada bagian teori. Rerangka berpikir Petrick dan Quinn (2000), mengenai empat dimensi kapasitas integritas yang nantinya dapat mendukung terbentuknya moral progress dan pada akhirnya membantu tercipta perilaku beretika yaitu: process integrity capacity, judgment integrity, development integrity capacity dan system integrity capacity digunakan untuk mendukung analisis pengaruh nilai integritas pada perilaku beretika.

Pertama, dalam process integrity capacity terdapat kesadaran moral. Konsep ini merupakan kapasitas untuk memiliki sensitivitas berkaitan dengan isu etika yang relevan dalam pembuatan keputusan yang memiliki implikasi pada orang lain. Dalam membuat keputusan, baik dosen maupun karyawan perbankan harus memperhatikan suara orang atau aspek lain dalam organisasi. Kepekaan moral yang dimiliki oleh individu ini akan menuntun individu untuk membuat keputusan yang tidak menyimpang dari peraturan atau kode etik yang ada. Keputusan yang dibuat akan membuat banyak manfaat bagi para stakeholder organisasi.

Baik dosen maupun karyawan perbankan membuat keputusan harus memperhatikan orang lain. Sebagai tenaga pendidik untuk menuntaskan pembelajaran yang tidak hanya akademik, namun juga berkewajiban sebagai panutan. Dalam membuat keputusan, misalnya mau untuk bertindak melakukan penyusunan, penggelapan uang, atau menerima gratifikasi, akan dipikirkan kembali. Tindakan-tindakan ini dihindari karena mereka harus memberikan contoh yang baik kepada peserta didik. Selain itu, lembaga pendidikan dianggap sebagai tempat bermulanya pendidikan yang mengajarkan kebaikan dan membentuk masyarakat madani. Begitu juga dengan karyawan perbankan, individu yang bekerja dalam perbankan akan menghadapi tuntutan lebih besar. Hal ini berkaitan dengan pertimbangan moral. Pertimbangan moral dalam process integrity berkaitan dengan kapasitas untuk mengolah dengan analisis sebuah keputusan. Analisis sebuah keputusan harus mempertimbangkan jangka panjang berkaitan dengan segala risiko dan konsekuensinya. Perbankan adalah industri bisnis yang menawarkan kepercayaan. Dengan mengelola organisasi perbankan secara baik, investor atau konsumen akan terus mempercayakan pelayanan kepada perbankan. Apabila misalnya karyawan perbankan terlibat dalam pelecehan atau penyusunan, maka konsekuensi terburuk adalah penyelewengan wewenang dan penggelapan uang. Penggelapan uang ini berarti menggunakan uang konsumen. Dengan demikian akan berdampak pada kerugian di sisi konsumen.

Pendidikan karakter seorang siswa berasal dari lingkungan pendidikan. Dosen sebagai agen sosialisasi pendidikan karakter perlu membentuk karakter moral sebagai bagian dari process integrity. Karakter moral yang perlu diperhatikan dalam dunia pendidikan adalah kejujuran, keadilan, kebaikan bersama, kepercayaan, welas asih, kasih sayang, dan aspek perhatian pada sesama. Karakter moral ini harus ditanamkan dalam kegiatan akademis,

dengan demikian peserta didik atau mahasiswa akan menjadi pribadi yang unggul dengan tidak hanya memiliki keunikan dalam akademis, namun juga ditopang oleh kekuatan sikap yang positif. Sebagai bagian dari pembentuk karakter, dosen bisa menjadi contoh atau referensi bagi mahasiswa. Dengan demikian, hal ini menjadikan pegangan bagi dosen untuk senantiasa melakukan tindakan yang bermoral dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan focus group discussion, integritas sebagai role model. Role model di sini bisa diartikan sebagai panutan. Panutan atau tuntunan dalam bertindak selalu ada dalam diri individu. Panutan ini bisa terbentuk sejak dini oleh lingkungan bisa karena keluarga, masyarakat ataupun media. Integritas ini menjadi dasar untuk berperilaku.

Kuatnya dimensi-dimensi dalam process integrity capacity dianggap sudah bisa terinternalisasi dalam diri individu dan organisasi. Dimensi-dimensi yang meliputi kesadaran moral dijadikan komitmen untuk bertindak sesuai dengan rerangka etis dalam lingkungan pendidikan maupun perbankan. Indikator dosen dan karyawan perbankan yang menerapkan nilai ini, akan mampu mewujudkan perilaku yang beretika. Perilaku beretika misalnya melakukan kepentingan bersama, memberikan perhatian kepada orang lain, setiap orang bisa mengikuti prosedur atau peraturan yang berlaku.

Kedua, judgment integrity. Judgment integrity merupakan gabungan antara teori dalam manajemen, etika dan hukum yang akhirnya membentuk kebijakan dan praktik bisnis (Petrick & Quinn, 2000). Dalam judgment integrity capacity, organisasi bisa mengembangkan dan menggunakan teori etika atau hukum yang mendukung dan teori manajemen sejalan untuk pembuatan keputusan yang beretika. Hal ini bisa diterapkan dalam lingkungan atau organisasi pendidikan dan perbankan atau keuangan.

Lingkungan pendidikan juga memiliki kekuatan hukum sebagai pendukung terwujudnya nilai integritas di dunia pendidikan. Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 dalam pasal 1, menyatakan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu berdasarkan pasal 66 dalam undang-undang yang sama, dosen berkewajiban:

- a. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- c. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- d. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- e. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- f. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Undang-undang ini menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk mengembangkan kebijakan akademik di tingkat fakultas yang kemudian diimplementasi dalam program studi. Kebijakan ini bisa mengatur kewajiban dosen. Dosen dianggap sebagai individu yang memiliki kepedulian untuk memahami dan mempelajari peraturan demi kelancaran pelaksanaan pendidikan di universitas. Kode etik juga dimiliki oleh setiap perguruan tinggi sebagai landasan berperilaku. Berdasarkan hasil focus group discussion, terdapat sosialisasi kebijakan akademik sebagai dasar kode etik dalam perguruan tinggi. Setiap dosen sebagai tenaga pendidik menjadi individu yang memahami peran kebijakan ini agar dosen selalu terhindar dari perilaku tidak beretika.

Berkaitan dengan karyawan perbankan, terdapat hukum yang menciptakan hubungan sosial dengan masyarakat secara kuat dan memberdayakan masyarakat. Tujuan adanya hukum dalam bentuk undang-undang atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membuat pelaku dalam bidang perbankan termasuk individu dalam organisasi perbankan yang sekaligus menjadi anggota masyarakat dapat menempatkan diri sesuai dengan perannya untuk bisa berperilaku sesuai dengan koridor etika dan hukum dengan baik. Tindakan

penyelewengan dalam pekerjaan dapat dikurangi karena adanya pemberitahuan kebijakan dan prosedur melalui sosialisasi.

Di bidang perbankan, terdapat kebijakan Good Corporate Governance yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance. Bank dianggap sebagai lembaga intermediasi yang mengatur pertukaran dana masyarakat baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Bank menghadapi sejumlah risiko yang meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional dan risiko reputasi. Dengan adanya sejumlah risiko tersebut, menjadikan bank sebagai perusahaan yang banyak mendapatkan peraturan. Selain itu, bank diharapkan dalam menerapkan good corporate governance untuk bisa menciptakan kepercayaan dari masyarakat sebagai bagian dari stakeholder. Lembaga Bank for International Settlements (BIS) merupakan lembaga yang mengkaji secara terus-menerus mengenai pelaksanaan good corporate governance.

Berdasarkan informasi dari focus group discussion, dalam bidang perbankan terdapat lima prinsip utama yang harus dipegang oleh setiap pengelola perbankan bahkan individu sebagai karyawan perusahaan perbankan diwajibkan menerapkan lima prinsip utama ini dalam memberikan pelayanan perbankan kepada masyarakat. Penerapan lima pilar ini dimonitor terus-menerus karena agar terhindar dari sejumlah risiko perbankan. Lima pilar tersebut adalah akuntabilitas (accountability), tanggung jawab (responsibility), independensi (independency) dan kewajaran (fairness). Lima pilar ini ditujukan untuk dapat melindungi semua pihak yang berkepentingan lainnya yaitu deposan, penabung, pemegang giro, debitur, karyawan, pemerintah, dan investor. Lima pilar ini penting karena perbankan adalah bisnis dalam sistem ekonomi yang merupakan suatu sistem yang tidak berdiri sendiri dan nilai integritas menjadi inti dari pelaksanaan bisnis yang sehat (Brown, 2006). Lima pilar ini merupakan sumber terciptanya nilai integritas dalam bidang perbankan. Nilai integritas dalam lima pilar ini bisa tercipta secara terus-menerus, karena pemerintah sebagai lembaga pengawas, selalu rutin untuk memantau kinerja perbankan melalui audit laporan keuangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Kondisi ini mau tidak mau memaksa para pengelola bank untuk senantiasa juga menerapkan nilai integritas ini sehari-hari untuk menjaga kinerja bank selalu pada koridor mengutamakan kepentingan bersama. Nilai-nilai sebagai pilar utama ini dirumuskan berdasarkan Komite Nasional Kebijakan Good Corporate Governance.

1. **Transparansi.** Bank diharapkan mengungkapkan informasi yang jelas dan akurat bagi para pemegang kepentingan. Informasi yang diberikan tidak hanya berkaitan dengan hal-hal umum seperti visi misi, strategi perusahaan ataupun kondisi keuangan, namun juga berkaitan dengan pengelolaan risiko, status kepatuhan, dan sistem pelaksanaan good corporate governance. Kebijakan perbankan bersifat tertulis dan disosialisasikan secara terus menerus kepada para karyawan perbankan yang menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan kebijakan ini.
2. **Akuntabilitas.** Dalam perbankan, terdapat mekanisme untuk bisa menunjukkan kinerja sesuai dengan tanggung jawabnya. Selain itu, di bank terdapat check and balance system dalam mengelola kinerja bank.
3. **Tanggung jawab.** Untuk mempertahankan keberlangsungan usaha bank, perbankan diharapkan bisa menerapkan prudential banking practices. Dengan demikian, semua pihak yang berkepentingan harus memikirkan segala konsekuensi dari setiap keputusan dan melakukan sejumlah pertimbangan. Perbankan harus memiliki kepedulian untuk tanggung jawab sosial.
4. **Independensi.** Perbankan diharapkan tidak terjebak dari pengaruh dominan dari kelompok tertentu. Keputusan yang dihasilkan paling tidak obyektif dan tidak mendapatkan tekanan dari pihak-pihak tertentu.
5. **Kewajaran.** Perbankan harus memperhatikan semua pihak-pihak yang berkepentingan dalam memberikan masukan untuk suatu keputusan dan semua pihak terkait bisa mendapatkan akses informasi.

Ketiga, aspek integritas adalah system integrity capacity. Konsep ini merupakan kebijakan organisasional yang menguatkan perkembangan moral dalam organisasi dan mendukung terciptanya aspek integritas. Dukungan dari organisasi yang terus-menerus ini bisa diwujudkan dengan sejumlah aspek organisasional yaitu kepemimpinan, budaya kerja, struktur organisasi, kebijakan etika, pelatihan etika, audit kerja. Penguatan aspek ini merupakan

sisi eksternal para karyawan baik sebagai dosen maupun karyawan perbankan untuk terus memperhatikan kepentingan orang banyak.

#### 4.9. Penjelasan Aspek Gender

Aspek gender dalam penelitian ini menunjukkan aspek care. Secara teori, aspek gender dimaknai perspektif untuk lebih mementingkan aspek perhatian, kasih sayang, dan memberikan perhatian kepada orang lain. Menurut Sevenhuijsen (2003), aspek gender merupakan konstruk yang memiliki sejumlah dimensi yaitu:

1. Caring about yaitu memfokuskan adanya pengakuan untuk memberikan perhatian kepada pihak lain.
2. Taking care of yaitu memfokuskan pada adanya tanggung jawab untuk memberikan kasih sayang kepada orang lain.
3. Care-giving yaitu memberikan aspek empati dan mau mendengarkan keluhan.
4. Care receiveing yaitu memfokuskan pada respon menerima perhatian dari pihak lain.

Berdasarkan perspektif ini gender merupakan suatu pemikiran yang cenderung menekankan harmonisasi dengan lingkungan yang ada. Harmonisasi dengan lingkungan ditunjukkan dengan adanya menjaga sistem yang berkembang dapat berjalan dengan baik. Iklim organisasi dibangun untuk menjaga kenyamanan kerja. Selain itu, harmonisasi juga terbentuk karena setiap individu memiliki empati dan kasih sayang pada sesamanya dalam lingkungan kerja. Konflik berusaha dihindari karena individu yang bekerja akan mengalami psikologis negatif. Individu yang bekerja akan merasa tidak nyaman untuk beraktivitas dalam organisasi.

Dimensi-dimensi dalam gender ini menunjukkan adanya perhatian, emosional, kelembutan. Menurut Fakih (1999), gender tidak berkaitan dengan seks. Seks itu sendiri berkaitan dengan perbedaan jenis kelamin. Ciri-ciri pria adalah kuat, rasional sedangkan ciri perempuan adalah lemah lembut, keibuan. Ciri-ciri pria dan perempuan tersebut bisa ditukarkan artinya ada pria yang lemah lembut dan ada perempuan yang kuat dan rasional. Berkaitan dengan gender, merupakan ekspektasi terhadap pria dan perempuan. Gender berkaitan dengan sebuah perspektif untuk memahami kenyataan atau pandangan tertentu.

Penelitian ini menunjukkan bahwa aspek gender memengaruhi perilaku beretika pada karyawan yang bekerja di perbankan. Ada sejumlah penjelasan mengenai terdukungnya hipotesis tersebut. Pertama, karakteristik industri perbankan merupakan industri yang syarat dengan kepatuhan. Individu-individu yang bekerja di perbankan merupakan para pekerja yang pada awalnya akan mendapatkan sosialisasi mengenai etika kerja, kepatuhan terhadap peraturan, kode etik, dan kecenderungan untuk menghindari konflik. Dengan demikian, dalam menjalankan kegiatan atau aktivitas kerja sehari-hari akan menerapkannya dengan optimal.

Kedua, hal ini menunjukkan bahwa setting organisasi perbankan mendukung pelayanan perbankan pada sejumlah pemegang kepentingan terutama investor, konsumen dan pemerintah. Perspektif gender di perbankan menunjukkan bahwa dalam membuat suatu keputusan berkaitan dengan menghindari terjadinya konflik. Konflik ini bisa terjadi antar pemegang saham, antar karyawan atau bahwa antar organisasi dan karyawan. Lingkup kerja perbankan merupakan di bawah otoritas perbankan yang semuanya perlu diatur. Peraturan ini mau tidak mau menjadikan individu memiliki kepekaan untuk memperhatikan segala konsekuensi. Kepekaan ini bisa dibentuk apabila terdapat sosialisasi nilai-nilai yang ada dalam organisasi perbankan.

Berdasarkan Komite Nasional Kebijakan Good Corporate Governance, bank memiliki sejumlah kebijakan yang berkaitan dengan sumber daya manusia yang menjamin setiap aspek yaitu:

1. Tidak terjadinya diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, aliran dan gender serta bebas dari tekanan.
2. Perlakuan yang adil, jujur, dan mendorong setiap karyawan yang ingin berkembang seluas-luasnya sesuai potensi, kemampuan, pengalaman dan keterampilan masing-masing karyawan.
3. Terciptanya lingkungan kerja yang kondusif, termasuk kesehatan dan keselamatan kerja agar setiap karyawan dapat bekerja secara kreatif dan produktif.
4. Tersedianya informasi yang transparan dan perlu diketahui oleh karyawan melalui sistem komunikasi yang berjalan baik dan tepat waktu.

5. Kebebasan berserikat bagi para karyawan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Keputusan investasi adalah merupakan dari karyawan, namun investasi pribadi di suatu perusahaan dilarang jika investasi tersebut berpotensi menimbulkan benturan kepentingan sehingga dapat mengganggu pengambilan keputusan untuk kepentingan bank.
7. Bank harus memastikan agar karyawan tidak menggunakan nama, fasilitas, atau hubungan baik bank dengan pihak eksternal untuk kepentingan pribadi.
8. Dalam melaksanakan tugasnya, bank harus mempunyai sistem untuk menjaga agar setiap karyawan menjunjung tinggi standar etika dan nilai-nilai perusahaan serta mematuhi kebijakan, peraturan dan prosedural internal yang berlaku di bank.

Dimensi-dimensi yang ada dalam kebijakan di atas menjadikan individu untuk menekankan kepekaan terhadap kepatuhan agar menjaga standar etika dan nilai-nilai perusahaan. Adanya keragaman sebagai bagian dari indikator dalam gender menguatkan dorongan untuk tidak melakukan tindakan diskriminatif antar sesama, dan memengaruhi individu untuk menciptakan suasana kerja yang aman. Konflik menjadi terhindarkan. Dalam membuat keputusan akan mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang.

Dalam penelitian dengan setting universitas, aspek gender tidak memberikan pengaruh pada perilaku beretika. Perilaku beretika terjadi namun, lebih disebabkan oleh penguatan lain. Ada sejumlah aspek yang menjelaskan gender tidak memengaruhi perilaku beretika. Pertama, aspek gender tidak dikuatkan dalam perusahaan. Tanpa perlu bekerja sebagai dosen, sebenarnya individu sudah memiliki gender yang ada dalam dirinya. Dosen bekerja berdasarkan moralitas yang sudah terbentuk artinya pilihan bekerja sebagai dosen sudah menjadi bagian hidup. Motivasi untuk selalu berbuat baik sudah otomatis tertanam dalam hati dosen. Apabila akan melakukan perbuatan yang menyimpang, maka individu akan mudah menghindarinya karena sudah ada alarm otomatis dalam hati. Oleh karena itu, individu dalam menjalankan kegiatan sehari-hari akan senantiasa mengedepankan adanya moralitas tanpa perlu ada penguatan gender oleh perusahaan.

Kedua, bekerja sebagai dosen merupakan sebuah dedikasi atau pengabdian. Pengabdian ini menjadikan dosen bersedia bekerja tulus karena sudah menjadi bagian diri dosen untuk bisa menjalankan sebagai peran pendidik dan pengajar. Tujuan dosen adalah mendidik mahasiswa agar menjadi individu yang bisa memiliki kepribadian unggul, sikap yang optimis, berperilaku etis, menghargai orang lain. Dengan demikian, landasan pengabdian inilah yang selalu memengaruhi dosen untuk berperilaku etis tanpa harus bekerja di universitas.

Ketiga, lingkungan dan budaya dalam organisasi pendidikan termasuk universitas mengarah ke arah idealisme. Budaya dalam organisasi pendidikan menanamkan nilai-nilai yang kuat untuk menjadikan peserta didik untuk menjadi individu yang berkarakter jujur, mau bertanggung jawab, mengedepankan keadilan. Perguruan tinggi merupakan organisasi yang bertanggung jawab untuk membentuk pendidikan karakter. Pembentukan karakter tidak hanya terjadi di dalam keluarga. Namun perguruan tinggi memiliki peran untuk membantu pendidikan karakter pada peserta didik. Lingkungan perguruan tinggi sebagai agen sosialisasi pendidikan memiliki tugas untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan dan kemanusiaan. Idealisme ini juga terwujud dalam kegiatan akademik sehari-hari yang harus dikuatkan oleh dosen sebagai pendidik. Pendidikan yang mengedepankan karakter kuat bisa menjadi budaya yang menguat sehingga bisa menjadi dasar untuk bertindak. Pendidikan yang diberikan kepada siswa bersifat lebih formal dengan demikian, individu yang belajar maupun dosen sebagai pengajar mau tidak mau juga harus meresapi, merenungi bersama atas nilai-nilai beretika. Dengan kata lain kondisi lingkungan dan budaya serta peran sebagai agen sosialisasi turut memengaruhi perilaku beretika tanpa harus ada penguatan gender.

## 5. PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Penelitian menunjukkan bahwa nilai integritas memengaruhi perilaku beretika. Pertama, integritas berkaitan dengan moralitas yang dimiliki oleh individu yang bisa menjadi dasar untuk berperilaku. Moralitas ini bisa muncul karena setiap individu memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mengedepankan kepentingan bersama. Para individu memiliki motivasi untuk menjalankan tugas masing-masing dengan baik dengan menghindari konflik. Kedua, integritas bisa kuat karena adanya sistem hukum, peraturan atau kebijakan. Peraturan yang ditegakkan dengan konsisten mampu mengkondisikan individu yang bekerja dalam organisasi untuk selalu mengikuti aturan yang ada. Dengan demikian, individu selalu berusaha menghindari risiko dan mengupayakan tidak merugikan orang lain. Ketiga, penguatan nilai-nilai melalui aspek organisasional. Aspek organisasional memainkan peranan dalam menegakkan integritas. Aspek kepemimpinan, budaya kerja, penegakan etika menyebabkan terbentuknya perilaku beretika. Sosialisasi aspek-aspek tersebut dikuatkan sejak awal individu memasuki organisasi sehingga mau tidak mau akan membentuk nilai diri yang selalu menjadi pegangan dalam bersikap dan bertindak. Oleh karena itu, hal ini bisa mewujudkan perilaku beretika.

Dalam penelitian ini, pengaruh gender pada perilaku beretika positif, namun hanya pada konteks perbankan. Aspek gender ini berkaitan dengan suatu motivasi untuk empati pada kepentingan orang lain. Individu memiliki kepekaan besar untuk tidak membuat keputusan yang merugikan. Hal ini disebabkan oleh adanya perhatian pada semua pemangku kepentingan secara lebih luas. Berkaitan dengan konteks dosen, aspek gender tidak memengaruhi perilaku beretika. Ada sejumlah aspek yang menjelaskan gender tidak memengaruhi perilaku beretika. Tanpa perlu bekerja sebagai dosen, sebenarnya individu sudah memiliki gender yang ada dalam dirinya. Dosen bekerja berdasarkan moralitas yang sudah terbentuk artinya pilihan bekerja sebagai dosen sudah menjadi bagian hidup. Motivasi untuk selalu berbuat baik sudah otomatis tertanam dalam hati dosen. Bekerja sebagai dosen merupakan sebuah dedikasi atau pengabdian. Pengabdian ini menjadikan dosen bersedia bekerja tulus karena sudah menjadi bagian diri dosen untuk bisa menjalankan sebagai peran pendidik dan pengajar. Lingkungan dan budaya dalam organisasi pendidikan termasuk universitas mengarah ke arah idealisme. Budaya dalam organisasi pendidikan menanamkan nilai-nilai yang kuat untuk menjadikan peserta didik untuk menjadi individu yang berkarakter jujur, mau bertanggung jawab, mengedepankan keadilan. Perguruan tinggi merupakan organisasi yang bertanggung jawab untuk membentuk pendidikan karakter. Kondisi lingkungan dan budaya serta peran sebagai agen sosialisasi turut memengaruhi perilaku beretika tanpa harus ada penguatan gender.

Penelitian ini menunjukkan bahwa ada irisan penjelasan mengenai nilai integritas dan konsep gender. Konsep integritas dan konsep gender dalam perkembangan operasionalisasi indikator-indikator memiliki kesamaan pengukuran. Konsep integritas yang diacu dari Forsyth (1980) merupakan pengukuran integritas yang paling utama dengan memfokuskan pada moralitas.

### 5.2. Implikasi Manajerial

Penelitian ini memiliki implikasi manajerial secara umum baik untuk karyawan dosen maupun perbankan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku beretika terjadi. Oleh karena itu agar terjadi penguatan perilaku beretika, aspek integritas dan gender perlu dikuatkan dari waktu-waktu. Meskipun aspek gender tidak memengaruhi perilaku beretika dalam setting perguruan tinggi, aspek gender bisa saja diperkuat dalam sisi organisasi karena memiliki aspek positif yang lebih besar. Implikasi manajerial ini bisa diaplikasikan oleh baik dosen maupun karyawan perbankan. Praktik dan strategi yang bisa dikuatkan dari sisi manajerial sebagai berikut.

Pertama, baik universitas atau perguruan tinggi maupun perbankan menerapkan strategi rekrutmen yang adil dan mampu memilih kandidat-kandidat yang bisa bekerja dan tidak memiliki kecenderungan perilaku menyimpang. Rekrutmen merupakan proses awal untuk menjangkau individu-individu dengan pribadi yang unggul karena pada proses selanjutnya akan yang paling aktif untuk berinteraksi dengan lingkungan dan sistem organisasi.

Kedua, mempertahankan kebijakan promosi dan kompensasi yang memadai karena hal ini bertujuan untuk menghindarkan individu untuk melakukan perbuatan yang tidak beretika. Salah satu sumber perilaku tidak etis adanya kekurangan materi untuk kebutuhan sehari-hari.

Ketiga, melaksanakan pelatihan integritas secara internal. Pelatihan yang terus-menerus mengenai aspek integritas dapat dijadikan sebagai media untuk membangun karakter individu untuk selalu berpegangan pada aspek integritas. Pelatihan bisa juga bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam jangka pendek berkaitan dengan penegakan etika. Pelatihan tidak hanya bersifat kognitif, namun membangun aspek berperilaku. Keperilakuan bisa dibentuk pelatihan yang terus-menerus.

Keempat, untuk aspek perbankan, penguatan financial disclosure perlu diadakan karena berkaitan dengan bentuk tanggung jawab individu yang menjalankan kegiatan perbankan. Financial disclosure meliputi suatu pelaporan informasi mengenai investasi uang dari para pemegang kepentingan dengan demikian harus bersifat transparan. Transparansi informasi keuangan yang berjalan secara terus-menerus menjadikan individu sebagai karyawan perbankan memiliki aspek monitoring diri untuk menghindari dari perilaku tidak etis.

Kelima, penguatan disclosure integrity issue. Kebijakan untuk mengupayakan perilaku beretika harus diimbangi dengan keberanian untuk menyampaikan terbuka setiap terjadi perilaku yang menyimpang. Dengan demikian, bisa dijadikan media untuk pembelajaran bagi setiap individu yang bekerja. Disclosure integrity issue bisa menjadi sebagai cara untuk menguatkan nilai-nilai moral.

#### **Keterbatasan Penelitian dan Saran Penelitian yang Akan Datang**

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hasil penelitian. Pertama, topik penelitian ini terbatas pada aspek integritas dan gender. Penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh pada perilaku beretika. Berdasarkan hasil uji  $R^2$ , masih terdapat 75% lebih perilaku beretika bisa disebabkan oleh faktor lain. Faktor-faktor lain yang bisa dijadikan sebagai penentu perilaku beretika di masa yang akan datang antara lain sebagai berikut.

1. Faktor kepemimpinan. Faktor kepemimpinan dianggap bisa memberikan arahan untuk berperilaku karena kepemimpinan bersifat inspiratif dan bisa menjadi model untuk berperilaku. Kepemimpinan dapat menciptakan kewibawaan bagi bawahan untuk bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh pemimpin. Kepemimpinan menjadi ujung tombak dalam mewujudkan nilai-nilai integritas bagi terciptanya perilaku beretika. Kepemimpinan bisa berfungsi sebagai pemotivasi untuk melakukan kegiatan perilaku beretika. Kepemimpinan para individu di level konseptual akan memberikan warna sendiri sebagai seseorang yang bisa mengayomi.
2. Sosialisasi nilai-nilai integritas. Sosialisasi nilai integritas bisa dijadikan sebagai elemen penguat untuk menegakkan nilai integritas. Sosialisasi merupakan sebagai aktivitas untuk memberitahukan atau menginformasikan mengenai sejumlah kebijakan, aturan, atau kode etik. Sosialisasi ini penting untuk dijadikan acuan bagi karyawan agar bisa berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Aspek internal individu misalnya motivasi, kepribadian. Aspek internal individu dianggap sebagai pendorong untuk berperilaku etika. Input individu ini penting untuk dilakukan karena sebagai pendukung proses kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Aspek internal ini merupakan kekuatan yang tidak kalah pentingnya untuk menjamin terbentuknya perilaku beretika. Kepribadian yang baik akan membantu terciptanya perilaku yang baik, karena individu ini akan senantiasa bisa selalu berada dalam langkah yang sesuai dengan aturan.
4. Iklim organisasi berkaitan dengan sistem, struktur dan kode etik yang tegak diterapkan dalam organisasi akan sangat membantu terbentuknya sikap dan perilaku beretika. Martin & Cullen (2006) berpendapat bahwa kode etik, sistem dan struktur memengaruhi perilaku beretika dalam kehidupan organisasi. Kode etik yang kuat pelaksanaannya akan menjadi pegangan individu untuk menerapkan perilaku etika. Sistem organisasi yang bisa memonitoring perilaku dan memberikan penilaian kinerja sesuai dengan deskripsi kerja akan menjadi acuan untuk menilai seseorang sesuai dengan apa yang sudah ditugaskan. Struktur organisasi yang mendukung dan lebih transparan akan mengurangi kecenderungan individu untuk melakukan perilaku tidak etis.

Kedua, keterbatasan penelitian ini adalah menggunakan pengukuran konsep integritas dan gender yang memiliki indikator-indikator yang saling berhubungan. Dengan demikian dikhawatirkan validitas diskriminan antar konstruk tersebut rendah. Hal ini disebabkan oleh penggunaan alat ukur yang mungkin dianggap belum dicoba secara berulang-ulang hingga menjadi sebuah alat ukur yang mapan. Di samping itu, penggunaan indikator-indikator penelitian cenderung bias karena mengandung indikator-indikator yang dapat mengundang social desirability bias. Individu sebagai responden cenderung memberikan nilai positif pada kuesioner yang harus diisi karena berkaitan dengan keterbukaan diri terhadap perilaku etis. Individu mungkin saja menghindari pemberian jawaban yang mungkin tidak mengenakan karena berkaitan dengan pencitraan diri. Oleh karena itu untuk penelitian yang akan datang, indikator-indikator perilaku beretika, nilai integritas dan gender dalam penyusunan pembuatan kuesioner dibuatkan pertanyaan yang bersifat umum, misalnya tidak menggunakan saya, namun dibuat misalnya berdasarkan pertanyaan secara umum dengan membuat perumpamaan secara ideal seseorang bertindak. Misalnya, saya menghindari persaingan seharusnya karena bisa menimbulkan konflik diganti dengan sebagai karyawan yang baik, seharusnya menghindari persaingan karena bisa menimbulkan konflik. Dengan membuat pernyataan lebih umum, individu merasa menjawab pertanyaan tidak dikondisikan untuk dirinya sendiri, namun individu pada umumnya.

Ketiga, penggunaan dosen dan karyawan perbankan masih bersifat terbatas. Hasil penelitian ini hanya bisa digeneralisasi pada dua tipe karyawan ini. Oleh karena itu, dalam penelitian mendatang dilakukan penelitian dengan lingkup yang lebih luas yaitu meliputi organisasi politik, kepolisian, pemerintah, atau industri jasa lainnya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan keterwakilan dari masing-masing sektor industri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, N.H. and Seet, Pi-Shen, (2010), "Gender variations in ethical and socially responsible considerations among SME entrepreneurs in Malaysia", *International Journal of Business and Society*, 11, pp. 77-88.
- Ahmed, P.K. and Machold, S., (2004), "The quality of ethics connection: Toward virtuous organizations:", *Total Quality Management*, 15, pp. 527-545.
- Atakan, M.G.S., Burnaz, S. and Topcu, Y.I., (2008), "An empirical investigation of the ethical perceptions of future managers with a special emphasis on gender Turkish case", *Journal of Business Ethics*, 82, pp. 573-586.
- Audi, R. and Murphy, P.E., (2006), "The many faces of integrity", *Business Ethics Quarterly*, 16, pp. 3-21.
- Bateman, C.R. and Valentine, S.R., (2008), "Investigating the effects of gender on consumer's moral philosophies and ethical intentions", *Journal of Business Ethics*, 95, pp. 393-414.
- Bear, S., Rahman, N. and Post, C., (2010), "The impact of board diversity and gender composition on corporate social responsibility and firm reputation", *Journal of Business Ethics*, 97, pp. 207-221.
- Borna, S. and White, G., (2003), "Sex and gender: Two confused and confusing concepts in the women in corporate management literature", *Journal of Business Ethics*, 47, pp. 89-99.
- Brown, M.T., (2006), "Corporate integrity and public interest: A relational approach to business ethics and leadership", *Journal of Business Ethics*, 66, pp. 11-18.
- Brown, M.E., Trevino, L.K., Harrison, D.A., (2005), "Ethical leadership: A social learning perspective for constructs development and testing", *Organizational Behavior and Human Decision Process*, 97, pp. 117-134.
- Daily, C.M. and Dalton, D.R., (2003), "Women in the boardroom: A business imperative", *Journal of Business Strategy*, 24, pp. 8-9.
- Davis, A.L. and Rothstein, H.R., (2006), "The effect of the perceived behavioral integrity of managers on employee attitude: A meta analysis", *Journal of Business Ethics*, 67, pp. 407-419.

- Dineen, B.R., Lewicki, R.J., and Thomlinson, E.C., (2006), "Supervisory guidance and behavioral integrity: Relationship with employee citizenship and deviant behavior", *Journal of Applied Psychology*, 91, pp. 622-635.
- Donleavy, G.D., (2008), "No man's land: exploring the space between Gilligan and Kohlberg", *Journal of Business Ethics*, 80, pp. 807-822.
- Ethisphere, (2010), *Worlds Most Ethical Companies*. [www.ethisphere.com](http://www.ethisphere.com)
- Fakih, M., (1999), *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Forsyth, D.R., (1980), "A taxonomy of ethical ideologies", *Journal of Personality and Social Psychology*, 39, pp. 175-184.
- Gill, S., (2010), "Is gender inclusivity an answer to ethical issues in business: An Indian stance", *Gender in Management: An International Journal*, 25, pp. 37-63.
- Gosling, M. & Huang, H.J., (2010), "The fit between integrity and integrative social contracts theory", *Journal of Business Ethics*, 90, pp. 407-417.
- Grojean, M.W., Resick, C.J., Dickson, M.W. and Smith, D.B., (2004), "Leaders, values, and organizational climate: Examining leadership strategies for establishing and organizational climate regarding ethics", *Journal of Business Ethics*, 55, pp. 223-241.
- Hair, Jr., Anderson, R.E., Tatham, R.L., and Black, W.C., (2009), *Multivariate Data Analysis*. New Jersey: Prentice-Hall International, Inc.
- Hansen, L.L., (2002), "Rethinking the industrial relations tradition from a gender perspective", *Employee Relations*, 24, pp. 190-210.
- Ibrahim, N., Angelidis, J. and Tomic, I.M., (2006), "Managers' attitudes toward codes of ethics: Are there gender differences?", *Journal of Business Ethics*, 90, pp. 343-353.
- Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J., and Anderson, R.E., (2010), *Multivariate Data Analysis: A Global Perspective*. Upper Saddle River New Jersey: Pearson Education.
- Jaramillo, F., Mulki, J.P. and Solomon, P., (2006), "The role of ethical climate on salesperson's role stress, job attitudes, turnover intention, and job performance", *Journal of Personal Selling & Sales Management*, 26, pp. 271-282.
- Kim, S. and Rader, S., (2010), "What they can do versus how much they care", *Journal of Communication Management*, 14: 59-80.
- Koh, H.C. and Boo, E.H.Y., (2001), "The link between organizational ethics and job satisfaction. A study of managers in Singapore", *Journal of Business Ethics*, 29, pp. 309-324.
- Leung, A.S.M., (2008), "Matching ethical work climate to in-role and extra role behaviors in a collectivist work setting", *Journal of Business Ethics*, 79, pp. 43-55.
- Lund, D.B., (2008), "Gender differences in ethics judgment of marketing professionals in the united states", *Journal of Business Ethics*, 77, pp. 501-515.
- Maak, T., (2008), "Undivided corporate responsibility: Towards a theory of corporate integrity", *Journal of Business Ethics*, 82, pp. 353-368.
- Martin, K.D. and Cullen, J.B., (2006), "Continuities and extensions of ethical climate theory: A meta analytic review", *Journal of Business Ethics*, 69, pp. 175-194.

- Mayasari, I., (2008), "The Creating of Ethical Work Climate & The Role for Influencing Work Attitude", *Jurnal Paramadina*, 5: 3, Desember.
- Mayasari, I., Wulandari, D., Wiadi, I., dan Maharani, A., (2010), "Determinants of ethical behavior: An empirical study of implementing marketing strategies", *Studi Tidak Dipublikasi*.
- Mayasari, I. dan Wulandari, D., (2009), "Perilaku Menyimpang pada Pekerja: Ditinjau dari Perspektif Disposisional dan Situasional", *Jurnal Paramadina*, 6: 2.
- Mayasari, I. dan Pramono, R.S., (2009), "Kajian Peran Perempuan: Pembuatan Keputusan Beretika dalam Aspek Bisnis Melalui Pendekatan Multi-Prinsip", Dipresentasikan dalam Seminar Nasional Kepemimpinan yang Berperspektif Gender, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- McKendall, M., DeMarr, B. and Jones-Rikkens, C., (2002), "Ethical compliance programs and corporate illegality: Testing the assumptions of the corporate sentencing guidelines", *Journal of Business Ethics*, 23, pp. 37-41.
- Oakley, A., (2002), *Gender on Planet Earth*. Cambridge: Polity Press.
- O'Dwyer, B. and Madden, G., (2006), "Ethical codes of conduct in Irish companies: A survey of code content and enforcement procedures", *Journal of Business Ethics*, 63, pp. 217-236.
- Palanski, M.E. and Yammarino, F.J., (2007), "Integrity and leadership: Clearing the conceptual confusion", *European Management Journal*, 25, pp. 171-184.
- Pater, A. & Van Gils, A., (2003), "Stimulating ethical decision making in a business context", *European Management Journal*, 21, pp. 762-773.
- Pelletier, K.L. & Bligh, M.C., (2008), "The aftermath of organizational corruption: Employee attributions and emotional reactions", *Journal of Business Ethics*, 80, pp. 823-844.
- Petrick, J.A. & Quinn, J.F., (2000), "The integrity capacity construct and moral progress in business", *Journal of Business Ethics*, 2, pp. 3-18.
- Roman, S. & Ruiz, (2005), "Relationship outcomes of perceived ethical sales behavior. The customers's perspective" *Journal of Business Research*, 58, pp. 439-445.
- Schwepker, C.H.J., (2005), "Ethical climate's relationship to job satisfaction, organizational commitment, and turnover in the sales force", *Journal of Business Research*, 54, pp. 39-52.
- Sevenhuijsen, S., (2003), *The place of care: The relevance of the feminist ethic of care for social policy*, *Feminist Theory*, 4, pp. 179-197.
- Sikula, A., and Costa, A.D., (1994), "Are women more ethical than men?", *Journal of Business Ethics*, 13, pp. 859-871.
- Simonson, I., Carmon, Z., Dhar, R., Drolet, A., and Nowlis, S.M., (2001), "Consumer research: In search of identity", *Annual Review Psychology*, 54, pp. 249-275.
- Stevens, B., (2008), "Corporate ethical codes: Effective instruments for influencing behavior", *Journal of Business ethics*, 78, pp. 601-609.
- Transparency International. [www.transparency.org/policy\\_research/survey](http://www.transparency.org/policy_research/survey).
- Vadi, M. & Jaakson, K., (2006), "The importance of value honest: Determining factors and some hints to ethics", University of Tartu, Faculty of Economic and Business Administration.
- Vardi, Y., and Wiener, Y., (2009), "Misbehavior in organizations: A motivational framework", *Organizational Science*, 7: 151-165.

- Weeks, W.A. and Nantel, J., (2004), "Corporate codes of ethics and sales force behavior: A case study", *Journal of Business Ethics*, 11, pp.753-760.
- White, D.W. and Lean, E., (2008), "The impact of perceived leader integrity on subordinates in a work team environment", *Journal of Business Ethics*, 81, pp. 765-778.
- Yang, X. and Rivers, C., (2009), "Antecedents of corporate social responsibility practices in multi national coporations'subsidiaries: A stakeholder and institutional perspective", *Journal of Business Ethics*, 86, pp. 155-169.



## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN HUTANG DAN NILAI PERUSAHAAN: STUDI EMPIRIK PADA PERUSAHAAN SEKTOR NONJASA DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2007-2010

Mafizatun Nurhayati  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Mercu Buana  
Email : mafiz\_69@yahoo.com

### Abstract

This study was conducted to examine the influence of factors of company size, business risk, liquidity (current ratio), and profitability (return on assets / ROA) to the policy of debt (debt to asset / DTA) and enterprise value (price book value / PBV ) through empirical studies on non-service firms that go public on the Stock Exchange Indonesia Year 2007-2010. The population in this study were 425 companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the period 2007-2010. Sampling technique used was purposive sampling, with the following criteria: (1) a company that is always present its financial statements for 2007-2010, and (2) a company that is continuously distributed dividends every period 2007-2010. Data obtained from the publication in the website Stock Exchange, namely [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Thence obtained the sample of 108 companies. Analytical technique used is the path analysis. The results showed that the size of the company have a positive and significant impact on debt policy. Business risk has a negative but not significant influence on debt policy. Company's liquidity (Current Ratio) has a negative and significant impact on debt policy. Corporate profitability has a negative and significant impact on debt policy. Firm size has a significant positive effect on firm value. Business risk has no significant negative effect on firm value. Company's liquidity (Current ratio) does not have a significant influence on the value of the company. Corporate profitability has a positive and significant impact on firm value. Debt policy does not significantly influence the value of the company.

Keywords: Current ratio, firm size, return on assets, Debt to Asset, Price Book Value.

### 1. PENDAHULUAN

Tujuan utama perusahaan pada dasarnya adalah untuk meningkatkan dan memaksimalkan kemakmuran pemilik perusahaan. Peningkatan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham tercermin dalam harga saham di pasar modal. Semakin tinggi harga saham berarti kesejahteraan pemilik saham semakin meningkat. Nilai perusahaan dapat dilihat dari price book value (PBV) yang merupakan perbandingan antara harga saham dengan nilai buku per lembar saham (Rahmawati & Akram, 2007). Besarnya PBV tidak terlepas dari beberapa kebijakan yang diambil perusahaan. Salah satu kebijakan yang sangat sensitif terhadap PBV adalah kebijakan hutang (Brigham dan Houston, 1998). Nilai perusahaan dapat ditingkatkan melalui kebijakan hutang. Kebijakan hutang merupakan penentuan berapa besarnya hutang akan digunakan perusahaan dalam mendanai aktivitasnya yang ditunjukkan oleh rasio antara total hutang dengan total aktiva (DTA).

Modigliani dan Miller (1958) menyatakan bahwa semakin tinggi proporsi hutang maka semakin tinggi nilai perusahaan. Hal ini berkaitan dengan adanya keuntungan dari pengurangan pajak karena adanya bunga yang dibayarkan akibat penggunaan hutang tersebut mengurangi penghasilan yang terkena pajak. Namun, menurut trade off theory semakin tinggi hutang maka semakin tinggi beban kebangkrutan yang ditanggung perusahaan. (Brigham, 1995). Semakin besar hutang, semakin besar kemungkinan terjadinya perusahaan tidak mampu

membayar kewajibannya. Risiko kebangkrutan akan semakin tinggi karena bunga akan meningkat lebih tinggi daripada penghematan pajak. Oleh karena itu, perusahaan harus sangat hati-hati dalam menentukan kebijakan hutangnya karena peningkatan penggunaan hutang akan menurunkan nilai perusahaannya (Sujoko dan Soebiantoro, 2007).

Pengaruh kebijakan hutang (DTA) dalam menentukan nilai perusahaan (PBV) dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ukuran perusahaan merupakan salah satu hal yang dipertimbangkan perusahaan dalam menentukan kebijakan hutangnya. Semakin besar ukuran perusahaan berarti semakin besar aktiva yang bisa dijadikan jaminan untuk memperoleh utang (Bringham & Gapenski, 1999; Mulianti:2010). Ukuran perusahaan yang besar menunjukkan perusahaan mengalami perkembangan sehingga investor akan merespon positif bahwa perusahaan tersebut mempunyai kinerja bagus dan nilai perusahaan akan meningkat (Sujoko dan Soebiantoro, 2007; Nurhayati, 2008). Risiko bisnis juga menentukan keputusan tentang kebijakan hutang yang akan diambil perusahaan. Perusahaan yang menghadapi risiko bisnis tinggi sebagai akibat dari kegiatan operasinya, akan menghindari untuk menggunakan hutang yang tinggi dalam mendanai aktivasinya (Mamduh, 2003). Pengelolaan risiko yang efektif juga mengurangi kemungkinan financial distress, sehingga pada dasarnya nilai perusahaan dapat ditingkatkan dengan pengelolaan risiko yang efektif (Junarsin, 2011). Kebijakan hutang yang akan diambil perusahaan juga berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam mengembalikan hutangnya (likuiditas perusahaan). Perusahaan yang memiliki current ratio tinggi berarti memiliki aktiva lancar yang cukup untuk mengembalikan hutang lancarnya sehingga memberikan peluang untuk mendapatkan kemudahan dalam memperoleh hutang dari investor (Ozkan:2001 dalam Mulianti:2010). Perusahaan yang memiliki current ratio tinggi berarti memiliki kinerja perusahaan yang bagus, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan. Faktor yang lain adalah profitabilitas. Profitabilitas yang semakin meningkat akan menurunkan minat perusahaan untuk melakukan pembiayaan melalui hutang. Selain itu, dalam Singnally theory, Bhattacharya (1979), dikemukakan bahwa profitabilitas yang tinggi menunjukkan prospek perusahaan yang bagus sehingga investor akan merespon positif dan nilai perusahaan akan meningkat.

Penelitian tentang pengaruh kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan juga masih belum memperlihatkan hasil yang konsisten pada hubungan antar variabel tersebut. (Nurhayati, 2008; Euis dan Taswan, 2002; Sujoko dan Soebiantoro (2007). Penelitian-penelitian tentang pengaruh ukuran perusahaan, risiko bisnis, likuiditas dan profitabilitas terhadap kebijakan hutang juga masih memberikan hasil yang belum konsisten. pada hubungan antar variabel tersebut. (Wahidahwati, 2001; Hartono dan Mahadwartha, 2002; Euis dan Taswan, 2002; Sujoko dan Soebiantoro, 2007, Nurhayati, 2008; dan Mulianti, 2010).

Berdasarkan latar belakang yang masih menunjukkan ketidakkonsistenan pengaruh antara variabel ukuran perusahaan, risiko bisnis, likuiditas, dan profitabilitas perusahaan yang mempengaruhi kebijakan hutang serta pengaruhnya terhadap nilai perusahaan maka akan menarik untuk melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan hutang perusahaan dan pengaruhnya terhadap nilai perusahaan. Dengan harapan untuk memperkuat hasil penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan mengkaji apakah ukuran perusahaan, risiko bisnis, likuiditas, dan profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan hutang? Dan apakah ukuran perusahaan, risiko bisnis, likuiditas, profitabilitas perusahaan, dan kebijakan hutang berpengaruh terhadap nilai perusahaan?

## **2. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **2.1. Nilai Perusahaan**

Tujuan utama perusahaan menurut perspektif keuangan adalah untuk memaksimalkan kekayaan atau nilai perusahaan. Dengan memaksimalkan nilai perusahaan berarti juga memaksimalkan kemakmuran pemegang saham yang merupakan tujuan utama perusahaan (Euis dan Taswan, 2002). Menurut Husnan (2000) nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Sedangkan menurut Keown (2004) nilai perusahaan merupakan nilai pasar atas surat berharga hutang dan ekuitas perusahaan yang beredar. Nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan setiap pemilik perusahaan selaku pemegang saham karena dengan nilai yang tinggi menunjukkan kemakmuran pemilik perusahaan juga tinggi. Nilai perusahaan pada

umumnya dapat diukur dari beberapa aspek, salah satunya adalah nilai pasar saham yaitu menggunakan rasio Price to book value (PBV). Rasio PBV merupakan perbandingan antara nilai saham menurut pasar dengan nilai buku ekuitas perusahaan. Dari rasio PBV menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan menciptakan nilai relatif terhadap jumlah modal yang diinvestasikan.

## 2.2. Kebijakan Hutang

Kebijakan hutang termasuk kebijakan pendanaan perusahaan yang bersumber dari eksternal. Penentuan kebijakan hutang ini berkaitan dengan struktur modal karena hutang merupakan salah satu komposisi dalam struktur modal. Perusahaan dinilai berisiko apabila memiliki porsi hutang yang besar dalam struktur modal, namun sebaliknya apabila perusahaan menggunakan hutang yang kecil atau tidak sama sekali maka perusahaan dinilai tidak dapat memanfaatkan tambahan modal eksternal yang dapat meningkatkan operasional perusahaan (Mamduh, 2004).

## 2.3. Teori Kebijakan Hutang

Teori kebijakan hutang telah dikembangkan dalam dua aliran (Brigham, 1995), yaitu:

### 1. Trade off theory

Teori trade off menyatakan bahwa utang bermanfaat karena bunga dapat mengurangi pajak, tetapi utang juga menimbulkan biaya yang berhubungan dengan kebangkrutan yang aktual dan potensial. Implikasi trade off theory menurut Brigham (1995). Adalah bahwa perusahaan dengan risiko bisnis yang lebih tinggi sebaiknya menggunakan lebih sedikit utang, karena makin tinggi risiko bisnis, peningkatan utang memperbesar beban bunga tetap, sehingga menurunkan laba dan menyebabkan perusahaan mengalami financial distress. Selain itu perusahaan yang terkena tingkat pajak yang lebih tinggi memperoleh penghematan pajak lebih tinggi bila menggunakan lebih banyak utang.

### 2. Signaling theory

Teori ini didasari adanya asimetri informasi yang terjadi antara manajemen dengan investor. Pada situasi tersebut, manajer mempunyai informasi tentang prospek perusahaan yang lebih baik dibandingkan dengan investor. Investor akan menilai prospek dari suatu perusahaan berdasarkan sinyal yang diberikan manajemen melalui keputusan pendanaannya. Fokus utama dari teori ini adalah mekanisme yang ditempuh manajemen untuk mendapatkan dana eksternal melalui alternatif utang atau penerbitan ekuitas baru. Perusahaan yang mempunyai prospek yang bagus akan mengalami kenaikan harga saham seiring dengan perspektif positif dari para investor. Seiring dengan pertumbuhan perusahaan, maka untuk kebutuhan pendanaan eksternal perusahaan akan memakai utang daripada penerbitan ekuitas baru. Hal ini dikarenakan manajemen lebih mementingkan pemegang saham lama daripada berbagi dengan pemegang saham baru. Sebaliknya bila perusahaan menerbitkan ekuitas, para investor akan menilai negatif prospek karena manajemen dianggap berbagi risiko dengan pemegang saham yang baru. Jadi pemilihan alternatif antara utang dan penerbitan ekuitas merupakan sinyal (signaling) manajemen kepada para investor tentang prospek perusahaan yang dapat mempengaruhi nilai dari sebuah perusahaan.

## 2.4. Ukuran Perusahaan (Firm Size)

Besar kecilnya perusahaan sangat berpengaruh terhadap struktur modal, terutama berkaitan dengan kemampuan memperoleh pinjaman, karena nilai aktiva yang dijadikan jaminan lebih besar dan tingkat kepercayaan bank juga lebih tinggi. Sudarma (2004) menemukan bukti bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan aktivitas pada perusahaan besar cenderung mudah memperoleh tambahan dana dari pihak peminjam sehingga manajemen bisa melakukan kesempatan investasi yang memberikan

keuntungan yang lebih tinggi sehingga menaikkan kepercayaan investor pada masa depan perusahaan yang akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan.

## 2.5. Risiko Bisnis

Aktivitas yang dilakukan perusahaan tidak dapat dipisahkan dari adanya risiko. Risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya akibat buruk atau kerugian yang tidak diinginkan (Imam: 2007 dalam Mulianti: 2010). Menurut Brigham dan Houston (1998) terdapat dua dimensi risiko, yaitu risiko keuangan serta risiko bisnis. Risiko keuangan merupakan risiko tambahan bagi pemegang saham biasa karena perusahaan menggunakan hutang. Sedangkan risiko bisnis merupakan tingkat risiko dari operasi perusahaan apabila tidak menggunakan hutang. Dengan demikian, risiko bisnis sering dihubungkan dengan pengambilan kebijakan hutang suatu perusahaan. Menurut Brigham dan Houston (1998) risiko bisnis merupakan ketidakpastian mengenai proyeksi pengembalian atas aktiva di masa mendatang. Suatu perusahaan dikatakan memiliki risiko bisnis yang tinggi apabila perusahaan tersebut memiliki volatilitas pendapatan yang tinggi sehingga mempunyai probabilitas kebangkrutan yang tinggi.

## 2.6. Likuiditas Perusahaan

Likuiditas secara umum dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu perusahaan untuk dapat membayar hutang-hutangnya yang telah jatuh tempo. Likuiditas juga diartikan sebagai kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban keuangannya dalam jangka pendek atau yang harus segera dibayar (Mamduh, 2003). Ukuran likuiditas perusahaan yang sering digunakan adalah current ratio yang merupakan perbandingan antara aktiva lancar (current asset) dengan hutang lancar (current liabilities).

## 2.7. Profitabilitas Perusahaan

Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin besar pula tersedianya dana internal untuk investasi, sehingga penggunaan hutang akan lebih kecil. Ismiyanti dan Hanafi (2003) menemukan bahwa ROA berhubungan negatif dan signifikan dengan kebijakan hutang. Pada tingkat profitabilitas rendah, perusahaan menggunakan hutang untuk membiayai operasional. Sebaliknya pada tingkat profitabilitas tinggi, perusahaan mengurangi penggunaan hutang karena perusahaan mengalokasikan sebagian besar keuntungan pada laba ditahan sehingga dapat mengandalkan dana internalnya untuk investasi. Semakin besar keuntungan yang diperoleh semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayarkan dividennya dan melanjutkan kegiatan usahanya atau menginvestasikan kembali keuntungannya. Dengan demikian semakin besar profitabilitas semakin menghemat biaya modal. Para manajer tidak hanya mendapatkan dividen tapi juga akan memperoleh power yang lebih besar dalam menentukan kebijakan perusahaan. Oleh karena itu profitabilitas menjadi pertimbangan penting bagi investor dalam keputusan investasi.

## 2.8. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan hutang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti. Begitu pula dengan penelitian tentang pengaruh kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Euis dan Taswan (2002) dengan judul Pengaruh Kebijakan Hutang Terhadap Nilai Perusahaan Serta Beberapa Faktor yang Mempengaruhinya. Sampel pada penelitian ini yaitu sebesar 95 perusahaan manufaktur yang telah go publik sejak 1993 hingga 1997. Hasil pengujian terhadap variabel dependen kebijakan hutang (leverage ratio) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan, insider ownership berpengaruh positif tidak signifikan. Sementara itu kebijakan hutang tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Sujoko dan Soebiantoro (2007) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Struktur Kepemilikan, Faktor Intern, Dan Faktor Ekstern Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empirik Pada Perusahaan Manufaktur dan Non

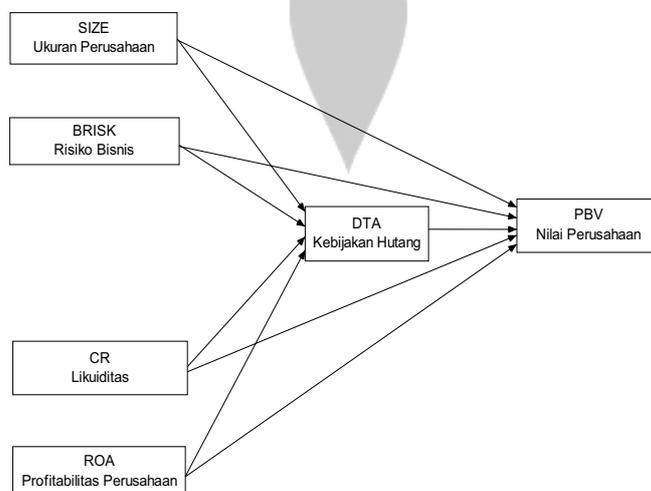
Manufaktur di Bursa Efek Jakarta). Sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 134 perusahaan. Teknik analisa pada penelitian ini dengan SEM menggunakan AMOS 4,01. Variabel struktur kepemilikan terdiri dari kepemilikan institusional dan manajerial, faktor intern terdiri dari profitabilitas, dividen, ukuran perusahaan, dan faktor ekstern terdiri dari suku bunga, keadaan pasar modal, pertumbuhan pasar, pangsa pasar relatif. Hasil pengujian terhadap variabel dependen leverage ratio menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, suku bunga dan profitabilitas berpengaruh negative signifikan. Pertumbuhan pasar, dividen, ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan. Sedangkan kepemilikan manajerial, keadaan pasar modal, dan pangsa pasar relatif menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Sementara itu leverage ratio berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan.

Nurhayati (2008) melakukan kajian tentang pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap kebijakan dividen dan kebijakan hutang serta pengaruhnya dalam penciptaan nilai perusahaan. Teknik analisa yang digunakan adalah Path Analysis. Hasil kajian ditemukan bahwa ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen, sedangkan kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusi tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Kepemilikan saham oleh manajer, kepemilikan saham oleh institusi, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan hutang. Sedangkan profitabilitas perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan hutang. Kaitannya dengan penciptaan nilai perusahaan, variabel-variabel kepemilikan manajerial, profitabilitas, ukuran perusahaan, kebijakan hutang dan kebijakan dividen berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, hanya kepemilikan institusi yang tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Mulianti (2010), yang melakukan penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan hutang dan pengaruh kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan: studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2004-2007. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda, dan regresi linear sederhana, sehingga terdapat dua model regresi. Model pertama adalah pengaruh ukuran perusahaan, risiko bisnis, dan likuiditas terhadap kebijakan hutang, sedangkan model kedua adalah pengaruh kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan hutang. Begitu pula dengan variabel risiko bisnis berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan hutang. Sedangkan variabel likuiditas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kebijakan hutang. Kebijakan hutang sendiri berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

## 2.9. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, berikut ini digambarkan model (bagan) kerangka pemikiran pengaruh antar variabel penelitian.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

### Hipotesis

- Hipotesis 1 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan hutang
- Hipotesis 2 : Risiko Bisnis berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan hutang.
- Hipotesis 3 : Likuiditas perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan hutang
- Hipotesis 4 : Profitabilitas perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan hutang.
- Hipotesis 5 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan
- Hipotesis 6 : Risiko Bisnis berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan.
- Hipotesis 7 : Likuiditas perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.
- Hipotesis 8 : Profitabilitas perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.
- Hipotesis 9 : Kebijakan hutang berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan.

## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kausal. Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan, penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka. Adapun data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang diperoleh terdiri dari data yang diperoleh dari laporan tahunan tahun 2007-2009 versi auditor independen yang bersumber dari database Bursa Efek Indonesia (<http://www.idx.co.id/>). Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2007 sampai tahun 2010. Sedangkan sampel yang diambil adalah perusahaan-perusahaan di sektor non jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mempunyai data laporan keuangan pada tahun 2007 sampai 2010. Teknik yang digunakan untuk mendapatkan sampel yang representatif adalah purposive sampling. Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan antara data time series (data diurutkan menurut waktu) dan data cross sectional (data lintas seksi) yang disebut dengan pooled data. Dengan memakai teknik pooled data diperoleh sampel penelitian sebanyak 108 perusahaan.

### 3.2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Variabel Endogen (Endogenous variable) atau dependent variable:

##### a. Nilai Perusahaan (PBV)

Nilai perusahaan didefinisikan sebagai persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan dalam mengelola sumber dayanya. Variabel nilai perusahaan diukur dari rasio nilai pasar (market value ratios). Rasio nilai pasar menghubungkan harga saham perusahaan dan nilai buku per saham. Rasio nilai pasar didefinisikan sebagai perbandingan antara harga penutupan saham dengan nilai buku per saham. (Soliha dan Taswan, 2002). Semakin besar nilai rasio ini semakin baik kinerja perusahaan.

$$\text{Price to Book Value Ratio} = \text{PBV} = \frac{\text{Harga Saham}}{\text{Nilai buku per Saham}}$$

##### b. Kebijakan Hutang (DTA)

Penelitian yang dilakukan oleh Muliarti (2010), menggunakan variabel kebijakan hutang yang salah satunya diproksi dengan membagi total hutang dengan total aktiva yang menunjukkan seberapa besar aktiva yang dibiayai dengan hutang perusahaan. Leverage ratio (debt to total asset/ DTA), dengan rumus di bawah ini :

$$\text{Debt to Total Asset Ratio} = \text{DTA} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Asset}}$$

2. **Variabel Eksogen (Exogenous variable) atau independent variable yaitu:**

a. **Ukuran Perusahaan (SIZE)**

Variabel ukuran perusahaan (firm size) diberi simbol SIZE. Variabel ini diukur dengan menggunakan logaritma natural dari nilai buku aktiva (Soliha dan Taswan, 2002).

$$\text{SIZE} = \text{Logaritma Natural Nilai Total Aktiva Perusahaan}$$

b. **Risiko Bisnis**

Risiko bisnis merupakan ketidakpastian perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Risiko bisnis pada penelitian ini diprosikan dengan standar deviasi dari EBIT (Earning Before Interest and Tax).

$$\text{BRISK} = \text{stdev EBIT}$$

Deviasi standar merupakan ukuran dispersi (penyebaran), deviasi standar merupakan ukuran secara statistik dari risiko dimana semakin besar nilai deviasi standar maka semakin besar risikonya.

c. **Likuiditas**

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pada penelitian ini, likuiditas dihitung dengan membagi aktiva lancar dengan hutang lancarnya. Likuiditas (current ratio/ CR) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{CR} = \frac{\text{Aktiva lancar}}{\text{Hutang lancar}}$$

d. **Profitabilitas Perusahaan (Return on Asset / ROA)**

Variabel ini diprosi dari ROA. Variabel ROA dinyatakan sebagai perbandingan EBIT terhadap total aset. Variabel ROA diperoleh dari ICMD pada bagian summary of financial statement.

$$\text{ROA} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Total Asset}}$$

3.3. **Metode Analisis Data**

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Analisis Jalur (Path Analysis). Persamaan jalur yang dibangun adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{DTA} &= b_1 \text{ SIZE} + b_2 \text{ BRISK} + b_3 \text{ CR} + b_4 \text{ ROA} + e_1 \\ \text{PBV} &= b_5 \text{ SIZE} + b_6 \text{ BRISK} + b_7 \text{ CR} + b_7 \text{ ROA} + b_8 \text{ DTA} + e_2 \end{aligned}$$

Dimana:

SIZE = Ukuran Perusahaan

BRISK = Risiko Bisnis

CR	= Likuiditas (Current Ratio)
ROA	= Profitabilitas Perusahaan (Return on Asset)
DTA	= Kebijakan Hutang (Debt to Total Asset Ratio)
PBV	= Nilai Perusahaan (Price to Book Value Ratio)
B	= Beta, koefisien regresi
e	= Galat model

Untuk menganalisis hal tersebut perlu dilakukan beberapa uji statistik yang akan dijelaskan berikut ini.

#### 1. Uji Asumsi Model

##### a. Uji Normalitas Data

Sebaran data harus dianalisis untuk mengetahui apakah asumsi normalitas dipenuhi, sehingga data dapat diolah lebih lanjut pada path diagram. Pengujian dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov (Ghozali, 2008). Apabila nilai K-S untuk variabel-variabel yang akan diuji nilai-nilainya berada di atas  $\alpha = 0,05$ . Hal ini berarti variabel-variabel yang akan dianalisis terdistribusi secara normal.

##### b. Uji Outliers

Uji outliers dilakukan untuk menghilangkan nilai-nilai ekstrim pada hasil observasi. Deteksi terhadap data yang dikategorikan sebagai outliers dengan cara mengkonversi nilai data penelitian ke dalam Z-score, yang mempunyai rata-rata nol dengan standar deviasi satu.

#### 2. Uji Estimasi Model

**Analisis atas kesesuaian model (Goodness-of-fit)**, yaitu menguji hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan antara matriks kovarians data sampel dibandingkan dengan matriks kovarians populasi yang diestimasi. Analisis ini memerlukan beberapa fit indeks untuk mengukur kebenaran model yang diajukan diantaranya adalah  $X^2$  – Chi Square, RMSEA, GFI, AGFI, CMIN/DF, TLI, dan CFI (Hair, 1998)

#### 3. Analisis atas koefisien jalur (path coefficients), dianalisis melalui signifikansi besaran regression weight dari model. Hasil pengujian ini akan menunjukkan apakah semua jalur yang dianalisis menunjukkan critical ratio (CR) yang signifikan, terlihat dari besarnya koefisien jalur (Estimate dan Standardized estimate) dengan nilai CR yang lebih besar dari 2,0 atau tingkat signifikansi uji hipotesis yang lebih kecil dari 5%. Pengujian ini juga akan menunjukkan besaran dari efek menyeluruh, efek langsung serta efek tidak langsung dari satu variabel terhadap variabel lainnya.

#### 4. ANALISIS DATA

##### 4.1. Uji Asumsi Model Evaluasi Criteria Goodness-of-fit

###### 4.1.1. Uji Normalitas Data

Dengan uji Kolmogorov-Smirnov, setelah mentransformasi data menjadi berbentuk logaritma, terlihat bahwa nilai K-S untuk variabel-variabel yang akan diuji nilai-nilainya berada di atas  $\alpha = 0,05$ . Ini berarti variabel-variabel yang akan dianalisis terdistribusi secara normal.

###### 4.1.2. Uji Outliers Data

Dengan cara mengkonversi nilai data ke dalam skor standardised atau yang biasa disebut z-score, menunjukkan bahwa data z-score mempunyai nilai rata-rata sama dengan nol dan standar deviasi sama dengan satu. Berarti tidak ada data observasi yang outlier.

#### 4.1.3. Uji Kesesuaian Model (Goodness-of-fit Test)

Ada beberapa indeks kesesuaian dan cut-off value-nya untuk menguji diterima atau ditolaknya sebuah model (uji kelayakan model) seperti yang disajikan dalam tabel 2. Dengan memperhatikan uji kesesuaian di atas, maka dapat dikatakan bahwa model tersebut secara umum dapat diterima. Model penelitian ini secara umum dapat diterima untuk konfirmatori atas dimensi atau faktor serta hubungan kausalitas antara variabel yang diteliti.

**Tabel 1.** Uji Kesesuaian Model (Goodness of fit index)

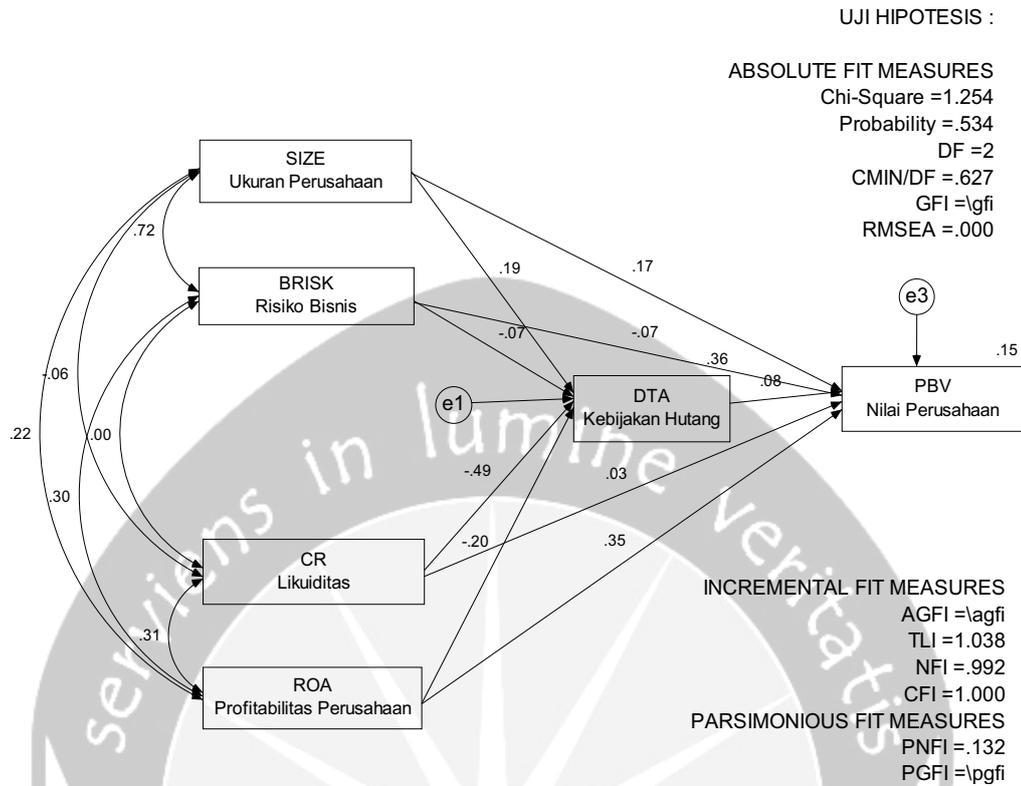
Kriteria	Hasil	Nilai Kritis	Evaluasi model
<b>1. Absolute Fit Measures</b>			
Chi-Square (CMIN)	1,254	Diharapkan kecil. $\leq 5.991465$ $\alpha = 0,05; df = 2$	Fit
Probability	0,534	$\geq 0,05$	Fit
DF	2		
Chi-Square relative (CMIN/DF)	0,627	$\leq 2$	Fit
GFI	-	$\geq 0,9$	-
RMSEA	0,000	$\leq 0,08$	Fit
<b>2. Incremental Fit Measures</b>			
AGFI	-	$\geq 0,9$	-
TLI	1,000	$\geq 0,95$	Fit
NFI	0,992	$\geq 0,95$	Fit
CFI	1,000	$\geq 0,95$	Fit
<b>3. Parsimonious Fit Measures</b>			
PNFI	0,132	$\geq 0,60$	Tidak fit
PGFI	-	$\geq 0,60$	-

Sumber : Hasil olah data dengan Amos 16.0

#### 4.2. Pengaruh dan Signifikansi antara Variabel

Estimasi nilai parameter dilakukan dengan default model yang digunakan adalah maximum likelihood. Pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dapat dilihat dari hasil koefisien standardized dan unstandardized regression. Hasil estimasi adalah seperti yang disajikan dalam gambar 2. Hasil pengujian ini akan menunjukkan apakah semua jalur yang dianalisis menunjukkan critical ratio (CR) yang signifikan, terlihat dari besarnya koefisien jalur (Estimate dan Standardized estimate) dengan nilai CR yang lebih besar dari 2,0 atau tingkat signifikansi uji hipotesis yang lebih kecil dari 0,01, 0,05 atau 0,1. Pengujian ini juga akan menunjukkan besaran dari efek menyeluruh, efek langsung serta efek tidak langsung dari satu variabel terhadap variabel lainnya. Hasilnya seperti yang disajikan di tabel 3.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Hutang dan Nilai Perusahaan  
(Mafizaton Nurhayati)



Sumber : Hasil olah data dengan Amos 16.0

Gambar 2. Hasil Analisis Jalur ( )

Tabel 2. Pengaruh dan Signifikansi antar Variabel

HIPOTESIS	R <sup>2</sup>		Standardised Estimate (β) (loading factor)	C.R. (t hitung)	P	Keterangan	Efek		
	DTA	PBV					xDirect	Indirect	Total
H1	0.363	0.145	0.189	1.702	0.089*	Signifikan	0.189	0	0.189
H2			-0.070	-0.620	0.535	Tidak Signifikan	-0.070	0	-0.070
H3			-0.487	-5.935	0.000***	Signifikan	-0.487	0	-0.487
H4			-0.201	-2.352	0.019**	Signifikan	-0.201	0	-0.201
H5			0.166	1.268	0.205	Tidak Signifikan	0.166	.016	0.182
H6			-0.070	-0.533	0.594	Tidak Signifikan	-0.070	-.006	-0.076

HIPOTESIS	R <sup>2</sup>		Standardised Estimate (β) (loading factor)	C.R. (t hitung)	P	Keterangan	Efek		
	DTA	0.363					xDirect	Indirect	Total
	PBV	0.145							
H7	PBV <--- CR		0.032	0.289	0.772	Tidak Signifikan	0.032	-.041	-0.009
H8	PBV <--- ROA		0.351	3.451	0.000***	Signifikan	0.351	-.017	0.334
H9	PBV <--- DTA		0.084	0.753	0.451	Tidak Signifikan	0.084	0	0.084

Sumber : Hasil olah data dengan Amos 16.0

- \* Signifikan pada p=0,10 lemah;
- \*\* Signifikan pada p=0,05 kuat;
- \*\*\* Signifikan pada p=0,01 kuat sekali.

Nilai koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) untuk model factor-faktor yang mempengaruhi variable kebijakan hutang pada perusahaan sector nonjasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2006-2009 sebesar 0.363, sedangkan untuk model yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah sebesar 0.145. Hal ini menunjukkan bahwa besar pengaruh variabel independen yaitu ukuran perusahaan, risiko bisnis, likuiditas, dan profitabilitas terhadap variabel dependen yaitu kebijakan hutang ( ) yang dapat diterangkan oleh model persamaan ini adalah sebesar 36,3% sedangkan sisanya sebesar 63,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi. Sedangkan besar pengaruh ukuran perusahaan, risiko bisnis, likuiditas, profitabilitas dan kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan ( ) yang dapat diterangkan oleh model persamaan ini adalah sebesar 14,5% sedangkan sisanya sebesar 85,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

### 4.3. Pembahasan Hasil Penelitian

#### 4.3.1. Pengaruh Ukuran Perusahaan (SIZE) terhadap Kebijakan Hutang (Debt to Assets=DTA)

Hasil pengujian adalah bahwa ukuran perusahaan (SIZE) manufaktur yang terdaftar di BEI terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan hutang (DTA). Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa ukuran perusahaan di sektor non jasa yang terdaftar di BEI terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan hutang atau semakin besar ukuran perusahaan maka semakin meningkat pula kebijakan hutang pada perusahaan sector non jasa yang terdaftar di BEI. Hasil pembuktian hipotesis ini diperkuat dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Euis dan Taswan (2002), Sujoko dan Soebiantoro (2007) serta Nurhayati (2008).

Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan yang besar maka kebutuhan akan dana juga akan semakin besar. Salah satu alternatif pemenuhan dana tersebut berasal dari pendanaan eksternal yaitu hutang. Dengan demikian, semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar dana investasi yang dapat diperoleh dari hutang. Perusahaan besar memiliki keuntungan aktivitas serta lebih dikenal oleh publik dibandingkan dengan perusahaan kecil sehingga kebutuhan hutang perusahaan yang besar akan lebih tinggi dari perusahaan kecil. Selain itu, semakin besar ukuran perusahaan maka perusahaan semakin transparan dalam mengungkapkan kinerja perusahaan kepada pihak luar, dengan demikian perusahaan semakin mudah mendapatkan pinjaman karena semakin dipercaya oleh kreditur. Oleh karena itu, ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan hutang.

#### **4.3.2. Pengaruh Risiko Bisnis (BRISK) terhadap Kebijakan Hutang (DTA)**

Hasil pengujian adalah bahwa risiko bisnis (BRISK) perusahaan sektor nonjasa yang terdaftar di BEI berpengaruh negative tetapi tidak signifikan terhadap kebijakan hutang (DTA). Hasil ini dimungkinkan karena pada jangka waktu penelitian antara 2007 sampai dengan 2010 terjadi krisis global, sehingga sebagian besar perusahaan akan mempertimbangkan lebih hati-hati dalam kebijakan penggunaan hutangnya, apakah perusahaan tersebut mempunyai risiko bisnis yang tinggi maupun rendah. Mestinya, peningkatan risiko bisnis sangat berdampak pada penurunan kebijakan hutang. Hal ini disebabkan manajemen akan mempertimbangkan kembali apabila risiko bisnis yang akan ditanggung meningkat maka manajemen perusahaan akan berupaya untuk menurunkan hutang. Hal ini terkait dengan adanya ketidakpastian pendapatan yang diterima perusahaan. Tetapi, pada kenyataannya di masa krisis tersebut perusahaan yang semakin menurun risiko bisnisnya pun juga melakukan penurunan kebijakan hutang. Hal ini menyebabkan secara rata-rata risiko bisnis berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kebijakan hutang.

#### **4.3.3. Pengaruh Likuiditas (Current Ratio) terhadap Kebijakan Hutang (DTA)**

Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa likuiditas (CR) mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kebijakan hutang (DTA). Hasil pembuktian ini walaupun secara signifikan tetapi mempunyai arah yang berlawanan dengan yang diharapkan.

Mestinya, semakin tinggi likuiditas menunjukkan semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban dalam jangka pendeknya yang memberikan peluang untuk mendapatkan kemudahan dalam memperoleh hutang karena adanya kepercayaan terhadap kreditor. Dengan demikian, peningkatan likuiditas suatu perusahaan akan meningkatkan kebijakan hutangnya. Namun berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada saat terjadi krisis global, peningkatan likuiditas bahkan menyebabkan peningkatan kehati-hatian perusahaan dalam memutuskan kebijakan hutang. Perusahaan yang semakin tinggi kemampuannya dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau semakin tinggi likuiditas (CR) perusahaan membuat perusahaan tersebut lebih berhati-hati untuk mendapatkan hutang yang dapat digunakan untuk ekspansi perusahaan. Hal ini dimungkinkan karena waktu penelitian yang terjadi krisis global.

#### **4.3.4. Pengaruh Profitabilitas (ROA) terhadap Kebijakan Hutang (DTA)**

Penelitian ini membuktikan hipotesis yang mengatakan bahwa profitabilitas perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan hutang. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin besar pula tersedianya dana internal untuk investasi, sehingga penggunaan hutang akan lebih kecil. Penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh Ismiyanti dan Hanafi (2003), Sudarma (2004) serta Sujoko dan Soebiantoro (2007) yang menemukan bahwa profitabilitas perusahaan berhubungan negatif dan signifikan dengan kebijakan hutang. Pada tingkat profitabilitas rendah, perusahaan menggunakan hutang untuk membiayai operasional. Sebaliknya pada tingkat profitabilitas tinggi, perusahaan mengurangi penggunaan hutang karena perusahaan mengalokasikan sebagian besar keuntungan pada laba ditahan sehingga dapat mengandalkan dana internalnya untuk investasi. Jadi profitabilitas yang semakin meningkat akan meningkatkan laba yang ditahan. Tersedianya dana intern yang semakin meningkat akan menurunkan minat perusahaan untuk melakukan pembiayaan melalui hutang sehingga menurun.

#### **4.3.5. Pengaruh Ukuran Perusahaan ( ) terhadap Nilai Perusahaan ( )**

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa investor tidak mempertimbangkan ukuran perusahaan dalam membeli saham. Temuan ini juga menunjukkan bahwa di mata investor, sebuah perusahaan yang mempunyai kinerja yang bagus tidak sekedar dilihat dari ukuran perusahaannya, sehingga ukuran perusahaan bisa saja memberikan pengaruh yang positif terhadap nilai perusahaan tetapi tidak secara signifikan.

#### **4.3.6. Pengaruh Risiko Usaha (BRISK) terhadap Nilai Perusahaan ( )**

Hasil pengujian adalah bahwa risiko bisnis (BRISK) perusahaan sektor nonjasa yang terdaftar di BEI berpengaruh negative tetapi tidak signifikan terhadap nilai perusahaan (PBV). Hasil ini dimungkinkan karena pada jangka waktu penelitian antara 2007 sampai dengan 2010 terjadi krisis global. Hal ini terkait dengan adanya ketidakpastian pendapatan yang diterima perusahaan. Tetapi, pada kenyataannya di masa krisis tersebut perusahaan-perusahaan baik yang memiliki risiko bisnis yang rendah maupun yang tidak memang mengalami penurunan nilai perusahaan. Sehingga secara rata-rata perilaku perusahaan di sector non jasa risiko bisnis berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.

#### **4.3.7. Pengaruh Likuiditas Perusahaan ( ) terhadap Nilai Perusahaan ( )**

Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa likuiditas (CR) mempunyai pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan terhadap nilai perusahaan (PBV). Hal ini mengindikasikan bahwa jika kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya semakin tinggi mestinya nilai perusahaan akan meningkat secara berarti. Tetapi, kenyataannya peningkatan kemampuan perusahaan tersebut tidak cukup meningkatkan nilai perusahaan tersebut secara signifikan. Dugaan mengenai ini adalah karena pada saat terjadi krisis ekonomi secara global, akan berdampak kepada penurunan nilai perusahaan secara rata-rata. Sehingga kinerja perusahaan yang bagus dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya sekalipun tidak dapat mengangkat nilai perusahaan.

#### **4.3.8. Pengaruh Profitabilitas Perusahaan (ROA) terhadap Nilai Perusahaan ( )**

Penciptaan nilai perusahaan dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan memperoleh laba ternyata terbukti, yaitu bahwa profitabilitas perusahaan (ROA) berhubungan positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan (PBV). Hasil penelitian Soliha dan Taswan (2002), Sujoko dan Soebiantoro (2007), serta Nurhayati (2008) juga menyatakan bahwa profitabilitas perusahaan berhubungan positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Profit yang tinggi memberikan indikasi prospek perusahaan yang baik sehingga dapat memicu investor untuk ikut meningkatkan permintaan saham. Permintaan saham yang menaik menyebabkan nilai perusahaan meningkat. Temuan penelitian ini mendukung yang menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai yang semakin meningkat merupakan bahwa perusahaan tersebut mempunyai prospek bagus di masa yang akan datang (Sujoko dan Soebiantoro, 2007).

#### **4.3.9. Pengaruh Kebijakan Hutang (DTA) terhadap Nilai Perusahaan ( )**

Penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa kebijakan hutang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil yang terjadi adalah bahwa variabel kebijakan hutang ( ) menunjukkan hasil yang positif, tetapi tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan utang tidak menyebabkan perubahan nilai perusahaan. Meskipun hasilnya tidak signifikan, bukan berarti bahwa investor dapat mengabaikan kebijakan hutang suatu perusahaan. Sering kali kondisi fi yang dihadapi perusahaan disebabkan oleh kegagalan dalam membayar utang. Proporsi utang yang semakin tinggi menyebabkan fi yang tinggi. dan akan menimbulkan risiko kebangkrutan.

## 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terlihat bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan hutang. Risiko bisnis berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kebijakan hutang. Likuiditas perusahaan ( ) berpengaruh negative dan signifikan terhadap kebijakan hutang. Profitabilitas perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan hutang. Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Risiko bisnis berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Likuiditas perusahaan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Kebijakan hutang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan.

Jadi, dalam penelitian ini ditemukan bahwa dari 9 (sembilan) hipotesis yang diajukan, ditemukan hanya ada 3 (tiga) hipotesis yang dapat diterima, yaitu pengaruh positif signifikan ukuran perusahaan terhadap kebijakan hutang, pengaruh positif signifikan profitabilitas perusahaan terhadap kebijakan hutang, dan pengaruh positif signifikan profitabilitas perusahaan terhadap nilai perusahaan.

### 5.2 Saran

Dengan memperhatikan kesimpulan penelitian tersebut, maka dapat disarankan kiranya baik perusahaan, investor maupun masyarakat mempertimbangkan pengaruh ketiga variabel tersebut yaitu variabel ukuran dan profitabilitas perusahaan terhadap kebijakan hutang, dan pengaruh profitabilitas perusahaan terhadap nilai perusahaan dalam membuat keputusan perusahaan ataupun keputusan investasinya.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini memiliki kelemahan karena terdapat beberapa aspek yang belum dimasukkan dalam model penelitian. Penelitian ini hanya terfokus pada dua variable endogen (PBV dan DTA) dan empat variabel eksogen (risiko bisnis, ukuran, likuiditas dan profitabilitas perusahaan). Padahal variabel yang terkait dengan nilai perusahaan relatif banyak, sehingga kemungkinan akan didapat kesimpulan yang berbeda.

Sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut disarankan bahwa penelitian selanjutnya perlu memperluas model dengan menambah jumlah variabelnya yang memungkinkan, meningkatkan sample, dan diharapkan juga untuk tidak hanya berfokus pada sektor non jasa saja tetapi seluruh macam industri agar dapat diperbandingkan dengan penelitian ini. Mengingat jenis usaha yang berbeda akan memiliki karakteristik yang berbeda sehingga bisa melahirkan perilaku keputusan yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Brigham, Eugene F., (1995), " , Seventh Edition, The Dryden Press, New York.
- Brigham, Eugene F., dan Joel F. Houston, (1998), , Terjemahan oleh Dodo Suhato dan Herman Wibowo, 2001. Edisi Kedelapan, Erlangga, Jakarta.
- Ghozali, Imam, (2005), . Badan Penerbit Universitas Diponegoro:Semarang
- Ghozali, Imam., (2008), . Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Hair JE, Jr. , Anderson RE, Tatham, RL., Black WG., (1998), , Prentice Hall International Inc. New york.
- Hanafi, Mamduh M., (2004), , Edisi 2004-2005, BPFE, Yogyakarta.

- Hasanah, Uswatun., (2007), "Analisis Simultan Antara Kepemilikan Manajerial, Risiko, Kebijakan Hutang dan Kebijakan Dividen dalam Perspektif Konflik Keagenan: Menggunakan Metode Two-Stage Leastsquares", Universitas Airlangga. Surabaya.
- Husnan, Suad. dan Enny Pudjiastuti, (1998), , Edisi Kedua, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Indahwati, (2003), "Analisis Pengaruh Leverage dan Kebijakan Struktur Modal terhadap Kebijakan Utang dan Nilai Perusahaan Go Publik Pasar Modal Indonesia Selama Krisis 1998-2001", , Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang.
- Ismiyanti, Fitri dan Mamduh M.Hanafi, (2003), "Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Risiko, Kebijakan Utang dan Kebijakan Dividen : Analisis Persamaan Simultan", , Simposium Nasional Akuntansi VI, Surabaya : Universitas Airlangga, hlm. 260-271.
- Junarsin, John E., (2011), "Manajemen Risiko dan Nilai Perusahaan", [http://cwma.or.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=95&Itemid=66](http://cwma.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=95&Itemid=66). diunduh 10 April 2011.
- Keown, Arthur J., David F. Scott Jr., John D. Martin, J. William Petty, (2002), , Terjemahan Oleh Haryandini, 2004, Edisi Sembilan, PT Indeks, Jakarta.
- Modigliani, F., Miller, M.H., (1958), "The Cost Of Capital, Corporae finance and the Theory of Investement", , Vol. XIVIII. No. 3, pp. 261-297.
- Mulianti, Fitri Mega., (2010), "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Hutang Dan Pengaruhnya terhadap Nilai Perusahaan (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 2004-2007)", Program Studi Magister Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nurhayati, Mafizatun, (2008), "Pengaruh Struktur Kepemilikan, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Hutang dan Kebijakan Dividen dalam Penciptaan Nilai Perusahaan : Studi Empirik pada Perusahaan Sektor Non Jasa Di Bursa Efek Jakarta", , Universitas Budi Luhur Jakarta.
- Soliha, Euis dan Taswan, (2002), "Pengaruh Kebijakan Hutang terhadap Nilai Perusahaan serta Beberapa Faktor yang Mempengaruhinya", . September
- Sudarma, Made, (2004), "Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham, Faktor Intern dan Faktor Ekstern Terhadap Struktur Modal dan Nilai Perusahaan", , Program Pascasarjana, Universitas Brawijaya Malang
- Sujoko dan Ugy Soebiantoro, (2007), "Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham, Leverage, Faktor Intern Dan Faktor Ekstern Terhadap Nilai Perusahaan (Studi empirik pada perusahaan manufaktur dan non manufaktur di Bursa Efek Jakarta)" 9, ( 1), hlm. 41-48
- Wahidahwati, (2002), "Kepemilikan Manajerial dan Agency Conflict : Analisis Persamaan Simultan Non Linier dari Kepemilikan Manajerial, Penerimaan Risiko (Risk Taking), Kebijakan Utang dan Kebijakan Dividen", . Ikatan Akuntansi Indonesia. hlm.601-625
- Weston, J.Fred dan Thomas E.Copeland, (1992), , Terjemahan oleh A.Jaka Wasana dan Kibrandoko,1995, Edisi Kesembilan (Edisi Revisi), Bumiaksara, Jakarta.
- Zulhawati, (2004), "Analisis Dampak Kepemilikan Saham oleh Insider pada Kebijakan Hutang dalam Mengontrol Konflik Keagenan", , 11, hlm.240-249

## **STRUKTUR PASAR DAN KINERJA INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT) INDONESIA TAHUN 2007-2010**

Florentina  
**Fakultas Ekonomi**  
**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**  
Email: florentina.tjan@gmail.com

Y.Sri Susilo  
**Fakultas Ekonomi**  
**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**  
Email: yssusilo@gmail.com

### **Abstract**

This research aims to identify and analyze the market structure and the performance of Indonesian textile industry in 2007-2010. Model and tools that used in this research are  $CR_4$  to analyze market structure, economic value added (EVA) to analyze performance and pooled data regression to analyze whether the market structure affect the performance. Secondary data is used, in the form of time series and cross section data contained in the annual report of 16 textile companies listed on Indonesia Capital Market, with observation period 2007-2010.

The results of this research indicate that Indonesian textile industry market structure is tight oligopoly. Overall, Indonesian textile industry in 2007-2010 was able to produce economic value added. This condition indicates that the performance of Indonesian textile industry is good enough. This research uses fixed effect model in the pooled data regression analysis. The result of this analysis indicates that the market share (MS) variable as proxy of market structure is significantly have negative effect to the EVA variable as proxy of performance. This effect is caused by a large market share that led to inefficiency in the companies and the old industrial machinery results on the decreasing productivity.

**Keywords:** Market structure, performance, textile industry, economic value added, market share.

### **1. PENDAHULUAN**

Perdagangan barang dan jasa antar negara di dunia membuat setiap negara mampu memenuhi kebutuhan penduduknya dan memperoleh keuntungan dengan mengekspor barang-barang yang diproduksi di dalam negeri. Ekspor mempunyai peranan penting sebagai penghasil devisa dan pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) bagi Indonesia. Indonesia menempati peringkat ke 30 dari 35 negara-negara pengekspor terbesar di dunia (Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, 2005). Ekspor Indonesia dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu ekspor migas (minyak mentah, hasil olahan minyak dan gas) dan non migas yang meliputi sektor pertanian, sektor pertambangan dan sektor industri. Pada tahun 2007 sektor industri merupakan sektor dengan nilai ekspor terbesar dibandingkan sektor nonmigas lain dan migas, yaitu sebesar 63,53 % dari total ekspor Indonesia. Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia memainkan peran yang cukup besar terhadap perekonomian nasional. Pada 2010, industri ini memberikan kontribusi sebesar 11,43 % terhadap total ekspor nasional. Industri TPT ini juga memberi kontribusi sebesar 2,45% terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan mampu menghasilkan nilai tambah sebesar 55,24 milyar rupiah. Sementara daya serap industri ini terhadap

tenaga kerja juga cukup besar, mencapai 1,128 juta tenaga kerja (Kemenperin, 2008). Produk TPT Indonesia juga masih berhasil mendapat tempat yang cukup baik di pasar luar negeri, bahkan memiliki daya saing yang cukup tinggi di pasar internasional. Ini terbukti dari cukup besarnya kontribusi devisa yang dihasilkan dari sektor ini dari tahun ke tahun maupun kontribusi Indonesia terhadap perdagangan TPT internasional dibanding negara-negara eksportir lainnya. Pada 2006 misalnya, devisa yang dihasilkan dari sub sektor TPT mencapai US\$ 9,5 miliar. Dan juga Indonesia termasuk dalam 10 negara pengekspor tekstil terbesar di dunia.

Namun hingga saat ini, industri TPT Indonesia menghadapi berbagai masalah. Salah satu permasalahan terbesar industri TPT Indonesia saat ini adalah usia mesin-mesin yang sudah sangat tua. Biaya energi yang mahal merupakan permasalahan lain yang cukup mengganggu daya saing produk tekstil Indonesia. Indonesia masih dihadapi biaya pelabuhan yang cukup mahal, dengan termahal kedua diantara negara-negara ASEAN setelah Singapura dan juga serbuan produk tekstil dari China yang menguasai hampir 50% pangsa pasar domestik, membuat perkembangan index produksi Industri TPT pada tahun 2006-2010 cenderung menurun.

Dari uraian tersebut muncul pertanyaan bagaimana kondisi industri TPT sekarang ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk struktur pasar pada tahun 2007-2010, apakah industri TPT Indonesia sudah mampu menciptakan nilai tambah secara ekonomi dan apakah struktur pasar mempengaruhi kinerja industri TPT Indonesia tahun 2007-2010. Penelitian ini terdiri dari 5 bagian. Setelah bagian pendahuluan, disajikan studi terkait yang menjelaskan tentang stuktur dan kinerja. Bagian selanjutnya merupakan metode penelitian, kemudian bagian keempat merupakan bagian yang menjelaskan hasil dan pembahasan dari penelitian. Bagian akhir merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran untuk melengkapi penelitian ini.

## **2. STUDI TERKAIT**

Supramono dan Elletarianti (2004) dengan judul penelitian "Pengukuran Kinerja Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia melalui pendekatan Economic Value Added (EVA)" menerapkan perhitungan EVA untuk mengukur kinerja industri TPT dan untuk melihat apakah industri TPT sudah mampu menciptakan nilai tambah secara ekonomis dan apakah industri ini masih bisa dijadikan andalan ekspor setelah banyak masuknya produk impor tekstil dari China. Penelitian ini menggunakan analisis data sekunder yang didapat dengan objek penelitiannya adalah 21 perusahaan yang tergabung pada industri tekstil yang go public pada tahun 1999-2001.

Hasil penelitian ini menunjukkan hasil EVA yang negatif yang menunjukkan bahwa industri TPT belum mampu menghasilkan laba yang dapat digunakan untuk menutup modal, dan MVA positif yang berarti investor mempunyai ekspektasi positif terhadap industri TPT dan dari hasil uji korelasi menunjukkan hasil yang signifikan yaitu EVA mempunyai korelasi dengan MVA. Karena hasil perhitungan EVA bernilai negatif maka dapat dikatakan bahwa selama kurun waktu 1999-2001 industri ini belum menunjukkan kinerja yang baik, dan hasil perhitungan MVA yang positif mengimplikasikan bahwa industri TPT masih banyak membutuhkan perhatian dalam rangka peningkatan kinerja baik dari pelaku usaha maupun dari pemerintah sehingga industri TPT dapat kembali dijadikan andalan ekspor.

Suryawati (2009) dengan judul penelitian "Analisis Struktur, Perilaku dan Kinerja Industri Tekstil dan Pakaian Jadi di Provinsi DIY" menggunakan pendekatan Struktur-Perilaku-Kinerja yang digunakan untuk menganalisis kondisi industri tekstil dan garmen di DI Provinsi Yogyakarta. Untuk memperkuat penelitian, pendekatan SWOT (strength, weakness, opportunity dan threat) juga digunakan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder terkait dengan industri tekstil dan pakaian jadi skala sedang dan besar di Provinsi DIY tahun 2000-2006. Termasuk ke dalam industri besar adalah perusahaan-perusahaan yang masing-masing mempekerjakan 100 orang atau lebih. Sementara pada industri sedang, perusahaan-perusahaan yang termasuk kedalamnya masing-masing mempekerjakan antara 20-99 orang. Data-data ini bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, didukung publikasi media massa. Hasil penelitian: 1) industri ini ketergantungan yang relatif tinggi terhadap sektor pemasok; 2) permintaan industri didorong tidak signifikan dengan meningkatnya permintaan output pengguna sektor; 3) industri yang relatif tinggi rasio input-output mencerminkan

tingginya ketergantungan industri terhadap masukan persediaan; 4) peran industri dalam memenuhi permintaan lokal melemah oleh porsi yang relatif besar produk yang diimpor; 5) industri harga-biaya dan keuntungan margin secara signifikan dipengaruhi oleh biaya input dan output produksi.

Malik (2003) dengan judul penelitian "Analisis Struktur Pasar, Perilaku dan Kinerja Industri TPT di Sukoharjo". Menggunakan metode penelitian dintegration tiga metode pengumpulan data allatonce, yaitu Survei Lapangan, survei Lembaga saling terkait. Hasil penelitian menunjukkan Analisis konsentrasi industri dengan indikator CR4 menunjukkan bahwa untuk Subsektor industri TPT, angka konsentrasi industrinya cukup bervariasi dengan kecenderungan menurun mulai tahun 1991 s/d 1997 tetapi setelah itu 1998 s/d 2000 mengalami peningkatan. Dilihat dan ratio konsentrasinya, yang paling tinggi rasio konsentrasi industrinya adalah industri pertenunan. Sedang yang paling rendah konsentrasi industrinya adalah industri penyempurnaan.

Naylah (2010) dengan judul penelitian "Pengaruh Struktur Pasar terhadap Kinerja Industri Perbankan Indonesia" menganalisis hubungan antara struktur pasar dan kinerja dengan menggunakan paradigma Structure Conduct Performance (SCP). Dengan sampel 16 bank umum terbesar selama tahun 2004-2008. Pertama, hipotesis tradisional yang mendasarkan pada perilaku kolusi, kedua, hipotesis diferensiasi yang mendasarkan pada perilaku diferensiasi produk dan yang ketiga, hipotesis efisiensi yang mendasarkan pada perilaku efisiensi pasar.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa kuat pengaruh dari struktur pasar pada kinerja industri perbankan. Penelitian ini mencoba membuktikan bahwa pangsa pasar dan konsentrasi pada industri perbankan adalah proksi dari efisiensi. Jika hal tersebut terbukti, maka tidak akan ada hubungan yang signifikan antara pangsa pasar dan konsentrasi dengan profitabilitas sehingga mendukung hipotesis efisiensi. Jika terdapat hubungan yang positif antara pangsa pasar dengan profitabilitas, maka hasilnya mendukung hipotesis diferensiasi. Namun jika terdapat hubungan yang positif antara konsentrasi dengan profitabilitas, berarti kinerja industri perbankan tersebut dipengaruhi oleh konsentrasi sebagai proksi dari struktur pasar yang mana didalamnya ditengarai terdapat perilaku kolusi. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis tradisional.

Kaesti (2010) menganalisis Industri TPT dengan pendekatan Structure – Conduct – Performance (S-C-P) pada tahun 2000 – 2003. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui struktur dari industri TPT tahun 2000-2003, pengaruh struktur industri terhadap perilaku perusahaan dan menganalisis pengaruh  $CR_4$ , minimum efficiency of scale (MES), dan rasio modal tenaga kerja (CLR) terhadap margin keuntungan (PCM) industri TPT Indonesia. Penelitian ini menggunakan sample 28 perusahaan dari industri TPT dan alat analisis regresi data panel untuk melihat pengaruh  $CR_4$ , MES dan CLR. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa industri TPT Indonesia pada tahun 2000-2003 berbentuk oligopoli yang ditandai dari hasil perhitungan  $CR_4$  yang lebih dari 60%. CLR yang mencerminkan perilaku perusahaan lebih dipengaruhi oleh efisiensi daripada tingkat konsentrasi dalam industri oleh karena itu kondisi efisiensi dapat dicapai dengan penggunaan teknologi yang lebih tinggi (rasio modal terhadap tenaga kerja yang lebih tinggi). Hasil estimasi dari 3 variabel independen, variabel CLR merupakan variabel yang paling berpengaruh sehingga diperlukan penambahan modal untuk meningkatkan produktivitas dari perusahaan. Tingginya rasio penggunaan biaya input terhadap output yang dihasilkan menunjukkan kondisi yang inefisien, yang terlihat dari adanya hubungan negatif antara MES dan PCM pada industri TPT tahun 2000-2003. Hal ini menunjukkan struktur industri yang oligopoli menyebabkan perusahaan di dalam industri tersebut tidak efisien.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berupa data time series dan cross section yaitu data produksi industri TPT yang diperoleh dari Kemenperin dan laporan keuangan tahunan 16 perusahaan tekstil go public selama 4 tahun terakhir (2007-2010) yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia.

### 3.2. Model Penelitian

Model teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$EVA = f(MS) \dots \dots \dots (3.1)$$

di mana:

EVA = economic value added ( jutaan Rupiah)

MS = market share ( persen)

Untuk model yang ditaksir, yaitu model yang digunakan pada regresi data panel, sebagai berikut:

$$EVA = a + b_1 MS + e \dots \dots \dots (3.2)$$

di mana:

EVA = economic value added ( jutaan Rupiah)

a = konstanta

b<sub>1</sub> = koefisien regresi

MS = market share (persen)

e = error term

### 3.3. Metode Analisis Data

#### 3.3.1. Rasio Konsentrasi

Tingkat konsentrasi industri dapat dihitung dengan menggunakan Concentration Ratio (CR). CR adalah persentase dari total keluaran industri atau pendapatan penjualan. Formula Rasio Konsentrasi (CR) adalah sebagai berikut:

$$CR_{ni} = \sum_{j=1}^n S_{ij}$$

di mana:

S<sub>ij</sub> = Pangsa pasar dalam industri dari perusahaan i

CR<sub>ni</sub> = Merupakan rasio konsentrasi

n = Jumlah perusahaan berdasarkan peringkat penjualan terbesar.

i = Total 4 perusahaan dengan produksi terbesar.

Dalam penelitian ini akan digunakan metode CR<sub>4</sub>. Dari hasil pengukuran rasio konsentrasi kemudian dapat diklasifikasikan ke dalam bentuk struktur pasar yang berdasarkan kriteria dari Shepherd (1990). Pengklasifikasian bentuk struktur pasar lebih ditekankan ada tingkat penguasaan pangsa pasar dan jumlah perusahaan dalam suatu industri. Pada bentuk struktur pasar monopoli dan perusahaan dominan mempunyai karakteristik sendiri, yaitu hanya terdapat satu perusahaan yang menguasai pangsa pasar dan perbedaannya hanya pada tingkat penguasaan pangsa pasar. Selain itu juga terdapat bentuk struktur pasar yang jumlah perusahaan dalam skala besar dalam penguasaan pangsa pasar, hal ini akan menjadi sebuah persaingan yang ketat antar perusahaan dalam suatu industri seperti oligopoli, pasar monopolistik dan pasar persaingan sempurna.

**Tabel 3.1** Klasifikasi Struktur Pasar Berdasarkan Kategori

Struktur Pasar	Kondisi
Monopoli (Pure Monopoly)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat satu perusahaan yang menguasai 100 % pangsa pasar</li> <li>2. Tidak ada pesaing yang dapat masuk ke dalam pasar</li> <li>3. Harga tidak elastis</li> </ol>
Perusahaan Dominan (Dominant Firm)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat satu perusahaan yang menguasai 50 – 100 % pangsa pasar</li> <li>2. Tidak memiliki pesaing yang terdekat</li> </ol>
Oligopoli Ketat (Tight Oligopoly)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdiri atas empat perusahaan yang menguasai pangsa pasar</li> <li>2. Empat perusahaan yang menguasai 60-100% pangsa pasar</li> <li>3. Memungkinkan terjadinya kolusi</li> </ol>
Oligopoli Longgar (Loose Oligopoly)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat 4 perusahaan yang menguasaipangsa pasar tidak lebih dari 40 %</li> <li>2. Kolusi jarang terjadi</li> </ol>
Persaingan Monopolistik (Monopolistic Competition )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat cukup banyak pesaing</li> <li>2. Pangsa pasar tertinggi dari masing-masing perusahaan tidak lebih dari 10%</li> </ol>
Persaingan Sempurna (Perfect Competition )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat lebih dari 50 pesaing dalam suatu industri</li> <li>2. Tidak ada perusahaan yang berpotensi menguasai pasar</li> <li>3. Tingkat elastisitas harga cukup tinggi</li> </ol>

Sumber : Shepherd (1990)

### 3.3.2. Economic Value Added (EVA)

EVA adalah nilai tambah ekonomis yang diciptakan industri dari kegiatan atau strateginya selama periode tertentu. Prinsip EVA memberikan sistem pengukuran yang baik untuk menilai suatu kinerja dan prestasi keuangan karena EVA berhubungan langsung dengan nilai pasar sebuah perusahaan. Secara matematis, EVA dapat dinyatakan sebagai berikut (Stewart, 1993) :

$$\text{EVA} = \text{NOPAT} - (\text{WACC} \times \text{Capital})$$

dimana :

- EVA = Economic Value Added  
 NOPAT = Net Operating After Tax  
 = Laba Bersih Sebelum Pajak - Pajak  
 WACC = Weighted Average Cost Of Capital  
 =  $[(D \times rd) (1 - \text{Tax}) + (E \times re)]$

dimana:  $D$  = tingkat modal,  $rd$  = Cost of Debt,  $Tax$  = pajak,  $E$ =tingkat ekuitas dan  $re$  = Cost of Equity  
Capital = Modal perusahaan

Jika EVA positif berarti mampu menghasilkan laba yang dapat digunakan untuk menutup biaya modal. Menurut Knight (1997) perusahaan yang mampu menghasilkan EVA positif diasumsikan mampu menerapkan faktor-faktor operasi yang secara positif mempengaruhi hasil operasi dan keuangannya. EVA memperlihatkan kinerja yang benar benar merupakan prestasi manajemen.

### 3.3.3 Regresi Data Panel

Data panel merupakan gabungan data cross section dan data time series mempunyai observasi lebih banyak dibandingkan dengan data cross section atau time series saja. Pada data panel ini, hasil regresi data panel cenderung lebih baik dibanding regresi yang hanya menggunakan data cross section atau time series saja (Nachrowi, 2006). Sebagai hasilnya data set panel akan berisikan informasi observasi setiap individual data sampel. Data panel dapat berguna bagi peneliti untuk melihat dampak ekonomis yang tidak bias terpisahkan antar setiap individu dalam beberapa periode. Hal ini tidak bisa didapatkan dari penggunaan data cross section atau data time series secara terpisah. Gujarati and Porter (2009) mengatakan bahwa terdapat beberapa keuntungan dari penggunaan metode panel yaitu:

- 1) Mengingat penggunaan data panel juga meliputi data cross section dalam rentang waktu tertentu, maka data set akan rentan dari heterogenitas. Penggunaan teknik dan estimasi data panel akan memperhitungkan secara eksplisit heterogenitas tersebut.
- 2) Dengan pengkombinasian, data akan memberikan informasi yang lebih, tingkat kolinearitas yang lebih kecil antar variabel dan lebih efisien.
- 3) Penggunaan data panel mampu meminimasi bias yang dihasilkan jika kita mengagregasikan data individu ke dalam agregasi yang luas.

Pindyck dan Rubinfeld (1998) juga menambahkan bahwa penggunaan data panel dalam menganalisis industri lebih tepat. Karena jika regresi dilakukan dengan menggunakan data cross section tidak memperhitungkan perubahan yang terjadi di setiap waktunya, sedangkan jika menggunakan data time series tidak memperhitungkan efek antar ruangnya. Keuntungan lain dari penggunaan data panel adalah penyatuan informasi dari data cross section dan data time series yang akan mengurangi permasalahan yang timbul akibat hilangnya variabel. Dalam data panel, hilangnya suatu variabel akan tetap menggambarkan perubahan lainnya akibat penggunaan data time series.

Koefisiennya menggambarkan dampak variabel independen terhadap variabel dependen konstan untuk setiap cross section dan time series. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah EVA yang merupakan proxy dari kinerja dan variabel independennya adalah pangsa pasar yang merupakan proxy dari struktur pasar. Model regresi dengan data panel mengakibatkan kesulitan dalam spesifikasi model. Residualnya akan mempunyai tiga kemungkinan yaitu residual time series, cross section maupun gabungan keduanya. Ada dua metode yang bisa digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan data panel yaitu metode fixed effect dan metode random effect.

#### 3.3.3.1 Metode Fixed Effect

Model fixed effect adalah teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Model ini sangat tergantung dari asumsi yang dibuat tentang intersep, koefisien slope dan residualnya. Ada beberapa kemungkinan yang akan muncul yaitu (Gujarati and Porter, 2009):

- 1) Diasumsikan intersep dan slope adalah tetap sepanjang waktu dan individu serta perbedaan intersep dan slope dijelaskan oleh residual
- 2) Diasumsikan slope adalah tetap tetapi intersep berbeda antar individu.
- 3) Diasumsikan slope tetap tetapi intersep berbeda baik antar waktu maupun antar individu.
- 4) Diasumsikan intersep dan slope berbeda antar individu
- 5) Diasumsikan intersep dan slope berbeda antar waktu dan antar individu.

### 3.3.3.2. Metode Random Effect

Memasukkan variabel dummy dalam model fixed effect dapat menimbulkan konsekuensi (trade off), yang dapat mengurangi banyaknya derajat kebebasan (degree of freedom) yang pada akhirnya akan mengurangi efisiensi dari parameter yang diestimasi. Masalah tersebut dapat diatasi dengan cara menghimpun error term dalam upaya untuk mengakomodasi intersep. Cara ini yang dikenal dengan pendekatan random effect atau model komponen error (error component model).

### 3.3.3.3 Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk memilih teknik pendekatan model mana yang paling baik digunakan antara model fixed effect dan model random effect. Perhitungan uji Hausman untuk memilih model secara langsung bisa didapatkan dalam Eviews.

Pemilihan menggunakan Hausman Test dilakukan dengan hipotesa sebagai berikut (Gujarati and Porter, 2009):

Ho : Random Effect Model

Ha : Fixed Effect Model

Jika  $X_{statistik} > X_{tabel}$  atau  $P - value <$  maka hipotesa nol ditolak sehingga model yang digunakan adalah model fixed effect.

Jika  $X_{statistik} < X_{tabel}$  atau  $P - value >$  maka hipotesa nol diterima sehingga model yang digunakan adalah model random effect.

### 3.3.3.4 Uji Statistik

Setelah diperoleh model yang tepat untuk dilakukan analisis, maka langkah selanjutnya melakukan uji statistik. Pada tahap uji statistik akan dilakukan dua langkah uji yaitu,  $R^2$  dan uji-t atau uji individu.

#### 3.3.3.4.1 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi atau  $R^2$  dikatakan sebagai ukuran kesesuaian yang baik (Goodness of Fit), yaitu ukuran ikhtisar yang menyatakan seberapa baik garis regresi sampel dalam mencocokkan penyebaran datanya (Gujarati and Porter, 2009). Nilai koefisien determinasi yang dinyatakan sebagai  $R^2$  dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$R^2 = 1 - \frac{RSS}{TSS} = \frac{ESS}{TSS} = 1 - \frac{\sum \hat{u}^2}{\sum (Y - \hat{Y})^2}$$

di mana:

$R^2$  = Koefisien determinasi

$\hat{u}_i$  = Nilai taksiran atas residual

RSS = Residual sum of squares  
 ESS = Explained sum of squares  
 TSS = Total sum of squares.

Jika  $R^2$  sebesar satu, berarti ada kecocokan sempurna antara variabel bebas dan variabel tidak bebas. Jika  $R^2$  bernilai nol berarti tidak ada hubungan antara variabel bebas dan variabel tidak bebas.

### 3.3.3.4.2 Uji- t

Uji-t atau uji individu dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari masing- masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individu. Metode untuk menyatakan penolakan maupun penerimaan hipotesis nol, didasarkan pada metode satu sisi dengan hipotesis untuk menolak sebagai berikut:

$H_0: a_i = 0$

Hipotesis nol menerangkan apabila variabel independen secara individual tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya.

$H_0: a_i > 0$

Hipotesis nol menerangkan apabila variabel independen secara individual berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya.

Batas kritis untuk menolak atau tidak menolak  $H_0$  ditetapkan sebesar:

$$t\text{-tabel} = t_{\alpha, df}$$

Batas kritis dinyatakan sebagai t- tabel didasarkan pada tingkat signifikansi sebesar  $\alpha$  dan derajat kebebasan sebesar n-k. Nilai n menyatakan banyaknya pengamatan, sedangkan k menyatakan banyaknya parameter termasuk konstanta. Jika nilai t- hitung diketahui lebih besar daripada batas kritisnya, maka  $H_0$  ditolak, artinya variabel independen secara individu berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen pada tingkat signifikansi sebesar  $\alpha$ . Sedangkan jika diketahui nilai t-hitung lebih kecil atau sama dengan batas kritisnya, maka  $H_0$  diterima yang berarti bahwa variabel indepen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen pada tingkat signifikansi.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Hasil

#### 4.1.1 Rasio Konsentrasi ( $CR_4$ )

Metode  $CR_4$  merupakan pokok metode yang banyak digunakan dalam penelitian organisasi industri terutama untuk mengukur tingkat konsentrasi. Dasar perhitungan Rasio Konsentrasi menggunakan data penjualan.

**Tabel 4.1** Hasil Perhitungan Market Share Industri Tekstil Tahun 2007-2010 (%)

KODE	MS 2010	MS 2009	MS 2008	MS 2007
ADMG	19.0836133	16.49913419	17.801055	17.9735101
ARGO	3.494850457	3.963186567	4.8556176	4.86950571
CNTX	0.651547956	1.307301361	1.6440171	1.24923594

KODE	MS 2010	MS 2009	MS 2008	MS 2007
ERTX	1.226459925	1.297190723	1.4866931	2.94389958
ASTI	1.453568882	2.8337558	2.5311364	2.36407918
HDTX	4.932151423	6.321028417	3.9899618	3.58567823
INDR	21.014413	24.26175278	26.970493	22.1865267
KARW	0.206347897	0.370361193	1.2351143	1.58401359
MYTX	9.070273823	7.81093022	8.4857407	12.0896332
PAFI	0.143128205	1.296933495	1.4579937	1.81001843
PBRX	8.384406455	9.229212375	7.2202148	6.64537979
POLY	23.47381476	18.48098733	16.682184	16.9731646
RICY	3.05324386	2.666536548	2.1827321	1.9824404
SSTM	2.34982482	2.242603669	2.4023471	2.93280849
UNIT	0.596383303	0.654802958	0.3693028	0.21088909
UNTX	0.865971938	0.764282379	0.6853963	0.599217

Sumber: hasil olah data

**Tabel 4.3.** Hasil Perhitungan  $CR_4$  Industri Tekstil Tahun 2007-2010

TAHUN	$CR_4$ (%)	Jumlah Perusahaan	Total Penjualan (milyar Rp)	Struktur Pasar
2007	69.22283458	16	21.467.682	Oligopoli Ketat
2008	69.93947289	16	22.484.802	Oligopoli Ketat
2009	68.47108667	16	19.049.242	Oligopoli Ketat
2010	60.01210834	16	19.006.736	Oligopoli Ketat

Sumber: hasil olah data

Setelah melihat analisis  $CR_4$  dari tahun 2007-2010 maka tingkat konsentrasi industri 4 perusahaan tekstil yang dihitung dengan variabel nilai penjualan, mempunyai struktur pasar Oligopoli Ketat.

#### 4.1.2. Hasil Perhitungan Economic Value Added (EVA)

EVA adalah nilai tambah ekonomis yang diciptakan industri dari kegiatan atau strateginya selama periode tertentu.

**Tabel 4.4** Perhitungan EVA

Kode Perusahaan	Economic Value Added (EVA) (dalam Rp)			
	2007	2008	2009	2010
ADMG	72870.5959	55291.3614	-6525.2422	57587.5004
ARGO	-51614.1092	43534.4499	103518.5165	-144975.2633
CNTX	13730.8607	3772.7455	31800.0753	3775.5080
ERTX	4765.8256	16634.9662	25513.2348	33634.2402
ASTI	-6379.4014	-3579.0909	-7283.7931	2280.4103
HDTX	14777.5816	-26360.0083	883.7074	5574.8178
INDR	85976.8399	30040.4838	-28853.2715	46949.1370
KARW	17471.4605	8475.3943	17726.9447	9304.0292
MYTX	6620.5330	45951.2778	47916.3575	-15919.2036
PAFI	27560.6429	80338.7239	64109.4338	58769.7646
PBRX	43404.1214	57420.4079	41726.9681	6448.3796
POLY	259710.5901	59401.9324	72475.2663	-80511.7089
RICY	31559.1596	23313.9028	5461.0635	12844.0705
SSTM	9787.0848	-1510.2184	-10919.0371	230.3316
UNIT	6019.4698	-1964.9626	2407.5164	1.8537
UNTX	-5227.2359	3088.8011	5596.3399	11911.8564

Sumber: hasil olah data

Dari hasil perhitungan EVA yang ditunjukkan pada Tabel 4.4 memiliki nilai EVA yang bervariasi, namun secara keseluruhan industri TPT ini sudah mampu menciptakan nilai tambah secara ekonomis. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian Supramono dan Elletarianti (2004), hasil perhitungan EVA bernilai negatif maka dapat dikatakan bahwa selama kurun waktu 1999-2001 industri ini belum menunjukkan kinerja yang baik. Kondisi industri TPT Indonesia pada tahun 1999-2001 diperparah dengan diberlakukannya kuota (sampai tahun 2005) oleh negara importir seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, dan Turki. Ketergantungan industri TPT pada bahan baku yang harus diimpor juga menyebabkan semakin sulitnya perusahaan menekan biaya sehingga tidak kompetitif. Kondisi ini juga diperburuk dengan masuknya pakaian bekas jadi secara ilegal dan tidak adanya keterkaitan yang kokoh antara industri bahan baku dengan industri garmen sebagai supporting industry.

Dari 16 perusahaan sampel yang bergerak dalam bidang TPT selama tahun 2007 sampai 2010 terdapat 7 perusahaan yang selama empat tahun berturut-turut menghasilkan EVA yang positif yaitu PT.Centex, Tbk, PT. Eratex Djaja, Tbk, PT. Karwell Indonesia, Tbk, PT. Pania Filament Inti, Tbk, PT. Pan Brothers, Tbk, PT. Ricky Putra Globalindo, Tbk, PT. Nusantara Inti Corpora, Tbk. Hal ini mengindikasikan masih terbatasnya perusahaan dalam industri TPT yang mampu meningkatkan kinerja secara terus-menerus. Menurut Knight (1997) perusahaan yang menghasilkan nilai EVA positif diasumsikan mampu menerapkan faktor-faktor operasi yang secara positif mempengaruhi hasil operasi dan keuangannya. Faktor-faktor tersebut meliputi perbaikan mutu produk melalui proses control yang baik, berhasil melakukan peluncuran produk baru tepat waktu, pengendalian biaya optimal dan mampu mengefisienkan proses birokratisasi dalam perusahaan.

Faktor eksternal diduga memberikan dampak yang besar terhadap kinerja industri TPT Indonesia. Kondisi industri TPT Indonesia memang menghadapi berbagai kendala antara lain adanya resesi global pada tahun 2008 yang bersumber dari Amerika Serikat sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia dan ekspor TPT Indonesia ke Amerika Serikat. Hal ini diperburuk dengan serbuan produk tekstil Cina yang lebih murah. Selain itu, industri TPT Indonesia menghadapi kesulitan untuk merealisasikan program revitalisasi mesin maupun ekspansi usaha.

#### 4.1.3. Hasil Analisis Regresi Data Panel

Penelitian ini menganalisis pengaruh market share terhadap EVA industri TPT Indonesia tahun 2007-2010. Berdasarkan periode pengamatan, penelitian ini menggunakan periode dari tahun 2007-2011. Sampel yang digunakan terdiri atas perusahaan yang bergerak di industri TPT yang sudah go public di Indonesia. Berdasarkan data panel tersebut, maka model regresi data panel yang terdiri atas dua pendekatan, yaitu model fixed effect dan random effect. Adapun secara umum model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini dituliskan sebagai berikut:

$$EVA = a + b_1 MS + e \dots \dots \dots (4.1)$$

di mana:

EVA = economic value added ( jutaan Rupiah)

a = konstanta

b1 = koefisien regresi

MS = market share (persen)

e = error term

#### 4.1.4 Uji Hausman

Untuk keperluan memilih model yang terbaik di antara model fixed effect dan random effect yang akan dijadikan model penelitian, langsung didasarkan pada uji Hausman pada tabel 4.5.

**Tabel 4.5** Hasil Estimasi Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: DATA

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	10.714838	1	0.0011

\*\* WARNING: estimated cross-section random effects variance is zero.

Cross-section random effects test comparisons:

Variabel	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
MS?	-14589.185744	1582.400647	24407293.967945	0.0011

Sumber: hasil olah data

Hasil uji statistik Hausman tersebut kemudian dibandingkan dengan syarat:  
 P-value < maka  $H_0$  ditolak dan model yang dipilih adalah begitu juga sebaliknya.

**Tabel 4.6** Hasil Perbandingan Uji Hausman

P-value (Hausman test)	Sign	Alpha	Kesimpulan
0,0011	<	0,05	$H_0$ ditolak (dengan demikian model yang dipilih adalah fi )

Sumber: hasil olah data

Berdasarkan uji Hausman yang menunjukkan bahwa model yang tepat untuk memodelkan data panel pada penelitian ini adalah pendekatan fi . Adapun hasil estimasi untuk model fi diperlihatkan pada tabel 4.7.

**Tabel 4.7** Hasil Estimasi dengan Metode

Dependent Variabel: EVA?

Method: Pooled Least Squares

Date: 09/01/12 Time: 07:49

Sample: 2007 2010

Included observations: 4

Cross-sections included: 16

Total pool (balanced) observations: 64

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	110804.6	31536.46	3.513539	0.0010
MS?	-14589.19	5000.661	-2.917452	0.0054
Fixed Effects (Cross)				
_ADMG--C	194262.8			
_ARGO--C	-60516.60			
_CNTX--C	-79837.72			
_ERTX--C	-65303.32			
_ESTI--C	-81053.60			
_HDTX--C	-43411.26			
_HNDR--C	267149.5			
_KARW--C	-85174.49			
_MYTX--C	46952.91			
_PAFI--C	-35938.19			
_PBRX--C	41259.42			
_POLY--C	242737.1			
_RICY--C	-56456.67			
_SSTM--C	-75198.69			
_UNIT--C	-109188.6			
_UNTX--C	-100282.6			

## Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variabels)

R-squared	0.358008	Mean dependent var	20286.62
Adjusted R-squared	0.139458	S.D. dependent var	48717.36
S.E. of regression	45192.86	Akaike info criterion	24.49778
Sum squared resid	9.60E+10	Schwarz criterion	25.07123
Log likelihood	-766.9290	Hannan-Quinn criter.	24.72369
F-statistic	1.638105	Durbin-Watson stat	2.335822
Prob(F-statistic)	0.095550		

Sumber: hasil olah data

Pada tabel 4.7, nilai Probabilitas variabel MS sebesar 0,0054 dengan menggunakan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 5%, variabel MS terletak pada daerah untuk menolak  $H_0$ . Maka, variabel  $MS$  berpengaruh secara signifikan terhadap industri TPT Indonesia tahun 2007-2010.

#### 4.1.5 Uji Statistik

##### 4.1.5.1 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi atau  $R^2$  dikatakan sebagai ukuran kesesuaian yang baik atau koefisien determinasi merupakan ukuran ikhtisar yang menyatakan seberapa baik garis regresi sampel dalam mencocokkan penyebaran datanya (Gujarati, 2009). Dari hasil regresi data panel untuk model  $fi$  diperoleh nilai  $R^2$  sebesar 0.358008 (lihat tabel 4.7). Artinya, sebesar 35,8% variasi perubahan yang terdapat pada variabel dependen (EVA) dapat dijelaskan oleh variasi perubahan yang terdapat pada variabel independen. Sisanya sebesar 64,2% dijelaskan oleh variasi perubahan variabel-variabel independen lainnya yang tidak disertakan ke dalam model penelitian.

##### 4.1.5.2 Uji-t

Uji-t atau uji individu dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individu. Metode untuk menyatakan penolakan maupun penerimaan hipotesis nol, didasarkan pada metode satu sisi dengan hipotesis untuk menolak sebagai berikut:

$$H_0: a_i = 0$$

Hipotesis nol menerangkan apabila variabel independen secara individual tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya.

$$H_0: a_i \neq 0$$

Hipotesis nol menerangkan apabila variabel independen secara individual berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya.

Batas kritis untuk menolak atau tidak menolak  $H_0$  pada tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 5%, jumlah pengamatan (N) sebesar 64, dan banyaknya variabel independen termasuk konstanta (k) sebanyak 2 adalah:

$$t\text{-tabel} = t_{\alpha/2; df} = t_{0,025; 62} = 1,999$$

Nilai t-statistik hasil regresi data panel untuk variabel (MS), diperlihatkan sebesar -2.917452 (lihat Tabel 4.7). Pada tingkat signifikansi sebesar 5%, nilai t-statistik tersebut terdapat pada daerah untuk menolak  $H_0$ . Berdasarkan hasil uji individu, MS berpengaruh signifikan terhadap EVA pada tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 5%.

## 4.2. Pembahasan

Sesuai dengan bentuk model yang digunakan dalam penelitian ini, persamaan hasil regresi data panel sebagai berikut:

$$EVA = 11.0804,6 - 14.589,19 MS \dots\dots\dots(4.2)$$

Besarnya nilai konstanta sebesar 11.0804,6 berarti apabila tidak ada pengaruh variabel independent (MS) atau MS nol maka besarnya EVA sebesar 11.0804,6. Nilai p untuk variabel MS sebesar 0,0054 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara MS terhadap (EVA). Apabila MS naik 1 persen maka EVA akan turun 14.589,19, jika MS turun 1 persen maka EVA naik 14.589,19.

Pada beberapa penelitian sebelumnya, biasanya struktur pasar berpengaruh positif terhadap kinerja. Namun, hasil penelitian ini variabel (MS) yang merupakan dari struktur berpengaruh negatif terhadap (EVA) yang merupakan dari kinerja yang merupakan cerminan keberhasilan strategi efisiensi manajemen perusahaan. Perusahaan yang mempunyai pangsa pasar yang besar akan mempunyai . Efek ekonomi dari adalah sumber daya yang tidak teralokasikan dengan baik, terdistribusikan lagi pendapatan dari konsumen pada produsen dan pengurangan agregat kesejahteraan ekonomi (Martin: 1993). Struktur pasar industri TPT Indonesia yang bersifat oligopoli memberikan peluang pada perusahaan yang mempunyai pangsa pasar ( yang besar untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar pula, namun perusahaan tersebut kadangkala tidak memperhatikan proses produksinya sehingga penggunaan input tidak efisien.

Efisiensi perusahaan juga dapat dilihat dari rasio biaya selain biaya bahan baku yang dikeluarkan perusahaan terhadap output yang dihasilkan perusahaan tersebut. Biaya lainnya dapat berupa biaya sewa gedung, bahan bakar, listrik dan gas, mesin dan alat- alat yang diindikasikan sebagai biaya manajemen operasional perusahaan. Jika rasio biaya lain terhadap output semakin besar seiring dengan penambahan output yang dihasilkan maka perusahaan itu tidak efisien. Hal ini terjadi juga terkait dengan salah satu permasalahan yang dihadapi industri TPT Indonesia yaitu produktivitas mesin produksi yang ada. Siklus penggunaan mesin dalam industri TPT biasanya memakan rentan waktu 5-10 tahun. Oleh karena itu apabila mesin tidak diganti menyebabkan produktivitas yang menurun yang kemudian menyebabkan peningkatan biaya output.

Menurut catatan Kementerian Perindustrian, dari seluruh mesin TPT yang ada (8,38 juta unit mesin pada 2006), sekitar 80 % diantaranya telah berusia diatas 20 tahun. Ini menyebabkan produktivitas menurun hingga 50 %. Di Industri pemintalan jumlah mesin yang berusia diatas 20 tahun mencapai 64 % (5.025.287 mata pinal dari 7.803.241 mata pinal). Di industri pertenunan jumlahnya mencapai 82,1 % (204.393 ribu alat tenun mesin dibanding 248.957 unit), perajutan 84%, fi 93% dan pakaian jadi atau garmen 78%.

## 5. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tentang struktur dan kinerja industri TPT Indonesia tahun 2007-2010, maka diperoleh kesimpulan bahwa: 1) Struktur industri TPT Indonesia tahun 2007- 2010 berbentuk oligopoli ketat. 2) Industri TPT Indonesia pada tahun 2007-2010 sudah mampu menghasilkan laba yang dapat digunakan untuk menutup biaya modal. Meskipun memiliki nilai EVA yang bervariasi, namun secara keseluruhan industri TPT

ini sudah mampu menciptakan nilai tambah secara ekonomis. 3) Struktur pasar dalam industri TPT Indonesia tahun 2007-2010 berpengaruh negatif terhadap kinerja industri TPT Indonesia tahun 2007-2010.

Riset ini dapat dikembangkan dengan menambah variabel penjelas dalam model yang berpengaruh terhadap kinerja dan juga menerapkan untuk kasus industri lainnya dengan mempertimbangkan besar sampel. Dari alat analisis, dapat dikembangkan dengan model ekonometrika data panel dinamis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Carlton, D.W. and Perloff, J.M., (2005), \_\_\_\_\_, Fourth Edition, Addison-Wesley, New York.
- Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, (2005), “ \_\_\_\_\_, diakses dari [www.kemendag.go.id](http://www.kemendag.go.id) pada tanggal 21 November 2011.
- Gujarati, D. N., and Porter., D (2009), \_\_\_\_\_, Fifth Edition, McGraw-Hill International Edition, Singapore.
- Heather, Ken, (2002), \_\_\_\_\_, Pearson Education Limited, Edinburgh.
- Jacobson, D. and O’Callaghan, B.A., (1996), \_\_\_\_\_, McGraw – Hill International (UK) Limited, London.
- Jaya, Wihana Kirana, (1994), \_\_\_\_\_, BPFE, Yogyakarta.
- Kaesti, Atika, (2010), Analisis Kinerja Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) di Indonesia Tahun 2000-2003 (Pendekatan \_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_), \_\_\_\_\_, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. (tidak dipublikasikan).
- Keown, Arthur. J and John D.M, (2005), \_\_\_\_\_, Tenth Edition, Pearson Prentice Hall, New Jearsey.
- Knight, J. A., (1997), \_\_\_\_\_, MCGraw-Hill, New York.
- Kuncoro, Mudrajad, (2009), \_\_\_\_\_, Edisi 3, Erlangga, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad, (2007), \_\_\_\_\_, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Lynch , R. L and Cross, K., F., (1991), \_\_\_\_\_, Blackwell Publishers, Cambridge, MA.
- Malik, Abdul, (2003), Analisis Struktur, Perilaku dan Kinerja Industri Tekstil dan Produk Tekstil di Sukoharjo Surakarta, \_\_\_\_\_, Vol.9, No.10, Maret 2003, hal.55-60. Diakses dari <http://www.data.dppm.uui.ac.id/jurnal/uploads/1091007.pdf> pada tanggal 21 November 2011.
- Martin, Stephen , (1994), \_\_\_\_\_, Second Edition, Macmillan, New York.
- Nachrowi D.N. dan Hardius Usman, (2006), \_\_\_\_\_, LP-FEUI, Jakarta.
- Naylah, Maal, (2010), “Pengaruh Struktur Pasar Terhadap Kinerja Industri Perbankan Indonesia”, \_\_\_\_\_, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. (tidak dipublikasikan).
- Pindyk, R. S. and Rubinfeld, D. L., (1998), \_\_\_\_\_, Fourth Edition, McGraw-Hill, New York.

- Prasetyo, P.E, (2007), Hubungan Struktur Pasar dan Perilaku Pasar Serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pasar, *Jurnal UIN Ar-Raniry*, Vol.12, No.2, Agustus 2007, hal.111-122. Diakses dari <http://www.jurnal.uin.ac.id> pada tanggal 21 November 2011.
- Sheperd, W. G., (1990), *Marketing: An Introduction*, International Edition, Prentice-Hall, Inc, Singapore.
- Shil, N. C., (2009), Performance Measures: An Application of Economic Value Added, *Jurnal UIN Ar-Raniry*, Vol. 4, No.3, Maret 2009, hal.169-177.
- Shy, O., (1995), *Microeconomic Theory*, on, MIT Press, Cambridge.
- Stern, J. M. and John, S. S., (2001), *Marketing: An Introduction*, Willey, New York.
- Stewart, G. B, (1993), *Marketing: An Introduction*, Harper Collins, New York.
- Supramono dan Ellentarianti, (2004), Pengukuran Kinerja Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia Melalui Pendekatan Economic Value Added, *Jurnal UIN Ar-Raniry*, Vol.16, No.1, hal. 24-38
- Suryawati, (2009), Analisis Struktur, Perilaku dan Kinerja Industri Tekstil dan Pakaian Jadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal UIN Ar-Raniry*, Vol.20, No.1, April 2009, hal. 36-46
- Susilo, Y. S. dan Ariani, D. W., (2003), Struktur Pasar dan Perilaku Industri Lampu Listrik di Indonesia, *Jurnal UIN Ar-Raniry*, Vol.15, No.1, 2003, hal. 21-30.
- Widihasta, Yoga, (2008), Tingkat Konsentrasi Pasar Industri Rokok Kretek di Kudus (Studi Kasus Pada 14 Perusahaan Rokok Yang Tergabung Dalam Persatuan Perusahaan Rokok Kudus Tahun 2004-2006), *Jurnal UIN Ar-Raniry*, Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta. (tidak dipublikasikan).
- Yuwono, Sony dan Sukarno, (2003), *Marketing: An Introduction*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

## INDEKS

### JURNAL KINERJA, Volume 14, No. 2, Agustus Tahun 2010

No.	Judul	Penulis	Halaman
1	Effects Of Relationship Marketing Upon Nz Micro-Enterprise Internationals Within The Asian Marketplace	Paul Pickering dan Russel P J Kingshott	109-117
2	Service Recovery Strategy and Customer Satisfaction:Evidence From Hotel Industry In Yogyakarta-Indonesia	Budi Suprpto dan Galang Yunanto Hashym	118-130
3	Investor Overconfident Dalam Penilaian Saham:Perspektif Gender Dalam Eksperimen Pasar	Mahatma Kufepaksi	131-150
4	Pengaruh Corporate Governance, Etnis, dan Latar Belakang Pendidikan Terhadap Environmental Disclosure: Studi Empiris Pada Perusahaan Listing di Bursa Efek Indonesia	Djoko Suhardjanto dan Novita Dian Permatasari	151-164
5	Hubungan Kinerja Tugas dan Kinerja Kontekstual Dengan Kepuasan Kerja Komitmen dan Kepribadian	D. Wahyu Ariani	165-181
6	Peran Gender, Pendapatan, dan Pendidikan Terhadap Loyalitas Konsumen yang Berkunjung ke Mall	Tulus Haryono dan Dwi Hastjarjo KB	182-195
7	Polikotomi Pilihan Pengembangan Ekowisata Kawasan Borobudur	Amilihur Soeroso	196-211

### JURNAL KINERJA, Volume 15, No. 1, Maret Tahun 2011

No.	Judul	Penulis	Halaman
1	Illegal Digital Media Usage: Based on Moral Judgment and Legal Awareness	Iin Mayasari dan Dikara Barcah	1-14
2	Consumer Attitudes to Purchase Intention of Counterfeiting Bag Product	Santi Budiman dan Anas Hidayat	15-29
3	Restructuring in The Full Service Airline Company: The Case Of Garuda Indonesia	Roberto Akyuwen	30-44
4	Pengaruh Modal Sosial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1983-2008: Pendekatan Error Correction Model (ECM)	Y. Sri Susilo dan Lincoln Arsyad	45-63
5	Mengapa Tingkat Pengangguran di Indonesia Tinggi dan Persisten?	D. S. Priyarsono, Djoni Hartono, dan Nilam Anggar Sari	64-72
6	Niat Konsumen dalam Pembelian Makanan Organik	Heru Irianto dan Budhi Haryanto	73-87

7	Intensitas Pelaporan Keuangan Berbasis Internet dan Berbasis Kertas dalam Pembuatan Keputusan Investasi: Studi Eksperimen dengan Surogasi Mahasiswa Profesi Akuntansi Universitas Syiah Kuala	Yossi Diantimala dan Chairul Raziki	88-102
---	---	-------------------------------------	--------

**JURNAL KINERJA, Volume 15, No. 2, September Tahun 2011**

No.	Judul	Penulis	Halaman
1	Pengaruh Stimuli Lingkungan dan Fasilitas Pembayaran Terhadap Tingkat Emosi Konsumen	Yasinta Soelasih	103-118
2	Kinerja Fiskal Daerah : Kasus Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Jaka Sriyana	119-130
3	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pendapatan Laki-Laki dan Perempuan dalam Kegiatan Ekonomi di Provinsi Aceh	Abubakar Hamzah, Susanti, dan Sofyan Syahnur	131-144
4	Corporate Governance dan Manajemen Laba : Pengaruh Presiden Komisaris Independen dan Komite Audit Independen	Surifah	145-159
5	Analisis Pengaruh Sosialisasi, Saksi dan Faktor-Faktor Demografi Terhadap Kebutuhan Wajib Pajak PBB di Surakarta	Amalia Kurniati dan Sotya Fevriera	160-174
6	Pengaruh Kondisi Keuangan Perusahaan terhadap Hubungan antara Cash Flow Right Leverage dan Manajemen Laba : Oportunistik atau Efisien	I Putu Sugiarta Sanjaya	175-185
7	Status Likuiditas Saham, Struktur Aset, dan Struktur Modal	Bambang Sutopo	186-194

**JURNAL KINERJA, Volume 16, No. 1, Maret Tahun 2012**

No.	Judul	Penulis	Halaman
1	Aspek Lingkungan dalam Pertumbuhan Kota diwilayah Aglomerasi Perkotaan Semarang dan Daerah Istimewa Yogyakarta	Amin Pujiati	1-12
2	Keterkaitan Job Insecurity dengan Social Exchange Model	Anna Sugiyanto, Budiono Sri Handoko dan Dwi Nugroho	13-28
3	Land Conversion and Farmers Preference	Catur Sugiyanto, Budiono Sri Handoko dan Dwi Nugroho	29-34
4	Indikator-Indikator Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Indonesia (Modifikasi Model Pengukuran Doamekpor)	Muhammad Iqbal dan Abdul Halim	35-44

5	Determinan Kepercayaan dalam Hubungan Business-to-Business di Pasar Swalayan Modern	Tri Hendro Sigit Prakosa	45-62
6	Effects of Tri Hita Karana Tradition and Gross Regional Domestic Income on The Economic Growth of Bandung Regency, Gianyar, and Denpasar City of Bali Province 1985-2010	I Ketut Nama dan Purwiyanta	63-72
7	Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Bank Merger Publik yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)	Yossi Diantimala dan Chairul Raziki	73-88



## PEDOMAN PENULISAN

### Format Umum:

1. Artikel harus diketik 2 (dua) spasi pada kertas folio (A4) dengan panjang artikel berkisar 20 – 30 Halaman. Marjin atas, bawah dan samping harus dibuat paling tidak 3 cm. Pilihan huruf disarankan menggunakan Times New Roman ukuran 12. Pengolah kata disarankan menggunakan MS Words versi 2003.
2. Halaman cover harus menunjukkan judul tulisan, nama penulis, email penulis, institusi serta catatan kaki berupa ucapan terima kasih atau informasi lain yang berkaitan dengan artikel tersebut. Penulis juga wajib menyebutkan biodatanya secara singkat.
3. Halaman pertama dari artikel berisi judul, abstrak dan bagian pendahuluan dari artikel. Untuk memungkinkan blind review, penulis tidak boleh mengidentifikasi dirinya baik langsung maupun tidak langsung pada halaman pertama tersebut.
4. Tabel dan gambar harus diberi nomer. Tabel yang berisi data atau informasi dan gambar atau grafik yang dibuat harus dicantumkan sumber atau acuannya.
5. Artikel yang dikirim ke redaksi harus disertai copy dalam CD. Artikel termaksud dapat dikirim melalui email: kinerja@mail.uajy.ac.id

### Format Artikel

#### A. Judul Artikel

Judul artikel terdiri dari 10 – 15 kata.

#### B. Abstrak (Abstract)

Abstrak untuk artikel dalam bahasa Indonesia harus ditulis menggunakan bahasa Inggris dan sebaliknya. Panjang abstrak kurang lebih 100 kata, dan ditempatkan setelah judul artikel.

#### C. Kata Kunci (Keywords)

Setelah abstrak cantumkan 4 (empat) kata kunci yang berkaitan dengan isi artikel.

#### D. SKEMA PENULISAN

##### 1. PENDAHULUAN

Berisi latar belakang/ dan atau motivasi penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian

##### 2. KAJIAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS\* (jika ada)

Berisi kajian teoritis dan atau hasil-hasil riset terdahulu yang berkenaan dengan topik penelitian, serta berisi pengembangan hipotesis (jika ada) atau rerangka model penelitian.

##### 3. METODE PENELITIAN

Pada bagian ini, berisi paling tidak berupa populasi atau sampel penelitian, cara pengumpulan data, definisi operasional variable, dan alat analisis data.

##### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini berupa hasil analisis data dan disertai dengan pembahasan serta diskusi.

##### 5. PENUTUP

Pada bagian ini setidaknya berupa simpulan, keterbatasan penelitian, implikasi, dan atau saran.

## Referensi

Karya yang diacu harus menggunakan "sistem penulis-tahun" (Harvard-style) yang mengacu pada daftar acuan atau daftar referensi. Jika memungkinkan, penulis disarankan juga untuk mencantumkan halaman karya yang diacu.

1. Dalam teks, karya diacu dengan cara menulis nama akhir/keluarga penulis dan tahun dalam tanda kurung, contoh: untuk satu penulis (Gujarati, 1995), dua penulis (Hansen and Mowen, 2003), lebih dari 2 penulis (Woodman et al., 1993), lebih dari dua sumber yang diacu (Keegan, 1999; Jain, 2000), dua tulisan atau lebih oleh satu penulis (Amabile, 1997; Amabile, 1998).
2. Jika menggunakan halaman, jangan gunakan "hal", "pp", atau "halaman". Tetapi sebelum halaman gunakan tanda titik dua, contoh: (Gujarati, 1995: 55), (Hasen and Mowen, 2003: 96 – 110), (Woodman et al., 1993: 66).
3. Apabila daftar acuan lebih dari satu tulisan oleh penulis yang sama dalam tahun penerbitan yang sama, gunakan akhiran a, b dan seterusnya setelah tahun pada acuan, contoh: (Teoh, 1998a) atau (Teoh, 1998b).
4. Acuan tulisan yang merupakan karya institusional sedapat mungkin harus menggunakan akronim atau singkatan sependek mungkin, contoh (Komite SAK-IAI, PSAK 28, 1997).

## E. Daftar Acuan (Daftar Referensi)

Setiap artikel harus mencantumkan daftar acuan yang isinya hanya karya yang diacu. Untuk daftar acuan, gunakan format berikut:

1. Urutkan acuan berdasarkan abjad, sesuai dengan nama akhir/keluarga pengarang atau institusi yang bertanggungjawab atas suatu karya.
2. Gunakan inisial nama depan dari penulis.
3. Judul jurnal tidak boleh disingkat.
4. Kalau lebih dari satu karya oleh penulis yang sama, urutkan secara kronologis waktu terbitan. Dua karya atau lebih dalam satu tahun oleh penulis yang sama dibedakan dengan huruf setelah tahun.

Beberapa contoh penulisan daftar acuan sebagai berikut:

- a. Untuk jurnal/majalah ilmiah  
Francis, J., E. Maydew and H. Sparks, (1999), "The Role of Big Six Auditors in the Credible Reporting of Accruals", *Auditing: A Journal of Practice and Theory* 18 (Fall), pp. 125 – 130.  
  
Morrison, E. W., and Milliken, F. J. (2000). "Organizational Silence: A Barrier to Change and Development in A Pluralistic World", *Academy of Management Review*, Vol. 25 (4), pp. 706-725.
- b. Untuk buku  
Scott, W. R. (2000). *Financial Accounting Theory*, Canada Prentice Hall. 2<sup>nd</sup> edition.  
  
Greenberg, J., & Baron, R.A., (2000), *Behavior in Organizations*, Tenth Edition, Prentice Hall.
- c. Untuk makalah dan karya ilmiah lainnya yang tidak diterbitkan  
Puspita, Lisa Martiah Nila, (2000), "Pengaruh Tindakan Supervisi terhadap Kepuasan Kerja Auditor Junior: Melalui Pendekatan Dyadic", Thesis S2. (tidak dipublikasikan).  
  
Abimanyu, A., (1993). "Choice of Self-Generation in the Industrial Firms: A Case Study of Indonesia", Dissertation, University of Pennsylvania, Philadelphia. (unpublished).

d. Untuk jurnal/artikel yang didownload dari internet

Romon. F. (2000), "Contribution of Dividend Policy Stability to the Measurement of

Dividend Announcement and Ex-Dividend Effects on the French Market." Download dari [www.ssrn.com](http://www.ssrn.com), Institut d' Administration des Entreprises tanggal 21 Juli 2003.

West, P. and Bernard, B., (2000), "Applying Organizational Learning : Lessons from The Automotive Industry", International Journal of Operations and Production Management, Vol. 20 No. 10 pp. 1236 – 1251, Download dari internet [www.emerald-library.com](http://www.emerald-library.com). Pada tanggal 1 Desember 2000.

**F. Catatan Kaki**

Catatan kaki tidak digunakan untuk acuan. Catatan kaki tekstual harus digunakan hanya untuk perluasan informasi yang jika dimasukkan dalam teks bisa mengganggu kontinuitas bacaan.

